



BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

Prolog: Peter Carey

Epilog: Ruth Indiah Rahayu & Mohamad Sobary



MENCARI

INDONESIA

4

Dari Raden Saleh Sampai Ayu Utami

Riwanto Tirtosudarmo

Buku ini tidak boleh dijual kembali.

MENCARI INDONESIA 4

Dari Raden Saleh Sampai Ayu Utami



Buku ini tidak diperjualbelikan.

Dilarang mereproduksi atau memperbanyak seluruh atau sebagian dari buku ini dalam bentuk atau cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

All Rights Reserved

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Prolog: Peter Carey
Epilog: Ruth Indiah Rahayu & Mohamad Sobary

MENCARI INDONESIA 4



Dari Raden Saleh Sampai Ayu Utami

Riwanto Tirtosudarmo

Penerbit BRIN

Buku ini tidak diperjualbelikan.

© 2022 Riwanto Tirtosudarmo

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Mencari Indonesia 4: Dari Raden Saleh Sampai Ayu Utami/Riwanto Tirtosudarmo–Jakarta:
Penerbit BRIN, 2022.

xxvi hlm. + 410 hlm.; 14,8 × 21 cm

ISBN 978-623-7425-64-9 (cetak)
978-623-7425-65-6 (*e-book*)

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Mencari Indonesia 4 | 2. Biografi |
| 3. Indonesia | 4. Intelektual |
| 5. Akademisi | 6. Tokoh Sejarah |
| 7. Aktivis Sosial | |




920.0598

Copy editor : Risma Wahyu Hartiningsih & Yacub Fahmilda
Proofreader : Prapti Sasiwi
Penata isi : Donna Ayu Savanti
Desainer sampul : Dhevi E.I.R. Mahelingga

Cetakan pertama : Juni 2022



Diterbitkan oleh:
Penerbit BRIN
Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah
Gedung B. J. Habibie, Lantai 8
Jln. M. H. Thamrin No. 8, Kebon Sirih,
Menteng, Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340
Whatsapp: 0811-8612-369
E-mail: penerbit@brin.go.id
Website: <https://penerbit.brin.go.id/>

 PenerbitBRIN
 Penerbit_BRIN
 penerbit_brin

Buku ini tidak diperjualbelikan.

“...berilah aku satu kata puisi daripada seribu rumus ilmu yang penuh janji yang menyebabkan aku terlontar kini jauh dari bumi yang kukasih”.

Subagio Sastrowardoyo “Manusia pertama di angkasa luar” (1970)



Buku ini tidak diperjualbelikan.



Daftar Isi

Pengantar Penerbit	xi
Prakata	xiii
Prolog	xix

A

Abdurrahman Surjomihardjo	1
A.B. Kusuma	9
Adnan Buyung Nasution	15
Adri B. Lopian	19
Agus Purwadianto	25
Anis Hidayah	31
Arbi Sanit	37
Arief Budiman	41
Aris Ananta	45
Asfinawati	51
Asmara Nababan	55
Asvi Warman Adam	61
Ayu Utami	65

B

Bambang Hidayat	71
Ben Anderson	75

D

Dewi Sartika	79
Dolorosa Sinaga	85

E

Edi Sedyawati	89
---------------------	----

G

Garin Nugroho	93
Gus Dur	97
Gus Mus	103
George Junus Aditjondro	109
Goenawan Mohamad	113
Gunarti	117
Gunawan Wiradi	123

H

Herbeth Feith	129
Herman Lantang	135
Hikmat Budiman	141

J

Jalaludin Rakhmat	147
-------------------------	-----

K

Karlina Supelli	151
Kartini	155

M

Magnis Suseno	161
Manuel Kaisiepo	165
Marianne Katoppo	169
Muridan Widjojo	173
Marsillam Simanjuntak	179
Masri Singarimbun	185
Max Lane	189
Mayling Oey	193
Melly G. Tan	199
Mundardjito	205

N

Nh. Dini	211
Nono Anwar Makarim	217
Nurcholish Madjid	221

P

Pengendum Tampung	225
Paramita Abdurachman	229
Pramoedya Ananta Toer	233

R

Raden Saleh	239
-------------------	-----

S

Sangkot Marzuki	245
S.K. Trimurti	251
Slamet Iman Santoso	257
Sardono Waluyo Kusumo	263
Sayogyo	267

Semsar Siahaan	273
Sinta Nuriyah Wahid	279
Sucoro	283
Sumarsih	289
Suprpto Suryodarmo	295
Soe Hok Gie	301
Syafii Maarif	307

T

Takashi Shiraishi	311
Th. Sumartana	317
Toeti Herati Noerhadi	321
Toeti Kakiailatu	325

U

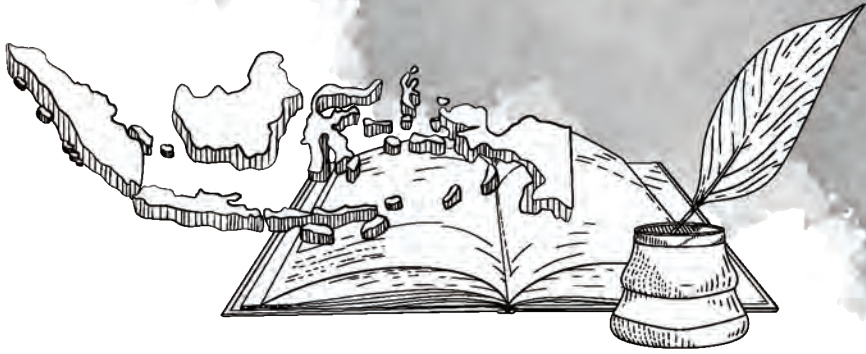
Umbu Landu Paranggi	329
---------------------------	-----

V

Van Vollenhoven	335
-----------------------	-----

W

Widjojo Nitisastro	341
Epilog: Antologi <i>Ngrasani</i> Intelektual Publik	347
Epilog: Mewujudkan Impian Lama	355
Sumber Karangan	363
Daftar Pustaka	369
Indeks	385
Biodata Penulis	409



Pengantar Penerbit

Sebagai penerbit ilmiah, Penerbit BRIN memiliki tanggung jawab untuk terus berupaya menyediakan terbitan ilmiah yang berkualitas. Upaya tersebut merupakan salah satu perwujudan tugas Penerbit BRIN untuk turut serta membangun sumber daya manusia unggul dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Melalui terbitan buku berjudul *Mencari Indonesia 4: Dari Raden Saleh sampai Ayu Utami*, para pembaca diajak untuk mengenal lebih dalam tokoh-tokoh intelektual yang mungkin sudah diketahui atau bahkan tidak diketahui oleh generasi saat ini. Tokoh-tokoh intelektual yang digambarkan dan diceritakan dalam buku ini tidak hanya tokoh intelektual Indonesia, namun juga tokoh intelektual dari luar Indonesia yang mempelajari hal-hal mengenai keindonesiaan, mulai dari agama hingga politik.

Mencari Indonesia 4: Dari Raden Saleh sampai Ayu Utami dipilih sebagai judul besar buku ini guna menunjukkan rentang sejarah kaum intelektual Indonesia yang cukup panjang, tepatnya dari masa sebelum kemerdekaan sampai pasca-reformasi, seperti saat ini. Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat ikut memberikan sumbangan untuk

Buku ini tidak diperjualbelikan.

menumbuhkan rasa hormat dan harga diri akan keberagaman kha-
zanah keintelektualan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak
yang telah membantu proses penerbitan buku ini.

Penerbit BRIN



Prakata

Membaca dan menulis menjadi pekerjaan yang utama bagi saya selama ini, lebih-lebih setelah saya pensiun dari pekerjaan saya sebagai peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Itu juga jawab saya, ketika orang menanyakan, apa kegiatan saya setelah pensiun. Jika membaca adalah pekerjaan mencerna, menulis adalah pekerjaan memproduksi; keduanya memberikan rasa nikmat. Keduanya menyangkut kegiatan otak dan kata orang-orang, otak kita harus tetap bekerja jika kita tidak ingin menjadi pikun. Sebelum resmi pensiun pada tanggal 1 Februari 2017, meskipun sebagai peneliti berbagai kegiatan dilakukan, seperti melakukan penelitian di berbagai tempat, pada akhirnya toh kita harus duduk membaca dan menuliskan laporan penelitian. Ketika kegiatan meneliti di lapangan sebagai bagian dari tugas peneliti LIPI berhenti—di samping berbagai kegiatan lain sebagai layaknya seorang pensiunan, bermain-main dengan cucu misalnya—membaca dan menulis ternyata masih saya teruskan.

Sudah agak lama, setelah mengetahui saya pensiun, Jumardi Putra, seorang rekan yang saya kenal ketika kami melakukan penelitian tentang Orang Rimba di Provinsi Jambi dan mengelola sebuah media *online* yang bernama *Kajanglako*, meminta saya untuk menyum-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

bangkan tulisan secara rutin di media *online*-nya. Bahkan sebelum saya pensiun, Jumardi yang juga seorang penyair itu sering mengirim tulisan-tulisan dari rekan lain yang dimuat di *Kajanglako*. Komunikasi jarak jauh melalui HP yang menjadi makin mudah antara lain dengan WA memudahkan kita untuk mengirim foto atau tulisan, di samping tentu saja komunikasi yang bersifat pribadi. Sampai suatu saat, setelah beberapa kali berkomunikasi lewat WA, saya menyepakati untuk secara rutin menulis sebuah serial yang mengupas tentang seorang tokoh publik setiap hari Senin. Pilihan tokoh yang pertama saya tulis adalah tentang sosok Goenawan Mohamad, terbit pada hari Senin, 20 Mei 2019. Sejak itu, setiap minggu saya harus memenuhi kewajiban yang saya buat sendiri untuk menulis sosok seorang tokoh. Sejak awal saya menyadari bahwa jika dibiarkan sosok-sosok dari tokoh yang saya tulis akan cenderung memberat ke hanya tokoh laki-laki. Oleh karena itu, setiap dua kali menulis sosok tokoh laki-laki, saya berusaha untuk menulis sosok seorang tokoh perempuan. Terus terang dalam menentukan siapa tokoh yang akan saya tulis tidak ada sebuah dalil atau rumus apa pun yang saya jadikan pedoman. Saya betul-betul mengikuti intuisi saya yang hampir pasti merupakan refleksi dari segala ingatan yang terkumpul dalam benak saya sepanjang masa hidupku di dunia ini. Jika misalnya saya memilih Goenawan Mohamad atau Arief Budiman sebagai tokoh yang saya pilih dan ingin saya tulis sosoknya; hampir pasti karena ketika mengingat sosok intelektual mereka yang selama ini saya kenal, terutama dari tulisan-tulisan mereka yang pernah saya baca atau dari berbagai berita tentang kedua tokoh ini yang pernah saya dengar; yang mendorong intuisi saya untuk memilih mereka sebagai sosok yang ingin saya tampilkan.

Namun, mengatakan bahwa intuisi sebagai satu-satunya pendorong untuk memilih seorang tokoh untuk ditulis sosoknya mungkin juga terlalu menyederhanakan persoalan. Dalam perjalanan waktu sehingga terkumpul sekitar 70-an tokoh yang pernah saya tuliskan sosok sketsa biografinya, penentuan untuk memilih seorang tokoh pada suatu waktu ternyata juga dipengaruhi oleh banyak hal. Meskipun tampaknya ada satu hal yang diam-diam selalu melatarbelakanginya. Tokoh-tokoh itu hampir bisa dikatakan sebagian besar tidak pernah saya kenal

secara pribadi, sebagian bahkan tidak pernah kulihat langsung sosoknya. Sebagian adalah tokoh-tokoh yang telah menjadi sejarah yang saya kenal hanya dari bacaan. Sebagian memang merupakan sosok-sosok yang saya kenal, meskipun tidak dekat secara pribadi. Sebagian tokoh itu saya tulis misalnya karena saya suka membaca buku-bukunya; atau saya mengenalnya sebagai orang yang buku-bukunya menjadi referensi ketika saya melakukan penelitian tentang sebuah isu tertentu kala masih aktif sebagai peneliti di LIPI. Sebagian tentu saja para mentor dan peneliti senior yang saya kenal ketika saya masih bekerja di LIPI.

Mungkin ada semacam lingkungan epistemik yang diam-diam mengisi ruang di benakku kala sosok-sosok yang saya pilih untuk ditulis itu menjadi bagiannya. Suasana hati, peristiwa-peristiwa kebetulan, bertemu dengan seseorang, dan buku yang kebetulan sedang dibaca; tidak jarang menjadi semacam inspirasi untuk mulai menulis tentang seorang tokoh.

Tapi siapa tokoh atau sosok yang kemudian ingin ditampilkan di dalam tulisan saya? Sulit dihindari ada bias pribadi dalam memilih seorang tokoh yang sosoknya ingin saya tampilkan. Mereka umumnya memang tokoh publik yang sudah dikenal bahkan terkenal, jadi itu menjadi bias yang pertama, pilihannya cenderung elitis. Bias yang lain adalah adanya semacam rasa hormat terhadap ketokohan dari sosok yang ingin disampaikan dan itu tidak mudah disembunyikan. Dalam hal ini tidak selamanya tokoh yang sosoknya ingin saya tampilkan itu adalah orang yang sungguh-sungguh terkenal, mungkin dikenal namun di kalangan yang relatif terbatas. Akan tetapi, dari semua kriteria dan alasan mengapa saya kemudian ingin menuliskannya barangkali rasa hormat itu yang diam-diam melatarbelakanginya. Dalam kaitan dengan rasa hormat inilah mengapa kumpulan esai pendek yang saya sebut sebagai sketsa-sketsa biografis ini menjadi bagian utama buku keempat dalam seri buku bertema “Mencari Indonesia”.

Seperti telah berulang kali saya sampaikan dalam berbagai kesempatan, “Mencari Indonesia” adalah semacam metafor yang saya pakai untuk mengimajinasikan sebuah tempat, sebuah keadaan, dan mungkin juga sebuah harapan atau cita-cita; semacam rumah bersama yang nyaman bagi para penghuninya, orang-orang yang mencintai Indo-

nesia. Tokoh-tokoh yang sosoknya saya tampilkan dalam kumpulan esai ini, dalam tafsir saya adalah orang-orang yang di dalam dirinya itu menampilkan keindonesiaan. Dari mereka, melalui karya, kiprah dan pemikiran-pemikirannya, saya merasa menemukan sedikit atau banyak keindonesiaan itu. Intuisi saya mengatakan dari sosok-sosok ini saya menemukan serpihan-serpihan, kadang tersambung satu sama lain, kadang seperti terlepas dan berdiri sendiri terpisah dari yang lain; dari apa yang bernama Indonesia yang sedang saya cari itu.

Nama-nama tokoh yang sosoknya menjadi esai dan kemudian dikumpulkan menjadi sebuah buku ini, sengaja diurutkan secara alfabetis dan bukan secara kronologis berdasarkan tanggal diterbitkannya. Mengurutkan secara alfabetis dari tokoh-tokoh itu dilakukan untuk menghindari adanya kesan bahwa tokoh yang satu memiliki peran atau pengaruh yang lebih besar atau lebih penting dari yang lain. Tokoh-tokoh itu juga tidak dikelompokkan berdasarkan bidang atau profesi di mana mereka berkiprah karena tidak jarang seorang tokoh aktif berperan dalam berbagai bidang dan tidak bisa ditempatkan dalam sebuah kotak profesi tertentu. Secara umum bisa dikatakan bahwa sebagian besar tokoh-tokoh yang saya tuliskan secara singkat sosoknya ini bisa saja digolongkan sebagai kaum cendekiawan. Sengaja dipilih subjudul “Dari Raden Saleh sampai Ayu Utami” untuk menunjukkan adanya sebuah rentang sejarah kaum cendekiawan Indonesia yang cukup panjang, dari masa jauh sebelum kemerdekaan hingga masa pasca-reformasi sekarang ini.

Serial tokoh-tokoh ini saya tulis secara rutin untuk dimuat di *Kajanglako* dalam dua tahun terakhir. Seperti kita tahu sejak awal Maret 2020 dunia dilanda virus Covid-19 yang sampai hari ini masih kita rasakan akibatnya. Dalam masa pandemi itu, selain menulis serial tokoh-tokoh ini, saya pun menulis berbagai hal yang terkait dengan pandemi. Kumpulan esai yang berkaitan dengan pandemi itu telah terbit sebagai buku “Mencari Indonesia 3: Esai-Esai Masa Pandemi”. Seperti juga esai-esai lainnya yang selalu diterbitkan oleh *Kajanglako*, esai-esai dalam buku “Mencari Indonesia 4: Dari Raden Saleh sampai Ayu Utami” ini pun selalu saya bagikan ke teman-teman dekat saya. Kepada merekalah saya perlu mengucapkan terima kasih karena kesediaannya

untuk membaca dan kadang-kadang memberikan komentar dan tanggapan.

Menuliskan sesuatu untuk dipublikasikan ternyata adalah sebuah cara saya untuk berkomunikasi. Saya adalah bagian dari sebuah komunitas. Sebagai penulis tentu saya berharap bahwa apa yang saya tulis dibaca orang, tidak penting sedikit atau banyak. Salah seorang yang sering saya kirim tulisan adalah Profesor Peter Carey, seorang sejarawan dari Oxford University yang setelah pensiun memilih bermukim dan melanjutkan berkarya di Indonesia. Kiprah dan karya Profesor Carey tidak saja berupa buku, terutama yang paling terkenal tentang sejarah hidup Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa, namun juga dalam berbagai bentuk karya pengabdian kemanusiaan lainnya. Profesor Peter Carey telah dengan senang hati memberikan kata pengantar untuk buku ini. Untuk itu, saya merasa terhormat dan mengucapkan banyak terima kasih. Selain kepada Profesor Peter Carey, saya telah meminta dua orang sahabat yaitu Mohamad Sobary dan Maria Hartiningsih untuk menulis komentarnya terhadap buku ini. Mohamad Sobary, rekan kerja di LIPI dan teman main sejak mahasiswa di kampus UI Rawamangun saya anggap orang yang paling mengenal saya secara pribadi. Sementara itu, Maria Hartiningsih, sebagai mantan wartawan senior Kompas saya berharap dapat memberikan komentar karena reputasinya sebagai penulis rubrik sosok atau persona di Kompas. Setelah hampir dua minggu menerima draf buku ini, Maria mengirim kabar kalau dia tidak bisa meneruskan menulis komentar karena harus menjalani terapi untuk punggungnya yang bermasalah. Namun, Maria kemudian memperkenalkan saya pada rekan yuniornya Ruth Indiah Rahayu, mahasiswa pascasarjana di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara (STFD) untuk menggantikannya menulis komentar. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya harus mengucapkan terima kasih kepada Mohamad Sobary, Ruth Indiah Rahayu, dan tentu saja Maria Hartiningsih yang telah memungkinkan adanya dua komentar sebagai epilog dari buku ini. Epilog Ruth berbeda dengan Sobary yang boleh dikatakan mengenal saya dari dekat, Ruth adalah seorang yang menulis komentar hanya dengan membaca teks dan dua epilog ini secara tak terduga menjadi menarik karena seperti saling melengkapi satu sama lain.

Ucapan terima kasih juga harus saya sampaikan secara khusus pada rekan saya Jumardi Putra yang selalu setia menjadi pembaca pertama sebelum tulisan saya dimuat di *Kajanglako*. Penghargaan dan terima kasih saya sampaikan pada segenap tim Penerbit BRIN yang telah bekerja keras mempersiapkan naskah ini sehingga kemudian terbit sebagai *e-book*. Kerja keras tim editor Penerbit BRIN untuk melengkapi referensi yang sering saya singgung dalam tulisan dan menemukan foto-foto yang secara legal dapat diakses patut mendapat apresiasi.

Indonesia adalah sebuah bangsa yang besar. Kebesaran itu tercermin dari banyaknya jumlah kaum cendekiawan yang ada di dalamnya. Tokoh-tokoh yang saya tampilkan sosoknya dalam buku ini hanyalah sebagian kecil dari begitu banyaknya mereka yang tergolong kaum cendekiawan itu. Oleh karena itu, apa yang dilukiskan dalam buku ini sama sekali jauh dari gambaran tentang kaum cendekiawan yang ada di Indonesia. Jika mereka terpilih untuk ditampilkan dalam buku ini semata-mata karena keterbatasan pandangan dan bias yang bersifat pribadi dari penulisnya. Sketsa-sketsa singkat dari tokoh-tokoh yang ditampilkan dalam buku ini juga sangat disadari baru menampilkan sebagian kecil dari berbagai sisi kehidupan dan kedalaman pengalaman dan wawasan dari tokoh-tokoh tersebut. Buku ini diharapkan dapat sedikit turut serta dalam menyumbangkan tumbuhnya rasa hormat dan pada gilirannya harga diri akan kekayaan dan keragaman khazanah ke-cendekiaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Kampung Limasan Tonjong, 25 Desember 2021

Prolog

Memanusiakkan Manusia

Peter Carey

Pak Riwanto Tirtosudarmo –atau Pak Ri, panggilan akrab yang dipakai teman-teman dan mahasiswa yang diajarnya– adalah sosok yang fenomenal. Seseorang yang mengecap pendidikan di bidang demografi-sosial, dia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya sebagai peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), sebuah lembaga yang saya kenal sewaktu masih menjadi mahasiswa pascasarjana di tahun 1970-an sebagai Leknas-LIPI ketika lembaga ini mensponsori perizinan penelitian saya di Indonesia. Akan tetapi sekarang, dalam masa pensiunnya, Pak Ri telah menjadi seorang cendekiawan rakyat (*public intellectual*). Tulisan-tulisannya tentang kebebasan akademik dengan wawasan, kemanusiaan, dan semangatnya yang dengan teguh untuk bicara terus terang kepada para penguasa membuatnya, setidaknya di bidang humaniora, menjadi ‘hati nurani bangsanya’. Di sini ia tidak bergerak sendirian. Melalui lembaga Kaukus Indonesia untuk

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kebebasan Akademik (KIKA) yang ikut didirikannya pada tanggal 7 Desember 2016¹ –sebuah lembaga swadaya masyarakat yang betul-betul dibentuk oleh masyarakat Indonesia sendiri, dia telah menjadi pedoman –titik tumpu dan sumber inspirasi– bagi para akademisi dan intelektual Indonesia dari generasi yang lebih muda dalam menghadapi dunia akademik yang telah dikorupsi oleh kepentingan-kepentingan politik, birokrat yang cuma menghabiskan waktu, dan proyek-proyek yang nilai akademisnya patut dipertanyakan. Belum lama ini (13 Oktober 2021), berakhirnya masa tahanan seorang anggota KIKA, Saiful Mahdi, ahli matematik dan statistik dari Universitas Syah Kuala Banda Aceh, yang dijatuhi hukuman penjara selama tiga bulan karena mempertanyakan prosedur penerimaan Pegawai Negeri Sipil di kampusnya, menggarisbawahi labirin moral ini. Perlakuan para pemimpin kampusnya sendiri terhadap Saiful Mahdi yang keterlaluan seharusnya menjebloskan mereka ke penjara, menegaskan betapa meluasnya masalah yang harus dihadapi oleh kaum intelektual yang masih memiliki hati nurani dan integritas di zaman Indonesia modern sekarang ini.

Jadi mengapa buku ini sangat penting? Jawaban penulis yang satu ini tertuang dalam sebuah tulisan pendek yang diselipkan di bagian depan kumpulan tulisan yang luar biasa ini yang terdiri dari karya tulis para penulis-penulis Indonesia, cendekiawan, seniman, akademisi, pembuat film, dan tokoh-tokoh populer yang jalan hidupnya pernah bersinggungan dengan penulis buku ini atau yang telah memberikan ilham kepadanya sebagai *leluhur bangsa*. Di sini pembaca bisa menemukan sosok yang merupakan seorang mantan penari Jawa klasik yang beralih menjadi ahli arkeologi dan sejarawan, Profesor Edi Sedyawati (lahir di Malang, 1938).

Seorang dengan sosok peneliti yang sangat anggun dan halus yang pernah menjabat selama enam tahun sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan (1993–1999); sosok ini dibandingkan, dalam gambaran yang

¹ KIKA adalah sebuah *platform* bersama bagi siapa saja yang peduli dengan kebebasan akademik, para insan akademik yang selalu bekerja dengan akal sehat, *conscience* dan *compassion*; untuk selalu mempertanyakan, *re-thinking*, *re-imagining*, menguji kebenaran dengan prinsip dan kaidah saintifik, segala sesuatu, termasuk klaim atas kepentingan nasional atau klaim kebenaran atas nama keyakinan agama tertentu.

dibuat Pak Ri yang sangat hidup, dengan rekan-rekan dewan pengulasnya di Dewan Riset Nasional (DRN) pasca-1984, dua orang di antaranya yaitu Profesor Parsudi Suparlan (1938–2007) dan Profesor Loekman Soetrisno (1937–2000-an), yang digambarkan oleh Pak Ri dengan nada yang berbeda:

“Bisa dibayangkan hanya Bu Edi yang bersuara lembut di tengah suara-suara keras, tidak jarang kasar, dalam menguliti proposal penelitian peneliti junior. Parsudi Suparlan, antropolog dari UI dan Loekman Soetrisno, sosiolog dari UGM, keduanya telah almarhum, adalah ilmuwan sosial legendaris yang terkenal sangat galak dalam menguji proposal penelitian. Menghadapi keduanya tidak hanya dibutuhkan kemampuan menguasai materi, namun juga syaraf yang kuat untuk tidak *groggi* sebelum menyampaikan isi pikiran.”

Jadi di sini para pembaca buku ini, mungkin sambil tersenyum di dalam hati akan melewati begitu saja renungan yang dituliskan dengan penuh rasa persahabatan ini, kalau saja bukan karena kenyataannya pernah muncul sebagai seorang sosok yang sangat berbeda dalam memoar seorang Tapol eks Pulau Buru, Tedjabayu Sudjojono (1943–2021). Putra seorang pelukis terkenal, S. Sudjojono (1913–1985), almarhum Tedjabayu belum lama ini (Desember 2020) menerbitkan memoar pribadinya yang menceritakan tentang pengalamannya dipenjarra setelah 1965 dan siksaan yang dideritanya selama 14 tahun di tangan militer Indonesia, *Mutiara di Padang Ilalang*. Di halaman 42 memoarnya yang terbit tidak lama sebelum ia wafat pada tanggal 25 Februari 2021, pembaca bisa menemukan gambaran sosok dari Profesor Loekman Soetrisno yang bertindak sebagai salah seorang interogator dari Tim Pemeriksa Daerah (Teperda) Yogyakarta pada Oktober 1965:

“Aku baru mendengar bahwa seorang teman [...] berada di sebelah seniman ternama, Trubus [Soedarsono, 1926–66], ketika [ia] sedang diperiksa oleh Loekman Soetrisno. Loekman menghantam dengan mesin ketik besar sampai Mas Trubus pingsan [...] hingga kini Mas Trubus hilang tak tentu rimbanya. Aku percaya Mas Trubus dibunuh, dan aku menduga salah satu yang bertanggung jawab adalah

Dr Loekman Soetrisno lulusan Institute of Social Studies Den Haag dan Cornell University di Ithaca itu.”

Pada kesempatan yang lain, “ilmuwan sosial legendaris” ini diceritakan telah menggunakan kursi untuk meremukkan tangan salah seorang tahananannya yang pada kemudian hari ternyata berjumpa lagi dengan profesor dari UGM ini sebagai tukang pijitnya dan memiliki keberanian untuk mengingatkan sang profesor tentang kebiadabannya dulu (Tedjabayu, 2020: 358). Kita juga mengetahui dari tuturan Tedjabayu bahwa teknik penyiksaan lain yang populer di kalangan para interogator militer adalah dengan menempatkan kaki korban mereka di bawah kaki meja lalu duduk di atasnya untuk meremukkan jempol dan tulang metatarsal. Jadi, kita mencatat di sini bagaimana produk intelektual –meja, kursi, mesin tulis– dipakai sebagai alat untuk penganiayaan. Di tempat yang lain, tempat-tempat penahanan yang tidak manusiawi yang telah lama ditutup oleh pejabat-pejabat pemerintahan penjajahan Belanda, seperti penjara bawah tanah yang terletak di bawah gedung *Stadhuis* (Balai Kota) Batavia yang sekarang menjadi Museum Sejarah Jakarta, yang sudah ditutup lebih dari seabad sebelumnya (1846) akibat begitu banyaknya tahanan yang tewas –85 persen tahanan meninggal dalam hitungan minggu akibat penyakit tifus dan disentri (De Haan, 1935, II: 222), kini difungsikan kembali. Dalam periode pembantaian antikomunis pasca-1965, para tahanan di antaranya adalah seorang anggota keluarga dekat penulis sendiri, dijebloskan ke dalam salah satu sel-sel bawah tanah ini –beberapa orang bahkan dibelenggu menggunakan rantai dan bola besi yang pernah digunakan untuk merantai penasihat keagamaan Pangeran Diponegoro, Kiai Mojo dan para pengikutnya sebelum mereka dibuang ke Sulawesi Utara (Minahasa) pada bulan Maret 1830 (Carey, 2012: 834, catatan kaki 136).

Visi para filsuf zaman Pencerahan Eropa abad kedelapan belas yang meyakini bahwa umat manusia selayaknya menghapuskan “hukuman yang kejam dan di luar batas (*cruel and unusual punishments*)” pun kini mengalami kemunduran. Ini adalah visi kemanusiaan yang sama yang didukung oleh ayahanda Diponegoro, Sultan Ketiga Yogyakarta pada bulan Juli 1812 ketika setuju untuk menghapuskan

pengadilan melalui cobaan (mengadukan tertuduh melawan binatang buas) dan hukuman amputasi tangan bagi pencuri, dengan sabdanya yang mengatakan bahwa penyiksaan “tentunya adalah kezaliman terhadap yang tidak bersalah dan bahkan menjadi hukuman ganda bagi yang bersalah” (Carey, 2012: 436). Dalam “kudeta merangkak” yang membawa Mephistopheles Jawa, Jenderal Soeharto dan para *myrmidon* militernya menuju ke tampuk kepemimpinan setelah terjadinya peristiwa G30S, kompas moral bangsa Indonesia telah dihancurkan dan kehidupan intelektual bangsa ini pun dikebiri. Seperti yang ditulis Aleksandr Solzhenitsyn (1918–2008) tentang Rusia pascarevolusi Oktober 1917, lokomotif sejarah Indonesia telah tergelincir dari relnya dan warga negara ini diharuskan untuk hidup di sepanjang pematang dan pinggiran jalur kereta api, korban autogenosida.

Indonesia pasca-1965 adalah sebuah negeri yang berada di bawah kuasa cengkeraman mengerikan yang memegang individu-individu dan kelompok-kelompok lalu membuat mereka mengingkari kodrat mereka sendiri, mengingkari akal sehat mereka sendiri, dan menghancurkan semuanya dengan fatalisme yang ceroboh, sebagaimana digambarkan oleh Pak Ri dalam makalahnya “Hersri (Setiawan), Trauma dan Amnesia Sejarah” yang dimuat dalam buku jilid ketiga karyanya yang berjudul *Mencari Indonesia 3: Esai-Esai di Masa Pandemi* (Tirtosudarmo 2021: 238):

“Dalam sebuah kesempatan, saya pernah bertanya pada Andrew Beatty seorang antropolog [lulusan Oxford] yang lama melakukan riset di komunitas Osing di Banyuwangi. Bagaimana kekejaman itu bisa terjadi? Setelah diam sejenak dia menjawab lirih: ‘ada kekuatan luar yang besar, orang-orang Desa itu tidak bergerak sendiri.’ Kenapa harus membunuh dan memenjarakan ribuan orang-orang yang sejatinya tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi? Mengapa tidak cukup menangkap mereka yang benar-benar dinilai bersalah? Mengapa harus mengorbankan begitu banyak orang? Strategi dan skenario siapa sesungguhnya yang telah diadopsi dalam peristiwa yang menjadi trauma besar bangsa ini? Bangsa ini sudah seharusnya mengingat kembali apa yang terjadi dengan mata yang bening dan hati yang bersih. Trauma ini harus diingat dan dituliskan jika amnesia sejarah tidak ingin terjadi.”

Trauma yang masih berlangsung hingga hari ini juga dirujuk dalam buku ini di sebuah makalah tulisan Pak Ri tentang seorang ahli reformasi agraria yang beraliran kiri, Gunawan Wiradi (1932–2020), pensiunan dosen IPB yang saat tulisan ini dibuat telah wafat:

“Setiap kali mendengarkan Gunawan Wiradi bicara, meskipun seperti belum kehilangan optimisme, ada nada kegetiran yang tidak bisa disembunyikan melihat berbagai perubahan yang terjadi, seperti dikatakannya pada suatu saat, ‘kita sekarang sebetulnya tidak lagi memiliki UUD [Undang-Undang Dasar] 1945, karena yang ada isinya sudah lain, sudah porak-poranda.’”

Akademisi dengan mutu tinggi seperti Gunawan Wiradi sangat jarang. Kekerasan dan impunitas moral yang membawa Soeharto menuju tampuk kekuasaan, terus bergaung hingga hari ini. Kini sudah tidak lagi senada dengan definisi fasisme, yang dibuat oleh jurnalis dan aktivis politik Amerika, Upton Sinclair (1878–1968), “kapitalisme plus pembunuhan” –yang menjadi ciri khas 32 tahun kekuasaan Orde Baru (1966–1998). Sebaliknya, kini fokusnya bertumpu pada akumulasi kekayaan pribadi dan secara sistematis mengorupsi lembaga-lembaga publik. Keadaan semacam ini telah menjadi racun dalam universitas-universitas di Indonesia sehingga negara ini kini menduduki salah satu posisi tertinggi di dunia dalam persentase ilmuwan yang melakukan penelitian aktif dan menerbitkan tulisannya di jurnal-jurnal yang tidak terindeks (Rakhmani & Siregar 2016: 51). Selain itu, sekitar 16 persen jurnal tersebut masuk dalam kategori “jurnal bajakan” yang sama sekali tidak memiliki nilai akademis.

Sekali lagi, dalam jilid ketiga buku *Mencari Indonesia* ini, dalam renungannya mengenai pejabat Menteri Pendidikan yang masih tergolong berusia muda (menjabat sejak 2019 hingga sekarang) “Renungan untuk Nadiem Makarim” (hlm. 217–21), Pak Ri mengimbau pak menteri untuk menghentikan persekongkolan jahat tingkat atas yang terjadi di tengah-tengah birokrasi tingkat tinggi antara kementeriannya dan rektor-rector yang akhlaknya tercela, seperti Rektor Universitas Negeri Semarang (UNNES), Fathur Rokhman:

“Pembiaran oleh penguasa dunia pendidikan di negeri ini terhadap beberapa rektor yang terbukti melakukan plagiasi [...] adalah sebuah persekongkolan tingkat tinggi untuk membunuh akal sehat. [...] Bukankah ini sebuah tindakan bunuh diri sebagai bangsa? Bangsa Indonesia tidak mungkin lahir jika para pemimpin bangsa waktu itu tidak terdidik untuk melatih akal sehatnya? Hanya dengan akal sehat yang kemudian menjadi prinsip yang dipegangnya para pemimpin bangsa itu mampu merumuskan apa yang harus dilakukan untuk memerdekakan rakyat bangsanya dari penjajahan oleh bangsa lain. Jika sekarang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan [Nadiem Makarim] terperangkap dalam sebuah konspirasi untuk membunuh akal sehat, bukankah dia telah melakukan sebuah laku tidak terpuji mengeliminasi prinsip mendasar yang secara historis telah mendorong lahirnya bangsa ini?”

Dalam situasi yang banyak disesalkan ini, membaca kumpulan 67 makalah yang ditulis oleh seorang akademisi Indonesia yang memiliki integritas tinggi dan wawasan yang luas ini, memulihkan akidah kita terhadap kemanusiaan pada umumnya dan juga terhadap masa depan Indonesia. Apabila negara ini pernah menghasilkan orang-orang seperti itu di masa lalu dan terus memupuknya hingga hari ini, kita boleh memandang ke depan dengan penuh keyakinan bahwa masyarakat sipil Indonesia akan terus hidup di masa depan. Bahkan, seandainya negeri ini masih –dalam tolak ukur kompas moralnya– berkemah di pinggir rel kereta api. Para pria ini dan rekan-rekan kaum wanita mereka yang sama mengesankannya adalah padanan para Wali (*custodes*) Plato, yang menjadi wali bukan untuk menjaga kekuasaan politik dan kewenangan sipil tertentu, namun mengawal nilai-nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat. Jejaring peradaban dan kepekaan mereka mengingatkan kita pada sebuah diktum yang diajukan Sam Ratulangi (1890–1949) “*Si tou timou tumou tou* [manusia baru dapat disebut sebagai manusia, jika sudah dapat memanusiaikan manusia]”. Tulisan-tulisan Pak Ri diilhami oleh visi ini dan dengan gemilang berhasil menghidupkan kembali dimensi kemanusiaan sahabat-sahabatnya, kolega-koleganya dan tokoh-tokoh sejarah yang dituliskannya.

Selamat Membaca!

Peter Carey

Fellow Emeritus Trinity College, Oxford; dan
Adjunct Professor (Profesor Tamu) Fakultas Ilmu
Pengetahuan Budaya (FIB), Universitas Indonesia

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Abdurrahman Surjomihardjo

Saya tidak sempat bertanya mengapa beliau sendiri tidak ikut menandatangani Surat Keprihatinan yang dibawa oleh rombongan W.S. Rendra ke Lembaga Ekonomi Kemasyarakatan Nasional (Leknas)-LIPI,



Sumber: Surjomiharjo (2020)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

sementara ketiga koleganya, Taufik Abdullah, Thee Kian Wie, dan Melly G. Tan menandatangani. Ketika menceritakan peristiwa itu, saya merasakan adanya campuran antara perasaan menyedihkan dan melihatnya sebagai semacam kenaifan politik. Membayangkan kejadian saat itu sekarang saya juga bertanya mengapa Pak Alfian tidak ikut menandatangani Surat Keprihatinan itu. Sebagai satu-satunya doktor ilmu politik di Leknas saat itu apa yang sesungguhnya dipikirkannya tentang situasi politik saat itu. Saya tidak tahu apakah ada semacam intuisi dari Pak Abdurrahman Surjomihardjo sebagai orang Jawa yang bisa mencium iklim politik dan sikap Soeharto saat itu. Tahun ini persis sepuluh tahun Soeharto berkuasa dan inilah saat ketika pola pembangunan seperti apa dipilih. Jelas Soeharto tidak menginginkan kritik. Setelah 1978 memang muncul kata pemerataan pembangunan tapi dalam praktik yang terjadi justru kesenjangan sosial.

Tahun 1977–1978 adalah tahun-tahun ketika gelombang kedua protes mahasiswa melanda kampus-kampus besar di Indonesia. Inilah gelombang protes terbesar setelah gelombang pertama yang meletuskan Peristiwa Malari 1974. Peristiwa Malari adalah aksi protes pertama setelah Soeharto berkuasa yang membuat Hariman Siregar, Ketua Dewan Mahasiswa UI dan Sjahrir, aktivis dan mantan tokoh KAMI, diadili dan dipenjara. Selain pimpinan mahasiswa tidak sedikit para intelektual kritis ditangkap dan diinterogasi, termasuk Sarbini Sumawinata dan Soedjatmoko. Dua staf pengajar UI, Dorodjatun Kuncorojakti dan Juwono Sudarsono juga sempat diajukan ke pengadilan. Sebuah *political crackdown* dan pembersihan mereka yang anti terhadap Orde Baru secara besar-besaran. Saya sudah menjadi mahasiswa UI pada tahun 1974 dan ikut berpawai dari Kampus Salemba ke Istana Negara yang dipimpin Hariman Siregar. Di Monas kami cerai berai disembur gas air mata dan kami diminta membubarkan diri. Pasar Senen diberitakan sudah mulai terbakar karena ulah orang-orang Ali Moertopo yang mau menggagalkan aksi mahasiswa. Sore dan malam itu kami tercerai berai, saya beruntung bersama Bambang Widianto, teman dari Antropologi UI yang keluarganya menempati sebuah bagian dari Gedung Trisula di Menteng. Malam itu dari atap Gedung Trisula kami melihat Pasar Senen yang terbakar.

Aksi-aksi mahasiswa pada 1977–1978 memang tidak sespektakuler Malari 1974. Sejumlah pimpinan Dewan dan Senat Mahasiswa memang ditangkap dan ditahan di rumah tahanan yang kemudian terkenal sebagai Kampus Kuning, tetapi sekitar 3 bulan kemudian dilepaskan. Melalui Menteri Pendidikan saat itu, Daoed Joesoef, dikeluarkan kebijakan yang dikenal sebagai Normalisasi Kebijakan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) yang melarang mahasiswa melakukan kegiatan politik di kampus dan Dewan Mahasiswa dibubarkan. Sejak 1978 kegiatan politik mahasiswa mengalami represi dan baru muncul kembali 20 tahun kemudian bersamaan dengan krisis moneter yang melengserkan Soeharto 1998. Sebagai seorang sejarawan yang mendalami gerakan kaum nasionalis, peristiwa 1974, 1977–1978, dan 1998 pastilah dilihatnya dalam perspektif sejarah. Dalam konteks sejarah pasca-kemerdekaan, peristiwa 1965 mungkin menjadi sangat penting atau bahkan yang terpenting karena dari sanalah apa yang kemudian terjadi dengan Indonesia berawal. Saya tidak tahu bagaimana sikap Pak Abdurrahman Surjomihardjo terhadap peristiwa 1965 karena saat meletusnya peristiwa itu dia telah lulus dari jurusan sejarah UI seperti koleganya Adri Lopian dan Onghokham. Pak Dur, panggilan Pak Abdurrahman Surjomihardjo, konon sempat menjadi pembimbing skripsi Soe Hok Gie.

Sebelum di Leknas Pak Dur telah menjadi peneliti di Lembaga Riset Kebudayaan Nasional (LRKN) yang saat itu dipimpin Pak Lie Tek Tjeng seorang sinolog dan Pak Luhulima sebagai sekretaris. Menurut penuturan Rusdi Muchtar, sekitar 1976–1977 terjadi suasana yang tidak menyenangkan di LRKN karena sikap pimpinannya yang otoriter. Akibatnya, sejumlah peneliti LRKN pindah ke Leknas, di antaranya adalah Pak Adri Lopian, Pak Abdurrahman Surjomihardjo, Pak Suhadak, dan Rusdi sendiri. Rusdi Muchtar, seorang antropolog lulusan UI sudah sejak mahasiswa tahun 1971 magang di LRKN. Saya telah kenal Rusdi sejak pertengahan tahun 70-an karena sama-sama tinggal di Asrama Daksinapati UI di Rawamangun. Melalui Rusdi saya mulai mengenal Leknas dan mendengar cerita-cerita penelitian lapangannya yang menarik, salah satunya tentang cerita penelitiannya ke Gayo Aceh bersama seniornya Junus Melalatoa.

Pak Dur dan Pak Adri bergabung dengan Pak Taufik Abdullah yang saat itu menjadi Direktur Leknas. Saya mulai bertemu Pak Dur pada awal tahun 1980-an ketika mulai bekerja di Leknas dan sedikit lebih sering setelah LRKN dan Leknas dilebur tahun 1986, kemudian seingat saya beliau masuk ke Pusat Penelitian Ekonomi yang dipimpin Pak Thee Kian Wie. Peleburan dua pusat penelitian ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan yang memiliki tidak sedikit peneliti andal di bidangnya masing-masing itu penting dicatat dalam sejarah ilmu sosial di Indonesia. Reorganisasi lembaga penelitian ilmu sosial dan kemanusiaan tahun 1986 itu memang tampak menarik dalam menentukan siapa ada di mana dan siapa menduduki posisi apa. Setelah reorganisasi itu Pak Adri Lopian memimpin Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB), Pak Alfian memimpin Pusat Penelitian Politik, Pak Edi Masinambow yang keahliannya etno-linguistik menjadi Kepala Pusat Penelitian Penduduk. “Memang harus direbut”, begitu Pak Taufik Abdullah suatu ketika menjelaskan. Sekitar masa transisi ini Pak Mochtar Buchori, ahli pendidikan, seorang doktor lulusan Harvard, seorang intelektual kritis, terpilih sebagai Deputy Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK)-LIPI, saya duga juga setelah melalui proses yang berbelit. Ketua LIPI saat itu adalah Profesor Dodi A. Tisna Amidjaya, mantan Rektor ITB. Persis ketika terjadi reorganisasi LIPI itu saya memang sedang bersiap-siap kembali ke Canberra melanjutkan studi pascasarjana. Praktis saya tidak terlibat sama sekali dengan apa yang kemudian terjadi sejak 1986. Ketika 1991 saya kembali ke LIPI proses reorganisasi itu sudah selesai dan lembaga-lembaga bentukan baru itu sudah mulai mapan.

Setelah kembali itu barulah saya mulai sering bertemu dengan Pak Dur meskipun tidak pernah melakukan penelitian bersama. Mungkin karena sebagai sesama orang Tegal suatu hari dia berkata, “Kita bikin penelitian tentang Tegal yuk, *premanan aja*”. Yang dimaksud “*premanan*” adalah dilakukan sendiri tanpa harus lewat LIPI. Rencana itu sampai sekarang tinggal rencana, kami tidak melakukan apa-apa, sampai beliau wafat. Ketika tahun 1998–2000 saya menjadi Kepala Satuan Kerja (kapus) PMB sempat dikunjungi Bu Abdurrahman antara lain membicarakan buku-bukunya yang ingin disumbangkan ke LIPI.

Buku-buku Pak Dur memang kemudian ditempatkan di rak tersendiri di koleksi IPSK-LIPI di Gedung PDII-LIPI bersama buku sumbangan lainnya, yang terbanyak dari George Hicks seorang Indonesianis yang sukses sebagai pebisnis di Hongkong. Menurut Pak Thee Kian Wie, George Hicks semula ragu-ragu, apakah disumbangkan ke LIPI atau CSIS. Mungkin karena melihat Pak Thee dan menganggap LIPI lebih tepat akhirnya buku-buku itu diberikan ke LIPI. Pada suatu hari, ketika mencari sebuah buku saya lihat buku-buku itu seperti merana tak terjamah dan tak terpelihara. Tidak tahu bagaimana nasib buku-buku itu sekarang ketika beberapa tahun yang lalu terjadi simpang siur berita tentang pembuangan buku-buku dari PDII-LIPI. Mungkin saja buku-buku George Hicks dan Pak Dur ikut *dikiloin*.

Secara usia Pak Dur memang jauh di atas saya, meskipun rumah kami di sebuah kampung di Tegal sangat dekat, saya di Lontrong 1 dan keluarga Pak Dur di Lontrong 4 namun saya baru bertemu beliau di LIPI. Rumah keluarga Pak Dur tipe rumah priyayi birokrat Jawa yang besar dengan pendopo dan halaman depan yang luas, dua pohon mangga yang rindang membuat rumah itu tampak teduh. Di LIPI pergaulan antarpemula yang tidak satu tim penelitian, antara lain melalui seminar-seminar yang secara rutin diadakan. Pak Dur yang bersosok tinggi besar, menyampaikan pendapatnya dengan suaranya yang khas dan bahasa Indonesia yang agak *medok* logat Tegal-nya, agak mirip tokoh Bima dalam pewayangan Jawa. Seperti Bima, Pak Dur kalau berbicara juga tegas lugas, tidak basa-basi meskipun kadang disertai sedikit senda-gurau. Ketika Gus Dur, jauh sebelum menjadi presiden berbicara dalam sebuah seminar di LIPI, antara keduanya terlihat saling lempar guyonan yang membuat seminar itu menjadi begitu cair dan informal. Seperti biasa sebelum dapat giliran bicara Gus Dur seperti tertidur dan sempat *digodain* Ulil Abshar Abdalla. Begitu bangun Gus Dur *nyletuk*, “Orang lagi semedi kok dibilang tidur”, kontan semua hadirin tertawa.

Setelah di Leknas salah satu penelitian penting yang dilakukan Pak Dur adalah tentang sejarah pers. Buku hasil penelitiannya itu kemudian ditarik oleh Departemen Penerangan karena memuat tentang pemberedelan pers. Buku itu mendapat pujian dari Atmakusumah, wartawan senior yang lama bekerja bersama Mochtar Lubis di Harian *Indone-*

sia Raya yang sejak Peristiwa Malari 1974 diberedel dan tidak terbit lagi. Pak Dur seorang sejarawan yang menurut pendapat saya sangat nasionalis dan itu sesuai dengan keahliannya tentang sejarah gerakan kaum nasionalis, terutama peran Ki Hadjar Dewantoro dengan Taman Siswa-nya. Seperti rekannya Pak Adri, Pak Dur juga meraih gelar doktornya dalam usia yang agak lanjut, mengangkat tentang sejarah Kota Yogyakarta dan pembimbingnya juga Pak Sartono. Sikap kritis terhadap penggelapan sejarah bangsanya, diceritakan Asvi Warman ketika dia marah dan menelepon penerbit Sinar Harapan yang menerbitkan buku *Pejuang dan Prajurit* dari Nugroho Notosusanto (1984) karena dalam buku itu foto Bung Karno saat Proklamasi hilang. Baru pada edisi keduanya foto Bung Karno itu muncul. Bukan rahasia lagi jika pada masa itu para sejarawan kritis, seperti Pak Abdurrahman dan Pak Taufik Abdullah berseberangan dengan Nugroho Notosusanto yang sejak Peristiwa 1965 telah menjadi pembenar sejarah utama rezim Soeharto Orde Baru.

Dalam sebuah seminar tentang sejarah transmigrasi, Sultan Hamengkubuwono X memberikan pidato kunci. Dalam makalah Sultan yang kemudian dibagikan kepada peserta rupanya ada kutipan dari salah satu tulisan saya tentang transmigrasi. Tidak lama setelah seminar usai, Pak Dur yang hadir dan membaca makalah itu bertemu dengan saya di lantai bawah LIPI. Dia mengatakan kalau tulisan saya dikutip oleh Sultan. Ketika kemudian saya membaca makalah Sultan itu dan mencari kutipan tulisan saya di sana, saya temukan adanya kekeliruan yang agak serius. Apa yang saya maksudkan sebagai kritik terhadap program transmigrasi oleh Sultan justru ditafsirkan sebagai mendukung transmigrasi. Ketika saya sampaikan hal itu pada Pak Dur dia terlihat sedikit kaget, tetapi kemudian dia menyarankan saya untuk memberi tahu sekretaris Sultan. Rupanya Pak Dur cukup akrab dengan sekretaris Sultan dan karena itu persoalan salah tafsir bisa segera diselesaikan secara cepat dan damai.

Pak Abdurrahman Surjomihardjo sebagai seorang ilmuwan sosial memiliki posisi sendiri di antara koleganya di LIPI. Beliau mungkin tidak terlalu *exposed* secara internasional, namun integritas dan komitmen intelektualnya tidak ada yang meragukan. Publikasinya, terutama

tentang sejarah Taman Siswa dan sejarah Pers telah memberikan sumbangan penting tidak saja bagi dunia akademis, namun juga bagi praktisi dan para aktivis penggiat perubahan di Indonesia. Tentang Pak Abdurrahman Surjomihardjo, Bung Mochtar Pabottingi, juniornya di Leknas mengatakan “Selain teguh dalam pendirian, Pak Abdurrahman pun selalu bersikap rendah hati, juga terhadap kita yang muda-muda”.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Buku ini tidak diperjualbelikan.



A.B. Kusuma

Beliau jelas bukan orang yang cocok untuk ditampilkan dalam sebuah acara *talk show* yang riuh rendah di layar kaca. Dunianya adalah ruang perpustakaan yang sepi, membaca, meneliti, dan menulis tentang hal-hal yang berkaitan dengan sejarah konstitusi dan tata-negara, khusus-



Sumber: Media Joang (2019)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

nya arsip-arsip tentang penyusunan UUD 1945 dan dengan sendirinya menyangkut Pancasila. Status resminya sebagai peneliti senior Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI mungkin saja telah berakhir karena usia, tetapi selama beliau masih sehat kegiatan itu pasti masih diteruskan. Ketekunannya dalam berkutat dengan arsip-arsip yang tercecer di berbagai tempat tidak hanya di Indonesia, telah menghasilkan sebuah buku tebal berjudul *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha Persiapan Kemerdekaan* (Kusuma, 2004). Buku ini berisi salinan dokumen-dokumen yang sangat penting bagi yang ingin mempelajari sejarah konstitusi negara ini dan terbit pada 2004, tidak lama setelah reformasi dan berbagai usaha untuk mengamandemen konstitusi.

Pada tanggal 31 Mei 2006 di Kampus UI Depok diselenggarakan Simposium Peringatan Hari Lahir Pancasila “Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas”. Konon penggagas awalnya adalah Rahman Tolleng yang mengkhawatirkan apa yang dilihatnya sebagai *crepping talibanism*, merangseknya secara diam-diam ideologi yang berbasis agama di masyarakat. Membaca TOR simposium itu gagasan Rahman Tolleng memang tecermin di sana. Secara lebih umum kekhawatiran itu ditujukan pada merebaknya apa yang disebut sebagai politik identitas. Ada ketakutan agama sebagai ideologi akan menggeser Pancasila sebagai ideologi negara. Sebuah ketakutan yang seperti tidak akan pernah hilang dalam psikologi kita sebagai sebuah bangsa, juga pada hari-hari ini ketika seluruh perhatian seharusnya dikerahkan untuk mengatasi pandemi.

Dalam TOR simposium itu juga dikatakan bahwa rezim-rezim pemerintahan sebelumnya memang seperti tidak memedulikan Pancasila dan simposium itu bermaksud merestorasinya. Pada Agustus 2006 prosiding simposium itu terbit sebagai buku. Dalam buku yang diawali oleh teks pidato Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu dimuat dalam 20-an makalah para pembicaranya antara lain Fuad Hassan, Goenawan Mohamad, Jakob Oetama, M. Dawam Rahardjo, dan Robertus Robet. Sebuah maklumat, “Maklumat Keindonesiaan” menjadi bagian akhir dari buku ini. Sebelum teks maklumat yang aslinya dibacakan oleh Tondung Mulya Lubis di panggung didampingi seluruh pembawa maka-

lah pada peringatan hari lahir Pancasila pada 1 Juni 2006 di Jakarta Convention Hall di hadapan presiden SBY itu, terdapat tulisan A.B. Kusuma yang berjumlah sekitar 15 halaman, yang berjudul: Catatan Seputar Simposium “Restorasi Pancasila” (Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, 2006). Dalam catatan yang dibuat sebagai reaksi terhadap TOR dan pengelompokan makalah dalam sub-sub tema simposium, nampak ketelitiannya sebagai orang yang menekuni arsip dan dokumen seputar UUD 1945, Pancasila dan perkembangan sejarahnya. Catatan itu dimulai dengan kritiknya terhadap panitia yang banyak menggunakan istilah yang menurutnya tidak jelas seperti *decentering*, *empty signifier*, *signified* tanpa *signifier*; juga penggunaan kata “restorasi” yang dinilainya gegabah karena dari berbagai kamus kata restorasi digunakan untuk gedung bersejarah sehingga panitia seperti menempatkan Pancasila sebagai bangunan tua seperti candi yang mau roboh. Dalam catatan itu pandangan panitia yang melihat bahwa seolah-olah hanya Pancasila yang merupakan dasar negara dinilai keliru. Menurut pendapatnya, kelima sila dalam Pancasila itu hanya merupakan sebagian dari “Dasar Negara”, “Dasar Negara” yang lengkap menurutnya adalah “Pembukaan UUD 1945”. Dalam catatannya yang menurut saya juga sangat penting adalah ajakannya untuk melihat secara serius arsip dan dokumen perdebatan yang berlangsung antara para pendiri bangsa ketika membicarakan isu pemisahan agama dengan negara. Membaca peringatannya, kita disadarkan bahwa isu itu sungguh-sungguh telah dicari jalan keluarnya oleh para pendiri bangsa kita.

Pada tahun 2011 Yudi Latief menerbitkan buku tebal, 600-an halaman berjudul *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Latief, 2011). Dalam pengantarnya, Yudi Latief menyebut nama A.B. Kusuma sebagai orang pertama yang telah memberikan masukan intelektual berharga. Ketika saya sampaikan apresiasi Yudi Latief itu terhadap dirinya, Pak Ananda hanya tersenyum tanpa kata-kata. Membaca buku A.B. Kusuma memang kita menemukan dokumentasi arsip yang lengkap tentang sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. Di sana kita bisa membaca stenografi teks-teks pidato para peserta sidang dan notula perdebatan yang berlangsung dalam sidang-sidang itu. Saya membayangkan Yudi Latief sangat terbantu oleh buku

A.B. Kusuma karena dari buku itu kita seperti dibawa ke dalam ruang-ruang sidang mendengarkan pidato Yamin, Supomo, Sukarno, dan tokoh-tokoh lain; dan perdebatan-perdebatan yang terjadi di antara mereka. Sesuatu yang tidak kalah pentingnya, sebagai pembaca kita dapat merasakan perdebatan itu berlangsung dengan komitmen bersama untuk mendirikan sebuah negara bernama Indonesia.

Pada tahun 2011 juga A.B. Kusuma menerbitkan kumpulan tulisannya yang semula terserak di berbagai media di samping komentar-komentarnya tentang berbagai isu seputar hukum dan konstitusi. Buku kumpulan tulisan itu diberi judul *Sistem Pemerintahan “Pendiri Negara” versus Sistem Presidensial “Orde Reformasi”* (Kusuma, 2011). Dalam buku ini A.B. Kusuma menuliskan komentar dan kritiknya tentang berbagai isu yang berkaitan dengan tata-negara dan tata-kelola negara terutama semenjak terjadinya pergantian kekuasaan dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Membaca tulisan-tulisan itu kita menemukan sebuah konsistensi sikapnya dalam memandang berbagai perubahan yang terjadi dengan selalu mengacu pada apa yang dia sebut sebagai sistem pemerintahan “Pendiri Negara”. Penguasaannya tentang pasal-pasal dalam konstitusi beserta konteks yang menyertainya menjadi referensi untuk mengupas dan menilai apakah perubahan yang terjadi telah melenceng bahkan keliru, jika dasar penilaiannya adalah apa yang menurut pendapatnya merupakan sesuatu yang telah digariskan oleh para pendiri negara ini.

Mungkin hampir sepuluh tahun saya tidak bertemu beliau. Ketika hari-hari ini sebagian dari kita bertengkar tentang Pancasila, tiba-tiba saya ingat tentang beliau. Pertengkar dan perdebatan dalam zaman revolusi teknologi informasi ini makin terbuka di ruang-ruang publik, tidak seperti dulu di ruang-ruang sidang yang tertutup. Yang merisaukan adalah pertengkar dan perdebatan yang kita saksikan hari-hari ini, rasanya jauh dari mencerahkan. Beberapa kali menyaksikan *talk show* di stasiun-stasiun TV menimbulkan kerisauan itu. Ibarat busa atau buih yang segera menguap di udara; begitupun yang dihasilkan dari silat lidah, celoteh, dan semburan kata-kata para demagog dengan wajah-karikatural mereka dalam tontonan yang riuh rendah mirip kabaret. Mungkin ada semacam katarsis di sana karena seolah-olah hal-

hal yang sensitif dan tabu telah diekspresikan secara terbuka dan katanya ditonton jutaan rakyat. Seolah-olah ada kebebasan dan demokrasi karena pendapat sering dikemukakan dengan panjang lebar, sebagian seperti mengutip sejarah, tidak jarang mengutip ayat-ayat dan kata-kata orang pandai; pembicaranya dipilih seperti wakil-wakil dari mereka yang sedang bertikai dalam satu panggung terbuka.

Menyaksikan *talk show* seperti itu, dalam keriuhan tontonan yang mungkin memang dibuat untuk menaikkan *rating* acara, jika ada yang tak hadir di sana mungkin itu adalah “reason”. Karena “reason” tidak bisa ditampilkan dalam bentuk busa dan buih, dia harus mengendap dalam bentuk penalaran yang jernih dalam bentuk teks atau tulisan. Kita punya banyak *talk show*, tetapi tidak punya, atau kalau pun ada, sangat sedikit ruang diskusi yang menghadirkan teks dan tulisan sebagai medium dari “reason”. Betapa sulitnya menerbitkan majalah “kebudayaan” di negeri ini. Barangkali persoalannya bukan pada persoalan dana, tetapi lebih pada soal taraf apresiasi kita terhadap intelektualitas pada “reason”. Kita lebih suka *talk show* daripada menuliskan pendapat dan pemikiran dan memperdebatkannya dalam ekspresi tekstual dan tulisan. Mungkin kita terlanjur tersergap dengan keasyikan menulis keluh kesah kita di sosial media dan merasa telah mengekspresikan sebuah pendapat secara publik dan itu sudah memuaskan ekspresi demokrasi kita.

Saya sudah lama tidak bertemu dengan A.B. Kusuma. Sudah pasti beliau makin sepuh, tetapi saya mendoakan beliau tetap sehat. Jerih payahnya mendokumentasikan arsip-arsip sejarah konstitusi negara yang sesungguhnya tidak ternilai harganya itu, tidak terbayangkan akan ada yang bisa menggantikannya. Beliau telah mendedikasikan hampir seluruh hidupnya untuk menyatukan berbagai dokumen yang terserak dalam sebuah buku yang wajib dibaca jika kita ingin membicarakan hal-hal yang paling penting dari sebuah negara, landasan historis, dan filosofisnya.



Buku ini tidak diperjualbelikan.



Adnan Buyung Nasution

Adnan Buyung Nasution, oleh kawan-kawannya yang lebih muda biasa dipanggil Bang Buyung. Beliau memang seorang abang, dari segi usia lebih tua dari Goenawan Mohamad dan Arief Budiman. Pria kelahiran Jakarta, 20 Juli 1934 ini dinilai telah berhasil membangun, tidak



Sumber: Dian (2015)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

saja sebuah jaringan aktivis pembela hak-hak asasi manusia, namun juga sebuah komunitas epistemik yang terlibat dalam berbagai agenda perubahan sosial politik di negeri ini. Bang Buyung yang wafat pada usia 81 pada 23 September 2015, merupakan Ekspone 66 yang sempat menjadi anggota DPR/MPR Sementara (66–68) bersama beberapa tokoh mahasiswa, seperti Rahman Tolleng, Marie Muhamad, dan Nono Anwar Makarim.

Dalam peralihan kekuasaan yang berlangsung cepat pasca-1965, sebagai ketua Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI) bersama tokoh-tokoh pro Orde Baru yang berbasis di Universitas Indonesia (UI), seperti Widjojo Nitisastro dan gengnya, menyelenggarakan “Simposium Kebangkitan 66: Menjelajah *Tracee* Baru”, yang diadakan di kampus Universitas Indonesia. Sebuah simposium yang ingin menegaskan posisi ideologis dari apa yang kemudian dikenal sebagai rezim Orde Baru (Anonim, 1966).

Dalam perkembangan Orde Baru yang menjadi otoriter dan represif, pilihannya untuk mengambil posisi sebagai pejuang hak-hak asasi manusia membawa dirinya pada situasi dilematis. Politik Indonesia yang penuh “*ruptures*” merupakan tantangan yang tidak mudah bagi seorang yang memilih jalan untuk membela mereka yang tertindas dan terampas hak-hak politiknya. Langkahnya untuk mendirikan lembaga bantuan hukum di Jakarta, 28 Oktober 1970 dengan dukungan Gubernur Ali Sadikin dan beberapa tokoh lainnya, seperti Mochtar Lubis; menjadi tonggak sejarah yang jejaknya bisa kita rasakan hingga hari ini.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di bawah kepemimpinannya menjadi lokomotif penarik gerbong demokrasi dan telah melahirkan puluhan dan mungkin ratusan intelektual publik dan para aktivis, seperti Abdul Hakim Garuda Nusantara, Todung Mulya Lubis, Nursyahbani Katjasungkana, Bambang Widjojanto, Teten Masduki, Munir, sampai yang sedang aktif saat ini, seperti Asfinawati dan Muhamad Isnur.

Hukum merupakan sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri, namun kelindannya dengan ilmu politik begitu erat. Dalam dunia nyata

tidak mungkin memisahkan hukum dengan politik. Bersama dengan Todung Mulya Lubis, Abdul Hakim Garuda Nusantara, Mulyana W. Kusumah, dan Fauzi Abdullah, Bang Buyung membangun perspektif baru di dunia advokasi yang kemudian dikenal sebagai “bantuan hukum struktural”.

Dalam perumusan teoretis dari pendekatan baru ini sumbangan pemikiran dari almarhum Fauzi Abdullah, seorang yang sama sekali tidak punya latar belakang hukum, namun terlibat dalam persoalan-persoalan konkret kaum miskin khususnya buruh, sangat besar. Perspektif “bantuan hukum struktural” menganggap penting konteks sosial-politik dari kaum miskin yang terampas hak-hak asasinya karena tanpa mengubah kemiskinan dan ketimpangan sosial-ekonomi yang bersifat struktural ini bantuan hukum konvensional yang cenderung mendekati persoalan secara individual, tidak akan banyak berarti.

Adnan Buyung Nasution adalah seorang aktivis yang tidak berhenti belajar. Di tengah-tengah kesibukannya memperjuangkan nasib sebagian besar warga bangsanya yang terpinggirkan dia sempat menyelesaikan tesis doktornya, yang mengambil tema penting dalam sejarah politik negerinya. Disertasi Nasution (1995) berjudul “The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: A Socio-legal Study of the Indonesian Konstituante 1956–1959” yang menganalisis risalah perdebatan di sidang-sidang konstituante, berhasil dipertahankannya di Universitas Utrecht Belanda.

Daniel Lev, Indonesianis dari Amerika, seorang “*cornellist*” seperti Ben Anderson dan Ruth McVey; yang menggeluti persoalan hukum di Indonesia mempunyai pengaruh besar terhadap Adnan Buyung Nasution, tidak hanya dari segi praksis, tetapi dalam upayanya membangun sebuah komunitas epistemik ketika pendidikan hukum di negeri ini cenderung menjadi sempit, kering, dan menjauhi kepentingan orang-orang kecil.

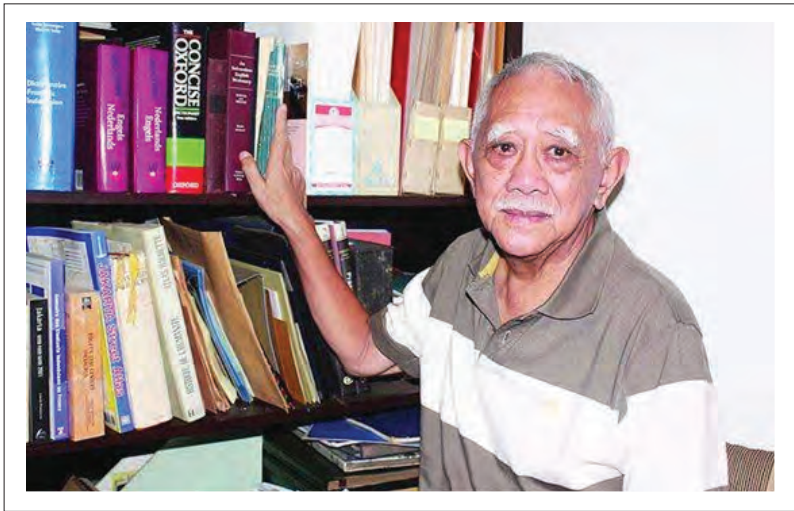


Buku ini tidak diperjualbelikan.



Adri B. Lopian

Kami biasa memanggilnya Pak Lopian, tetapi kadang-kadang juga Pak Adri. Nama lengkap beliau Adrian Bernard Lopian. Beliau telah lama wafat, hampir 10 tahun yang lalu tetapi sosoknya tidak mudah saya



Sumber: Mukthi (2011)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

lupakan. Terasa ada afeksi jika berada di dekatnya, semacam kedamaian seperti gabungan kebabakan dan kolegialitas, *an affectionate harmless person*. Meskipun saya tidak jadi ikut tim penelitiannya tentang maritim di Maluku seperti setengah dijanjikan Pak Edi Masinambow saat saya melamar masuk Leknas, saya merasa dekat dengan beliau. Saya kira banyak yang merasa begitu, tidak hanya saya. Kolegialitas yang ada di Leknas dan kedeputan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK) LIPI, tahun 80-an dan 90-an membuat kami sering bertemu, mungkin karena jumlah peneliti saat itu belum banyak dan kantor belum menjadi *overly bureaucratic*. Setahu saya, penelitian Leknas sejak awal tahun 80-an itu banyak diarahkan ke Indonesia bagian timur. Pak Adri dan Pak Edi yang keduanya berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara memiliki peran sangat besar dalam mengarahkan penelitian itu. Di samping mereka, peran dua ahli antropologi Belanda yang tinggal di Jakarta, Jacob Vredenburg dan C.A. van der Leeden juga menjadi penting. Mungkin saat itu bisa dikatakan sebagai kembalinya peneliti-peneliti Belanda ke Indonesia setelah generasi ahli-ahli sebelumnya terpaksa harus pulang bersamaan dengan meningkatnya ketegangan hubungan antara Indonesia dan Belanda menyangkut soal Irian Barat (sekarang Papua).

Jika saya ingat-ingat, Pak Adri, juga Pak Edi adalah orang-orang yang sering mengingatkan kami yang lebih muda tentang pentingnya teori dan metodologi penelitian. Bagi mereka, sebuah hasil penelitian hanya akan menjadi bermakna jika data yang menjadi dasar untuk menarik kesimpulan dikumpulkan dengan metode yang benar. Sementara itu, metode pengumpulan data yang benar hanya mungkin dibuat jika kerangka teori yang dipakai juga benar. Bagi mereka, kebenaran ilmiah adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Disertasi Pak Adri (2009) *Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX*, membuktikan keseriusan dalam melakukan sebuah penelitian sama penting dalam melakukan penulisan sejarah maritim. Nama Beliau kembali menggaung ketika orang ramai memperbincangkan kebesaran masa lalu bahwa konon Indonesia pernah menjadi negara maritim. Disertasi doktor yang diselesaikan pada usia yang tidak lagi muda itu membawa anggapan bahwa Indonesia merupakan

negara maritim. Tanpa penulisan sejarah tentang apa kebesaran yang sebenarnya terjadi pada masa lalu yang banyak diomongkan, itu tidak lebih dari sebuah mitos atau eskapisme, yaitu upaya melarikan diri dari kenyataan pahit yang dialami dari kegagalan bersaing dengan bangsa lain di masa kini.

Perfeksionisme dan keteguhan Pak Lopian terhadap kecermatan sebuah karya ilmiah ditunjukkan dengan kekecewaan atas penerbitan disertasinya oleh sebuah penerbit di Yogyakarta karena semestinya ada beberapa bagian yang perlu diperbarui sesuai perkembangan historiografi. Disertasi itu kemudian diterbitkan lagi dengan tambahan sebuah *post-script* yang dibuatnya. Komunitas Bambu yang menerbitkan lagi disertasi itu dimotori J.J. Rizal, salah satu muridnya di jurusan sejarah UI. J.J. Rizal juga yang membuat dokumentasi film tentang Pak Lopian, antara lain menemani beliau untuk mencari bekas rumahnya saat dia dilahirkan di sebuah kota di pantai Utara Jawa Tengah, Tegal. Saya lupa menanyakan mengapa dia begitu tertarik untuk meneliti soal bajak laut dan sejarah kelautan menjadi *passion*-nya. Anthony Reid, sejarawan dari Australia yang mengenal dengan baik Pak Lopian, dalam sebuah tulisan menyebutkan hampir seluruh perpustakaan di dunia yang menyimpan arsip tentang sejarah maritim di Nusantara telah dikunjungi oleh Pak Lopian.

Setelah pulang dari menyelesaikan program master saya di ANU pada tahun 1984–1986, saya terlibat penelitian dampak sosial pembangunan di Indonesia Timur. Kami memilih dua kabupaten di kawasan timur, yaitu Minahasa dan Lombok Barat. Saya memilih isu sentralisasi dan pendekatan *top-down* dalam pembangunan. Di lihat dari perspektif hari ini, kedua isu itu telah jauh berubah meskipun akibat bagi masyarakat mungkin tidak banyak berubah. Sebuah temuan yang menurut saya penting dari penelitian itu adalah teralienasinya masyarakat dalam proses pembangunan. Jopie Wangania, antropolog dari Fakultas Sastra UI yang berasal dari Minahasa mengkritik keras presentasi saya di LIPI. Sebagai pembahas, Jopie tanpa ampun telah membantai saya. Mungkin karena kasihan, Pak Mochtar Buchori Deputi IPSK saat itu, ikut bicara dari *floor*. Pak Buchori, seorang yang selalu mengartikulasikan pendapatnya dengan elegan, menunjukkan sisi lain dari temuan saya

yang menurut beliau penting. Tidak lama setelah seminar di LIPI yang sempat mencuitkan nyali saya itu, saya ikut dalam rombongan besar dari Jakarta untuk mengikuti seminar hasil-hasil penelitian Indonesia Timur di Manado. Dalam rombongan besar itu ada Pak Edi, Pak Lapi-an, dan Pak Mochtar Buchori serta banyak lagi yang lain termasuk beberapa dari luar negeri, terutama Belanda.

Lucunya, jika di Jakarta dibantai, di Manado temuan saya dijadikan *headline* oleh *Kompas* yang mengirimkan wartawan seniornya untuk meliput. Di halaman depan *Kompas*, 24 Juli 1985 yang kami baca sambil sarapan berbunyi “Kesenjangan Birokrasi dan Masyarakat”. Nam-paknya, Mas Sularto telah menjadikan presentasi saya sebagai berita utama. Di depan Pak Sofian Effendi dari UGM dan lainnya yang sedang sarapan bersama, Pak Woworuntu yang merupakan Rektor Uni-versitas Sam Ratulangi (Unsrat) mengatakan “Untung Worang baru diganti Mantik, kalau enggak kita pasti kena tegur”. Worang memang gubernur Sulawesi Utara yang terkenal bertangan besi. Temuan saya dari penelitian di Minahasa dan Lombok yang mengkritik birokrasi, bahkan muncul di halaman muka *Kompas* itu pasti akan membuat be-liau naik pitam.

Meskipun Irian Barat pada akhirnya berhasil direbut dari tangan Belanda (1969), proses integrasi setengah abad yang lalu terbukti menyisakan banyak persoalan sosial politik, bahkan hingga hari ini. Sementara itu, pencaplokkan Timor Timur tahun 1974 menambah persoalan baru di wilayah Indonesia bagian timur. Sebagai ahli seja-rah yang memahami dengan baik antara Belanda dan Portugis, Pak Lapi-an menjadi peneliti yang sangat diperlukan untuk mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah berdasarkan ilmu beliau. Tanpa ba-nyak publikasi, tidak sedikit sumbangan Pak Lapi-an dalam membantu pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di kawasan timur itu.

Posisi Beliau sebagai sejarawan yang bekerja di lembaga ilmu pengetahuan milik negara dan keyakinannya bahwa kebenaran ilmi-ah sesungguhnya tidak mengenal batas negara pastilah menimbulkan konflik dalam batinnya. Peran yang tidak mudah itu –mau tidak mau, harus dihadapi dengan kepala dingin, antara lain ketika dia harus mem-

bela negaranya dalam sengketa wilayah dengan Malaysia menyangkut keberadaan pulau Sipadan dan Ligitan di perbatasan Kalimantan Timur dan Sabah. Beliau pun harus berhadapan dengan koleganya, ahli sejarah dari Belanda. Selain perselisihan tentang hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 di Irian Barat, juga dalam soal Timor Timur yang Beliau ketahui dengan pasti bahwa klaim Indonesia secara historis tidak dapat dibenarkan karena wilayah itu adalah koloni Portugis.

Dalam kasus Papua, kepiawaiannya untuk menempatkan diri sebagai ahli sejarah dalam perselisihan tentang Pepera, dia tampilkan antara lain dalam resensi yang ditulis secara berimbang terhadap buku tebal karya koleganya sejarawan Belanda, Peter Drooglover yang ditugasi oleh parlemen Belanda untuk meneliti kasus Pepera 1969, benarkah telah terjadi pemaksaan dalam proses penentuan pendapat rakyat itu? Peter Drooglover yang tidak dapat izin dari pemerintah Indonesia untuk melakukan penelitian di Indonesia itu menyadari bahwa bukunya *Act of Free Choice* terdapat kekurangan, tetapi apa boleh buat. Pak Adri Lopian yang sejak awal tahu tentang penelitian itu lagi-lagi berada dalam posisi yang dilematis, keharusan membela negara atau mengatakan sebuah kebenaran. Mungkin generasi yang baru perlu berkaca dari *legacy* yang telah diteladankan oleh Pak Lopian. Bagaimana tidak mengkhianati negara, namun tetap menjaga integritasnya sebagai ilmuwan.

Mengenang Pak Lopian, setidaknya bagi saya, berarti mengingat sebuah generasi ilmuwan sosial Indonesia yang berdiri setara dengan peneliti asing. Kolaborasi penelitian dengan pihak luar didasari oleh *salings memercayai* bukan karena memerlukan dana penelitian dari mereka. Pada beberapa kesempatan, saya terlibat dalam kegiatan yang bersifat internasional dengan para senior saya itu, peran Bu Moertiningsih dan Pak Soehartono yang mengelola bagian hubungan internasional LIPI menjadi vital serta Pak Lopian akrab dengan mereka. Penunjukan Pak Lopian sebagai ketua tim ilmiah dari program UNESCO, napak tilas perjalanan Marco Polo dari Osaka ke Venesia (1990–1991) yang dikenal sebagai Jalan Sutra (Silk Road) hanyalah satu contoh dari pengakuan internasional itu. Penting dicatat juga, dalam kegiatan ini Pak

Lapian mengikutsertakan dua peneliti LIPI, Dedi Adhuri dan Fadjar Thufail sebagai cara untuk mentransmisi etos kerja dalam melakukan penelitian maritim kepada kolega peneliti yang lebih muda.

Seperti halnya Pak Edi, Pak Lapian tidak mungkin diingat tanpa menyinggung Minahasa. Minahasa adalah salah satu tempat yang saya sukai. Saya merasa memiliki banyak teman di Minahasa, salah satu teman yang selalu menemani jika ke Minahasa adalah Alex Ulaen, dosen Unsrat. Meskipun ia lahir di Tegal seperti saya, Pak Lapian pastilah tidak merasa menjadi orang Tegal, tetapi Minahasa. Di Tomohon, sebuah kota yang saat itu tidak terlalu ramai dan berhawa sejuk dengan orang-orangnya yang ramah, Pak Lapian memiliki rumah panggung dari kayu bekas peninggalan bapaknya. Dari beranda rumah, gunung Lokon yang selalu berasap tampak menjulang dengan gagahnya. Biasanya, setelah dari rumah Pak Lapian kami mengunjungi rumah Pak Woworuntu yang tidak jauh letaknya dari rumah Pak Lapian. Kuliner dan jajanan lokal Minahasa selalu menjadi bagian penting setiap kali saya ke sana. Pak Lapian tidak lupa membawa kami ke toko roti langganannya dan mengajak kami ke rumahnya yang lain di pinggir pantai di Amurang yang menghadap ke lautan Pasifik. Di setiap rumahnya selalu ada perpustakaan tempat menyimpan buku-bukunya. Mungkin itu buku-buku yang dikoleksinya dari berbagai kota di dunia ketika dia meneliti sejarah maritim yang menjadi minatnya. Buku-buku itu saya dengar telah disumbangkan ke jurusan sejarah Unsrat. Semoga dari sana lahir sejarawan-sejarawan penerus Pak Adri Lapian.



Agus Purwadianto

Demam Covid-19 yang akhir-akhir ini melanda dunia dan sedang menghantui kita, mengingatkan saya kepada Agus Purwadianto, teman lama yang pernah berusaha merintis program saintifikasi jamu. Sab-



Sumber: Pemerintah Jawa Barat (2014)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

tu kemarin, Sampurno, mantan direktur dan kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam artikelnya *Korona dan Industri Farmasi, Kompas*, 28/3/2020 mengungkapkan potensi kekurangan bahan baku obat karena dua negara pemasok utamanya, Cina dan India, mungkin harus memenuhi kebutuhan negara sendiri yang juga terancam akibat pandemi Covid-19. Dalam artikel itu, Sampurno mengulang seruan lama yang tidak pernah serius sebagai bangsa kita tanggap bahwa semestinya negeri ini memanfaatkan bahan baku obat alami yang melimpah karena taktertandinginya keanekaragaman hayati yang kita miliki.

Jauh sebelumnya, apa yang dikatakan Sampurno pernah diusulkan oleh dokter Seno Sastroamidjojo (1893–1974), lulusan STOVIA 1915 dan mendapatkan gelar doktor 1930 dari Universitas Amsterdam; saat krisis obat terjadi akibat pendudukan Jepang dan perang kemerdekaan. Pada tahun 1948 pemikiran dan idenya dituangkan dalam buku berjudul “Obat Asli Indonesia”. Lima puluh tahun setelah itu, menjelang krisis ekonomi tahun 1997, buku itu kembali diterbitkan untuk yang ke-5 kali (Sastroamidjojo, 1997). Obat dengan bahan alam sesungguhnya telah menjadi bagian dari peradaban manusia dan Indonesia dengan keanekaragaman hayati yang ada adalah surga untuk itu. Akan tetapi, kenapa kita selalu lalai dengan itu? Pramoedya Ananta Toer (1980) dalam buku Bumi Manusia (*The Earth of Mankind*) yang tokoh utamanya Minke, seorang mahasiswa kedokteran (STOVIA); antara lain menulis: “*A doctor doesn't simply cure the body of disease; but he also awakens his people's spirit, which is intoxicated by ignorance*”.

Agus Purwadianto juga merupakan seorang dokter yang semasa mahasiswa aktif mengelola koran kampus *Media Aesculapius* yang beredar di kalangan mahasiswa kedokteran. Setelah lulus kedokteran, ia meraih dua gelar S2: bidang hukum dan kriminologi, setelah itu studi filsafat untuk S3. Ia memperoleh gelar profesor untuk bidang kedokteran forensik setelah melewati proses yang tidak mudah karena riwayat pendidikan yang bagi umumnya dosen FKUI, tidak normal, tidak linier, dan *untypically medical professor*.

Dari latar belakang pendidikannya sudah terlihat perhatian yang sangat besar pada persoalan sosio-legal dari kedokteran. Gelar aka-

demik yang berderet terbukti bukan cuma pajangan tetapi kredensi dan piranti yang ia perlukan untuk merambah wilayah-wilayah kerja yang memang harus dia lakukan secara profesional. Ketika ilmu kedokteran telah menjadi makin *njelimet* (Indonesia: rumit) dan super-super spesialis, seorang dokter seperti tidak lagi berhubungan dengan *human being*, tetapi seperti hanya memburu bakteri dan virus. Oleh karena itu, dengan latar belakang ilmu dan pengalaman yang dimiliki terkait persoalan etika khususnya bio-etika, telah menjadi keprihatinan utamanya.

Agus Purwadianto tidak hanya bergerak pada tataran teori, tetapi dia juga sempat berkarier menjadi Kepala Bidang Hukum Departemen Kesehatan dan pada saat itulah dia merintis sebuah proyek yang kemudian dikenal sebagai saintifikasi jamu. Saintifikasi jamu adalah sebuah proyek rintisan agar jamu berkedudukan setara dengan obat-obatan kimiawi. Sesungguhnya, istilah saintifikasi agak kurang tepat untuk dikenakan pada jamu karena mengandaikan adanya uji laboratorium dan klinis, tetapi tampaknya itulah persyaratan yang dituntut oleh dunia kedokteran Indonesia *mainstream*.

Sebagai seorang dokter, Agus Purwadianto mengetahui bahwa sebagian besar masyarakat di Indonesia masih menggunakan jamu dalam berbagai bentuknya, untuk mengobati penyakit atau untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Bukan rahasia lagi, Cina dan India adalah dua negara yang memiliki tradisi pengobatan tradisional sangat maju sehingga memiliki kedudukan setara dengan pengobatan modern yang berasal dari barat. Niat Agus Purwadianto untuk merintis program saintifikasi jamu tidak saja terinspirasi oleh apa yang berhasil dilakukan oleh Cina dan India, namun juga oleh keprihatinannya melihat implikasi dari dominasi paradigma ilmu kedokteran barat serta telah berkelindan dengan kepentingan industri farmasi dan pabrik obat. Bahkan, tanpa disadari menghegemoni diskursus dan menengkeram praktik kedokteran di Indonesia.

Sebagai dokter yang mendalami ilmu hukum, kriminologi dan filsafat, Agus Purwadianto menyadari untuk membangun platform perlawanan dari dominasi dan hegemoni ilmu kedokteran barat berbagai inisiatif harus dia lakukan dalam berbagai *front*, antara lain dengan

mendorong pemerintah membuat kerangka hukum (*legal framework*). Sementara itu, perlu juga menggalang dukungan dunia akademis untuk menyusun paradigma ilmu kedokteran yang didasari oleh filsafat manusia yang lebih holistik selain membangun organisasi untuk bersama-sama merealisasikan program saintifikasi jamu. Pada 2011, Komisi Nasional Saintifikasi Jamu menghasilkan sebuah dokumen penting “*Body of Knowledge: Sistem Pengobatan Tradisional Indonesia*” (Komisi Nasional Saintifikasi Jamu, 2015).

Kalangan kedokteran dan farmasi di Indonesia sesungguhnya telah melakukan berbagai program sejenis, seperti yang dirintis oleh dokter Arjijanto Jonosewoejo dan Prof. Mangestuti, ahli farmasi di Universitas Airlangga yang merupakan kelanjutan dari NIAS, sekolah dokter Jawa yang kedua setelah STOVIA di Batavia. Di Tawangmangu Surakarta, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional (B2P2TOOT) milik Kementerian Kesehatan (Kemendes) merupakan laboratorium dan klinik yang telah lama berdiri serta memiliki jumlah pasien yang banyak. Dedikasi dan komitmen dari kepala balai Indah Yuning Prapti sangat penting dalam membesarkan laboratorium dan klinik ini.

Andrew Goss (2011), dalam buku yang semula merupakan disertasi doktornya (2004) di Universitas Michigan, *The Floracrats: State-Sponsored Science and the Failure of the Enlightenment in Indonesia* menunjukkan bahwa penemuan-penemuan yang kemudian dikembangkan di Eropa adalah hasil riset yang dilakukan pada masa kolonial Belanda. Riset tersebut juga sempat dilakukan dalam waktu singkat di bawah pimpinan Raffles yang membangun Kebun Raya dan Istana Bogor, yang mana sekarang Presiden Jokowi sering melakukan rapat kabinet di sana. Beberapa tokoh penting, seperti Alfred Wallace –suratmenyuratnya ikut memengaruhi Charles Darwin dalam mengembangkan teori evolusinya, Rumphius yang mengoleksi berbagai tanaman tropis, Junghun yang menemukan pil kina untuk mengobati malaria, Eijkman yang berhasil memberantas penyakit beri-beri sehingga mendapat hadiah Nobel. Ada beberapa contoh betapa dari tempat ini pernah ada sumbangan penting bagi dunia kedokteran. Andrew Goss yang melacak perkembangan riset botani sejak zaman kolonial mem-

perlihatkan penurunan kualitas riset pasca kemerdekaan. Riset setelah kemerdekaan telah terjebak dalam birokrasi dan oleh sebab itu bukunya berjudul “Floracrat”.

Agus Purwadianto, mungkin saja belum membaca Floracrat, tetapi inisiatifnya untuk merintis proyek saintifikasi jamu bisa dilihat sebagai gerakan untuk mencari secara serius alternatif di dunia kedokteran yang terlalu lama terhegemoni oleh paradigma ilmu kedokteran yang makin menjauhi alam. Ilmu kedokteran makin mapan, tetapi jangan-jangan telah kehilangan *critical thinking*. Ketika berpikir kritis menjadi dasar dari kebebasan akademik, saat ini ditelikung oleh menguatnya kontrol negara, dihambat oleh mengerasnya tabu-tabu norma, dan meluasnya komodifikasi oleh korporasi; jangan heran jika universitas-universitas kehilangan universalitasnya dan kampus-kampus kehilangan kemerdekaannya. Menjadi pertanyaan bersama, mampukah kita keluar dari situasi krisis ini ataukah memang setelah kemerdekaan secara politik dicapai, dunia ilmu pengetahuan kita telah gagal melanjutkan elan pencerahan yang pernah ada di tempat ini, seperti disimpulkan Andrew Goss?



Buku ini tidak diperjualbelikan.



Anis Hidayah

Anis Hidayah, Direktur Migrant Care adalah seorang aktivis yang kebetulan perempuan dan merintis dari bawah. Mungkin ini sudah menjadi tradisi, kampus adalah tempat bersemainya aktivisme begi-



Sumber: Hidayah (2016)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

tu juga yang dialami Anis saat kuliah di FH Universitas Jember yang mendirikan Solidaritas Perempuan Jawa Timur. Menjelang Soeharto turun jabatan pada Mei 1998, Solidaritas Perempuan (SP) di Jakarta yang dipimpin oleh Tatik Krisnawaty merupakan tempat aktivis-aktivis berkumpul. Mereka peduli dengan nasib perempuan yang terdiskriminasi hanya karena lahir sebagai perempuan. Para perempuan ini, karena berbagai penyebab, tidak sedikit yang kemudian bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) di luar negeri, terutama Malaysia dan Saudi Arabia, yaitu dua negara yang punya catatan kelam jika berbicara tentang PRT di luar negeri.

Sebuah fenomena Indonesia pasca 1965, mungkin mulai muncul dalam berita-berita di surat kabar awal tahun 1980-an, adalah perlakuan buruk yang dialami oleh perempuan-perempuan yang bekerja sebagai PRT di Arab Saudi. Berita-berita buruk tentang berbagai perlakuan kejam para majikan terhadap para pembantunya itu, tidak membuat menteri tenaga kerja waktu itu, Sudomo menghentikan kesewenang-wenangan yang dialami warga negara Indonesia di luar negeri tetapi malah melarang surat kabar menulis tentang hal itu.

Perlakuan buruk yang dialami pembantu rumah tangga asal Indonesia di Arab Saudi itu yang diberitakan koran-koran pada pertengahan tahun 1980-an itu adalah *panggilan* bagi Indonesia tentang sebuah harga diri yang diinjak-injak di luar negeri. Jika kita mencoba mengingat peristiwa yang terjadi hampir 40 tahun yang lalu itu, kita perlu bertanya apakah kita kemudian benar-benar bangun dan berhasil mempertahankan harga diri kita yang terinjak-injak itu? Kita tahu bahwa nasib perempuan-perempuan yang bekerja di luar negeri hingga hari ini masih rentan terhadap perlakuan buruk majikan mereka. Hal itu sudah tidak terhitung beberapa dari mereka yang pulang dalam peti mati tetapi juga telah lama kita tahu betapa rentan posisi mereka terhadap eksploitasi para agen yang membawa mereka ke luar negeri.

Solidaritas Perempuan, Kalyanamitra, LBH-APIK, dan KAPAL Perempuan adalah LSM-LSM yang tumbuh secara bersama-sama seiring dengan kesadaran yang berkembang bahwa diskriminasi terhadap perempuan memiliki konteks tersendiri yang berbeda dari diskriminasi yang dialami oleh warga negara pada umumnya. Para aktivis perem-

puan memandang ada masalah dalam kesetaraan antara laki-laki dan perempuan akibat dominasi laki-laki dalam perkembangan sosial, politik, dan kebudayaan. Ketidaksetaraan atau *gender inequality* merupakan salah satu sumber dari berbagai diskriminasi yang dialami oleh perempuan, baik di dalam keluarga maupun di ruang publik. Sementara itu, Komnas Perempuan sebagai lembaga resmi yang didirikan pemerintah pasti dimaksudkan untuk mengurus persoalan ini.

Buruh Migran adalah sebuah kosakata baru yang menunjukkan fenomena bekerja di luar negeri. Tidak hanya menjadi monopoli *expatriate* yang merupakan fenomena kelas atas dan kelas profesional, Buruh Migran adalah fenomena kelas bawah yang terseret ke luar negeri akibat ketimpangan kemakmuran antarnegara. Ketika negeri-negeri lain makin makmur, mereka membutuhkan buruh-buruh yang mau bekerja di sektor bawah, yaitu 3 D's (*dirty, dangerous, difficult*) yang sudah tidak dikehendaki oleh tenaga kerja dari negeri itu. Hal ini merupakan fenomena global, ketimpangan, dan ketidakadilan global yang bersifat struktural. Krisis migrasi di Eropa akibat mengalirnya pengungsi tidak mungkin terselesaikan tanpa penyelesaian masalah terhadap ketidakadilan dan ketimpangan global ini. Ketika Dino Pati Jalal, saat itu pejabat Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menggagas "Diaspora Indonesia" yang terbayangkan oleh dia hanyalah *Indonesian expatriate*. Mereka yang penuh talenta dianggap mampu menyumbangkan ilmu dan pengalaman bagi Indonesia. Buruh Migran Indonesia (BMI) "who cares?"

Mungkin hal ini juga menjadi tradisi aktivisme di Indonesia untuk dikenal dan lebih punya pengaruh di mana seorang aktivis harus berkiprah di ibu kota. Begitu pula yang dialami Anis Hidayah, pindah ke Jakarta dan bergabung dengan Wahyu Susilo yang telah terlebih dulu dikenal sebagai pembela BMI. Mereka adalah *orang-orang yang dibutuhkan namun tidak dikehendaki*. Meskipun sebagai pemberi devisa bagi negara, tetapi hak-hak mereka diabaikan oleh negara. Tidak penting juga untuk dijadikan bagian dari "Diaspora Indonesia" karena tidak memiliki talenta dan hanya kumpulan orang-orang dari kelas bawah, "who cares?"

Pada tahun 2004, Wahyu Susilo dan Anis Hidayah mendirikan Migrant Care. Seperti namanya, LSM ini memang dimaksudkan untuk membantu pekerja migran untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi sejak keberangkatan, kedatangan di tempat kerja hingga pulang nanti. Belum lama ini saya ke Kupang, NTT dan salah satu isu sosial yang hangat di sana adalah sering terdapat kiriman peti mati jenazah dari kelompok sosial mereka yang bekerja di luar negeri. Dalam perkembangannya, NTT merupakan daerah pengirim tenaga kerja ke luar negeri terbesar, selain dari Jawa Barat dan Jawa Timur. Berbagai kasus kekerasan terhadap pekerja migran perempuan sering dialami oleh mereka yang berasal dari NTT. Masih ingat wajah Nirmala Bonat?

Bisnis pengiriman buruh migran ke luar negeri telah menjadi industri yang tidak saja menghasilkan devisa terbesar kedua setelah pariwisata, menguntungkan para agen, calo, dan tekong yang menjadi perantara resmi atau tidak resmi. Namun para pelakunya, BMI, sebagian besar masih menjadi bagian dari proses eksploitasi, yaitu sebagai korban *human trafficking* dan tidak terlindungi hak-haknya. BNP2TKI yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi BMI justru menjadi rebutan yang berkuasa karena uang di sana berputar cukup banyak dan penting untuk keberlangsungan hidup partai politik rezim.

Dalam konteks politik-ekonomi yang penuh kepentingan terhadap BMI, Migrant Care berkembang menjadi sebuah organisasi non-negara yang mungkin saat ini paling efektif menjawab berbagai tantangan dan kebutuhan BMI untuk dipenuhi hak-haknya sebagai warga negara. Ketika musim pemilu, Anis Hidayah –yang kemudian menggantikan Wahyu Susilo sebagai direktur Migrant Care, sangat sibuk membantu proses pemilu di berbagai negara yang memiliki banyak BMI terutama Malaysia, di mana BMI yang tidak berdokumen cukup besar jumlahnya.

Melalui Migrant Care, Anis Hidayah dan Wahyu Susilo tidak hanya telah berjasa dalam membela dan meningkatkan harkat BMI yang sampai hari ini masih terabaikan hak-haknya. Akan tetapi, mereka juga telah berhasil mengangkat isu BMI dalam diskursus politik-ekonomi yang makin penting untuk diatasi. Dalam sebuah tulisan, Anis Hidayah mengupas dengan kritis praktik korupsi yang berlangsung hampir tak ter-

deteksi dalam program pengiriman TKI ke luar negeri. Makin banyak tulisan tentang BMI, baik oleh orang luar maupun oleh penulis dari dalam negeri, tak pelak lagi telah memperkaya khazanah studi migrasi –sebuah fenomena sosial yang akan makin penting dan krusial bagi Indonesia di masa mendatang.

Jargon dunia tanpa batas, *a borderless world*, mungkin berlaku bagi mereka yang punya talenta, yaitu yang telah di dudukkan dalam tempat terhormat sebagai “Diaspora Indonesia”. Namun demikian, BMI “who cares?”. Anis Hidayah, Wahyu Susilo, dan juga para aktivis masyarakat sipil lainnya, melalui jaringan LSM yang peduli dengan nasib BMI masih akan terus ditantang untuk mencari jalan keluar sehingga dapat memperbaiki nasib BMI. Di Kupang, ibu pendeta Emy Sahertian bersama jaringan aktivis di NTT merupakan salah satu aktor yang berada di garis depan melawan penindasan yang dialami oleh warga NTT di luar negeri. Akan tetapi, terdapat sebuah kenyataan yang pahit bahwa *the state is in fact also the party that is committed to the sin for the human trafficking practices*. Selamat berjuang Anis, Wahyu, Emy dkk. Kalau bukan Anda semua, *who cares?*



Buku ini tidak diperjualbelikan.



Arbi Sanit

Saya tidak banyak ingat tentang Bang Arbi Sanit, tetapi mendengar berita beliau *wafat*, saya tergerak untuk menuliskan ingatan saya tentang beliau yang sedikit itu. Rasanya, saya pernah sekali mewawancarai



Sumber: Wijayanto (2009)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

beliau di rumahnya, kompleks dosen UI di Ciputat untuk sebuah tulisan. Salah satu pertanyaan saya waktu itu, “kenapa tidak mengambil doktor?”. Seingat saya Bang Arbi menjawab sambil tertawa, “wah, susah cari pembimbingnya, mungkin harus orang setingkat Deliar Noer atau Alfian”. Buat Arbi Sanit mungkin gelar doktor memang tidak perlu, *toh* kiprah dan pikiran-pikirannya sudah memiliki kualitas tersendiri, bahkan telah melebihi koleganya di kampus yang banyak berstatus doktor maupun profesor.

Mengenang Arbi Sanit, bagi saya berarti mengenang seorang dosen jurusan politik UI yang pendapat dan pikirannya kritis dengan perspektif ilmu politik yang bagi saya sangat akademik. Perspektif ilmu politik yang sangat akademik, dalam tafsir saya adalah perspektif yang tidak *dileleti* oleh kepentingan untuk membela partai politik tertentu atau kelompok identitas tertentu. Kritiknya lugas, *speak truth to power*.

Dalam hal ini posisi Arbi Sanit di mata saya melebihi posisi Deliar Noer yang selain sebagai ilmuwan politik tangguh juga terus berupaya membangun partai politik Islam. Arbi Sanit, seperti halnya Nurcholish Madjid adalah tokoh-tokoh yang tumbuh dalam organisasi mahasiswa Islam. Namun, ketika menjadi seorang yang harus berbicara sebagai ilmuwan politik, saya menilai kualitas pikiran dan pendapatnya tidak bias. Bagi saya, Arbi Sabit adalah ilmuwan politik yang mampu berbicara melampaui identitas sosial yang ada pada dirinya.

Terus terang, saya makin sulit menemukan ilmuwan yang memiliki kualitas keilmuan seperti Arbi Sanit. Beliau tidak saja telah memperlihatkan kualitas akademik, namun barangkali yang lebih penting dari soal akademik ini adalah menyangkut integritas, kejujuran, dan keberanian untuk melakukan kritik terhadap kekuasaan *without hate or favor*. Perkembangan politik dalam sepuluh tahun terakhir ini memang menunjukkan tingkat polarisasi yang tinggi. Terlepas dari setuju atau tidak setuju dengan cara yang diambil untuk mengurangi polarisasi politik identitas ini, saya menganggap bahwa pilihan yang diambil oleh Presiden Jokowi memperlihatkan upaya untuk mengendalikan meningkatnya polarisasi ini. Presiden Jokowi telah mengambil langkah-langkah yang bagi sebagian pengamat terkesan kompromistis, seperti menomorduakan demokrasi dan hak-hak asasi manusia.

Mungkin karena kondisi kesehatan, saya telah lama tidak lagi mendengarkan suara Bang Arbi Sanit di ruang publik. Bagi saya, suara Bang Arbi Sanit adalah suara akal sehat yang sangat diperlukan untuk menjaga ruang publik yang makin dipenuhi oleh para demagog dan akademisi yang melecehkan integritas atas nama profesionalisme. Meninggalnya Bang Arbi Sanit menambah deretan panjang intelektual yang berani berbicara melampaui identitas sosial yang melekat pada dirinya. A.E. Priyono, Artidjo Alkotsar, dan Arbi Sanit adalah intelektual yang telah membuktikan bahwa menyuarakan kepentingan publik bisa dilakukan betapapun kuatnya identitas sebagai bagian dari kelompok sosial tertentu.

Menggadaikan integritas akademik untuk mendapatkan imbalan kedudukan dan materi telah menjadi norma yang makin umum terjadi. Atas nama profesionalisme dalam berbagai bidang keahlian, integritas akademik telah dengan mudah dilanggar. Ketika pragmatisme menjadi ideologi kerja pemerintah yang sedang berkuasa dan dunia akademik dikelola untuk mendukung pragmatisme ini, jangan heran jika universitas dan perguruan tinggi menjadi bagian dari ajang transaksi politik-ekonomi. Salah satu yang ditengarai menjadi pintu masuk politik transaksional yang saat ini melanda perguruan tinggi adalah 35 persen hak pilih yang ada ditangan menteri pendidikan dalam memilih rektor di universitas negeri. Hak veto ini bisa dengan mudah menganulir calon rektor yang memiliki reputasi baik dan mendongkrak perolehan suara rivalnya yang mana sesungguhnya bermasalah.

Mengenang Arbi Sanit yang baru saja wafat, bagi saya adalah mengenang seorang intelektual yang mampu mempertahankan integritas akademik ketika ruang publik dipenuhi para demagog dan akademisi oportunistis yang berlindung di balik profesionalisme untuk mendapatkan imbalan materi maupun kedudukan dari rezim yang berkuasa atau bermodal.



Buku ini tidak diperjualbelikan.



Arief Budiman

Goenawan Mohamad, teman sekelas Arief Budiman di Fakultas Psikologi UI dan konon sama-sama belajar filsafat eksistensialisme, mungkin dari Romo Drijarkara atau Fuad Hassan. Jika Goenawan



Sumber: Novaria (2020)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Mohamad kemudian *drop-out* dan menjadi wartawan, Arief Budiman selesai menjadi doktorandus (Drs.) setelah menulis skripsi tentang Chairil Anwar. Goenawan Mohamad, dalam sebuah kesempatan mengatakan bahwa dia dekat sekali dengan Arief Budiman. Keduanya ikut menandatangani Manifes Kebudayaan (Manikebu), yang kalau tidak salah sempat dilarang Soekarno.

Arief Budiman dan Goenawan Mohamad, juga Soe Hok Gie dan Nono Anwar Makarim adalah cendekiawan-cendekiawan yang mengalami ujung masa kekuasaan Soekarno dan kemudian tumbuh besar selama Orde Baru, kecuali Soe Hok Gie yang meninggal tahun 1969 di puncak Semeru. Hal menarik dari tokoh-tokoh ini adalah bulan madu yang amat singkat dengan Orde Baru karena mereka kemudian memilih berada di luar pagar dan menjadi pengkritik Orde Baru. Setelah Soe Hok Gie meninggal mungkin Arief Budiman yang paling vokal.

Arief Budiman bersama Goenawan Mohamad adalah orang-orang yang bergerak antara sastra dan politik. Keduanya sama-sama duduk sebagai redaksi majalah sastra Horizon, bersama almarhum H.B. Jassin dan Mochtar Lubis. Ketika Arief Budiman yang memimpin demo menentang pembangunan Taman Mini yang dianggap menghamburkan uang rakyat, ia ditangkap dan ditahan oleh aparat keamanan. Di rubrik editor majalah Horizon, Goenawan Mohamad menulis kalimat pendek "Arief Budiman ditahan". Saat Arief Budiman dengan beberapa temannya, antara lain, kalau tidak keliru, Yopi Lasut, almarhum Imam Waluyo, dan Asmara Nababan; mengkampanyekan Golput, menentang Pemilu 1971 yang dinilai hanya mobilisasi massa. Lalu, Goenawan Mohamad menulis kolom di Tempo, judulnya *Teater Arief Budiman*.

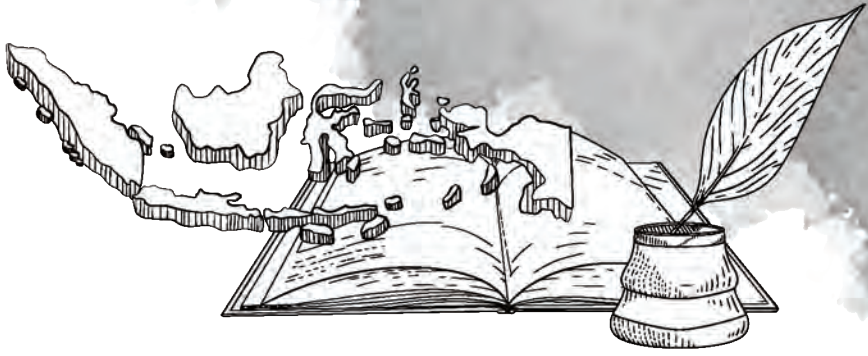
Arief Budiman kemudian melanjutkan kuliah di jurusan sosiologi Universitas Harvard, gosip yang berkembang, dia sengaja disekolahkan agar tidak membuat Soeharto pusing. Di Harvard dia menulis disertasi doktor tentang eksperimen sosialisme Presiden Allende di Cili yang digagalkan CIA. Ketika menulis disertasi, dia sempat diundang Clifford Geertz ke Universitas Princeton. Sepulang dari Amerika, Arief Budiman memutuskan menjadi dosen Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga dan dibangun rumah burung-burung Manyar oleh Romo Mangunwijaya yang dia tempati hingga sekarang.

Bersama Arief Budiman kemudian bergabung antara lain George Aditjondro dan Ariel Heryanto yang menjadikan UKSW sarang pengkritik pembangunan Orde Baru. Kedung Ombo merupakan salah satu ajang perlawanan terhadap Soeharto yang menenggelamkan puluhan desa untuk dibuat waduk. Di UKSW, Arief Budiman menjadi mentor generasi muda aktivis yang kemudian banyak menjadi tokoh publik. Stanley yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pers adalah salah satu hasil gembengan Arief Budiman di UKSW begitu juga Handoko yang mendirikan Omah Tani di Batang.

Arief Budiman kembali menjadi duri di mata Soeharto. Ketika Arief Budiman melancarkan protes terhadap keputusan pemilihan rektor UKSW yang seharusnya dimenangkan Liek Wilarjo, dia dipecat sebagai dosen, hampir pasti kaki tangan Soeharto ada di sana. Arief Budiman kemudian memilih hijrah ke Melbourne setelah beberapa saat menganggur meskipun dapat beberapa tawaran pekerjaan. Pada awalnya, ia menjadi direktur Herbeth Feith Institute yang baru berdiri dan kemudian menjadi dosen tetap di Universitas Melbourne hingga pensiun. Saat terakhir berjumpa di Percik, sebuah komunitas yang didirikan oleh Niko Kana, Samiana, dan Pradjarta, yaitu rekan-rekannya yang ikut dipecat dari UKSW; Arief Budiman bilang kalau sekarang dia suka menikmati kemalasan, setengah tahun di Australia setengah tahun di Indonesia.



Buku ini tidak diperjualbelikan.



Aris Ananta

Mungkin dialah ekonom-demograf yang paling banyak memublikasikan tulisan tentang isu-isu ekonomi-demografi kontemporer di Indonesia. Mengambil spesialisasi demografi-ekonomi sejak lulus dari



Sumber: IUSSP (2021)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia (FEUI), 1977 dan meraih gelar doktor di Duke University, 1983 Aris Ananta boleh dibilang penerus Prof. Nathanael Iskandar, ahli demografi paling menonjol. Prof. Nathanael bersama Prof. Widjojo Nitisastro mendirikan Lembaga Demografi UI tahun 1964. Prof. Widjojo Nitisastro adalah “lurah” tim ekonom-teknokrat dan arsitek pembangunan ekonomi Orde Baru. Demografi mungkin lebih tepat disebut sebagai sebuah teknik daripada disiplin ilmu dalam pengertian yang sempit. Demografi berurusan dengan *grafa* atau gambaran secara statistik dari Demos, penduduk yang menjadi warganegara sebuah negeri. Prof. Widjojo Nitisastro mendapatkan gelar doktor Universitas Berkeley dengan disertasi tentang proyeksi penduduk Jawa-luar Jawa dengan beberapa skenario migrasi penduduk, sebuah isu klasik yang sesungguhnya masih relevan sampai sekarang. Sebagai seorang ekonom-demograf, Widjojo adalah orang yang sangat memahami data demografi untuk membuat perencanaan pembangunan jangka panjang. Tanpa data yang akurat, perencanaan pembangunan adalah sebuah omong kosong.

Aris Ananta orang yang dekat dengan Prof. Widjojo, terutama setelah beliau secara resmi meninggalkan panggung kekuasaannya sebagai tzar pembangunan ekonomi Orde baru. Aris Ananta yang saat itu menjadi *senior reserach fellow* di Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) sebuah Think Thank dari pemerintah Singapura, mengambil inisiatif untuk mengumpulkan dan menerjemahkan karya tulis Prof. Widjojo ke dalam bahasa Inggris yang terserak, dalam berbagai bentuk terutama yang berbicara tentang pembangunan ekonomi. Meskipun tidak terhitung kritik terhadap Orde Baru, keterkaitan utama yang nampak adalah represi politik yang dilakukannya. Tidak bisa dibantah keberhasilan Prof. Widjojo dalam menurunkan jumlah warga negara yang miskin. Prestasi dari Prof. Widjojo terbukti dari “*tributes*” yang diberikan oleh tokoh-tokoh ekonomi dan pembangunan dunia. Mereka berasal dari 27 negara dalam sebuah buku yang awalnya dimaksudkan untuk memperingati ulang tahunnya yang ke-70, namun karena permintaannya, baru diterbitkan pada tahun 2007.

Demografi berkaitan dengan tiga aspek utama dari *Demos*; jumlah, persebaran secara spasial-geografis, dan pertumbuhannya. Oleh

karena itu, secara teknis ada tiga hal yang menjadi perhatian demografi, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk. Perubahan pada tiga hal yang disebut *demographic vital* ini akan berpengaruh terhadap tiga aspek tadi. Sementara itu, Indonesia merupakan sebuah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat terbesar di dunia, setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Posisi keempat ini diperoleh Indonesia setelah Uni Soviet *terpecah-belah* pada 1989, tepat setelah Tembok Berlin runtuh. Indonesia juga diramalkan akan mengalami disintegrasi sepuluh tahun setelah Uni Soviet runtuh, yaitu ketika Orde Baru runtuh pada tahun 1998 dan Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun terpaksa turun dari takhta.

Sebagai pengajar di FEUI, Aris Ananta telah mencapai puncak karier sebagai profesor sebelum menjadi *visiting lecturer* di NUS selama 2 tahun dan *senior research fellow* di ISEAS selama 14 tahun. Sebagai seorang ahli demografi-ekonomi yang berasal dari negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, Aris Ananta adalah seorang intelektual publik yang memiliki peran penting untuk mengedukasi tentang seluk-beluk demografi dan implikasi untuk masyarakat dan masa depan bangsa. Sebagai seorang ekonom-demograf, Aris Ananta adalah orang yang sangat paham tentang statistik karena demografi terkait erat dengan angka-angka. Hal ini merupakan sebuah dunia akademis yang di kalangan ahli ilmu-ilmu sosial dianggap tidak menarik dan kering. Akan tapi, jika mendengarkan presentasi Aris Ananta, hal yang kering itu bisa menarik karena kemampuannya menjelaskan soal angka-angka yang menjemukan dengan bahasa yang sederhana dan komunikatif, bahkan disertai contoh dalam kehidupan sehari-hari yang sering dialami. Dalam buku *Social Science and Power in Indonesia*, Aris membeberkan *the use and abuse of statistics* (Ananta, 2005) –sebuah isu yang penting ketika membicarakan kekuasaan dan politik di negeri ini dan tidak ada orang yang lebih tepat untuk berbicara tentang itu daripada Aris Ananta.

Membicarakan teknokrasi barangkali adalah hal penting. Sebuah kekuasaan yang dimiliki oleh para ilmuwan-teknokrat karena otoritas yang berdasarkan keahlian yang dimiliki dan kemudian diaplikasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan sebuah rekayasa sosial (*social en-*

gineering) yang bernama pembangunan nasional. Prof. Widjojo Nitisastro adalah seorang ekonom-teknokrat terbesar yang pernah dimiliki negeri ini dan dia sangat menyadari statistik demografi menjadi pilar penting untuk menunjang teknokrasinya. Masalahnya, teknokrasi tidak mungkin berjalan jika *Demos* menolak. Mungkin sekarang, terlihat perbedaan antara teknokrasi zaman Soeharto dan zaman Jokowi.

Di zaman Orde Baru, Widjojo lebih punya keleluasaan untuk menjalankan teknokrasinya karena Soeharto bisa memaksa *Demos* untuk menerimanya. Untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, Soeharto siap membantu Widjojo dengan memaksa penduduk menerima program Keluarga Berencana (KB). Untuk bisa meningkatkan produksi padi, Widjojo bisa menjalankan Bimas/Inmas dengan lancar karena petani bisa dipaksa menanam padi unggul yang bisa panen setahun tiga kali. Bukan rahasia lagi pada masa Orde Baru peran penting Babinsa dan Tentara untuk mengancam penduduk yang menolak KB atau petani yang *mbalelo* tidak mau menanam padi unggul. Sebagai ekonom Prof. Widjojo sangat paham pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai jika kelahiran bayi tidak ditekan lajunya. Kegagalan negara-negara di Afrika, negara-negara miskin lainnya, antara lain diyakini karena gagalnya program KB ini. Tentu pertumbuhan ekonomi yang tinggi di masa Orde Baru juga sangat ditunjang karena masih tingginya produksi minyak mentah saat itu. Sebuah “*windfall benefit*” yang tidak lagi dimiliki oleh rezim Jokowi saat ini.

Dalam acara peluncuran buku Prof. Widjojo di Hotel Dharmawangsa beberapa tahun yang lalu, Sri Mulyani yang saat itu sudah menjadi menteri keuangan, dalam sambutannya mengaku sebagai cucu-murid Prof. Widjojo Nitisastro. Sri Mulyani bisa dianggap pewaris utama Widjojo jika membicarakan tentang teknokrasi. Meskipun dari sudut kekuasaan yang dimiliki dalam mengarahkan pembangunan, Sri Mulyani memiliki jangkauan yang jauh lebih kecil daripada Widjojo yang saat berkuasa dapat memegang tiga *sokoguru* pembangunan ekonomi nasional, yaitu Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan Bappenas. Namun demikian, mengendalikan kebijakan keuangan yang menjadi

tugasnya ibarat mengendalikan denyut nadi yang menentukan hidup dan mati negeri ini.

Saat ini, tidak mungkin Sri Mulyani, yang dibantu oleh Suahasil Nasara seorang mantan direktur Lembaga Demografi UI sekaligus sebagai Wamen, meminta Presiden Jokowi menggunakan Babinsa dan tentara untuk memaksa *Demos* menerima kebijakan teknokrasi. Diperlukan alat legitimasi lain yang bisa diterima *Demos* dan diketahui pemerintahan ini ingin dalam waktu cepat menciptakan apa yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu Omnibus Law dan UU Sapu Jagat agar sekali dayung dua-tiga pulau terlampaui. Dengan UU Sapu Jagat ini, nantinya, *Demos* harus menerima berbagai kebijakan terobosan yang diharapkan bisa mempercepat pencapaian tujuan dari pembangunan. Adapun UU Sapu Jagat ini menjadi alat legitimasi yang dianggap sah karena telah melalui persetujuan wakil-wakil rakyat. Saat ini, Presiden Jokowi harus pandai bersiasat karena tidak seperti *jamanku biyen* tidak bisa lagi memakai cara-cara represif untuk bisa diterima oleh *Demos*.

Sebagai pemimpin yang sangat rasional, Presiden Jokowi jelas orang yang sangat menyadari pentingnya data akurat untuk melakukan perencanaan dan eksekusi setiap kebijakannya. Tidak mengherankan jika dia sangat berkepentingan untuk menyukseskan Sensus Penduduk 2020. Hampir pasti, Aris Ananta adalah intelektual publik yang dibutuhkan untuk menyiapkan desain Sensus Penduduk yang tepat. Aris Ananta juga akan menjadi interlocutor yang diperlukan oleh *Demos* ketika kekuasaan dan teknokrasi telah memproduksi dan menggunakan data statistik dari Sensus Penduduk tanpa mempertimbangkan kepentingan publik yang sebagian besar tidak paham tentang demografi dan angka-angka statistik.



Buku ini tidak diperjualbelikan.



Asfinawati

Dalam sebuah wawancara dengan harian *The Jakarta Post*, 23 Mei 2008, Asfin, begitu dia dipanggil, mengatakan tidak akan menggunakan ucapan *assalamualaikum* –jika hal itu akan membuat perasaan



Sumber: Almudatsir (2019)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

tidak nyaman bagi pendengarnya yang mungkin bukan beragama Islam. Agak langka hari-hari ini menemukan sikap seperti yang diperlihatkan oleh Asfin, ketika *assalamualaikum* betapa pun netralnya arti yang dikandung dalam kata itu, merupakan ekspresi yang bersifat keagamaan dan semestinya tidak dianggap sebagai sebuah salam yang bersifat umum, seperti *selamat pagi* atau *selamat siang*.

Meskipun usianya tergolong muda, lahir di Bitung, ujung utara Sulawesi tahun 1977, sempat tinggal di Aceh dan Bali, dua wilayah yang kental dengan tradisi keagamaannya; sebelum kemudian besar di Jakarta. Asfin tipikal anak metropolitan, sekolah di SMA 6 Jakarta yang terletak di bilangan Blok M yang dari dulu hingga hari ini *semrawut* lalu lintasnya, bahkan sering menjadi ajang tawuran siswa di situ. Ia berkuliah di Fakultas Hukum UI, yang kampusnya mengklaim sebagai kampus perjuangan. Kampus perjuangan menjadikan Asfin tumbuh sebagai anak yang *dari sononya* kosmopolitan, terbiasa dengan perbedaan, lingkungan yang menghargai berpikir kritis, dan menganggap setiap orang setara –terlepas dari latar belakang etnis, agama maupun kelas ekonomi. Kemahiran bermain piano yang konon dimilikinya melengkapi atribut dirinya sebagai “*the true city girl*”.

Asfin memilih untuk belajar hukum dan memutuskan untuk berkarier sebagai pengacara publik bersama LBH Jakarta. Sejak mahasiswa, ia memberi ruang terbuka yang sangat dinamis untuk mengepakkan sayapnya sebagai anak muda yang batinnya terpenggil untuk membela kaum tersingkirkan dan tak terlindungi oleh penegak hukum di negeri ini yang hanya melayani pihak yang memiliki uang dan kekuasaan; ketika hukum menjadi komoditas yang diperjualbelikan. Sebagai sebuah negara yang *katanya* merupakan negara hukum, justru tampil penuh carut marut tidak tegaknya hukum, *rule of law* hanya ada di teks-teks kuliah hukum atau di rak-rak mahkamah atau pengadilan, para pengacara –tampil necis, glamor, dan menjadi bagian selebritas kelas atas.

Asfinawati, terlihat kontras di tengah-tengah koleganya yang necis itu, hampir selalu hanya memakai kaos oblong, celana panjang warna gelap, membungkus tubuhnya yang tergolong kecil. Namun demikian, bagi orang yang mengenalnya, menyimpan energi yang terekspresikan melalui artikulasi komunikasi yang lugas tanpa basa-basi, tetapi berisi

pikiran dan gagasan yang jernih tentang perlunya menyuarkan kebenaran. Bahkan, untuk hal-hal di negeri ini yang masih dianggap tabu dan untuk sebagian besar orang takut mengatakannya. Asfinawati tahu bahwa dia memiliki kawan-kawan yang memiliki aspirasi dan idealisme yang sama untuk mengupayakan keadilan tidak hanya bagi kaum yang selama ini tersisihkan: kaum buruh, perempuan, kelompok minoritas, mereka yang dianggap sesat, korban 1965, petani yang dirampas tanahnya, dan komunitas adat yang tak diakui wilayah adatnya, tetapi juga para pencari keadilan lain yang terlunta-lunta akibat ditelantarkan oleh negara.

Ketika hukum dan politik tidak lagi jelas batas-batasnya, yang diperlukan mungkin memang sebuah suara yang berani menyampaikan kebenaran dan apa yang menjadi keprihatinan orang banyak. Ketika hukum telah dilumuri oleh dogma agama-agama yang dibutuhkan, barangkali memang sebuah *moral courage* untuk berbicara atas nama kemanusiaan, penderitaan, dan ketidakberdayaan manusia yang terkungkung sehingga menutup cakrawala pencerahan hati nurani. Sebuah kewarasan publik harus terus diupayakan meskipun tantangan dan risiko politik yang dihadapi sangat besar. Almarhum Munir barangkali adalah contoh terbaik dari negeri ini, yaitu betapa mahal harga yang harus dibayar untuk terus mengupayakan sebuah kewarasan publik di tengah rimba belantara kekuasaan yang telah membuat *hukum menjadi politik* dan *dogma agama menjadi pedoman buta para penganutnya*.

Pengalaman Asfina sebagai direktur LBH Jakarta (2006–2009) dan saat ini sebagai Ketua YLBHI (2017–2021) menjadi bukti konsistensi dan komitmennya pada sebuah idealisme; perlunya hukum ditegakkan bagi mereka yang tercampakkan dan diperlakukan secara tidak adil. Gedung yang cukup megah di Jalan Diponegoro 82 Menteng Jakarta tidak saja sejak awal telah menjadi rumah berteduh bagi para pencari keadilan, namun juga menjadi simbol dan saksi sejarah bahwa masih ada perlawanan yang menyuarkan kemerdekaan di tengah intimidasi, represi, dan persekusi politik, walaupun sering kali dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya sendiri.

Akhir-akhir ini, ketika kepercayaan kepada otoritas negara begitu rendah, ketika parlemen tidak mencerminkan sila ke-4 Pancasila – “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, dan ketika ketidakadilan dalam situasi darurat seperti sekarang disuarakan di jalan-jalan oleh anak muda, mahasiswa, dan pelajar yang memang menjadi pemilik sah masa depan negeri ini. Asfinawati dan kolega-koleganya yang tergabung dalam berbagai jaringan masyarakat sipil (*civil society*); tampil bersama gelegak arus pergolakan politik itu. Adagium lama yang terdengar klise, *speak truth to power* tampil otentik dalam diri Asfinawati.



Asmara Nababan

Di mana Asmara Nababan ketika Peristiwa 15 Januari (Malari) tahun 1974 meletus? Ketika sejumlah tokoh, sebagian besar intelektual ditangkap karena dianggap terlibat dalam protes terbesar di awal Orde



Sumber: Pranoto (T.t.)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Baru itu, nama Asmara Nababan seperti tidak tersangkut di dalamnya. Jika muncul pertanyaan seperti ini, semata karena ada semacam prasangka para intelektual penentang Orde Baru terkoneksi dalam sebuah kubu. Akan tetapi, prasangka itu jangan-jangan memang keliru. Mungkin, ada banyak kubu, ada banyak aliran, dan tradisi-tradisi yang berbeda yang membuat intelektual Indonesia sesungguhnya sangat beragam.

Asmara Nababan tak mungkin dilupakan ketika membicarakan gerakan masyarakat sipil di negeri ini. Sosoknya sebagai aktivis sudah tercatat sebagai penentang Orde Baru sejak awal tahun 1970-an. Bersama Arief Budiman, dkk. dia aktif dalam gerakan antikorupsi, Komite Anti Korupsi (KAK), demo menentang pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang hanya menghamburkan uang rakyat, membentuk Golput, sebagai perlawanan terhadap ketidakbebasan dalam Pemilu yang direayasa Orde Baru.

Aksi-aksi protes yang dilakukan oleh Asmara Nababan, Arief Budiman, dan beberapa aktivis lainnya berlangsung secara damai dan tidak melibatkan massa yang besar. Keberanian untuk menentang rezim militer Soeharto secara terbuka di awal tahun 1970-an harus dicatat sebagai pembangkangan masyarakat sipil (*civil disobedience*), barangkali yang pertama sejak kemerdekaan. Mungkin, hal inilah cikal bakal dari gerakan masyarakat sipil (*civil society*) di Indonesia.

Periode awal tahun 1970-an adalah periode yang penting dalam perkembangan politik di Indonesia. Imbas peristiwa G-30S masih terasa di mana-mana, penangkapan dan pembunuhan mereka yang oleh rezim Orde Baru dianggap terlibat masih berlangsung. Dalam tubuh militer, sebagai pemenang dari kisruh politik 1965, konflik internal berlangsung sengit dan berebut siapa yang paling berhak berkuasa. Peristiwa 15 Januari 1974 merupakan pantulan dari konflik di antara para jenderal di bawah Soeharto, terutama antara Soemitro dan Ali Moertopo.

Berbeda dengan Th. Sumartana atau Ignas Kleden, yang lebih menekuni dunia pemikiran, Asmara Nababan memilih menggeluti dunia aktivisme yang menggelegak dan bergelora. Namun ketiganya,

meskipun berasal dari suku dan tempat lahir yang berbeda, ini dugaan saya; memiliki tradisi kekristenan yang kuat, kekristenan yang telah melewati masa pencerahan, juga kekristenan yang telah ditransendir ke dalam keyakinan universal, keyakinan bahwa setiap manusia –apa pun agama dan sukunya, terlahir dengan hak asasi yang melekat dalam kemanusiaannya dan sebuah hak yang tidak dapat dihilangkan atas nama apa pun.

Sebagai sebuah bangsa, Indonesia tidak memiliki tradisi menghormati hak asasi manusia seperti apa yang dialami di *Barat* karena sifatnya yang individual, sementara tradisi di sini lebih cenderung komunitarian. Sebagai negara, konstitusi pun lebih condong pada paham komunitarianisme daripada individualisme. Secara akademik, tampaknya memang ada persoalan diskrepansi di sana, tetapi bagi Asmara Nababan, mungkin, terlalu mewah dan hanya menghabiskan waktu untuk berdiskusi sementara pelanggaran terhadap hak asasi manusia begitu nampak dengan mata telanjang. Para korban tidak bisa menunggu kita selesai berdiskusi, mereka membutuhkan uluran tangan segera.

Asmara Nababan, menggunakan perspektif Th. Sumartana sebagai intelektual yang tidak ragu dalam berpihak. Meskipun tidak ragu dengan aktivismenya dilandasi oleh pengetahuan yang mendalam tentang seluk-beluk hukum yang dipelajarinya. Akan tetapi, yang menjadikan berbeda, mungkin, *kepercayaannya sebagai orang Kristen* dan keyakinan yang tidak bisa ditawar akan universalitas hak asasi manusia. Agak sulit mencari perbandingan untuk orang sekaliber Asmara Nababan yang sejak awal Orde Baru, bahkan sebelumnya telah turun ke jalan menentang penindasan dan ketidakadilan yang saat itu umumnya *committed by the state*.

Selain turun ke jalan, Asmara merupakan tokoh yang telah membidani kelahiran berbagai LSM yang memperjuangkan hak asasi manusia dan demokrasi. Meninggal karena kanker paru-paru dalam usia 64 tahun, di hari yang menurut Ignas Kleden, sahabatnya, seperti sengaja dipilih sendiri, 28 Oktober 2010. Sepeninggalnya, pelanggaran hak asasi manusia tidak lagi menjadi monopoli negara meskipun, *by omission*, negara ikut bertanggungjawab ketika pelanggaran dan persekusi politik dilakukan oleh aktor-aktor non-negara.

Sejak serangan teroris di gedung WTC New York 2001 dan peristiwa Bom Bali 2002; menampakkan perubahan besar dalam politik global. Tantangan demokrasi dan penegakan hak asasi manusia tidak mungkin lagi dibatasi dalam batas-batas wilayah sebuah negara. Kesadaran akan hal ini sudah terlihat dengan keterlibatan Asmara dalam berbagai forum dan organisasi yang bersifat lintas bangsa. Bersama Marzuki Darusman, dia pun merintis terbentuknya Human Resource Center for ASEAN sebagai basis mengadvokasi HAM lintas negara.

Asmara Nababan, tidak merasa pantang untuk bekerja dari dalam tubuh negara seperti yang dilakukan dengan masuk menjadi anggota Komnas HAM yang didirikan oleh pemerintah Orde Baru –yang mungkin dipandang dengan sinis oleh para aktivis yang lain. Bersama Baharuddin Lopa, seorang ahli hukum yang terkenal kejujuran dan integritasnya, Asmara Nababan telah membuktikan bahwa Komnas HAM, bukan hanya lembaga pemanis sebuah rezim otoriter.

Dengan legitimasi yang dimiliki, juga dengan *courage* dan *conviction* yang lekat di hatinya, Komnas HAM yang dipimpin mampu mencapai banyak hal. Hal yang lebih penting, dia berhasil menancapkan sebuah tradisi baru penghormatan terhadap hak asasi manusia, melampaui batasan suku, dan agama. Jejak Asmara Nababan bisa dilihat di hampir semua tempat yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia, mulai dari Tanjung Priok, Semanggi, Timor Timur hingga Aceh. Bersama almarhum Munir, masih bisa dilihat fotonya mengangkat jenazah korban kekerasan di Timor Leste. Saya kira, Papua pasti akan menjadi lokasi yang akan menjadi perhatian utamanya jika hari ini Asmara Nababan masih bersama kita.

Hal ini merupakan *legitimasi* seorang Asmara Nababan pada keberhasilannya menanamkan sebuah tradisi yang penting bagi generasi aktivis yang lebih muda. Apa yang dilakukan Asmara merupakan sebuah tradisi perjuangan menegakkan prinsip dasar yang bernama hak asasi manusia. Baginya, inti demokrasi adalah hak asasi manusia dan tidak ada demokrasi ketika hak asasi manusia dilanggar. Mengakui hak asasi manusia secara otomatis mengakui dalam berdemokrasi, semua warga negara tanpa terkecuali berkedudukan setara. Penghilangan atau penyingkiran seseorang, bahkan sekelompok orang hanya karena alas-

an perbedaan agama, suku bangsa, kelas sosial dan ekonomi, orientasi seksual dan jenis kelamin; harus ditentang karena mengingkari hak asasi, hak paling dasar seorang manusia.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Buku ini tidak diperjualbelikan.



Asvi Warman Adam

Asvi Warman Adam atau Asvi, begitu biasa kami dan rekan-rekan sebaya lain memanggil, adalah Profesor riset LIPI yang berasal dari Sumatra Barat, dan ahli bidang sejarah. Ia selalu berpenampilan sederhana, tidak ada kegenitan sedikit pun yang terlihat. Meskipun se-



Sumber: Subekti (2019)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

bagai seorang sejarawan publik yang banyak menyuarakan secara kritis ketidakadilan dalam periode politik gelap 1965, mungkin agak sulit dicari bandingannya. Menyelesaikan sarjananya di jurusan Sastra Prancis Fakultas Sastra UI, kemudian meraih gelar doktor dari EHESS –di bawah bimbingan sejarawan ahli Indonesia terkenal Denys Lombard, bidang kajiannya adalah sejarah kolonial hubungan Vietnam yang saat itu dijajah Prancis dengan Indonesia yang masih bernama Hindia Belanda.

Asvi menjadi terkenal karena tulisan-tulisan dan pendapat-pendapatnya yang berani tentang sebuah peristiwa politik –yang mungkin paling traumatis dalam sejarah Indonesia pasca kemerdekaan. Sebuah peristiwa yang memiliki beberapa nama: Gestok, Gestapu, dan G30S/PKI yang belakangan tidak sedikit yang hanya menyebutkan G30S. Banyak yang bertanya, “kenapa Asvi kemudian menjadi semacam spesialis tentang sejarah 1965, keluar jauh dari topik disertasi doktornya?” Asvi memang tidak saja kemudian banyak berbicara tentang sejarah seputar 1965, namun juga gigih membela mereka yang menjadi korban represi dan persekusi politik akibat peristiwa 1965 dari rezim militer Orde Baru yang mengklaim sebagai penyelamat bangsa dari kudeta PKI yang berhasil digagalkan.

Pertanyaan itu baru terjawab ketika dalam orasi sebagai penerima Nabel Award (2010); Asvi menceritakan mengapa kemudian dia menjadi sejarawan yang mengkhususkan diri pada peristiwa 1965. Katanya, suatu ketika dia diminta untuk berbicara di depan para tapol PKI yang rata-rata usianya sudah sepuh. Ketika itulah Asvi merasa benar-benar tergetar hatinya melihat wajah-wajah mereka yang telah dipenjara, sebagian di buang ke Pulau Buru tanpa melalui proses hukum apa pun. Dalam orasinya itu, Asvi pun mengungkapkan bahwa sebagai orang Sumatra Barat keluarganya pun sebetulnya termasuk yang berseberangan dengan PKI karena merupakan simpatisan dari PRRI/Permesta.

Sejak perasaannya tersentuh melihat wajah-wajah tua para tapol itu, Asvi tergerak niatnya dan seperti berjanji pada diri sendiri bahwa dia harus membela mereka, para eks tapol itu, sebagai warga negara yang telah diperlakukan secara tidak adil dan dirampas hak-hak sipil dan politiknya. Sebagai sejarawan, Asvi Warman Adam melihat ada

narasi sejarah yang sengaja dibuat oleh Orde Baru untuk melegitimasikan kekuasaan yang diperoleh melalui cara-cara yang penuh kekerasan. Narasi sejarah yang telah dimanipulasi ini bagi Asvi harus diluruskan. Tak pelak lagi, Asvi harus berurusan dengan mereka yang memegang kekuasaan selain berbagai pihak yang berbeda pandangan maupun yang akan tersudutkan dengan upaya Asvi untuk meluruskan sejarah.

Peristiwa 1965 telah menjadi kontroversi pro dan kontra serta perdebatan yang tak habis-habis diperdebatkan di antara para ahli yang masing-masing berusaha mengungkapkan analisisnya berdasarkan serpihan fakta-fakta sejarah yang masing-masing berhasil mereka kumpulkan. Namun, sebagai peristiwa politik tidak bisa dilepaskan dari polarisasi ideologis perang dingin yang sedang berlangsung saat itu. Sebagai negeri yang disebut memiliki partai komunis dengan jumlah anggota terbesar ketiga setelah Tiongkok dan Uni-Soviet, Indonesia jelas mempunyai posisi strategis secara geo-politik. Keadaan ini membuat peristiwa 1965 tidak mungkin dianggap sekadar sebagai peristiwa politik yang berskala domestik.

Konflik 1965 yang diawali oleh terbunuhnya 6 jenderal dan seorang letnan angkatan darat oleh apa yang menamakan Dewan Revolusi itu, berkecamuk menjadi konflik horizontal dan pembantaian anggota PKI atau yang dianggap pro-PKI. Posisi Jenderal Soeharto sebagai panglima Kostrad saat itu, yang berperan besar dalam mengendalikan keadaan, memberikan peluang untuk apa yang oleh Asvi disebut sebagai kudeta merangkak. Tumbanganya Soeharto dari tampuk kekuasaan Mei 1998 membuka kesempatan untuk mengungkap berbagai hal yang selama itu dianggap tabu. Pihak-pihak yang selama ini menjadi korban juga mulai berani menyampaikan tuntutan mereka. Sebagai sebuah peristiwa, peristiwa 1965 memang telah menjadi peristiwa masa lalu, namun polarisasi yang terus berlangsung dan setiap kali dijadikan hantu untuk mengintimidasi dan meligitimasi kekuasaan, menjadikan peristiwa itu sebagai gambaran bangsa yang terjerat dan terbelenggu pada masa lalu.

Asvi Warman mengikuti jejak seniornya –sejarawan UI, Onghokham, yang lebih banyak menulis dalam forum-forum yang populer. Oleh karena itu, atribut sejarawan publik patut disandanginya. Seperti Onghokham, Asvi ke mana-mana memakai kendaraan umum. Dia

juga tidak tertarik untuk menjadi pejabat atau untuk ikut-ikutan main politik. Bagi dirinya, menjadi sejarawan dan berbicara tentang sejarah sudah cukup menyita banyak waktu. Meskipun ke mana-mana menggunakan kendaraan umum, sebetulnya hal itu berbahaya untuk orang sekaliber Asvi karena tidak jarang pembela para korban peristiwa 1965 telah menimbulkan kemarahan kelompok-kelompok tertentu.

Suatu hari, dua buah metro mini yang penuh dengan orang-orang yang marah menggeruduk LIPI untuk mencari Asvi Warman. Untungnya, Asvi tidak ada di tempat. Sebagai sejarawan publik yang bersuara kritis terhadap terus berlangsungnya represi dan persekusi dari para korban peristiwa 1965, keamanan diri sesungguhnya sangat rentan. Asvi, meskipun mungkin menyadari hal itu, seperti tidak menjadikannya berubah. Dia tetap tampil bersahaja tanpa ada kegenitan dan ke mana-mana naik kendaraan umum seperti biasa.



Ayu Utami

Novel pertama Ayu Utami, *Saman*, muncul pada waktu yang tepat. Novel yang bercerita tentang Saman, seorang calon rahib Katolik yang menjadi aktivis, berhasil mewakili zamannya. Sebuah zaman ketika



Sumber: Agnes (2018)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

musim dingin berganti menjadi musim semi. Sebagai wartawan majalah yang dibangun oleh para aktivis, Ayu mengalami dengan baik bagaimana bekerja di bawah tanah. Tokoh imajinernya, Saman, adalah tokoh bawah tanah, bergerak secara klandestin, mengorganisasi petani dan mahasiswa untuk melakukan resistensi terhadap rezim militer Soeharto. Saman adalah cerita tentang seorang *hero* dalam pelariannya terlibat dalam percintaan yang tak terduga dengan aktivis perempuan yang telah bersuami. Persetubuhan yang membara, bagi seorang calon rahib dan untuk perempuan yang telah memiliki suami, adalah kisah ketegangan antara moralitas dan kebebasan yang mengasikkan.

Sebagai wartawan, Ayu Utami adalah seorang yang bekerja dengan kata-kata. Kemahirannya mengolah kata-kata menjadikan Saman sebuah cerita rekaan yang renyah. Sebagai wartawan, ia juga orang yang bekerja dengan fakta-fakta, arsip, dan dokumentasi peristiwa-peristiwa. Dilahirkan sebagai anak kota, kuliah di universitas yang dikenal sebagai kampus perjuangan, menjadikan dirinya tipikal anak muda yang penuh gairah akan pencarian makna kemerdekaan dan kebebasan.

Berbeda dengan mereka yang mengalami trauma langsung peristiwa 1965, Ayu Utami dan generasinya hanya mendengarkan kisah kebrutalan politik 1965 itu dari orang lain. Ia dan generasinya mengalami kebrutalan politik justru ketika *pemenang* dari kisruh politik 1965 itu sedang menjelang ajalnya setelah 30 tahun memimpin. Pada tahun 1994, beberapa majalah kritis dibredel. Sejak saat inilah sebuah jurnalisme klandestine tumbuh berpilin dalam jaringan resistensi bawah tanah untuk menentang rezim otoriter Soeharto. Pada saat yang sama, rezim militer yang berkuasa ini, sesungguhnya sedang memasuki fase kelumpuhannya dari dalam. Ruth McVey banyak menulis tentang komunisme di Indonesia, pada tahun 1996 telah menuliskan dengan tepat kelumpuhan rezim Soeharto itu. Saya kutipkan sedikit di sini pengamatannya *By the mid-1990s the combination of intense emphasis on social stability, state control and capitalist development has resulted in what might best be described as dynamic paralysis* (McVey, 1966).

Saman terbit April (Utami, 1998) dan Soeharto dijatuhkan sebulan kemudian, Mei 1998, setelah mahasiswa menduduki gedung parlemen dan kerusuhan berkecamuk diberbagai kota. Lengsernya Soeharto

yang telah menduduki kursi kekuasaan selama 32 tahun itu tak pelak lagi membawa angin segar dari kepengapan yang selama itu dirasakan. Euforia politik pada ruang kebebasan memenuhi udara dan Saman lahir dalam suasana yang penuh harapan baru itu. Membaca Saman lebih dari 20 tahun kemudian, apa yang dapat direfleksikan? Terutama bagi Ayu Utami, apa yang kemudian berubah dari dirinya?

Sebagai sebuah novel resistensi yang berkisah tentang berbagai peristiwa di seputar tokoh utamanya, Saman, paling tidak ada dua bentuk resistensi yang bisa ditemukan. Yang pertama resistensi terhadap represi politik, resistensi terhadap kekuasaan politik yang menindas; dan yang kedua adalah resistensi terhadap represi sebuah moralitas yang tercermin pada berbagai bentuk larangan ekspresi kebebasan seksual. Jika sumber represi yang pertama –terutama berasal dari tafsir terhadap posisi dan peran negara, sumber represi yang kedua berasal dari tafsir terhadap posisi dan peran agama. Saman adalah kisah perlawanan untuk membebaskan diri terhadap represi negara dan agama.

Setelah *Saman*, Ayu Utami menerbitkan *Larung* (2001) dan beberapa cerita lainnya. Sepuluh tahun setelah Saman, terbit *Bilangan Fu* (2008), yang sepertinya memperlihatkan mulai dipilihnya tema yang berbeda setelah serial *Saman* dan *Larung* mengalami saturasi. Berbeda dengan *Saman* yang tipis, novel *Bilangan Fu* cukup gemuk. *Bilangan Fu* bisa dibilang sebuah tonggak baru dalam perkembangan penulisan fiksi dari Ayu Utami, meskipun sebagai pembaca kita tetap merasakan gaya penulisan Ayu dan tokoh-tokohnya yang merupakan generasi penerus dari *Saman* dan *Larung*. Dari segi resistensi atau perlawanan, *Bilangan Fu* tidak lagi sejelas *Saman*, namun nampak sekali bagaimana Ayu meneruskan tema resistensinya, terutama terhadap moralitas yang menyungkup dan represi agama.

Latar belakang agama keluarganya yang Katolik dan terutama tradisi kejawaannya, tampaknya menjadi dasar pijakan untuk bereksplorasinya di wilayah spiritual. Meskipun sejak unsur spiritual *Saman* sudah menjadi bagian penting dari novelnya, saya kira, baru ketika menulis *Bilangan Fu*, dimensi spiritual ini digarapnya dengan serius. Kekhawatiran akan represi dari kekuatan agama terhadap kebebasan makin menonjol meninggalkan perhatiannya terhadap represi

negara yang terasa kental di *Saman*. Jika *Saman* sempat mengambil *setting* Sumatra, bahkan New York dalam *Bilangan Fu*, Ayu Utami seperti terserap kembali ke pedalaman Jawa.

Bukunya, sejauh yang saya tahu yang paling baru, *Anatomi Rasa* (2019), terbit selang sepuluh tahun setelah *Bilangan Fu*, mungkin semacam hasil sampingan dari eksplorasinya ketika menggarap *Bilangan Fu*. Meskipun dikatakan sebagai sebuah novel, *Anatomi Rasa* lebih merupakan kesimpulan hasil riset dari dunia pemikiran dan dimensi spiritual kebudayaan Jawa: dari mana keluarga Ayu Utami berasal. *Rasa*, atau *roso*, dalam bahasa Jawa adalah inti dari semacam strategi kebudayaan yang ia tawarkan untuk mengatasi konflik kemanusiaan, yang menurut pendapatnya sedang dihadapi oleh kebudayaan *Barat* yang berintikan pada rasio.

Ayu Utami adalah seorang penulis yang berangkat dari dunia jurnalisisme, dunia publikasi, dunia publisitas, dan dunia media massa. Sebagai sesama penulis novel, Ayu Utami bisa kita bedakan dari Nh. Dini yang berangkat dari refleksi penulis, yaitu sebagai seorang mantan pramugari udara dan seorang istri diplomat Prancis. Atau dengan Sutan Takdir Alisjahbana (STA) –yang meniti karier sebagai ahli bahasa dan filsafat. Latar belakang dan sejarah seorang penulis bisa saja diabaikan ketika membaca teks sebagai karyanya, namun pastilah selalu ada persangkutan yang bisa ditemukan antara penulis dan karyanya. Seorang akademisi yang menjadi novelis, seperti Umberto Eco pastilah menulis sedikit banyak tentang sesuatu yang tidak jauh dari latar belakangnya sebagai profesor semiotika dan sejarah abad pertengahan.

Cerita rekaan, pendek atau panjang, adalah sebuah dunia tanpa batas. Batas, kalau *toh* mau dikatakan ada, adalah seberapa dalam dan seberapa luas. Sumur yang dimiliki oleh sang penulis, di mana setiap saat air kehidupan bisa ditimba. Sumur itulah yang akan membatasi sejauh mana, sedalam, dan setinggi apa sebuah cerita rekaan itu nanti akan mampu bergema di lubuk hati pembaca. Tentu, ketika persoalan teknik sebagai kemampuan mengolah kata-kata sudah lama terlampaui. Ketika upaya untuk membawa cerita rekaan keluar dari bahasa Indonesia ke berbagai bahasa asing akan menampakkan bagaimana kedalaman, keluasan, dan ketinggian sebuah cerita rekaan yang berasal

dari sebuah tradisi bangsa tertentu. Dengan demikian, mampu melompat dan masuk ke dalam jagat raya antarbangsa yang lebih luas, bahkan riset dengan sendirinya menjadi bagian penting dari sumur itu.

Ketika tantangan kehidupan umat manusia tidak lagi bisa dibatasi oleh batas-batas geografis dan kedaulatan negara, sebuah cerita rekaan makin dituntut juga untuk mencari jalan keluar dari impas kemanusiaan yang makin bersifat global itu. Membaca karya Ayu Utami yang terakhir, *Anatomi Rasa*, keinginan dan obsesinya untuk menawarkan jalan keluar dari impas yang dilihatnya sedang dihadapi oleh dunia keilmuan barat, terlihat jelas, dan tentu ini adalah sesuatu yang sangat mulia. Ujian yang dihadapi oleh Ayu Utami, saya kira adalah sedalam dan seluas apa sumur yang telah digali untuk dapat menimba air kehidupan yang hendak ditawarkan kepada dunia, *di sini*, dan *di sana*.



Buku ini tidak diperjualbelikan.



Bambang Hidayat

Bambang Hidayat, profesor astronomi dari ITB, selalu tampil necis: mulai rambut yang tetap hitam tersisir rapi, biasanya pakai baju putih dengan jas dan dasi serta celana dengan warna yang serasi dan licin tersetrikan; sampai sepatu yang tampak tersemir mengkilat; wajah ceria



Sumber: Institut Teknologi Bandung (2018)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dengan senyum yang selalu tersungging di wajahnya yang klimis dan tak nampak kumis selebar pun karena tercukur bersih.

Pada suatu pagi di sebuah hotel, saat sarapan, ketika umumnya orang beruluk salam dengan *assalamualaikum*, beliau dengan gagah menyalami dengan ucapan “merdeka”. Berbicara dengan rendah hati, kadang-kadang disertai *guyon*, namun tidak menyembunyikan pengetahuan yang mendalam, tidak saja di bidang keahliannya, astronomi dan ilmu alam pada umumnya, tetapi yang membuat saya heran adalah perhatiannya yang sungguh-sungguh terhadap masalah-masalah sosial dan kebudayaan. Meskipun ia tidak terlalu sering menampakkan keprihatinannya terhadap berbagai persoalan bangsa untuk muncul dalam kolom-kolom Kompas.

Dalam sebuah kesempatan berkumpul dengan kolega-koleganya sesama profesor emeritus dari ITB di sebuah hotel di Bandung, beliau menceritakan koleksi pribadi majalah berbahasa Jawa “Panjebar Semangat” yang komplet. Dalam kesempatan itu juga diobrolkan soal aksara Jawa dan keris oleh seorang yang ahli metalurgi. Ini adalah sebuah forum diskusi yang langka, pikir saya.

Profesor Bambang Hidayat, di mata saya adalah seorang intelektual publik yang sangat kosmopolitan –yang bisa berbicara dengan baik tentang Teori Big Bang dan Stephen Hawking sampai pada persoalan yang bagi banyak orang sudah dilupakan, seperti aksara Jawa dan “Panjebar Semangat”. Menebarkan semangat, mungkin itu yang diam-diam menjadi misi hidupnya. Saya kira, memelihara semangat untuk terus beraktivitas dan berpikir tanpa batas, juga menjadi kredonya.

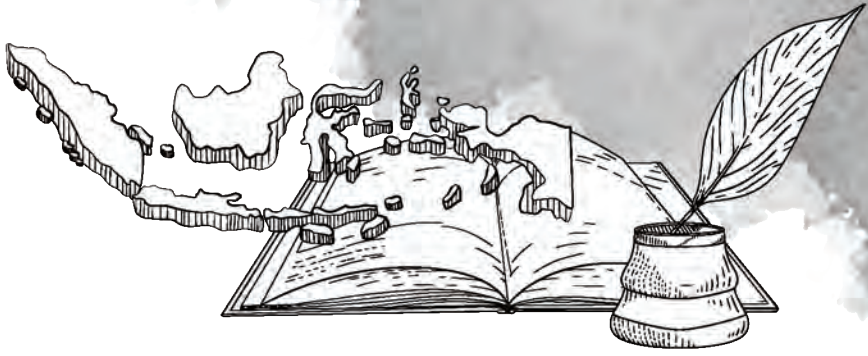
Ketika menjelang akhir tahun 1970-an, ia bermalam di rumahnya di kompleks Boscha di Lembang Bandung, yang saat itu masih terasa sejuk. Kami dibawa ke ruang perpustakaan dan diperlihatkan koleksi lengkap koran mahasiswa UI “Salemba”. Selain memperlihatkan perhatian pada aspirasi generasi yang lebih muda, juga mencerminkan keseriusannya dalam menjangkau berbagai lingkungan akademik yang sangat luas. Sebuah ilustrasi lain terjadi, ketika suatu saat datang *e-mail* dari beliau, memberitahukan ada *review* dari buku saya di sebuah penerbitan di Belanda yang bahkan saya sendiri belum baca.

Saya tidak tahu apa yang dilakukan oleh Profesor Bambang Hidayat ketika beberapa hari yang lalu, terkait 50 tahun pendaratan manusia pertama di bulan diperingati di mana-mana. Di Kompas, sebuah artikel untuk memperingati peristiwa bersejarah di dunia ilmu pengetahuan dan teknologi itu, ditulis oleh seorang wartawan seniornya, Ninok Leksono, mantan mahasiswa dari Profesor Bambang Hidayat di Jurusan Astronomi ITB, yang seperti biasa, kaya dengan nuansa; sekaligus melempar kritik terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat ini ada di negeri ini.

Peristiwa pendaratan pertama manusia di bulan jelas memperlihatkan sebuah pencapaian para *ilmuwan* dalam menggabungkan pengetahuan dan teknologi. Saat ini berbagai pusat studi di berbagai belahan dunia sedang meneliti apakah ada makhluk setingkat manusia di planet mars atau di galaksi lain yang tidak terbatas jumlahnya. Sebagai seorang ilmuwan, Profesor Bambang Hidayat pasti mengikuti perkembangan itu, mungkin sambil bertanya, kenapa ilmuwan Indonesia seperti makin tertinggal dan terus hanya berkuat dengan persoalan-persoalan teknis-birokratis yang sebenarnya *remeh-temeh*?



Buku ini tidak diperjualbelikan.



Ben Anderson

Indonesianis yang satu ini agak sulit dicari bandingannya, mungkin Herbeth Feith yang agaknya mirip. Keduanya tidak menjadikan Indonesia sekadar *rice bowl*, namun tumpah darahnya yang kedua. Ben An-



Sumber: Heryanto (2015)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

derson, seperti juga Herbeth Feith yang sudah wafat, tiba di Indonesia ketika Soekarno berada di puncak kekuasaannya, sekitar akhir 1950-an dan awal 1960-an. Menyaksikan kejatuhan Soekarno, merasakan kebrutalan Soeharto, dan menghirup udara kebebasan setelah Soeharto lengser ke *prabon*.

Mungkin orang yang paling mengerti Ben Anderson adalah Vedi Hadiz yang telah membaca habis buku-buku Ben Anderson dan menganalisisnya dengan kritis. Mungkin Ben, begitu Ben Anderson biasa dipanggil, menginginkan Vedi untuk jadi muridnya saat melakukan studi tentang karya Ben di Yayasan SPES, sempalan LP3ES, walaupun baru S1. Akan tetapi, Vedi rupanya memilih Richard Robison sebagai mentornya.

Karena dianggap menyebarkan analisis yang sesat tentang Peristiwa 1965, Ben dicekal masuk Indonesia oleh Ali Moertopo, pendiri CSIS –sebuah *think tank* yang sangat berpengaruh di masa kejayaan Soeharto. Total 26 tahun Ben dilarang menginjakkan kaki di tanah air keduanya. Ben harus menunggu, mungkin dengan tidak sabar, sampai Sang Petrus turun tahta. Kembali masuk Indonesia, konon ada dua tempat yang selalu di kunjungi setiap kali ke Indonesia, yaitu Sumur Jalatunda dan Candi Tetek. Kedua tempat itu ada di lereng Gunung Penanggungan Jawa Timur. Begitupun sebelum menghembuskan napasnya yang terakhir di sebuah hotel di Batu Malang, Ben baru mengunjungi dua tempat ziarahnya itu.

Sebagai penghargaan terhadap Ben, majalah Tempo membuat upacara penyambutan kembalinya Ben masuk Indonesia dengan mintanya memberikan kuliah umum. Dalam kuliah umum yang diberi judul “Nasionalisme Indonesia Kini dan di Masa Depan” (1999), pada Maret itu Ben mengingatkan para hadirin bahwa Indonesia harus dilihat sebagai sebuah proyek bersama (*a common project*). Indonesia, menurut Ben, bukan warisan dari nenek moyang yang hidup di masa lampau, tetapi sebuah proyek yang harus dibangun bersama untuk masa depan. Indonesia adalah proyek bersama dari seluruh warga negara, tanpa terkecuali, yang memiliki posisi setara sebagai warga negara. Pidato yang disampaikan ketika Indonesia sedang tercabik oleh berbagai konflik komunal dan konflik politik, Ben mengingatkan bahwa

Aceh bukanlah hanya milik orang Aceh; Papua juga bukan hanya milik orang Papua, namun demikian keduanya adalah bagian tidak terpisahkan dari Indonesia dan menjadi milik bersama seluruh warga negara Indonesia.

Beberapa tahun menjelang wafat, Ben terkesan risau dengan langkanya intelektual publik di Indonesia dan Asia Tenggara. Dia terlihat galau karena hampir semua intelektual yang ada, seperti tertelan oleh yang berkuasa. Ben, yang di masa mudanya dekat dengan Soe Hok Gie dan Onghokham; sangat kehilangan ketika Hok Gie mati muda di puncak Semeru. Pramoedya Ananta Toer kemudian menjadi heronya, tetapi setelah Pram, dia sulit mencari yang muda; Pipit si pembangkang di Berlin dan novelis Eka Kurniawan; juga Jokowi dan Ahok sempat disebut-sebutnya, selain itu dia kecewa. Kekecewaan itu bahkan dia ungkapkan ketika dia diminta untuk memberikan pidato kunci di sebuah acara yang diadakan oleh Asian Public Intellectual (API) di Cebu, Filipina.

Dalam autobiografinya dia tidak menyembunyikan *love affair*-nya dengan Jawa, tetapi yang betul-betul dia cintai adalah *the red Java*. Membaca karya-karyanya, antara lain yang sangat berpengaruh di dunia “The Imagined Communities” (1993), kesan Jawa sebagai sumber inspirasi sulit dihapus. Cerita yang menyaksikan, ketika abunya ditebar-kan di laut Jawa setelah dikremasi di Surabaya, tiba-tiba muncul kupu-kupu yang terbang di atas laut tempat abunya ditebar-kan.



Buku ini tidak diperjualbelikan.



Dewi Sartika

Nama Dewi Sartika diabadikan menjadi nama jalan di banyak kota besar. Di Jakarta, Jalan Dewi Sartika lebih besar dan bahkan lebih ramai dibandingkan dengan Jalan Kartini. Akan tetapi, siapa yang se-



Sumber: Portal Resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (2017)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

karang ingat dengan sosok perempuan yang dianggap sebagai *perintis pendidikan* untuk kaum perempuan ini. Pada zaman ketika informasi tentang apa pun yang ada di dunia ini bisa dicari lewat HP, tidak sulit untuk mengetahui mengapa nama perempuan ini diabadikan menjadi nama jalan dan oleh negara diberi gelar pahlawan nasional.

Dewi Sartika, lahir pada tanggal 4 Desember 1884 di Cicalengka, adalah anak dari pasangan ningrat Sunda, R. Ranga Somanegara dan R.A. Rajapermas. Empat tahun setelah kelahirannya, tahun 1888 di Banten, terjadi pemberontakan petani yang dipimpin oleh para ulama Islam sebagai reaksi terhadap makin kerasnya represi pemerintah kolonial Belanda. Sebagai anak ningrat, selain dididik dalam tradisi Sunda yang kuat, Dewi Sartika kecil beruntung mendapat pendidikan barat dari asisten residen Belanda. Ketika umur lima tahun (1889) setelah ayahnya meninggal dan ikut pamannya, dia ikut pindah ke Bandung, sebuah kota kolonial terbesar kala itu, setelah Batavia.

Pemberontakan petani di Cilegon (1884) yang menjadi bahan kajian Sartono Kartodirjo dalam disertasi doktornya di Universitas Amsterdam tahun 1966, hanyalah salah satu dari gejala kegelisahan rakyat yang terjadi hampir secara merata di seluruh Jawa akibat sistem tanam paksa yang hanya menguntungkan Belanda tetapi memelaratkan rakyat. Para ulama menjadikan Islam sebagai inspirasi perlawanan terhadap penindasan dan ketidakadilan serta menjanjikan kedatangan Ratu Adil, Sang Imam Mahdi –yang akan menyelamatkan rakyat dari kesengsaraan yang diderita di dunia fana ini. Konteks sosial politik di tanah Pasundan ini penting untuk memahami mengapa Dewi Sartika tergerak untuk memelopori pendidikan bagi kaum perempuan ini.

Daerah pinggiran dari Tanah Pasundan memang merupakan lokus kekejaman pemerintah kolonial yang berpilin dengan keangkuhan kaum feodalnya. Selain pemberontakan petani di Cilegon, sejarah juga mencatat kekejaman yang terjadi di Lebak yang hingga hari ini sebagian warganya masih seperti harus terus menanggung keterbelakangan dan kemiskinan. Multatuli, nama samaran dari Eduard Douwes Decker seorang Belanda yang pernah ditugaskan sebagai asisten residen di Lebak ketika pulang ke Belanda menuliskan ketidakadilan yang dilihatnya di Lebak dalam sebuah novel yang kemudian menjadi terkenal

“Max Havelaar” (1860). Novel tersebut berlatarbelakang masyarakat Lebak sekitar tahun 1860 saat tanam paksa berlangsung. Ketika tanam paksa dihentikan pada tahun 1870, penderitaan rakyat sudah mencapai klimaks dan ketika tahun 1880-an berbagai peristiwa muncul, sulit untuk membantah akan hubungan erat antara rasa keterpinggiran dan kehendak untuk melakukan perubahan.

Tidak jelas, apakah Dewi Sartika –yang juga pandai berbahasa Belanda, terinspirasi oleh apa yang dilakukan oleh perempuan ningrat Jawa, Kartini, yang lahir lima tahun sebelumnya (1879–1904). Namun, seperti Kartini sebagai pendahulunya, Dewi Sartika harus dibayangkan sebagai pelopor dalam konteks sejarah masa itu. Sebuah masa ketika hanya mereka yang berkelamin laki-laki dan tergolong ningrat, priyayi atau menak, dan ajengan berkesempatan untuk mengenyam pendidikan barat. Pemerintah kolonial saat itu pun mulai memberikan pendidikan untuk meningkatkan harkat penduduk pribumi, tetapi untuk kepentingannya mereka agar tersedia tenaga terdidik untuk menjalankan roda kolonialisme. Oleh karena itu, sangat bisa dimengerti jika kegiatan pendidikan yang dirintis pun harus dilihat sebagai kegiatan-kegiatan yang menekankan segi-segi keterampilan untuk meningkatkan peran sebagai seorang istri yang tujuannya masih terbatas, yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup berkeluarga secara lebih bermartabat.

Melalui informasi terbatas tentang Dewi Sartika, pada awalnya kegiatan pendidikan itu diberi nama “Sekolah Keutamaan Istri” yang mencerminkan tidak jauhnya keterampilan yang diajarkan lebih dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas perempuan dalam kedudukannya sebagai seorang istri. Mungkin itu juga yang menyebabkan sesungguhnya apa yang dirintis oleh Dewi Sartika masih lebih sederhana dibandingkan pemikiran-pemikiran Kartini sebagaimana kemudian terungkap dari surat-suratnya yang menjangkau persoalan-persoalan yang lebih maju, seperti soal kebebasan dan kesetaraan kedudukan antara perempuan dan laki-laki.

Namun bagi zamannya, apa yang dilakukan oleh Dewi Sartika membuka ruang sekolah untuk para istri dan anak perempuan, merupakan sesuatu yang bisa dikatakan sebagai revolusioner. Zaman

ketika sebagian rakyat masih belum mengenal sekolah, melata dalam kemiskinan serta penindasan kolonial dan para feodal, apa yang dilakukan Dewi Sartika sejatinya adalah sebuah pemberontakan terhadap tatanan lama yang menyekap posisi kaum perempuan sebagai *konco wingking* (teman belakang) yang harus menerima kedudukannya sebagai perempuan yang lebih rendah dari laki-laki. Simone de Beauvoir, pemikir dan pelopor emansipasi perempuan dari Prancis (1908–1986), menuangkan renungan dan kritik terhadap opresi yang dialami perempuan dalam buku yang menjadi sangat terkenal, *The Second Sex* (1949). Bagi Simone de Beauvoir, perempuan harus membebaskan diri dari posisinya yang hanya menjadi pelengkap laki-laki.

Akhir-akhir ini tampak apa yang telah dirintis oleh Dewi Sartika dan tentu saja oleh Kartini pendahulunya, tentang perlunya memberikan pendidikan bagi perempuan agar bisa menjadi mitra sejajar dengan laki-laki, seperti hendak dihela lagi mundur kebelakang. Betapa tidak, para wakil rakyat yang tidak sedikit di antaranya perempuan justru keluar dengan gagasan-gagasan yang ingin menempatkan kembali perempuan sebagai sekedar *konco wingking* dan *The Second Sex*. Beberapa waktu lalu, masyarakat dihebohkan oleh undang-undang pornografi yang jelas-jelas menempatkan perempuan sekadar sebagai objek. Belum lama ini, masyarakat dipaksa untuk menerima rancangan KUHP yang ingin mengatur kehidupan pribadi dan memarjinalkan perempuan. Sebuah rencana undang-undang yang katanya dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan keluarga justru dinilai sebagai sesuatu yang justru antikeluarga. Perempuan selalu menjadi arena kontestasi dan menjadi objek yang selalu ingin dikontrol oleh negara.

Membaca kembali riwayat Dewi Sartika, wafat dua tahun setelah proklamasi kemerdekaan, mencoba membandingkan dengan apa-apa yang hari ini disaksikan di masyarakat yang notabene telah lebih dari 74 tahun merdeka –sebuah usia yang bagi seorang manusia seharusnya telah menjadi manusia dewasa, justru seperti disajikan sebuah gerak mundur dari peradaban. Jika Dewi Sartika harus memperjuangkan cita-citanya di tengah alam kolonial dan negara penjajah, kita membaca betapa kemajuan demi kemajuan sedikit demi sedikit diraihinya: untuk menempatkan kedudukan perempuan lebih terampil, terdidik

dan menjadikan keluarga menjadi lebih bermartabat. Namun demikian, mengapa justru hari ini disajikan sebuah gerakan yang seperti-nya menarik ke belakang, menempatkan perempuan dalam *posisinya kembali* sebagai pelengkap dari laki-laki? Nampaknya, ada yang tidak beres dalam masyarakat ketika konservatisme dalam kehidupan keberagamaan diam-diam merayap tanpa disadari menyungkup sebagian warga negara dari beberapa penelitian justru telah menerpa sebagian generasi muda. Agama seharusnya memberikan inspirasi yang membebaskan manusia, bukan membelenggunya.



Buku ini tidak diperjualbelikan.



Dolorosa Sinaga

Suatu hari, saya bertandang ke rumah teman yang menjadi pelukis dan mengoleksi berbagai karya seni lain. Salah satu koleksi yang sangat dia sayangi adalah sebuah patung, mungkin tingginya 30 cm dari perunggu hitam kasar mengilat, yang menggambarkan seorang pemburu Indi-



Sumber: BBC Indonesia (2013)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

an terlempar ke udara karena bison yang diburu melabrak kuda tunggangannya. Komposisi bison, kuda, dan si Indian –yang melambung di udara dengan tangan kiri yang masih memegang sais dan tangan kanan memegang tombak yang nyaris lepas, menjadi keindahan yang bagi saya luar biasa. Melihat patung yang sangat ekspresif itu, saya jadi ingat sebuah nama, Dolorosa Sinaga.

Dolorosa Sinaga, lahir 31 Oktober 1953 di Sibolga, Sumatra Utara dan dibesarkan di Jakarta. Mempelajari seni patung di Institut Kesenian Jakarta (IKJ) dan mengembangkan diri menjadi pematung bersama rekan seni rupa segenerasinya, yang mengalami secara penuh hidup di bawah bayang-bayang rezim militer-teknokrat Orde Baru. Ternyata, tidak sedikit pilihan bagi mereka yang hidup dalam sebuah rezim politik yang menjadikan pembangunan ekonomi sebagai kredo legitimasi kekuasaannya.

Sebagai pematung perempuan, Dolorosa tentu dihadapkan pada pilihan-pilihan tentang tema, medium, dan publik yang akan menjadi *audience*-nya. Sempat mengenyam pendidikan seni di Amerika dan Inggris, diduga menjadikannya lebih memahami berbagai perspektif dalam berkesenian: tentu saja kesadarannya akan kosmopolitan dan universalitas nilai-nilai kemanusiaan.

Patung sebagai sebuah ekspresi seni memiliki semacam kelebihan dalam menggambarkan sebuah ide atau realitas karena mediumnya yang biasanya bersifat masif: kayu, batu, atau perunggu. Patung bisa menjadi sangat ekspresif dibandingkan karya seni rupa lain –yang menggunakan medium lebih lembut dan lunak. Seperti patung yang saya lihat di rumah teman saya itu: bison melabrak kuda dan si Indian pemburu terpelanting meliuk ke udara. Secara keseluruhan dapat membentuk sebuah *gestalt* yang mampu mengekspresikan banyak hal: kebringasan, kesakitan, keberanian, ketidaksetaraan, kesia-siaan, dan harapan. Ada semacam ketegangan yang bersifat aerodinamis dalam patung Indian pemburu bison yang terjungkal bersama kudanya itu, tetapi juga tersimpan sebuah ingatan sejarah kolektif akan sebuah bangsa yang tertumpas habis oleh sebuah hubungan kekuasaan yang tak seimbang.

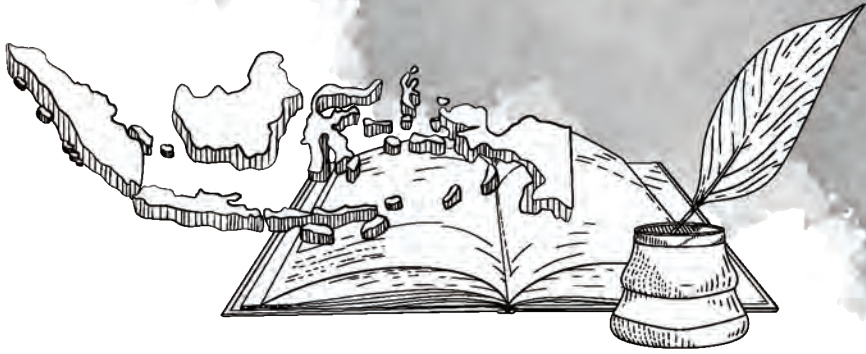
Melihat patung-patung karya Dolorosa Sinaga, sulit dihindari kesan kuat akan pilihannya untuk memihak pada yang tertindas dan terpinggirkan. Mereka adalah para korban dari ketidakadilan yang berpangkal pada ketidaksetaraan hubungan kekuasaan antara pihak-pihak yang berkontestasi di ruang publik. Pilihannya untuk mengekspresikan semacam rasa kepedihan yang dialami oleh para korban dalam kontestasi yang tidak seimbang ini menjadikan Dolorosa Sinaga seperti mengingatkan kita pada masa pra-1965 ketika seniman terbawa dalam gelegak retorika presiden pertama kita, Soekarno, seniman harus menjadi bagian dari arus perjuangan –sebuah revolusi yang belum selesai.

Setiap zaman tentu menciptakan situasi masing-masing, yang merangsang para seniman pada masanya untuk mengambil pilihan-pilihan ekspresi estetikanya. Seni, betapapun sang seniman berusaha untuk mengisolasinya, tidak mungkin terhindar dari politik maupun ekonomi pada zamannya. Gerakan Seni Rupa Baru, yang mana Dolorosa Sinaga dan teman-teman seangkatannya, seperti pelukis Semsar Siahaan dan perupa F.X. Harsono pernah mendeklarasikannya; adalah sebuah gerakan yang menginginkan sebuah bentuk baru dalam berkesenian di tengah sebuah rezim politik yang cenderung menganggap kesenian sebagai komoditas dan hal-hal yang indah serta romantis. Seni adalah ekspresi estetik dari berbagai ketegangan yang ada di ruang publik. Kesenian sudah seharusnya merupakan sebuah ekspresi estetis yang didorong oleh komitmen yang bersifat sosial, rasa solidaritas, dan pemihakan pada yang terlupakan dan terpinggirkan dalam pembangunan.

Pilihan untuk menjadikan perempuan sebagai sebuah tema dalam patung-patung yang dibuat, hampir pasti karena sebuah keprihatinan Dolorosa yang melihat keadaan dalam ruang publik: suasana ketidakadilan dan ketimpangan dalam hubungan kekuasaan. Yang menarik, perempuan digambarkan oleh Dolorosa bukan sebagai korban yang tidak berdaya, namun sebagai mereka yang memiliki ketegaran dan kekuatan untuk melawan ketertindasan. Seperti setiap karya seni lain, ada ironi dan kontradiksi; ada semacam kesia-siaan, tetapi juga harapan dan dinamika perubahan.

Mungkin dua karya ini bisa disebut sebagai bentuk yang paling kentara akan komitmen sosialnya. Dengan jelas, dia memihak pada mereka yang dilumpuhkan: korban lumpur Lapindo dan Multatuli. Jika korban lumpur Lapindo mencerminkan keprihatinan tentang sebuah masyarakat yang menjadi korban dari dua ketidakpedulian lembaga publik terhadap warga negara: pertama, keteledoran sebuah korporasi dalam mengamankan operasi yang mengancam lingkungan kehidupan dan kedua, kegagalan negara dalam menjamin kelangsungan hak hidup warga negara.

Sementara itu, patung Multatuli yang dibuat Dolorosa merupakan bagian dari sebuah museum untuk mengenang sang penulis novel. Karyanya mengingatkan kekejaman kolonialisme dan feodalisme: *lagi-lagi* memperlihatkan betapa ketidaksetaraan dalam hubungan kekuasaan yang tidak terkendalikan hanya akan melahirkan penyingkiran, penindasan, dan kegetiran yang seringkali tak tertanggungkan; seperti nasib orang Indian yang nyaris tersapu dari muka bumi karena ketamakan dan kebuasan manusia.



Edi Sedyawati

Sekitar pertengahan 1990-an, dunia penelitian dikelola dengan relatif baik oleh Dewan Riset Nasional (DRN), proposal penelitian harus lolos penilaian para *reviewer* sebelum dana usulan penelitian disetujui. Dunia penelitian pada ilmu-ilmu sosial saat itu belum seramai seka-



Sumber: Prasetyo (2018)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

rang ketika teknologi informasi, sosial media, globalisasi ekonomi dan politik begitu berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari. Begitupun jumlah ilmuwan sosial tidak sebanyak dan seberagam seperti saat ini ketika begitu mudah orang menjadi pakar, pengamat serta komentator sosial-politik dan kebudayaan.

Hari ini pemegang otoritas keilmuan seperti tidak harus berada di menara gading lagi seperti dulu. Otoritas keilmuan bisa datang dari mana saja ketika pengetahuan telah menjadi komoditas dan bagian dari ekonomi pasar. Kemajuan teknologi telah membuat akses terhadap sumber pengetahuan begitu terbuka sejauh tersedia layanan internet. Buku dan artikel jurnal begitu mudah diakses asal mau dan asal mampu membaca dalam bahasa Inggris –bahasa kolonial, yang *suka nggak suka* harus kita pakai kalau tidak mau ketinggalan zaman. Hari ini, begitu mudah kita mengikuti kuliah dari profesor paling terkenal dari universitas paling ternama di dunia sekalipun.

Pada tahun 1990-an itu, profesor Edi Sedyawati adalah salah satu dari sedikit ahli ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan untuk menjadi *reviewer* yang ditunjuk oleh Dewan Riset Nasional (DRN) bersama *reviewer* lain. Dalam sebuah panel *reviewer* ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan, Bu Edi, begitu beliau biasa dipanggil, pernah duduk bersama Parsudi Suparlan, Loekman Soetrisno, dan Nico Kana sebagai ketua panel.

Bisa dibayangkan, hanya Bu Edi yang bersuara lembut di tengah suara-suara keras, bahkan tidak jarang kasar dalam *menguliti* proposal penelitian peneliti junior. Parsudi Suparlan, antropolog dari UI dan Loekman Soetrisno, sosiolog dari UGM –keduanya telah almarhum, merupakan ilmuwan sosial legendaris yang *terkenal sangat galak* dalam menguji proposal penelitian. Menghadapi keduanya tidak hanya dibutuhkan kemampuan menguasai materi, namun juga syaraf yang kuat untuk tidak *grogi* sebelum menyampaikan isi pikiran.

Bu Edi, dengan penampilan sederhana disertai tutur kata yang tertata, dalam suasana diskusi yang tidak jarang penuh ketegangan itu, seperti *oase* di padang pasir: menyejukkan dan menenangkan. Sebagai ahli bidang arkeologi, ia harus meneliti benda-benda purbakala; dan

keterampilan menari Jawa klasik yang tergabung Ikatan Seni Tari Indonesia, telah menjadikannya seorang empu ilmu dan empu tari sekaligus karena disiplin dalam pengendalian diri yang prima.

Hal menarik dari Direktur Jendral Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, periode 1993–1999 ini –dan karena itu pula yang menjadikannya seorang intelektual publik, tidak dipagari ruang gerak hanya di menara gading pada universitas yang paling ternama di negeri ini, Universitas Indonesia. Beliau tidak segan-segan menceburkan diri di keramaian dan kegalauan publik intelektual, seperti Taman Ismail Marzuki (TIM), Akademi Jakarta dan Institut Kesenian Jakarta (IKJ). Dengan latar belakang ilmu dan tari yang dimiliki, Bu Edi bisa duduk setara dengan para tokoh kebudayaan terkemuka, seperti Mochtar Lubis, Toeti Herati Noerhadi, Goenawan Mohamad, dan Umar Kayam. Sampai hari ini, usia Bu Edi yang makin senja masih aktif berkiprah di berbagai arena, di akademik maupun di luar akademik. Tidak terhitung lagi mereka yang pernah dibimbingnya. Ketika kebudayaan hari-hari ini seperti ingin diarusutamakan, diperlukan sosok seperti ibu dua anak ini yang tidak hanya paham, tetapi juga *nglakoni*.

Umar Kayam, dalam *Para Priyayi* (1991), seperti hendak mengusulkan sebuah definisi baru tentang apa yang lama diperbincangkan dalam dunia ilmu-ilmu sosial sebagai *priyayi*. Kayam dalam cerita rekaannya sangat bagus menggambarkan dunia luar maupun dunia dalam para priyayi Jawa itu. Ia seperti menyimpulkan bahwa *priyayi* adalah sebuah sikap dan pandangan hidup, bukan sesuatu yang berhubungan dengan keturunan, trah, atau darah. Menjadi *priyayi* yang demikian tidak menjadi monopoli orang Jawa, tetapi bisa bagi siapa saja –sejauh memiliki sikap dan pandangan *kepriyayian*.

Sikap dan pandangan *kepriyayian*, sebagai roh seorang priyayi ini, tersirat dari novel Umar Kayam itu. Hal ini menjadi sesuatu yang makin langka di tengah gelegak dan gemuruh perubahan sosial-politik yang menggeser dan menggusur tradisi-tradisi lama, yang tentu saja tidak semuanya baik dan cocok untuk zamannya. *Nah*, dalam kegelisahan dan kegalauan zaman yang penuh dengan ketidakpastian, para pakar bicara tentang algoritma dan disrupsi, kebudayaan dikomodifikasi sebagai pariwisata, sosok perempuan kelahiran Malang, 28 Oktober

1938 ini tampak seperti mewakili zaman lampau ketika *kepriyayan* tidak bisa dilepaskan dari tradisi Jawa. Namun demikian, ia juga mewakili *kepriyayan* sebagai sikap dan cara pandang yang baru, yang dilukiskan Umar Kayam dengan baik: jembar, merengkuh, tertata, dan mengayomi.



Garin Nugroho

Membaca berita film Korea Selatan *Parasite* berhasil menyabet piala Oscar, ingatan saya melayang pada Garin Nugroho. Dalam hati saya bertanya, “kapan Garin Nugroho meraih Oscar?” Saya bukan penonton film yang serius, dalam arti bisa mendiskusikan film secara sis-



Sumber: Retno (2020)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

tematis, tetapi film memang tontonan yang saya sukai. Banyak film Indonesia yang belum saya tonton, tapi film-film Garin Nugroho hampir semuanya atau sebagian besar pernah saya tonton. Film Garin terakhir yang saya tonton di bioskop adalah *Kucumbu Tubuh Indahku*. Sebelum itu, saya berkesempatan *nonton* bareng (nobar) film *Setan Jawa*, di rumah Rahayu Supanggah di Solo selepas menghadiri seminar internasional gamelan di ISI. Begitu usai *Setan Jawa* tayang, sambil bertepuk tangan, Jenifer Lindsey berbisik kepada saya “*a masterpiece!*”. Seingat saya, Garin Nugroho juga disebut sebagai “*a wonder boy*” dalam salah satu tulisan Ariel Heryanto.

Saya pikir, Garin Nugroho memang seorang sutradara film yang saat ini kita punya, paling layak untuk diharapkan suatu saat menyabet Oscar, seperti yang tahun ini diterima sutradara muda (50 tahun) Korea Selatan Bong Joon-Ho. Hampir setiap film yang dibuat Garin selalu mendapatkan penghargaan di berbagai festival film di luar negeri, tetapi belum menyabet penghargaan di festival Cannes, Golden Globe, dan Oscar. Seperti Bong Joon-Ho, sebelum menang Oscar harus menang dulu di Cannes. Tidak ada yang tahu kapan Garin bisa menang di Cannes.

Berbeda dengan sastra, film adalah bagian dari industri. Sebuah film adalah hasil dari sebuah proses panjang dan rumit dengan melibatkan banyak pihak. Seperti pengalaman dari Korea Selatan, mereka membutuhkan keterlibatan negara yang sungguh-sungguh. Jika seorang Joko Pinurbo, cukup sambil duduk di sebuah kafe di Seoul berhasil memproduksi beberapa puisi yang bagus, Garin Nugroho membutuhkan dukungan dan kerja sama banyak pihak untuk memproduksi sebuah film. Film *Setan Jawa*, bahkan membutuhkan *live music*. Komposisi musik dengan sinden dan gamelan beserta *pangrawit* lengkap, arahan maestro gamelan Jawa, Profesor Rahayu Supanggah, dosen dari ISI Surakarta. Selain melibatkan banyak pihak, ketersediaan modal dan dukungan negara adalah hal yang masih jadi masalah ketika kita membicarakan produksi kreatif di negeri ini, yaitu lemahnya tradisi atau infrastruktur kelembagaan yang harus secara berkesinambungan ada –jika sebuah karya kreatif ingin dikompetisikan di pentas internasional.

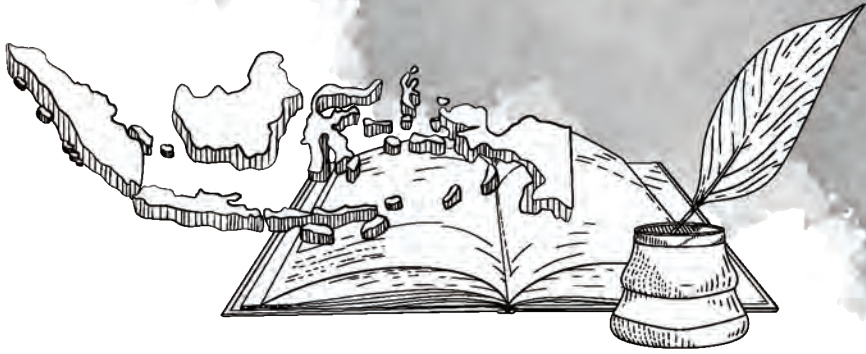
Bagi pekerja kreatif seperti Garin Nugroho atau Joko Pinurbo, persoalan tradisi atau infrastruktur kelembagaan ini boleh jadi tidak menjadi urusannya. Urusan mereka adalah menciptakan sebuah karya kreatif, skenario film, atau sebuah puisi. Membaca bagaimana industri perfilman di Korea Selatan berhasil memproduksi film yang sekaligus menyabet 8 Oscar sungguh sebuah pelajaran penting bagi Indonesia untuk berefleksi. Pada tahun 1950-an, Korea Selatan juga negeri miskin, apalagi selepas perang Korea yang menghabiskan sumber daya yang sangat besar. Meskipun kemudian menjadi basis tentara Amerika Serikat, Korea Selatan berada dalam bayang-bayang dominasi Jepang yang lebih dulu menjadi negara industri modern. Satu hal yang pasti, Korea Selatan kemudian tumbuh sebagai sebuah bangsa yang penuh harga diri dan berhasil membangun industri modern, bahkan mampu bersaing dengan Jepang. Bagi orang Korea Selatan, mungkin orang Jepang adalah *alter-ego*. Istana-istana kuno yang konon dulu di hancurkan Jepang dan sekarang di bangun kembali, selalu ada tulisan kalau istana ini pernah dihancurkan dan dibangun kembali oleh bangsa Korea sendiri. Ada kemarahan sekaligus harga diri sebagai sebuah bangsa.

Sebagai sutradara film, Garin Nugroho tidak bisa bekerja sendiri seperti Joko Pinurbo yang menulis puisi. Garin harus punya banyak teman dan relasi; tidak hanya untuk mendukung penampilan filmnya, tetapi juga untuk mendapatkan dukungan dalam memproduksi. Garin Nugroho sudah pasti harus menjalin kerja sama dengan banyak pihak, pemain film, crew produksi, juga para sponsor dan pemodalnya. Bagi Garin, menyelesaikan kuliah sinematografi di IKJ *masih* ada yang kurang, kemudian ia belajar hukum di UI, yang barangkali membuat dirinya lebih memahami isu-isu yang ingin digarap sebagai sebuah film. Tidak saja harus indah, namun juga menjadi lebih memiliki kelengkapan terhadap perspektif sosial dan politiknya.

Dengan senyumnya yang terkulum, potongan rambut yang seperti tidak pernah berubah, kaos oblong dan jaket tipisnya; ringan seperti kapas, Garin bergerak lincah ke segala arah. Film garapannya jauh dari selera pasar, bahkan cenderung memilih tema-tema yang tergolong kontroversial dan membongkar hal-hal untuk kebanyakan orang *masih* dianggap tabu. Film terakhirnya *Kucumbu Tubuh Indahku* men-

ceritakan perjalanan hidup seorang *transgender* yang menjadi penari Lengger keliling di Banyumas. Ketika *conservative turn*, sebuah istilah yang diperkenalkan oleh islamolog Martin Van Bruinnissen, untuk menggambarkan perkembangan Islam kontemporer di Indonesia, film Garin itu jelas melawan arus. Garin Nugroho, orang yang gelisah melihat masyarakatnya, sebagai pembuat film dia menyalurkan kegelisahannya dalam karya artistik, namun dia juga tahu itu jauh dari cukup. Ketika kita mengetahui Garin, bersama Moeslim Abdurachman, Franky Sahilatua (keduanya telah almarhum), dan Sukardi Rinakit (sekarang bekerja di Istana Merdeka) mencoba mengusung Sultan Yogyakarta untuk jadi presiden. Hal lain yang juga kita dengar, Garin Nugroho mencoba maju sebagai calon independen untuk bersaing menjadi gubernur DIY, kota kelahirannya. Tidak ada yang tahu, Garin Nugroho sedang serius atau bercanda. Mungkin kalau ditanya, dia hanya tersenyum atau tertawa terbahak-bahak.

Indonesia adalah sebuah negara dan bangsa yang besar –*besar dalam berbagai hal*. Tidak hanya jumlah penduduk dan wilayah yang luas, tetapi juga begitu banyak kemungkinan yang bisa terjadi atasnya. “*an unlikely nation*” kata sejarawan R.E. Elson (2008); “*a messy state, too big to fail*” kata Tom Friedman (2000), kolumnis The New York Times. Memang Indonesia bukan Ceko yang telah melahirkan Vaclav Havel, seorang penulis dan sutradara teater lalu menjadi presiden. Akan tetapi, *who knows*, seorang sutradara film suatu saat bisa menjadi presiden, bahkan sebelum menyabet piala Oscar sekalipun.



Gus Dur

Apa kira-kira yang akan dikatakan Gus Dur jika dia masih hidup dan melihat kita kerepotan menghadapi Covid-19? Apakah dia masih akan berseloroh “*Gitu aja kok repot?*”. Belum lama ini, karena banyak wak-



Sumber: Prasetya, 2016

Buku ini tidak diperjualbelikan.

tu di rumah, saya menemukan buku kumpulan kolomnya di Majalah Tempo yang ditulis tahun 1978–1992. Buku yang diterbitkan oleh Pusat Data dan Analisa Tempo itu berjudul *Melawan Melalui Lelucon* terbit tahun 2000 saat Gus Dur menjadi presiden. Melihat tanggal pemuatan kolom-kolom itu, tulisan-tulisan itu dibuat ketika Orde Baru berada di puncak kekuasaannya. Orde Baru yang oleh Herb Feith disebut sebagai *repressive developmentalist regime* itu, praktis tidak menoleransi suara kritis.

Dibandingkan hari ini, saat itu masyarakat sipil juga sangat lemah dalam menyuarakan kepentingan warga negara. Membaca tulisan Gus Dur hari ini, terlihat tokoh ini telah berpikir jauh melampaui zamannya. Kolom-kolomnya menyentuh hampir semua aspek kehidupan sosial politik, mulai dari pesantren dan *ludruk*, bahkan dari perkembangan politik internasional sampai urusan sepak bola. Membaca tulisan-tulisannya, menurut Syubah Asa yang memeriksa tulisan Gus Dur sebelum dimuat, Gus Dur hanya perlu waktu 1–2 jam untuk menulis kolomnya, sekali jadi dan dikerjakan di tempat yang memang disediakan untuk dia di kantor Majalah Tempo yang saat itu masih di bilangan Pasar Senen.

Kolom-kolom yang bisa disebut sebagai *short social commentary* itu merupakan refleksi atas sebuah peristiwa atau isu tertentu yang sedang hangat di masyarakat. Judul buku *Melawan Melalui Lelucon* (1981) diambil dari salah satu judul kolom yang terbit 19 Desember 1981. Di situ dia menulis:

“Lelucon, dan bentuk-bentuk humor lain, memang tidak dapat mengubah keadaan atas ‘tenaga sendiri’. Ini sudah wajar karena apalah kekuatan percikan perasaan manusia di hadapan kenyataan yang mencengkam kehidupan bangsa secara keseluruhan. Sedangkan ideologi besar-besar pun tidak mampu melakukan hal itu sendirian, masih harus ditunjang oleh berbagai hal, seperti agama, buruknya keadaan ekonomi, sentimen-sentimen primordial, dan seterusnya”.

Dalam kolom yang bertanggal 13 Februari 1982, berjudul *Perubahan Struktural tanpa Karl Marx*, tertulis “Dalam transformasi model Marx, atau lebih tepat model Marxisme-Leninisme, transformasi

dimulai ketika kekuasaan telah direbut. Apa yang terjadi sebelum itu hanyalah persiapan ke arah transformasi, bukan transformasinya sendiri. Setelah kekuasaan direbut, masih diperlukan semacam “pengawal revolusi” untuk menjaga kemurnian transformasi yang dihasilkan agar tidak diselewengkan. Bagi yang menolak ajaran Marxisme-Leninisme, walaupun menerima analisis sosial-ekonomisnya, perubahan terjadi justru sebelum kekuasaan ‘berubah kelamin’. Transformasi terjadi dalam sikap dan perilaku masyarakat secara keseluruhan melalui proses pendidikan berjangka panjang. Misalnya, melalui perjuangan menegakkan keadilan melalui bantuan hukum struktural. Atau melalui kesadaran berperilaku politik yang menjunjung asas kebebasan dan persamaan hak atau melalui penumbuhan dan pengembangan organisasi ekonomi yang benar-benar demokratis di tingkat bawah”.

Hampir semua kolom Gus Dur selalu *berisi*, mencerahkan, dan mampu menempatkan hal yang tampaknya sepele dalam konteks kemasyarakatan dan kebudayaan yang luas serta dikomunikasikan dengan gaya dan bahasa yang segar. Melihat topik dan isu yang menjadi subjek tulisannya, bisa dilihat keluasan pengetahuan dan pengalaman yang tersimpan di ingatannya. Sebagian tentu diperoleh dari bahan bacaannya, sebagian lain dari aktivismenya sebagai tokoh lintas bidang dan pergaulan dengan berbagai kalangan. Kedudukannya sebagai tokoh agama selain karena darah biru yang dimilikinya dalam trah pendiri NU juga karena ekspektasi dan apresiasi yang tinggi dari rekan-rekannya yang berasal dari kalangan non-Islam tentang peran yang harus dimainkannya dalam sebuah masyarakat yang mayoritas beragama Islam.

Dalam hidupnya, Gus Dur adalah seorang tokoh yang mampu tidak saja menjadi jembatan antara Islam dan non-Islam, tetapi juga merupakan tokoh yang menyadari ancaman kehidupan bersama bisa berasal dari klaim Islam sebagai agama mayoritas. Pada tahun 1990 ketika tokoh-tokoh Islam mendirikan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Gus Dur malah mendirikan Forum Demokrasi (Fordem) bersama rekan-rekannya yang sebagian non-Muslim. Sebuah sikap yang bagi sebagian tokoh muslim sulit diterima.

Dalam kolomnya yang berjudul *Tuhan Tidak Perlu Dibela* (1982) terlihat sikap dan pandangannya dalam “berislam” dan kerisauannya

akan pengatasnamaan “Tuhan” untuk kepentingan-kepentingan sempit umatnya. Tulisan yang terbit 26 Juni 1982 ini jika ditempatkan dalam perspektif hari ini akan sangat menarik karena masih sangat relevan. Sepeninggal Gus Dur, tampak bagaimana Tuhan dan agama hanya dijadikan “*alat politik*” untuk kepentingan remeh-temeh orang yang seolah-olah mengagungkannya. Dalam tulisan itu, Gus Dur mengutip Al-Hujwiri: “Bila engkau menganggap Allah ada hanya karena engkau yang merumuskannya, hakikatnya engkau sudah menjadi kafir. Allah tidak perlu disesali kalau ia ‘menyulitkan’ kita. Juga tidak perlu dibela kalau orang menyerang hakikat-Nya”.

Gus Dur memang *nyeleneh*, tetapi ke-*nyeleneh*-annya bukan ke-*nyeleneh*-an untuk sekadar terlihat lain atau hanya untuk mencari perhatian. Akan tetapi, sebuah reaksi *intelligent* dari keprihatinan dan komitmennya untuk menjaga kehidupan bersama yang sedang terancam di matanya. *Think the unthinkable* menjadi ciri gerak intuitif dari gagasan-gagasan segar yang keluar dari benaknya. Fakta ini menunjukkan Gus Dur memang intelektual sejati dan kekuasaan seharusnya memang bukan wilayahnya. Komplikasi yang dialami memaksanya turun dari kursi kepresidenan pada tahun 2001. Peristiwa itu mencerminkan Gus Dur bukan orang yang piawai menggegap kekuasaan. Greg Barton, yang menulis biografinya merinci komplikasi-komplikasi yang dialami Gus Dur dengan detail dan baik.

Berbeda dengan kebanyakan tokoh politik yang ikut menjatuhkan Bung Karno, pada tahun-tahun kritis pasca 1965, sejak 1963 hingga 1971 Gus Dur malah *klayapan* di Kairo, Bagdad, dan Eropa. Meskipun resmi dikirim untuk belajar di universitas, Gus Dur mengaku banyak belajar di luar kampus. Di Al Azhar, Gus Dur dan Gus Mus (Mustofa Bisri) mengorganisasi kegiatan ekstrakurikuler dan membuat majalah mahasiswa. Oleh karena itu, Gus Dur menjadi tokoh unik karena berbeda dengan generasi seangkatannya yang ikut mendongkel Bung Karno, seperti Soe Hok Gie, Rahman Tolleng, dan Marsillam Simanjuntak, justru Gus Dur absen dari demonstrasi Angkatan 66. Gus Dur pun tidak termasuk penandatanganan Manifest Kebudayaan, seperti Arief Budiman dan Goenawan Mohamad. Kembali dari melanglang buana pada tahun 1971, artinya masuk ke dalam suasana normal pasca

1965, para teknokrat di bawah Widjojo Nitisastro mulai mengimplementasikan rencana pembangunan lima tahunannya. Masyarakat Indonesia memasuki *the new normal* politik massa mengambang, perampingan partai politik, dan pemilihan umum lima tahunan yang selalu dimenangkan Golkar. Pada masa politik seperti ini, Gus Dur menulis kolom-kolomnya dan pada masa penuh represi ini juga Gus Dur memainkan peran sebagai Ketua Umum NU untuk menjaga kepentingan umatnya sekaligus *meladeni* kepentingan Soeharto. Hanya seorang Gus Dur yang berhasil melawan Soeharto, tanpa perlu masuk penjara.

Selama hampir sepuluh tahun setelah meninggalkan istana yang hanya dihuninya selama 21 bulan, dengan berbagai kendala fisik yang disandang tubuh, terbukti tidak membuatnya mengendorkan aktivitas atau beristirahat menikmati hari tua bersama cucunya. Gus Dur terus bergerak, kekecewaan karena penghianatan dari teman-temannya tidak membuatnya larut dalam dendam kesumat. Dia tahu ada yang jauh lebih penting dan lebih besar dari sekadar dirinya. Di mata hatinya, ada yang dilihatnya sebagai sesuatu yang sedang mengancam masyarakat dan dia harus melawan untuk menjaga kewarasan hidup bersama. Seperti sajak W.S. Rendra (1974):

*Aku mendengar suara
Jerit hewan yang terluka
Ada orang memamah rembulan
Ada anak burung terjatuh dari sangkarnya
Orang-orang harus dibangunkan
Kesaksian harus diberikan
Agar kehidupan bisa terjaga*



Buku ini tidak diperjualbelikan.



Gus Mus

Sudah lama saya ingin menemui kyai yang di mata saya sangat mengagumkan. Sobat saya, Kang Sobary, menasihati “*Jangan lupa mampir beli peci dulu kalau sowan Gus Mus*”. Kesempatan itu akhirnya datang



Sumber: Misrawi (2016)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

juga. Saat itu, sebagai anggota Tim Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk meneliti kawasan pegunungan Kendeng memberi kesempatan saya beberapa hari di Rembang. Sejak dibangun pabrik Semen, muncul ketegangan karena sebagian petani menolak pabrik yang akan mengganggu cadangan air tanah yang vital bagi pertanian. Sejak di Hotel Fave, tempat tim KLHS menginap yang letaknya di seberang alun-alun kota Rembang, saya sudah diberi tahu letak Pondok Pesantren Raudlatut Maarut Thalibin yang menjadi tempat kediaman Gus Mus. Sebelum menuju rumah Gus Mus, saya berkonsultasi dulu dengan Kang Sobary. Kata Sobary, kalau ketemu bilang saja kalau saya teman Mohamad Sobary dari LIPI.

Hari masih pagi ketika saya sampai di kompleks pesantren Gus Mus yang berada di Desa Leteh. Saya kaget karena sudah ramai: laki-laki perempuan, tua muda, suasana sibuk sekali; saya lihat makanan dan minuman sedang diedarkan. Rupanya, mereka sudah di sana sejak subuh dan katanya kebiasaan Gus Mus memberikan pengajian setelah subuhan. Pada hari itu merupakan haul Gus Mus. Saya bertanya pada salah seorang di dekat saya, bagaimana kalau ingin bertemu dengan Gus Mus. Orang itu menunjuk sebuah rumah dalam kompleks itu sambil bilang, “Bapak ke situ saja, ikut antrean orang-orang yang ingin bertemu Gus Mus”.

Setelah ikut makan, saya masuk ke ruang tamu yang sudah hampir penuh. Saya memilih duduk di pojok, semua mata tertuju pada pintu bertirai yang diapit dua lemari kaca besar penuh buku. Sampai akhirnya ada bayang-bayang tinggi besar di balik tirai, setelah tirai terkuak tampaklah sosok Gus Mus yang ditunggu-tunggu. Begitu keluar, dengan wajah cerah sumringah, mengucapkan salam kemudian duduk bersila. Seketika sang asisten duduk mendekat, sambil membacakan catatan, seperti membisikkan sesuatu, mungkin melaporkan dari mana saja rombongan tamunya dan untuk keperluan apa mereka datang bertemu.

Saat itu, saya menyaksikan *live events*, seorang kyai berkomunikasi dengan umatnya. Sebagian tampaknya datang dari jauh untuk mendapatkan nasihat, namun mungkin yang paling utama adalah mendapatkan doa langsung dari kyainya. Para tamu itu, umumnya se-

dang merencanakan sesuatu yang penting dalam hidup. Niat atau ha-
jat itulah yang disampaikan ke kyainya, kadang-kadang melalui bisik-
bisik, mungkin karena rencana itu bersifat sangat pribadi. Beberapa,
selain menyampaikan niat sendiri atau rombongannya, juga membawa
surat atau catatan, mungkin titipan dari sanak saudara atau handai tau-
lan yang tidak bisa ikut datang. Beberapa rombongan ternyata mem-
inta didoakan karena akan naik haji atau umroh. Namun demikian,
respons Gus Mus terhadap rombongan yang ingin ke tanah suci ini
bagi saya bagian yang paling menarik.

Rombongan yang rata-rata sudah berusia tua itu, laki-laki dengan
baju koko atau batik lengan panjang, sebagian berkain sarung dan peci.
Sementara itu, para perempuan berkain kebaya dan kerudung, bukan
jilbab warna-warni yang saya lihat di kota; diwakili oleh ketuanya
menyampaikan niat untuk ke Mekah dan meminta petunjuk apa yang
harus dipersiapkan dan dilakukan nanti di Mekah agar selamat dan
menjadi haji mabrur. Setelah berbagai kata-kata wejangan, nasihat Gus
Mus yang satu ini membuat saya kaget.

*“Wis ora usah moco ayat-ayat sing angel-angel, ndonga nganggo boso
Jowo wae, opo sing dadi niatmu, sing penting khusus”.*

Terjemahannya, *“Sudahlah, tidak perlu menghafalkan ayat-ayat yang
susah-susah itu, berdoa pakai bahasa Jawa saja, apa yang menjadi
niatmu, yang penting khusus”.*

Mendengar nasihat yang satu ini, saya terus terang agak terpera-
ngah. Saya tidak menduga Gus Mus akan memberi nasihat seperti itu.
Saya hanya mengira-ngira, melihat penampilan rombongan laki-laki
dan perempuan itu, barangkali orang-orang ini adalah orang-orang Is-
lam Jawa yang tampaknya tidak menguasai bacaan doa dalam bahasa
Arab. Mungkin ini adalah hal yang biasa bagi Gus Mus, tetapi tetap
saja mendengar nasihatnya pada orang-orang ini membuat saya mere-
fleksikan suatu kedalaman dan kearifan; sikap yang membuat saya ma-
kin menghormatinya. Di kalangan orang Jawa, ada ungkapan *agomo*,
ageman, *ageming aji* yang artinya “agama, pakaian, pegangan sejati”.
Di akhir pertemuan dengan umatnya yang mau naik haji itu, Gus Mus
membacakan doa dalam bahasa Arab yang cukup panjang, mencer-

minkan kesejatan sebagai pengelola pesantren yang *memilih* dekat dengan rakyat yang membutuhkannya daripada kekuasaan yang di matanya hampa.

Saya merupakan orang terakhir yang diterima Gus Mus pada pagi menjelang siang itu. Setelah tidak lupa memperkenalkan diri sebagai teman Kang Sobary dari LIPI, Gus Mus langsung tersenyum lebar mendengarnya. Saya sampaikan kalau saya ke Rembang sebagai anggota Tim KLHS yang diminta oleh Presiden Jokowi mendalami aspirasi masyarakat yang sedang berkonflik dengan pabrik Semen. Gus Mus segera mengerti dan setelah berbincang tentang keprihatinan beliau tentang keadaan masyarakat dan lingkungan, beliau menyarankan agar saya ketemu salah satu kyai pembantunya yang selalu mewakili dalam persoalan yang menyangkut konflik pabrik semen di Rembang ini. Rupanya, menjelang siang, setelah pertemuan dengan para umatnya itu, Gus Mus harus bersiap untuk berangkat ke Jakarta untuk menghadiri sebuah acara.

Saya diantar oleh salah seorang santrinya menuju sebuah rumah tidak jauh dari rumah Gus Mus untuk menemui sang tuan rumah – seorang kyai muda dan sepertinya salah seorang tangan kanan Gus Mus. Sambil minum kopi khas Rembang, saya melanjutkan ngobrol soal pabrik semen dan rupanya berdatangan tamu-tamu lain ikut ngobrol, antara lain salah satu putra Gus Cholil, kakak Gus Mus. Tidak terasa waktu salat Jumat tiba, pergilah kami bersama-sama ke Masjid Agung kota Rembang untuk melaksanakan salat Jumat. Ketika duduk bersila mendengarkan khotbah Jumat itu, ingatan saya justru melayang ke Banyuwangi. Saya teringat apa yang ditulis Andrew Beaty tentang orang-orang Osing yang ditelitinya.

Dalam bukunya itu, *Varieties of Javanese Religion: An Anthropological Account* (1999), Andrew Beaty, antropolog dari Oxford itu menuliskan kembali pembicaraan verbatim dua orang Osing tentang Makkah dan Tuhan. Tentu aslinya dalam bahasa Osing, kalau Beaty menginggriskannya, saya di sini mengindonesiakannya. “*Kamu tahu di mana letak Makkah yang menjadi tujuan kalau naik haji?*”, orang Osing pertama bertanya. Sambil menunjuk orang Osing kedua yang ditanya itu menjawab “*di barat*”. Orang Osing pertama melanjutkan

pertanyaannya, “Jika kamu sudah ketemu Makkah dan terus berjalan mengitari bumi, kamu akan sampai di mana?” Orang Osing kedua yang ditanya sedikit bingung, tetapi kemudian mengangguk-angguk ketika orang Osing pertama itu menjawab pertanyaannya sendiri. “Sampai ke punggungmu, kan?,” “Jadi di mana Tuhan yang kamu cari itu?,” “Di dalam dirimu sendiri, bukan?”.

Gus Mus selain kyai juga seorang pelukis dan penyair. Sebuah puisinya, ditulis tanggal 22 Maret 2020 di Surabaya, berjudul *Tuhan Mengajarkan Melalui Corona*. Saya kutipkan dua bait dari puisinya yang cukup panjang itu.

*Datangi, temui dan kenali Dia di dalam relung jiwa dan hati
nuranimu sendiri
Temukan Dia di saat yang teduh di mana engkau hanya sendiri
bersamanya
Sesungguhnya Kerajaan Tuhan ada dalam dirimu
Qalbun mukmin baitullah
Hati orang yang beriman adalah rumah Tuhan*

Mengingat kembali perjumpaan yang singkat dengan Gus Mus itu, saya yang sudah dua bulan mengurung diri di rumah, tercenung. *What a coincidence!*



Buku ini tidak diperjualbelikan.



George Junus Aditjondro

Sedikit lebih muda dari Goenawan Mohamad (GM) dan Arief Budiman (AB), keduanya lahir 1941, George Junus Aditjondro (GJA) lahir 1946 dan meninggal tahun 2016. Tidak seperti GM dan AB yang sudah terlibat aktif sebagai intelektual publik di ujung masa pemerin-



Sumber: Zoelverdi (2016)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

tahan Soekarno dan awal masa Soeharto, GJA tumbuh besar seiring dengan membengkaknya kekuasaan Soeharto sejak Peristiwa Malari 1974. Sepertinya paradoks, Soeharto justru makin menggurita setelah gagalnya kritik paling besar oleh aksi protes mahasiswa tahun 1974.

Boleh dikatakan GJA tumbuh dalam tradisi jurnalisme kritis majalah Tempo. Majalah Tempo adalah salah satu mata air (dalam bahasa Jawa *Tuk*) para intelektual publik Indonesia. Seseorang disebut sebagai intelektual publik jika aktif menuliskan gagasan-gagasannya dengan kata lain: tulis-menulis adalah dunianya. Di Tempo, saya kira GJA orang yang memilih menulis soal lingkungan, sebuah bidang yang masih langka saat itu. Lingkungan terbukti merupakan bidang yang menjadi sangat krusial karena pemerintahan Soeharto, dengan Widjojo Nitisastro dan geng ekonom dari FEUI, menjadikan SDA negeri ini modal dasar pembangunan ekonominya. Tidak aneh jika lingkungan kemudian menjadi rusak parah dijarah oleh Orde Baru.

Dari isu-isu lingkungan GJA bergerak ke mana-mana, tidak saja secara tematik tetapi secara geografis. Ketika sebagai jurnalis dia merasa tidak cukup efektif melakukan kritik, GJA keluar dan mulai merintis gerakan untuk mengadvokasi persoalan lingkungan hidup. Kerusakan yang parah dari lingkungan hidup disadari oleh Widjojo dan ditunjukkan Emil Salim salah satu anggota gengnya, menjadi menteri yang mengurus lingkungan hidup. Keputusan Widjojo itu saya kira tidak hanya sudah terlambat, tetapi hanya menjadi gincu karena mesin pembangunan ekonomi Orde Baru tidak mungkin berjalan tanpa merusak lingkungan, menghabiskan minyak bumi, dan memabat hutan.

Keahlian utama Emil Salim adalah soal pemerataan pendapatan, sebuah isu yang jika ditangani dengan serius sejak akhir 1970-an sehingga Indonesia tidak menjadi negeri yang sangat timpang pendapatan penduduknya; malah menjadikan isu lingkungan semacam penghibur duka lara akibat strategi pembangunan yang dipilihnya. Gunawan Wiradi, ahli agraria dari Bogor secara retorik pernah bilang, kalau zaman Soekarno tidak ada sebatang pohon pun yang ditebang. GJA, meskipun kemudian meraih gelar doktor dari Cornell, dengan disertasi tentang dampak pembangunan dam-dam raksasa dan sempat mengajar di UKSW; sejak keluar dari Tempo, ia menghabiskan waktu sebagai

aktivis. Dunia tulis-menulis tetap digeluti, namun kiprahnya langsung mengubah sesuatu di masyarakat. Membangun organisasi, mendirikan kantor LSM dan terlibat langsung dalam berbagai gerakan melawan penindasan negara.

Sebagai aktivis, GJA sejatinya seorang pejuang pembela hak-hak asasi manusia. Dalam berkiprah, GJA memilih tempat-tempat yang penuh bahaya dan risiko politik. Ketika Papua masih asing bagi banyak aktivis, GJA membangun LSM yang kemudian terbukti sangat berpengaruh di sana. Ketika Timor Timur dan Aceh bergolak, GJA mungkin aktivis Indonesia generasi pertama yang masuk daerah yang sarat dengan DOM itu. Mungkin, karena dia dibesarkan di Makassar, kemudian memilih tinggal dan aktif di Palu, Sulawesi Tengah; bersama sahabatnya Arianto Sangaji membentuk Yayasan Tanah Merdeka dan kemudian di makamkan di sana. GJA, mungkin seorang intelektual publik yang paling berani dan kontroversial di Indonesia. Karena kevoalannya, dia harus melarikan diri untuk sementara ke Australia. GJA jelas bukan intelektual yang ke luar negeri untuk mencari penghidupan yang lebih baik, memiliki ruang kerja yang nyaman, bisa menulis dan melakukan riset dengan tenang; dia bukan jenis intelektual seperti itu. Dunianya di tempat-tempat yang berbahaya dan penuh konflik, di negerinya sendiri.



Buku ini tidak diperjualbelikan.



Goenawan Mohamad

Tak banyak intelektual Indonesia yang dikaruniai kesehatan, umur panjang dengan karya yang terjaga mutunya. Arief Budiman, teman baik Goenawan Mohamad, suatu saat di Salatiga berkomentar tentang



Sumber: Zulkarnain (2015)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

catatan pinggir yang ditulis setiap akhir pekan oleh Goenawan Mohamad, selalu bagus dan kritis, tidak banyak orang bisa seperti itu, katanya. Karena Goenawan Mohamad melintasi berbagai rezim politik, mungkin hal itu membuatnya dapat menulis dalam perspektif pergantian zaman yang bagi intelektual yang lebih muda sulit melakukannya. Goenawan Mohamad sudah aktif menulis ketika Soekarno masih berkuasa, kemudian ikut meruntuhkannya dan hanyut bersama lahirnya Orde Baru: meruntuhkan lagi dan tetap independen dua dekade setelahnya.

Dalam sebuah kesempatan, ketika para cendekiawan ramai-ramai membuat berbagai macam ikatan, Goenawan Mohamad cuma *nyeletuk*, “cendekiawan, *kan* mustinya bekerja secara individual bukan bikin organisasi”. Cendekiawan atau intelektual, bagi Goenawan Mohamad, saya kira, adalah orang yang berpikir bebas tidak berpretensi mewakili perkumpulan apa pun, meskipun pikiran yang diekspresikan secara langsung atau samar-samar, menyuarakan keresahan orang banyak, dan kegelisahan publik. Walaupun demikian, nampak kiprah Goenawan Mohamad yang tidak ragu-ragu turun dan terlibat dalam gerakan untuk memprotes pemerintah untuk membela mereka yang dianiaya, bahkan bergabung untuk mendirikan partai politik.

Politik masih dipercayai Goenawan Mohamad sebagai ruang publik mengupayakan kebaikan bersama, meskipun banyak kekecewaan dan kemurungan ketika menjalaninya. Membaca tulisan-tulisan Goenawan Mohamad, kata adalah awal yang utama, bahan baku yang diolahnya begitu rupa, menjadi puisi menjadi esai yang hampir selalu *menukik dalam* terhadap sesuatu; kritis mencerahkan tetapi juga indah. Goenawan Mohamad ternyata tidak hanya menulis puisi dan esai, tetapi juga novel, naskah drama (*libretto*), mengubah tari Jawa klasik, dan konon juga melukis.

Sebagai wartawan, dia tidak sekadar reporter tetapi mendirikan dan memimpin sebuah majalah mingguan yang bergengsi. Sebagai penyair dan esais, dia tidak hanya menulis, tetapi membangun tempat untuk menyemai komunitas bersama merayakan kemerdekaan dan kebebasan kreatif. Sebagai bagian dari generasi intelektual yang dibesarkan ketika Jakarta memiliki Ali Sadikin yang tidak saja memper-

baiki kampung-kampung kumuh, tetapi juga membangun pusat kesenian Taman Ismail Marzuki, Goenawan Mohamad sangat menyadari pentingnya situs tempat pertemuan berbagai gagasan dan ekspresi kreatif. Saya kira dia juga meyakini bahwa kebudayaan yang sehat hanya mungkin tumbuh karena tersebarnya komunitas-komunitas kesenian yg beragam dan tidak perlu harus ada sebuah pusat.

Membaca tulisan-tulisan Goenawan Mohamad, seperti sudah banyak dikomentari orang, lirih bertanya-tanya menyentuh banyak hal, mengutip banyak buku, menceritakan tentang tokoh-tokoh, mengabarkan tentang berbagai tempat yang pernah disinggahnya; mengulas berbagai hal, bahkan yang muskil seperti *Tuhan* dan hal-hal yang belum selesai.

Goenawan Mohamad jelas tidak hanya dikaruniai kesempatan untuk mengarungi kehidupan dari zaman dan politik yang berbeda, namun juga melayari peradaban yang tak bertepi dan menyinggahi banyak tempat; dengan daya imajinasinya yang terasah diolahnya menjadi berbagai karya yang unggul.

Goenawan Mohamad *terlibat* dan *melibatkan diri* dalam politik setiap zaman yang dilaluinya. Politik hampir selalu berarti membuat pilihan, memihak, dan karena itu niscaya memiliki lawan –mereka yang berada di pihak sana. Goenawan Mohamad dari kacamata mereka yang memilih berada di pihak sana, tentu memiliki *cela* dan *celah* untuk dikritik. Kritik, saya kira, bagian penting bagi dan dalam kehidupan Goenawan Mohamad sebagai seorang intelektual publik.



Buku ini tidak diperjualbelikan.



Gunarti

Imajinasi saya begitu terbatas untuk bisa membayangkan, apalagi merasakan dan mengerti bagaimana menjadi seorang perempuan seperti Gunarti. Dibesarkan dalam keluarga *sedulur sikep* di kawasan per-



Sumber: Baihaqi (2019)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

tanian antara Kudus dan Pati, bagian dari pegunungan kapur Kendeng yang dilihat dari jauh seperti raksasa sedang lelap tidur.

Meski praktis tidak bersentuhan dengan bangku sekolah seperti umumnya anak-anak di pedesaan Jawa, Gunarti tumbuh sebagai seorang yang tidak saja sadar bahwa pertanian perlu dipertahankan, namun juga keyakinan yang mendalam bahwa ibu bumi harus disantuni kalau manusia ingin selamat.

Pada suatu siang yang cukup terik, saya menyempatkan diri mencari rumah Pak Wargono, ayah kandung Gunarti. Akhirnya, saya bertemu setelah beberapa kali bertanya pada orang di pinggir jalan atau di tepi sawah. Saya datang tanpa memberi tahu sebelumnya. Sesampai di rumah Pak Wargono lepas tengah hari, dibukakan pintu oleh Bu Wargono, dengan baju kebaya dan kain batik sederhana, tanpa ada kesan ragu mempersilakan masuk setelah saya ingatkan kalau saya pernah bertemu di Sukolilo beberapa waktu sebelumnya. Pak Wargono rupanya baru pulang dari sawah, hanya mengenakan celana pendek warna hitam tanpa baju yang memperlihatkan badannya yang masih tegap berotot tanda kebiasaannya untuk mencangkul dan mengarit di tanah pekarangan dan sawahnya. Mungkinkah manusia hidup tanpa tanah? Betapa benarnya *sedulur sikep*.

Karena menurut Bu Wargono dan Pak Wargono sudah waktunya makan siang, saya pun diajak makan bersama mereka. Nasi dan sayur lodeh mungkin hasil dari kebun dan sawah mereka sendiri. Kami ngobrol *ngalor-ngidul* di ruangan tengahnya yang teduh, tidak terasa diam-diam saya menemukan sebuah kedalaman hati dari kesederhanaan yang penuh harga diri. Mungkin dari kacamata orang kota, mereka terlihat miskin, tetapi jelas ada integritas sebagai manusia, ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang *genuine* di sana, rasa solidaritas terhadap sesama, dan sikap syukur terhadap alam yang telah mengaruniai ketentraman dan kehidupan.

Dari sebuah keluarga *sedulur sikep* yang sederhana, seperti keluarga Pak dan Bu Wargono, lahir orang seperti Gunarti dan kakaknya Gunretno. Keduanya bahu-membahu bersama *sedulur sikep* lain dan tetangga-tetangganya yang menjadi petani di kawasan gunung Ken-

deng tidak mengenal lelah dan putus asa untuk terus menyuarakan kepentingan mereka sebagai petani meskipun saat ini terancam masa depannya. Hal itu disebabkan karena pemerintah membiarkan sebuah pabrik semen terus beroperasi meskipun bukti-bukti menunjukkan kerusakan yang *telah dan akan* terjadi di kawasan gunung kapur Kendeng. Gunung itu merupakan tempat menyimpan air tanah yang sangat diperlukan tidak saja untuk mengairi sawah, tetapi juga untuk berbagai keperluan manusia untuk kelangsungan hidup.

Keprihatinan untuk melestarikan lingkungan pegunungan kapur Kendeng sudah disuarakan oleh kakak beradik Gunarti dan Gunretno lebih dari sepuluh tahun yang lalu. Bahkan, tidak hanya sekali mereka menyampaikan keprihatinan itu langsung kepada Presiden Jokowi di istana maupun di tempat lain.

Berkali-kali dengan para petani dari kabupaten-kabupaten lain yang mengalami ancaman dari pabrik-pabrik semen, dengan ongkos yang mungkin dikumpulkan dengan susah payah untuk menyewa truk atau naik bus, mereka berdemo di depan istana di Jakarta dan di depan kantor gubernur di Semarang. Tujuan mereka tak lain adalah menyuarakan protes menolak kehadiran pabrik semen yang secara hukum seharusnya dicabut izin operasinya.

Dalam aksi protes secara damai itu, Gunarti dengan kain dan kebaya yang serba hitam dan capping bambu dengan tulisan “Tolak Pabrik Semen”, selalu melantunkan sebuah tembang dengan suaranya yang lirih dan menggetarkan.

*Ibu bumi wis maringi
Ibu bumi dilarani
Ibu bumi kang ngadili*

(Ibu bumi sudah memberi
Ibu bumi disakiti
Ibu bumi yang mengadili)

Kesederhanaan, kedalaman hati, harga diri dan integritas serta solidaritas dengan sesama yang secara turun temurun dimiliki *sedulur sikep* terbukti mampu mengartikulasikan sebuah kesadaran akan an-

caman masa depan yang akan dialami oleh planet bumi yang oleh para cerdas-pandai di negeri-negeri maju telah ramai dikemukakan. Planet bumi jika tidak mulai sekarang diselamatkan akan terjadi *bencana hebat* akibat dari apa yang sering disebut-sebut sebagai *global warming* dan *climate change*. Gunarti dan *sedulur sikep* serta tetangga-tetangganya di pegunungan kapur Kendeng bukankah memiliki kesimpulan yang sama tentang “*ibu bumi kang ngadili*” dengan para “*cerdik-pandai di negeri-negeri maju itu*”?

Ketika di negeri-negeri maju di Eropa, Skandinavia, Australia, New Zealand, Jepang, Amerika, dan Kanada; masyarakatnya merindukan kembali ke alam dan untuk itu mereka menciptakan kota-kota dan hunian yang ramah lingkungan; Gunarti dan komunitasnya di Kendeng tanpa harus menjadi negeri maju, sudah hidup menyatu dengan alam. Hal itu merupakan sesuatu yang sangat dirindukan oleh orang-orang yang hidup di negeri maju.

Jika demikian, “maju” atau “kemajuan” seperti apa sebenarnya kita imajinasikan? Dalam kesederhanaannya, Gunarti mengajari sendiri anak-anaknya dan anak-anak *sedulur sikep* lain tidak saja membaca dan menulis, tetapi juga bertani dan berkesenian. Buat apa menjadi pintar kalau hanya untuk menipu dan tidak bisa mengajarkan bagaimana hidup bersama.

Pemerintahan di Indonesia pasca 1965 hingga hari ini terus memabat hutan di Sumatra, Kalimantan, dan sekarang di Papua tanpa kendali dan tanpa rasa bersalah. Pak Gunawan Wiradi dari Sayogyo Institute, yang telah melewati berbagai pergantian pemerintahan pernah bilang dalam sebuah percakapan pribadi, bahwa zaman Bung Karno tidak ada satu batang pohon pun yang ditebang.

Selain memabat hutan dengan ganas, kota-kota dibangun tanpa perencanaan yang jelas. Menjadi tempat hunian yang tidak ramah dengan lingkungan dan membiarkan warga negaranya yang mayoritas miskin menghirup udara kotor karena asap yang keluar dari pabrik-pabrik dan jalanan yang penuh sesak dengan mobil dan motor.

Mencoba mengejar dan meniru menjadi negeri maju, seperti yang sampai hari ini dilakukan oleh pemerintahan di negeri ini, tidak hanya mencerminkan sebuah kesia-siaan. Akan tetapi, juga sebuah proses

menuju kematian secara perlahan-lahan karena manusia telah menyakiti alam yang telah memberi kehidupan dan tinggal menunggu saatnya saja alam akan mengadili manusia.

Berangkat dari kesahajaan, Gunarti dan *sedulur sikep* bersama tetanga-tetangganya yang menghuni kawasan pegunungan kapur Kendeng terus menagih janji yang pernah diucapkan dari mulut Presiden Jokowi di istana negara untuk memperhatikan nasib mereka yang terancam oleh kehadiran pabrik semen. Amdal yang amburadul itu, jangan-jangan Presiden Jokowi memang sudah tidak ingat lagi akan janjinya. Beliau disibukkan oleh mimpinya sendiri akan “Indonesia Maju” mengejar ketinggalan dari negeri-negeri maju. Haruskah kita belajar dari *sedulur sikep* bahwa kemajuan bukan orang lain yang menentukan tetapi hati kita sendiri?



Buku ini tidak diperjualbelikan.



Gunawan Wiradi

Tidak banyak yang mengetahui jika ketua tim penyusun draf Undang-undang Penanaman Modal Asing (PMA) pada tahun 1966 adalah Selo Sumardjan, seorang ahli sosiologi. Fakta ini saya temukan dalam buku Jeffrey Winters, *Power in Motion: Capital Mobility and The*



Sumber: Herlambang (2019)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Indonesian State yang terbit tahun 1996, sepuluh tahun setelah *Indonesia: The Rise of Capital* (1986) karya Richard Robison.

Dalam buku yang semula merupakan disertasi doktor (1991) di Yale university, Jeffrey Winters mengungkapkan dengan sangat rinci bagaimana proses transformasi politik-ekonomi Indonesia dari yang semula menentang imperialisme dan neo-kolonialisme, secara perlahan-lahan kemudian sepenuhnya berada dalam pelukan kapitalisme. Sejak awal Orde Baru, pergerakan investasi modal asing dan hutang terbukti dikontrol oleh para kapitalis (*financial controllers*) yang berada di luar kendali negara.

Penyusunan UU PMA adalah bentuk kesediaan negara untuk menuruti kemauan para kapitalis untuk mau menggerakkan modalnya ke Indonesia. Negara perlu menciptakan *investment climate* yang ramah terhadap para investor.

Mungkin ada yang bertanya, mengapa Selo Sumardjan? Jawabnya, seperti dapat dibaca dalam buku Jeffrey Winters itu, karena Selo Sumardjan adalah sekretaris pribadi Sultan Hamengku Buwono IX yang merupakan salah satu di antara tiga tokoh utama, selain Jendral Soeharto dan Adam Malik; yang menjadi *triumvirate* pasca peristiwa 1965 dan digulingkannya Presiden Sukarno.

Alkisah, ambruknya ekonomi yang ditandai oleh tingkat inflasi yang mencapai 600 persen itu, memaksa Indonesia untuk mencari pinjaman hutang dari negara-negara barat yang dimusuhi oleh Soekarno.

Satu-satunya tokoh yang masih dipercaya oleh negara-negara barat dalam situasi yang dianggap sebagai krisis ekonomi itu hanyalah Sultan Hamengku Buwono IX. Sebuah delegasi yang diketuai oleh Sultan Hamengkubuwono IX dan Selo Sumardjan sebagai sekretaris, sebagai anggota antara lain Adam Malik, Mohamad Sadli, dan Emil Salim; mengadakan pertemuan penting dengan para CEO *Multi National Corporation* di Jenewa awal 1967, dengan satu tujuan mengundang para investor itu ke Indonesia.

Undang Undang Penanaman Modal 1966 yang *draft*-nya banyak dibantu oleh konsultan dari Amerika itu adalah sebuah kunci pembuka almari yang berisi harta karun kekayaan alam Indonesia yang

sejak lama menjadi incaran negara-negara barat. Adalah sebuah ironi sejarah ketika konsorsium negara-negara kapitalis barat yang bersedia meminjamkan hutang kepada Indonesia, Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI) diketuai oleh Belanda, bekas penjajah Indonesia. Neo-kolonialisme yang sebelumnya ditentang habis-habisan oleh Soekarno, oleh Orde Baru justru diundang dengan penuh rasa hormat masuk ke Indonesia.

Kisah ini menurut hemat saya *background* yang tepat untuk menempatkan sosok Gunawan Wiradi yang tanggal 29 Agustus yang lalu genap berusia 89 tahun. Sosok Gunawan Wiradi yang dikenal lekat dengan isu *reforma agraria* dan *land reform* yang sejak berakhirnya Orde Baru seperti ingin dibangkitkan kembali dari kuburnya itu, menjadi bagian penting dari komitmen yang kuat terhadap isu yang lebih besar, yaitu keadilan sosial.

Sebuah buku biografi yang sangat bagus tentang Gunawan Wiradi, akrab dipanggil GWR itu terbit sebagai kado ulang tahunnya yang ke-87 belum lama ini. Membaca buku “*GWR Jali Merah: Dari Berbagai Tuturan Biografis Gunawan Wiradi*” (2019), yang ditulis oleh Surya Saluang, menampakkan perjalanan hidup sebuah pribadi yang melintasi zaman Orde Lama ke Orde Baru dengan penuh *passion*. Meskipun ia terombang-ambing dalam pendulum politik yang bergerak cepat, namun tetap memegang komitmen terhadap keadilan sosial dan orang kecil, khususnya para petani.

Ketika hari-hari ini reforma agraria seperti hidup kembali, dalam kebijakan pemerintah dan seminar-seminar para ahli; pastilah bukan seperti yang diharapkan oleh Gunawan Wiradi. Konteks sosial politik telah berubah hampir 360 derajat, reforma agraria sebagaimana di bayangkan oleh Gunawan Wiradi, telah berkembang sedemikian rupa, makin menjauh dari konsep aslinya.

Yang menarik, Gunawan Wiradi bukanlah seorang yang mudah menyerah atau tenggelam dalam sinisime. Melewati masa-masa sulit ketika terjadi pergantian rezim politik, bersama Profesor Sayogyo, kakak kelas yang kemudian menjadi sahabat dekatnya; GWR terus menekuni kariernya sebagai pengajar dan peneliti agraria di IPB.

Persoalan agraria adalah persoalan pokok bangsa Indonesia, namun kita semua tahu petani selalu merupakan warga bangsa yang terus berada di lapisan bawah kelas sosial ekonomi kita. Dalam berbagai kesempatan GWR selalu mengingatkan pesan Mohamad Hatta, wakil presiden dan proklamator, “jangan sampai tanah diperjualbelikan”. Mungkin pesan ini pula yang kemudian menjadi spirit Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 yang mengatakan bahwa tanah memiliki fungsi sosial. Ketika tanah menjadi komoditas yang bisa diperjualbelikan, tanah tidak mungkin lagi didistribusikan secara adil sebagai bagian penting dari reforma agraria.

Setiap kali mendengarkan Gunawan Wiradi bicara, meskipun seperti belum kehilangan optimisme, ada nada kegetiran yang tidak bisa disembunyikan melihat berbagai perubahan yang terjadi, seperti dikatakannya pada suatu saat, “kita sekarang sebetulnya tidak lagi memiliki UUD 1945 karena yang ada isinya sudah lain, sudah porak poranda”. Mungkin yang membuat Gunawan Wiradi tetap memiliki optimisme adalah anak-anak muda yang terus menemaninya, mengajaknya berdiskusi, dan menjadikannya seorang panutan yang mustahil tergantikan ketika berbicara tentang reforma agraria.

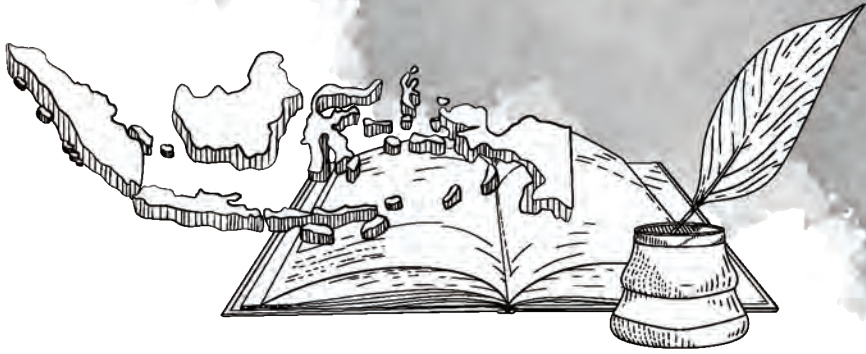
Gunawan Wiradi pada dasarnya adalah seorang ilmuwan sejati, berbicara dan menulis berdasarkan fakta dan data yang dia temukan dari penelitian; tidak sedikit yang dilakukan bersama peneliti dari luar negeri. Berkolaborasi dengan peneliti asing, bukanlah kolaborasi yang bersifat *instant* dan sekedar proyek; namun sebuah kolaborasi yang setara dan jangka panjang, yang menunjukkan integritasnya sebagai ilmuwan yang telah teruji. Dalam daftar publikasinya, bisa dilihat sederet kerjasamanya dengan Ben White, peneliti asing yang mungkin paling penting ketika berbicara tentang reforma agraria di Indonesia. Penelitian intensifnya bersama Jan Breman, seorang ilmuwan kritis dari Belanda, terbit sebagai buku *Good Times and Bad Times in Rural Java* (2002).

Mencoba mengenal Gunawan Wiradi dari dekat, saya melihat ada satu hal yang tampaknya membedakannya dari yang lain, yaitu konsistensi untuk melakukan resistensi terhadap perubahan yang telah berlangsung di sekelilingnya, terutama setelah peristiwa traumatis 1965.

Gunawan Wiradi memang tepat disebut sebagai “Jali Merah”, sesuatu yang mewakili jiwa zaman masa lampau yang sebetulnya tidak terlalu jauh, meskipun tergerus tetapi tetap bertahan. Ketika pemerintahan hari ini, seperti ingin mengulang sejarah awal Orde Baru, bagaimana menciptakan *investment climate* yang ramah dengan investor asing. Mungkin tinggal GWR yang tahu bagaimana seharusnya melakukan resistensi, meskipun tergerus tetapi tetap berusaha bertahan!



Buku ini tidak diperjualbelikan.



Herbeth Feith

Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang berisi pembubaran Konstituante dan memutuskan untuk kembali ke UUD 1945. Anggota Konstituante terdiri dari wakil-wakil



Sumber: Basri (2002)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

partai peserta Pemilu 1955 yang saat itu sedang berusaha menyusun UUD yang baru karena UUD 1945 sejatinya bersifat sementara. Tentu, ada berbagai faktor yang *bermain* dibalik pengeluaran keputusan Dekrit Presiden itu. Tidak terpaut jauh dari momentum itu, Herb Feith yang sejak awal tahun 1950-an sudah bekerja sambil melakukan penelitian di Jakarta untuk disertasi di Universitas Cornell menganalisis periode sejarah politik sampai keputusan Dekrit Presiden itu. Melalui bimbingan George Kahin –bukunya dianggap monumental *Nationalism and Revolution in Indonesia* (1952), Herb Feith seperti melanjutkan periode sejarah pasca kemerdekaan yang pernah ditulis oleh gurunya. Disertasi doktor tersebut kemudian diterbitkan menjadi buku pada tahun 1962 berjudul *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*.

Dalam sebuah seminar internasional di Department of Social and Political Change, Australian National University, Jamie Mackie –ketua departemen saat itu, menyebut Herb Feith, dengan sedikit sinis, *a secular saint*. Herb Feith suka memperolok diri sebagai *Yahudi Abangan*. Jamie Mackie, Herb Feith, juga John Legge adalah ilmuwan-ilmuwan sosial generasi pertama Australia yang memilih Indonesia sebagai fokus penelitian mereka. Mereka, seperti ilmuwan sosial Amerika lain, mulai menggantikan ilmuwan-ilmuwan sosial Belanda yang meninggalkan Indonesia setelah kemerdekaan. Di antara mereka bertiga mungkin hanya Herb Feith yang melakukan penelitian sekaligus mendedikasikan diri untuk membantu secara langsung masyarakat Indonesia. Di antara banyak inisiatif yang dilakukan, Feith membentuk lembaga yang bernama Australian Volunteers International (AVI). Mungkin, karena aktivitas sosial yang dilakukannya itu membuat Jamie Mackie menyebutnya sebagai *secular saint*.

Herb Feith, sesuai dengan judul tesisnya, menilai bahwa telah terjadi degradasi demokrasi di Indonesia pasca Dekrit Presiden itu. Dalam sebuah resensi terhadap tesis yang kemudian diterbitkan sebagai buku itu, Harry Benda, sejarawan dari Yale University yang meneliti tentang Islam di zaman pendudukan Jepang, mengkritik Herb yang dianggap mengajukan pertanyaan keliru karena beranggapan terdapat demokrasi di Indonesia. Perdebatan antara Herb Feith dan Harry Benda dianggap

penting dalam studi politik Indonesia. Keduanya melihat demokrasi di Indonesia dengan asumsi dan cara pandang yang berbeda. Debat antara keduanya semula muncul dalam *Journal of Asian Studies* (1964, 1965) yang kemudian diterbitkan ulang dalam buku *Interpreting Indonesian Politics: Thirteen Contributions to the Debate* yang diedit oleh Ben Anderson dan Audrey Kahin (1982).

Sebagai sejarawan, Benda menilai Feith tidak memberi perhatian cukup pada sejarah yang mana bagi Benda menganggap penting fase sebelum demokrasi, seperti barang asing dicangkokkan dalam masyarakat Indonesia. Bagi Benda, menganggap demokrasi mengalami penurunan seperti menganggap demokrasi telah lama ada. Benda menilai *jangan-jangan* demokrasi memang sebagai sesuatu yang *irrelevant* dalam konteks Indonesia. Benda mengkritik mereka yang merasa bahwa demokrasi konstitusional di Indonesia mengalami penurunan berdasarkan kacamata *barat*-nya. Apakah demokrasi di Indonesia bisa dinilai dengan kacamata *barat*? Hal ini juga menurut Benda merupakan suatu problematika.

Kedekatan Herb Feith dengan Indonesia, seperti saya temukan juga pada Ben Anderson, bukan hanya karena Indonesia merupakan objek penelitiannya, tetapi lebih dari itu, Indonesia seperti sudah menjadi bagian dari dirinya. Berbeda dengan Anderson yang dicekal dan dilarang masuk Indonesia selama 26 tahun, Feith meskipun juga kritis terhadap Soeharto dan Orde Baru masih bebas keluar masuk Indonesia. Ketegangan hubungan sempat terjadi antara Feith dengan Ben Anderson, Ruth McVey dan Frederick Bunnell, terutama setelah Herb Feith yang membaca draf Cornell Paper yang dibagikan secara terbatas karena ia merupakan bagian dari lingkungan terbatas itu. Kiriman draf tersebut dianalisis cepat (*preliminary analysis*), terutama berdasarkan berita-berita koran yang dapat diakses dan ketiga penulisnya sampai pada kesimpulan bahwa peristiwa 1965 sebagai *an internal army affairs* dan menilai bahwa PKI dan Bung Karno hanya merupakan pihak yang dikorbankan.

Pangkal ketegangan antara Herb Feith *terutama* dengan Ben Anderson dan Ruth McVey, disebabkan Herb dianggap tidak cukup prihatin terhadap para korban. Bahkan dalam artikel pendek yang ditulis

sebagai komentar terhadap peristiwa 1965, Herb seperti memberikan apologia terhadap militer yang dalam Cornell Paper justru dianggap sebagai biang kerok tragedi 1965. Surat Ruth McVey dan kemudian disusul surat dari Ben Anderson dengan nada keras terhadap pandangan Herb tersebut sangat mengejutkan Herb. Dia tidak menyangka koleganya di Cornell akan beraksi sekeras itu. Episode ketegangan antara Herb dengan koleganya dari Cornell dalam kasus 1965 itu direkam dengan baik oleh Jemma Purdey yang menulis dengan bagus buku biografi Herb Feith, *From Vienna to Yogyakarta: The Life of Herb Feith* (2011).

Herb Feith meninggal pada 15 November 2001 saat naik sepeda di perlintasan kereta. Saat itu, mungkin, dia sedang memikirkan sebuah rencana kegiatan baru di Indonesia. Cara meninggalnya, menurut sahabat-sahabat terdekatnya khas Herb, cukup sederhana, yaitu *saat bersepeda*. Kematian yang mendadak tersebut merupakan kehilangan besar bagi Indonesia yang saat itu justru sedang menaiki tangga demokrasi. Herb Feith, seperti juga Ben Anderson, mungkin tidak suka kalau disebut sebagai “Indonesianis”. Meskipun awal berhubungan dengan Indonesia dari rasa ingin tahu dan rasa simpati terhadap orang-orang –yang meskipun masih miskin secara ekonomi dipandang sebagai orang-orang yang punya harga diri meskipun mereka tahu sulitnya mengisi kemerdekaan setelah berhasil mengusir penjajah.

Herb Feith, yang mengungsi mengikuti orang tuanya ke Australia dari represi yang dialami orang-orang Yahudi di bawah fasisme Nazi Jerman, mengetahui dengan baik arti sebuah kemerdekaan dan kebebasan. Menjelang masa pensiunnya sebagai akademisi, Herb Feith oleh teman-temannya dianggap mulai lebih banyak menggunakan waktunya untuk menjadi aktivis daripada sebagai akademisi. Ketika tentara Indonesia mencaplok Timor Portugis di tahun 1974, Herb Feith termasuk yang mulai menentang dan mencurahkan sebagian waktunya untuk terlibat dengan advokasi di Timor Timur.

Peristiwa pencaplokan Timor Portugis oleh tentara Indonesia di bawah Ali Moertopo dan Benny Moerdani dengan CSIS sebagai *think tank* telah membuat orang-orang seperti Herb Feith dan Ben Anderson, juga tidak sedikit ahli Indonesia lain, seperti sejarawan ahli

Diponegoro Peter Carey dari Oxford University, *disappointed* dan *disillusioned* dengan Soeharto dan Orde Baru. Peristiwa Timor Timur memang menjadi bagian sejarah buruk Indonesia pasca tragedi politik 1965 yang mengantarkan Soeharto dan para jenderal nya menguasai panggung politik Indonesia. Dari 1974 hingga referendum 1999 yang memperlihatkan rakyat Timor Timur memilih merdeka adalah sebuah sejarah yang menunjukkan bahwa kolonialisme ternyata tidak hanya monopoli bangsa Eropa. Indonesia yang lahir dari perlawanan terhadap kolonialisme di bawah Soeharto, para jendral, dan *think tank*, terbukti bisa menjadi kolonialis dari bangsa kulit berwarna.

Kecintaan Herb Feith yang mendalam terhadap Indonesia pastilah terluka dengan keputusan Indonesia menjadi kolonialis baru di dunia ketiga. Selayaknya dia juga terluka ketika Presiden Soekarno membubarkan konstituante dan mengeluarkan Dekrit pada tanggal 5 Juli 1959, sekitar 60 tahun yang lalu. Mungkin yang membuat Herb Feith tidak patah hati terhadap Indonesia adalah karena dia tahu bahwa Indonesia tidak identik dengan Soekarno atau Soeharto; yang keduanya pasti mengecewakan hatinya.

Kecintaan Herb Feith tidak pupus terhadap Indonesia karena saya menduga, cinta dan simpatinya adalah pada *rakyat* Indonesia, yaitu pada orang-orang biasa, pada orang Indonesia pada umumnya. Hati dan simpatinya sepenuh dan setulusnya pada orang-orang Indonesia yang berharap terhadap kemerdekaan dari kolonialisme Belanda yang sangat menjadi jembatan emas menuju masyarakat yang adil dan makmur.



Buku ini tidak diperjualbelikan.



Herman Lintang

Ada hal menarik dari *obituary* Goenawan Mohamad (GM) untuk Arief Budiman di *MBM Tempo*, edisi 23 April 2020, berjudul *Yang Ak-rab dengan Yang Murni*. GM membandingkan Arief dengan Soe Hok Gie dan menunjukkan perbedaan teman-teman dari kakak beradik itu.



Sumber: Herman Lintang Camp (2016)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Saya kutipkan “Gie aktivis Gerakan Mahasiswa Sosialis; ia dekat dengan kalangan Partai Sosialis Indonesia yang dibubarkan Bung Karno dan pemimpinya, Sjahrir, dipenjarakan. Gie lebih akrab dengan aktivis politik –termasuk dengan bekas peserta pemberontakan Permesta. Sedangkan Arief lebih banyak bergaul dengan perupa, seperti Nashar, Zaini, Osman Effendi, dan Trisno Sumardjo dan kemudian dengan saya, Rendra, dan penulis lain”. Sayangnya, GM tidak menyebut nama-nama siapa saja teman dekat Soe Hok Gie, seperti dia sebut satu persatu nama teman dekat Arief Budiman.

Herman Lantang masih nampak gagah dengan topi dan jaket gunungnya. Pada 2 Juli 2020, usianya genap 80 tahun. Hanya masalah di kaki, membuat dia susah berjalan. Dia perlu dibantu dengan tongkat penyangga dan Joice, istri Herman, sepertinya tidak boleh jauh darinya. Herman Lantang memiliki posisi yang unik sebagai anak muda yang kemudian dikenal sebagai bagian dari Angkatan 66. Dia adalah senior Gie sebagai mahasiswa jurusan antropologi UI tahun 1960, sementara Soe Hok Gie masuk jurusan sejarah tahun 1962. Pada tahun 1964, mereka mendirikan Mapala UI. Jika Soe Hok Gie suka menulis di koran dan aktif berpolitik, Herman Lantang seperti menghindari tampil di ruang publik meskipun dalam film Gie, tampak kedekatan Herman dengan Soe Hoek Gie, terutama dalam kegiatan di kampus dan di gunung. Herman Lantang bukan orang yang tidak tahu politik, justru dia sangat terlibat dalam politik dan tidak ragu dalam menentukan pilihan politik. Sebagai orang Minahasa, dia sangat menyadari arti penting *menjadi orang Minahasa* yang pernah memberontak kepada pemerintah pusat. Zaman Permesta tidak jauh dari masa remajanya. Bersama Benny Mamoto, Aristides Katoppo, August Parengkuan, Jopie, dan Fredy Lasut –mahasiswa Minahasa di UI, peran Herman Lantang tidak dapat disisihkan dalam beragam kegiatan ekstrakurikuler masa itu. Akan tetapi, mendaki gunung dan mencintai alam menjadi *passion* utamanya.

Konon sebagai reaksi terhadap kehidupan kampus yang makin tidak sehat, yang dalam bahasa Herman Lantang disebut sebagai “Politik Tai Kucing”, mendorong Soe Hok Gie dan Herman Lantang merencanakan pendakian ke Semeru, gunung tertinggi di Jawa. Pendakian

yang menjadi sangat legendaris itu memang dilakukan bersama Soe Hoek Gie, Idhan Lubis, Fredy Lasut, Rudy Badil, Anton Wijana, Abdurachman, dan Aristides Katoppo. Mereka berangkat naik kereta dari Stasiun Gambir Jakarta tanggal 12 Desember 1969, persis di hari ke-2 Idulfitri. Kabarnya, sebelum berangkat Hok Gie dkk. sempat mengirimkan bingkisan terlebih dahulu pada rekan-rekan mahasiswa yang menjadi anggota DPR: berisi bedak dan lipstik sebagai sindiran agar mereka tampak cantik di depan penguasa. Pendakian yang ternyata menjadi pendakian yang terakhir bagi Soe Hok Gie dan Idan Lubis ini, bagi Herman Lantang adalah sebuah kehilangan besar.

Herman sulit untuk menceritakan kembali peristiwa itu karena rasa sedih yang mendalam, sahabat karibnya meninggal dalam pelukan. Arief Budiman, kakak kandung Soe Hok Gie dalam kata pengantar buku *Soe Hok Gie: Catatan Harian Seorang Demonstran*, menulis: “Ketika dia tercekik oleh gas beracun kawah Mahameru, dia memang ada di suatu tempat yang terpencil dan dingin. Hanya seorang yang mendampinginya, salah seorang sahabatnya yang sangat karib, Herman Lantang”. Soe Hok Gie pernah mengatakan hanya di puncak gunung dapat ditemukan kemurnian. Kemurnian di puncak Semeru itu pula mengajak Gie untuk meninggalkan *kekotoran* untuk selamanya. Sayangnya, GM membandingkan antara Arief Budiman dan Soe Hok Gie tidak sampai mengupas perbedaan antara kakak dan adik ini tentang kemurnian, sesuatu yang menurut GM paling diakrabi oleh Arief Budiman.

Dalam percakapan dengan Herman Lantang di *camping ground*-nya, Herman baru bercerita bahwa selama ini dia belum pernah dan tidak ingin naik gunung di luar Indonesia. Ketika saya bertanya kenapa, dia hanya menggelengkan kepala. Aristides Katoppo, sobat lamanya, meninggal dunia pada 29 September 2019, padahal seminggu sebelumnya Aristides Katoppo bersama Don Hasman dan Herman Lantang ke Ranupani, Semeru, untuk berziarah di tempat Soe Hok Gie wafat. Sebuah kebetulan, atau itu juga pertanda pendakian terakhir buat Herman Lantang?

Kepergian Soe Hok Gie memang membuat Herman kehilangan sebuah magnet yang mampu menyedot dan ingin berada di dekatnya;

seperti zaman-zaman ketika sebagai Ketua Senat FSUI, dia siap bertarung jika Soe Hok Gie mendapatkan ancaman; dan seperti saat terjadi ketegangan dan keributan di kampus FSUI di Rawamangun. Perjumpaan Herman dengan orang-orang Suku Dani di Lembah Baliem sejak 1967, untuk penelitian skripsi antropologinya, mungkin telah mempertemukan jiwa *petualangan* dan *kecintaan* pada alam sehingga membuat dia *betah* tinggal berbulan-bulan di hutan dan gunung di Papua. Sejak 1974, setelah mendapatkan sertifikat sebagai *Fluid Drilling Engineer* di Houston Texas, mulailah dia berkariyer sebagai *Fluid Drilling Consultant* di berbagai perusahaan minyak di Timur Tengah, Mesir dan terakhir di Malaysia pada tahun 2000. Sebagai bagian dari pekerjaan itu pula, mungkin membuat dia lupa mencari teman hidup. Masa lajang baru dia akhiri pada usia 40 tahun ketika keluarga mempertemukan dia dengan Regina Joice Moningga, 12 tahun lebih muda dan kemudian dinikahi.

Saat ini Herman dan Joice hidup bersama alam di Curug Nangka tepat di pinggir taman nasional gunung Halimun –sekitar satu jam naik mobil dari kota Bogor. Anak-anak mereka sudah memiliki keluarga sendiri-sendiri. Tanah yang dia beli tahun 1982 pada tahun 2017 dibangun sebuah *camping ground* di mana tenda-tenda dengan berbagai ukuran bisa disewa untuk mereka yang ingin menikmati udara bersih dan segar – hidup di tengah kehijauan. Sekitar rumah dan tenda-tenda yang disewakan, Herman dan Joice menanam bermacam-macam tanaman: ada pohon kayu besi yang bibitnya dibawa dari Kalimantan, pohon almon yang buahnya enak dimakan, alpukat, jambu merah, markisa, dan berbagai jenis anggrek. Macam-macam tanaman itu menjadikan Herman Lantang Camp (HLC) sebuah *mini botanical garden*. Herman yang saya kira *sangar* itu ternyata hafal nama-nama tanaman, bahkan *iles-iles* tanaman obat yang sering dibuat untuk jamu di Jawa pun dia tahu, juga tahu nama latinnya.

Usia 80 tahun adalah usia yang panjang untuk ukuran orang Indonesia dan menjelang melewati usia itu *apa lagi yang ingin dikeluhkan*. Dengan pengalaman yang tak tertandingi dalam mencintai alam, kehangatan keluarga dan kunjungan teman-teman yang ingin bernostalgia, mengenang perjalanan hidup yang penuh petualangan,

mendaki gunung dan menuruni jurang, *adakah yang lebih indah dari itu?* Ketika teman-teman dekat seusia Herman mulai satu per satu berpulang, yaitu Rudi Badil, Rahman Tolleng, Aristides Katoppo, August Parengkuan, dan yang terakhir Arief Budiman. Kenyataan ini seperti mengingatkan pada kita bahwa *ternyata* hidup memiliki tapal batas. Hidup bukan langit biru yang seolah-olah tak bertepi ketika dia ditatap dari ketinggian puncak gunung. Herman Lantang, sosok yang telah berjalan jauh sehingga dia tahu semua itu. Sebagai orang yang beriman, Joice selalu mendampingiya –tak ada sedikitpun kerisauan menatap masa depan. Hidup tentu harus disyukuri, tetapi juga harus dinikmati dan tetap diolah dengan penuh rasa cinta.

Sejak bahaya Covid-19 merebak, Herman menutup *camping ground* untuk masyarakat umum. Pada tanggal 11 April yang lalu, Joice berulang tahun yang ke-68 dan ulang tahun perkawinan mereka hanya dirayakan secara berdua dengan Joice. Foto yang dia kirimkan pada teman-temannya memperlihatkan mereka memakai baju dengan sulaman, topi yang indah, dan *sebotol anggur merah* dari Prancis katanya. *Sense of humor* menandai kebahagiaan pasangan ini. Beberapa hari yang lalu, saya –mungkin juga para sahabatnya yang lain, menerima foto wajahnya yang cerah dengan muka klimis dan rambut yang dipotong pendek. “Biar kelihatan muda” katanya, tentu dengan senyumnya yang khas.

Itulah Herman Lantang!



Buku ini tidak diperjualbelikan.



Hikmat Budiman

Pada Minggu pagi, 18 Juli 2021, saya duduk terhenyak. Beberapa saat setelah menerima kabar duka Mas Hisyam (Muhamad Hisyam, sejarawan LIPI) mangkat, disusul dengan berita Hikmat Budiman mening-



Sumber: Kakophōnia (t.t)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

gal. Berita beriring dua sahabat yang wafat ini mencerminkan *tip of the iceberg* –puncak gunung kematian korban Covid-19 dengan kurva yang terus melonjak selama dua pekan terakhir. Setelah menuliskan kenangan tentang Mas Hisyam, saya merasa perlu menuliskan kenangan saya tentang Hikmat Budiman. Hikmat dalam kacamata saya adalah tipe dari sedikit ilmuwan sosial Indonesia yang meyakini bahwa hasil riset sosial harus ditulis dengan sungguh-sungguh dan dibukukan.

Sebagai peneliti sosial yang selalu berada di luar lembaga penelitian pemerintah, Hikmat bisa bebas untuk memilih topik penelitian yang menjadi minatnya. Meskipun saya kira, tantangan sebagai ilmuwan sosial non-PNS berarti harus berjuang sendiri mencari dana penelitiannya. Selain lama menjadi *program officer* di Japan Foundation, jejak Hikmat Budiman terekam dalam deretan lembaga swadaya masyarakat, seperti Desantara, Interseksi, dan terakhir Populi Center. Sejak pertama kali saya kenal Hikmat sebagai aktivis LSM, dia selalu pada posisi sebagai direktur. Hal itu juga menunjukkan *standing status* dan kewibawaan intelektual yang dimilikinya.

Akan tetapi, kali ini saya ingin mengenang Hikmat dengan menunjukkan kualitasnya sebagai seorang peneliti dan penulis tangguh. Hikmat meletakkan target penulisan laporan penelitian cukup tinggi untuk ukuran ilmuwan sosial Indonesia. Target itu juga yang menjadikan Hikmat tidak sekadar sebagai direktur LSM yang bertugas mengajukan proposal untuk mendapatkan *research grant*, tetapi harus selalu menjadi editor dan penulis utama dari buku-buku hasil riset-riset yang dipimpinya. Bagi Hikmat, LSM bukan hanya untuk *menguber* dana dari para donor di luar negeri, memperoleh gaji, dan pekerjaan, tetapi menjadi alat untuk *ketertarikannya* sebagai ilmuwan sosial.

Buku-buku yang diedit oleh Hikmat Budiman selalu tebal dan ia bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan buku-bukunya. Hal itu terlihat dari bagian pengantar yang selalu ditulis sendiri. Setiap kata pengantar yang dibuat untuk memberikan konteks isi buku dari bab-bab yang ditulis oleh peneliti-peneliti pilihan *selalu ditulis dalam narasi panjang* dengan referensi yang kredibel. Perjumpaan saya dengan Hikmat adalah dengan membaca tulisan-tulisannya sebelum bertemu langsung dengan dirinya. Perkenalan itu terjadi ketika, eng-

gak tahu dengan alasan apa, saya diminta untuk menjadi salah seorang pembahas buku yang baru diterbitkan oleh Yayasan Interseksi tentang multikulturalisme. Seingat saya, acara bedah buku diadakan di sebuah ruangan yang tampaknya disewa oleh Interseksi di Gedung Jakarta Design Center di bilangan Slipi. Acara itu, sekitar 2008, mungkin dihadiri tidak lebih dari 20-an anak-anak muda yang tampaknya menjadi lingkaran pergaulan Hikmat Budiman. Seingat saya pada saat itu, selain saya ada juga Thung Ju Lan dan beberapa rekan dari LIPI yang tergabung dalam lingkaran Hikmat Budiman di Interseksi.

Lingkaran-lingkaran ilmuwan sosial di Indonesia tak terhitung jumlahnya. Antara lingkaran-lingkaran itu ada yang berhimpit atau sekadar bersinggungan, tetapi tidak sedikit yang satu sama lain tak bersentuhan. Lingkaran-lingkaran itu seperti pulau-pulau di Nusantara, berjumlah ribuan, ada yang besar dan terkenal, namun ada juga yang kecil tak dikenali. Banyak dan beragam lingkaran-lingkaran ilmuwan sosial ini memberikan karakter, komplasensi, dan juga involusi yang diam-diam diidap, dari ilmu-ilmu sosial di Indonesia.

Hikmat Budiman memiliki tempat yang khusus untuk lingkaran-lingkaran ilmuwan sosial itu. Mungkin tidak semua mengenal Hikmat Budiman, tetapi bagi yang mengenalnya pasti memberi penilaian terhadap dia sebagai ilmuwan sosial yang tidak ala kadarnya. Persinggungan saya dengan Hikmat juga sebetulnya tidak bisa dibilang mendalam, tetapi sejak perkenalan pertama itu kami beberapa kali bertemu dan pertemuan itu hampir selalu dalam suasana diskusi tidak sekadar *ngopi* bareng. Dua atau tiga kali saya diundang Hikmat untuk ambil bagian dalam pembahasan rencana penelitian yang akan dilakukan Interseksi tentang kota-kota di Sumatra, kemudian di Sulawesi.

Pada waktu lain, saya diminta untuk menyampaikan pemikiran tertentu, semacam *brainstorming* dan diskusi kecil secara intensif di lembaganya. Saya tahu orang yang diundang cukup beragam. Ketika saya mengggagas sebuah *workshop* kecil tentang kewarganegaraan di LIPI, Hikmat Budiman termasuk yang kami undang untuk menulis makalah. Saat itu, Hikmat menyampaikan hasil pengamatan tentang masyarakat Riau Bengkalis yang multietnik.

Saya terakhir kali pernah diundang untuk presentasi tentang sejarah migrasi di Papua di Populi Center. Dua buku yang terakhir di-edit saat di Populi Center adalah tentang Indonesia Timur dan Jakarta. “Saya ingin peneliti Populi Center tidak hanya pandai menulis tentang hasil survei atau *polling*, tetapi juga membuat tulisan etnografis yang panjang,” katanya suatu hari. Saya pikir, seperti itulah Hikmat Budiman, dia akan sedikit mengejek jika melihat buku yang tipis. Bagi dia, buku harus tebal dan berbobot isinya. Melalui pembacaan terhadap buku-bukunya menampakkan keinginan untuk menunjukkan bahwa ilmuwan sosial Indonesia tidak kalah dengan para Indonesianis dari luar negeri. Namun demikian, mimpi itu belum menjadi kenyataan karena bagi dia tidak penting, tetapi memang mimpi itu sesuatu yang menurut hematnya harus diupayakan dengan sungguh-sungguh.

Hikmat boleh bangga dan sombong tentang dirinya. Suatu saat dalam sebuah esai saya memuji seseorang yang saya anggap telah menunjukkan karya-karyanya yang menonjol. Orang tersebut bergelar doktor lulusan universitas terkenal dan dibimbing Indonesianis *kondang* di Amerika Serikat. Melalui WA, Hikmat ternyata membaca tulisan saya itu, menulis “dia pernah memplagiat tulisan saya, *lho!*”. Setengah tidak percaya, saya mengejanya dengan beberapa pertanyaan. Akhirnya, dia mengirimkan tulisan yang dia buat dan tulisan doktor yang saya baca. Lalu, saya *baru percaya*.

Interaksi saya yang terakhir dengan Hikmat berlangsung ketika saya dan Cahyo Pamungkas, rekan saya di LIPI mempersiapkan buku yang akan berisi tulisan para sahabat Muridan S. Widjojo, peneliti LIPI yang menaruh perhatian besar tentang Papua. Bersama Cahyo, saya menghubungi sejumlah calon penulis di dalam maupun di luar negeri yang mengenal almarhum Muridan yang meninggal sekitar 7 tahun yang lalu. Setelah membaca daftar tamu yang kami undang, ternyata nama Hikmat Budiman tidak ada. Akan tetapi, Hikmat mengajukan diri untuk ikut menyumbangkan tulisan. Saat itu *deadline* bagi para penulis sesungguhnya sudah dekat. Ternyata, Hikmat memang mengenal Muridan sejak sama-sama menjadi mahasiswa jurusan sastra Prancis; Muridan di UI dan Hikmat di UGM. Ketika draf buku mengenai Muridan itu selesai, saya dan Cahyo merasa perlu memper-

kenalkan dan mendiskusikannya secara publik –uluran tangan Hikmat yang saat itu masih menjabat sebagai Direktur Populi Center sangat membantu. Melalui jaringannya, Hikmat tidak saja berhasil mengajak beberapa lembaga untuk terlibat, tetapi juga membantu untuk menghubungi beberapa kolega yang bersedia menjadi pembahas. Draft buku sebagai penghormatan terhadap Muridan itu berhasil diperdebatkan dalam dua kali *webinar*.

Hikmat menceritakan pada saya bahwa sejak mahasiswa Muridan adalah *sparing partner*-nya untuk berdebat dan keduanya terlibat dalam polemik melalui tulisan tentang berbagai isu. Mereka rupanya dipertemukan kembali di Jakarta dan keduanya seperti sama-sama meninggalkan sastra Prancis karena lebih tertarik belajar antropologi. Dalam tulisan tentang almarhum sahabatnya itu, Hikmat menunjukkan apresiasi yang tinggi terhadap kegigihan Muridan dalam mengadvokasi Papua. Membaca kembali tulisan Hikmat tentang almarhum Muridan dan sekarang Hikmat sendiri menyusulnya, saya merasakan sebuah kegetiran yang mendalam. Dua orang ilmuwan sosial yang masih tergolong muda yang tidak hanya memikirkan tentang pengembangan ilmunya melalui tulisan-tulisan yang berkualitas, tetapi juga telah mendedikasikan diri sepenuhnya bagi peningkatan harkat dan martabat dari masyarakat dan bangsanya. Kepergian keduanya merupakan kehilangan yang tiada tara dan seperti meninggalkan lubang hitam dalam dunia ilmu-ilmu sosial negeri ini.

Salah satu buku awal Hikmat Budiman berjudul *Lubang Hitam Kebudayaan* (2002) yang diterbitkan oleh Kanisius merupakan sebuah buku yang mencerminkan keprihatinan intelektual tentang situasi yang dilihat. Sebagai intelektual, Hikmat sebetulnya tidak menjaga jarak atau alergi terhadap kekuasaan, dia *ikut serta* dalam kekuasaan. Dua buku terakhir yang diedit ketika menjadi Direktur Populi Center, *Ke Timur Haluan Menuju* (2019) dan *Sudah Senja di Jakarta* (2020) memperlihatkan posisi politik terhadap kekuasaan yang sedang berlaga di arena dalam lima tahun terakhir ini. Ketertarikan Hikmat terhadap kekuasaan mungkin juga tipikal ilmuwan sosial Indonesia, *agak serba tanggung*, yaitu dekat tetapi berharap bisa tetap kritis –sebuah posisi yang bisa berujung *zero sum game*.

Namun, mungkin ini akan menjadi masalah kita bersama ketika kaum intelektual, ilmuwan sosial, atau pegiat kebudayaan yang sesungguhnya selalu resah-gelisah dihadapkan pada sistem masyarakat dan struktur kekuasaan yang sesungguhnya telah sekian lama terjebak dalam kegagalan berkomunikasi satu sama lain. Sutanto, pegiat budaya dari Mendut Magelang yang lama bergaul dengan masyarakat pedesaan di sekitar lima gunung di Provinsi Jawa Tengah, dalam sebuah sarsehan yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Heritage Nusantara Universitas Kristen Satya Wacana (PSHN-UKSW) dan beberapa lembaga mitra pada Sabtu 17 Juli lalu –persis sehari sebelum dua sahabat saya wafat, mengemukakan pengamatannya yang menurut saya penting.

Mas Tanto Mendut mengatakan bahwa sebagai bangsa sesungguhnya kita sedang mengalami *krisis linguistik*. Selain itu, tidak saja *gagap teknologi*, tetapi juga gagal dalam berkomunikasi satu sama lain. Seperti lirik lagu *The Sound of Silence* dari Simon and Garfunkel, *People talking without speaking, people hearing without listening*. Sampai di sini, mungkin buku pertama Hikmat Budiman yang berjudul *Pembunuhan Yang Selalu Gagal: Modernisme dan Krisis Rasionalitas Menurut Daniel Bell* (1997) perlu dibaca lagi. Terima kasih Bung Hikmat atas dedikasi Anda yang panjang terhadap dunia keilmuan sosial di negeri ini. Suatu saat nanti, *semoga mimpi Anda menjadi kenyataan*.



Jalaludin Rakhmat

Meskipun berusia sudah lewat kepala tujuh pada 29 Agustus 2019 lalu yang untuk ukuran orang Indonesia berarti sudah melebihi rata-rata usia warga sebangsanya, Jalaludin Rakhmat dengan tubuh yang tergolong kecil ramping dengan baju dan celana panjang serba hitam;



Sumber: Utama (2021)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

tampil bersemangat ketika menyambut kedatangan rombongan *Nusantara School of Difference* (NSD) yang siang itu mengunjungi kompleks Sekolah Munthahari di Bandung yang dipimpinnya. Berbicara dengan bahasa Inggris yang fasih dihadapan tamu-tamu yang sebagian orang asing, Kang Jalal –begitu Jalaludin Rakhmat biasa dipanggil, terlihat ceria menceritakan pengalamannya sebagai seorang intelektual muslim Syiah –sebuah aliran yang dianggap menyimpang dalam sebuah negeri yang mayoritas muslim beraliran Sunni.

Tamu-tamu pada hari itu adalah peserta dari sebuah *summer school* dari berbagai latar belakang agama dan bangsa. Kegiatan tersebut dipimpin oleh seorang penganut agama Yahudi berkebangsaan Amerika, profesor di Faculty of Religious Studies di Boston University; Adam Selligman. Kang Jalal berbicara dengan teman-temannya yang telah akrab, disertai humor dan kadang seperti mengejek dirinya sendiri, yang untuk publik Indonesia dianggap sebagai orang yang berbahaya dan beraliran sesat. Akan tetapi, dia tetap merasa percaya diri yang besar dan berkeyakinan kuat akan kebenaran ajaran Islam yang dianutnya.

Pada dasarnya, Kang Jalal adalah seorang intelektual publik yang berposisi penting dalam diskursus Islam di Indonesia yang secara statistik 87 persen dari 270 juta penduduk beragama Islam. Sebagai ahli ilmu komunikasi dan pengajar tetap Universitas Padjadjaran, Bandung, tidak sedikit buku yang telah dihasilkan dan sebagian bukunya menjadi bacaan wajib yang belajar ilmu komunikasi. Setelah mendapatkan gelar master dari Iowa University, kemudian melanjutkan program doktor untuk ilmu politik di The Australian National University di bawah bimbingan Indonesianis ternama Harold Crouch –Kang Jalal tentulah seorang pakar di bidangnya yang patut diperhitungkan. Akan tetapi, yang menjadikan dia istimewa adalah dia memilih sebuah aliran Islam yang di Indonesia dianggap minoritas dan dia mengistilahkan sendiri sebagai *deviant*, Syiah.

Memilih untuk menganut ajaran Syiah sepulang dari muhibah ke Iran pasca kemenangan revolusi Iran di bawah Ayatullah Khomeini, Kang Jalal merasa cocok dengan pemikir-pemikir Iran, seperti Ali Syariati dan Muntahari. Ali Syariati merupakan seorang pemikir Islam

radikal dan dianggap kiri karena banyak menyerap Marxisme menjadi *role model* bagi tidak sedikit intelektual muslim Indonesia yang sejak awal tahun 1970-an mulai mewarnai diskursus maupun praksis keislaman dalam berbagai gerakan swadaya di Indonesia. Awal tahun 1970-an, istilah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mulai dipakai sebagai versi Indonesia dari istilah Non Government Organisation (NGO) yang oleh rezim Orde Baru saat itu terdengar agak kurang tepat. Harus diakui bahwa kalangan intelektual muslim merupakan *reservoir* terbesar yang paling banyak kemudian melahirkan intelektual publik dengan berbagai terobosan pemikiran dan eksperimen praksis keswadayaan yang terbesar dibanding dengan kalangan lain. Dalam konteks trajektori sejarah ini, peran dan pengaruh Jalaluddin Rahmat dapat disejajarkan dengan para intelektual publik sezamannya, seperti Dawam Rahardjo, Nurcholish Madjid, Kuntowijoyo, Abdurahman Wahid, dan Adi Sasono –yang mana saat ini kita hanya dapat baca buku-bukunya karena tokoh-tokoh ini telah meninggalkan kita.

Sekolah Muntahari yang didirikan dan telah subur berkembang telah menjadi bukti kegigihan dan kemampuan Kang Jalal sebagai seorang intelektual publik yang tidak sekadar berfungsi sebagai komentator politik yang sering terlihat diberbagai acara *talk show*. Akan tetapi, komitmen dan dedikasi secara langsung melalui dunia pendidikan yang lembaganya mengambil nama pemikir Syiah Iran terkenal, Muntahari. Kang Jalal berupaya untuk mengembangkan dunia pendidikan yang oleh kalangan Islam *mainstream* dicurigai sebagai ajaran Islam yang menyimpang sehingga menjadikannya sebagai intelektual publik yang kontroversial. Akan tetapi, barangkali orang-orang seperti Kang Jalal yang justru pada saat ini *mungkin* diperlukan untuk memberi otokritik pada perkembangan Islam yang oleh ahli Islam asal Belanda, Martin Van Bruinnissen, dinilai sedang memasuki sebuah periode yang disebut sebagai *conservative turn*.

Pada cuaca politik yang sering tidak menentu, yaitu sejak ambruknya *repressive developmentalist regime* atau Orde Baru, konservatisme dan ortodoksi berkembang menjadi ancaman baru bagi kehidupan bersama dari sebuah masyarakat yang berlatar belakang beragam. Hidup bersama dalam perbedaan sebagai sebuah *public virtue* menjadi tidak

mudah karena klaim kebenaran dan klaim paling suci terbukti tidak berhenti pada tataran wacana yang damai, namun bisa tereksresi pada tindakan persekusi dan represi dari mayoritas pada minoritas. Kaum minoritas dan ajaran-ajaran yang dianut dianggap sebagai ancaman terhadap klaim-klaim kebenaran dan kesucian yang dianut mayoritas. Oleh karena itu, perlu disingkirkan dan dianggap tidak berhak hidup sebagai bagian dari sebuah masyarakat yang beragam. Nusantara School of Difference, sebagai bagian dari Communities Engaging with Difference and Religion (CEDAR - <http://www.cedarnetwork.org>) yang digagas dan dikembangkan oleh Adam Selligman merupakan upaya rintisan untuk menembus persoalan klasik bagaimana hidup bersama dalam perbedaan keyakinan –yang selama ini tampaknya gagal diatasi oleh apa yang dikenal sebagai dialog antaragama (*interfaith dialogue*).



Karlina Supelli

Menempuh pendidikan strata satu di jurusan astronomi ITB, M.Sc. di bidang *Space Science* di University College London, dan meraih gelar doktor filsafat dari UI dengan judul *Wajah-Wajah Alam Semesta, Suatu Kosmologi Empiris Konstruktif*, memperlihatkan cakupan ilmu yang di-



Sumber: Salihara Arts Center (2018)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

miliki Karlina Supelli yang luas. Kerisauan yang mendalam terhadap paradoks pada literasi warga bangsanya yang rendah, sementara itu begitu besar potensi nalar manusia untuk memahami kosmos –mencari jawaban dari mana dan mau ke mana kita, seolah-olah begitu saja terlempar ke planet bumi, semestinya menjadi keprihatinan bersama. Dalam kaitan ini, selebrasi yang begitu besar diberikan kepada apa yang disebut sebagai Generasi Milenial mungkin perlu dilihat kembali secara kritis.

Akan tetapi yang membuat perempuan istimewa kelahiran Jakarta, 15 Januari 1958, ini adalah pilihan politik yang melibatkan Karlina dengan persoalan-persoalan praktis yang dihadapi bangsanya, seperti membentuk Suara Ibu Peduli (SIP). SIP merupakan kumpulan ibu-ibu yang merasa prihatin dengan imbas kekacauan politik menjelang dan pasca lengser Soeharto dari tampuk kekuasaan yang telah dikangkanginya lebih dari tiga dasawarsa –sebuah prestasi yang hanya dikalahkan oleh Mugabe di Afrika.

Akibat protes SIP pada 23 Februari 1998 di bundaran HI, Karlina bersama dua rekannya, yakni Gadis Arivia dan Wilarish, sempat ditahan polisi. Meskipun bisa saja, inspirasi untuk membentuk SIP datang dari belahan dunia lain, tetapi memang apa yang harus baru dan otentik ketika dunia sudah terkoneksi sedemikian rupa sehingga tak mungkin lagi rasanya sebuah ide seperti wangsit yang turun begitu saja dari langit. Ketika ide-ide tentang asal-usul kosmos diperdebatkan seolah-olah tanpa batas lagi antara ilmu dan filsafat, antara naluri dan nalar; orang seperti Karlina Supelli mungkin menjadi *pengecualian* karena berkemampuan untuk terlibat dalam menembus dan melampaui batas-batas itu.

Dalam sebuah masyarakat yang makin dikuasai oleh media massa dan media sosial yang sesak dengan demagogi, tidak aneh jika berpikir kritis dan bersikap rasional bisa dianggap menghina atau merendahkan *derajat sementara* dari sebagian kalangan. Ruang publik yang semestinya menjadi ajang pertukaran pikiran untuk mencari kemungkinan-kemungkinan hidup bersama yang lebih setara dan bermartabat tanpa terasa menjadi makin sempit dan dangkal. Berbagai pertanyaan tan-

pa rasa risih, seperti telah mendapatkan kepastian jawaban dari para demagog, sementara hipokrisi seolah menjadi kenormalan.

Beberapa waktu lalu, kritik Karlina terhadap kecenderungan yang hanya sebagai pengguna buta *smart phone*, meskipun sepintas juga menjadi *perhatian* banyak pihak, namun mungkin hanya Karlina yang bisa menjelaskan dengan gamblang implikasi-implikasi bagi kelangsungan sebuah komunitas kebangsaan. Mengungkapkan kritik-kritik dengan suara yang jernih dan halus, menunjukkan Karlina Supelli sangat menyadari betapa sensitif sesungguhnya sebuah publik yang telah terobsesi dengan politik identitas. Mungkin itu pula yang membuat pengagum karya petualangan Karl May, puisi Chairil Anwar, dan cerita detektif –dan tentu saja Carl Sagan dan Stephen Hawking– bekerja keras dalam sebuah medan akademik yang masih memberi ruang kebebasan. Ruang tersebut memberikan peluang untuk merambah dan merintis ide-ide dan gagasan-gagasan kritis di keluasan kosmos yang tidak bertepi dalam sebuah planet di mana umat manusia mungkin hidup sebatang kara.

Hanya dalam sebuah medan akademik yang masih menghargai kemerdekaan berpikir, perbincangan tentang buku-buku karya para pemilik *dangerous mind* seperti Richard Dawkins, Sam Harris, Daniel Dennet, dan Yuval Noah Harari dimungkinkan. Akan tapi, mungkin juga Karlina masih membaca puisi penyair Subagio Sastrowardoyo *Manusia pertama di angkasa luar* (1970) yang seperti mengeluh: “...berilah aku satu kata puisi daripada seribu rumus ilmu yang penuh janji yang menyebabkan aku terlontar kini jauh dari bumi yang kukasih”.



Buku ini tidak diperjualbelikan.



Kartini

Belum lama ini, saya dikirim teman beberapa tulisan Joss Wibisono –bekas wartawan Radio Belanda yang bermukim di Belanda. Tulisan yang berjudul *Mengagumi kekaguman Benedict Anderson terhadap José*



Sumber: Wikimedia Commons (2021)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Rizal (2019), Joss menyinggung Kartini (1879–1904). Joss menilai buku terjemahan surat menyurat Kartini yang asli dalam bahasa Belanda itu kurang baik. Menurut Joss Wibisono, dalam menerjemahkan buku Kartini itu, baik Armijn Pane (*Habis Gelap Terbitlah Terang*, telah dicetak lebih dari 10 kali sejak 1938) maupun Sulastin Sutrisno tidak ingin menyelewengkan sesuatu. Kalau buku terjemahan itu tidak baik karena soal penguasaan bahasa saja, tidak ada motivasi lain. Joss mengatakan itu karena dia sedang menceritakan tentang Ben Anderson yang harus belajar bahasa Spanyol karena ingin membaca *Noli Me Tângere* (1887) novel karya José Rizal (1861–1896) dalam bahasa aslinya. Menurut Joss, Ben melihat terjemahan yang dilakukan Leon Maria Guererro (1915–1982) menyimpang meskipun penerjemah menguasai bahasa Spanyol dan Inggris. Artinya, dibandingkan terjemahan surat-surat Kartini yang persoalannya pada alih bahasa, persoalan terjemahan *Noli Me Tângere* berbeda karena ada agenda tersembunyi, yaitu kepentingan politik Amerika untuk memengaruhi perkembangan nasionalisme Filipina.

Raden Ajeng Kartini, pesona perempuan Jawa yang ada di benak, kita peroleh selain dari bacaan, mungkin lebih karena cerita dari mulut ke mulut atau karena keharusan mengikuti perayaan hari Kartini di sekolah setiap tanggal 21 April. Membaca surat-suratnya tidak terbayangkan bagaimana perempuan yang hanya lulus sekolah dasar itu mampu menulis surat-surat yang isinya mencerminkan keprihatinan sosial pada masanya dengan bahasa Belanda yang indah. Menurut Asvi Warman, dalam sebuah percakapan pribadi, ada perdebatan antara Harsya Bachtiar dengan Abdurrachman Surjomihardjo, tentang siapa yang lebih layak mendapatkan gelar pahlawan nasional, Kartini atau Tjut Nya Dien?

Sesungguhnya, hal ini akan sangat menarik jika ada teks perdebatan antara dua orang intelektual yang sudah almarhum itu. Asvi sendiri tidak memberitahu di mana perdebatan itu bisa dibaca. Dari seorang teman, saya diberi tahu ada tulisan Harsya dan Abdurrahman dalam kumpulan tulisan berjudul *Satu Abad Kartini* (1979) yang dihimpun oleh Dirjen Kebudayaan saat itu, Haryati Subadio, untuk memperingati 100 tahun Kartini. Membaca tulisan Harsya Bachtiar

(*Kartini dan Peranan Wanita dalam Masyarakat Kita*) dan Abdurrahman Surjomihardjo (*Alam Gagasan Kartini: Dalam Kenyataan Sejarah, Pemikiran Termasa dan Dunia Lambang*) di buku kumpulan tulisan itu, saya mencoba mencari letak perbedaan antara keduanya. Saya merasa tidak terlalu jelas, namun saya samar-samar menangkap keberatan Harsya Bachtiar sementara Abdurrahman jelas mendukung pendapat bahwa Kartini memang telah memberikan sumbangan penting bagi tumbuhnya kesadaran nasional.

Ada dua hal penting yang saya tangkap dari tulisan Harsya. Pertama, Harsya tidak membantah bahwa Kartini telah menjadi simbol nasional tentang emansipasi wanita dan perjuangan melawan penjajahan, meskipun Harsya mengingatkan gagasan Kartini juga dibentuk oleh para pengagumnya, “Kartini dalam cita-cita dan bukan Kartini dalam kenyataan”. Kedua, dan ini yang menurut saya menarik, Harsya menunjukkan bahwa di Aceh dan di Sulawesi Selatan pernah ada pemimpin negara perempuan yang bisa diartikan bahwa emansipasi telah jauh dipraktikkan dalam sejarah bangsa Indonesia sendiri.

Sultanah Safiatuddin adalah penerus tahta Sultan Iskandar Muda dan selama 30 tahun masa kepemimpinannya, menurut Harsya Bachtiar, para cendekiawan Aceh seperti Abdur Rauf, Hamzah Fansuri, dan Nuruddin ar-Raniry menghasilkan karya-karya tulis yang termasyhur. Mereka bekerja di semacam universitas “Jami Baiturrahman” yang difasilitasi oleh kepala negara perempuan yang memberikan perhatian besar pada kesusastraan dan ilmu pengetahuan ini, selain menguasai bahasa Aceh dan Melayu

Sultanah Safiatuddin juga menguasai bahasa Arab, Persia, Spanyol, dan Urdu. Siti Aisyah We Tenriolle menjadi kepala negara kerajaan Tanette atau Datu Tanette, yang memerintah sejak tahun 1856 hingga setengah abad. Selain berhasil menyatukan wilayah yang sebelumnya terpisah, menurut Harsya Bachtiar, dia sangat menguasai kesusastraan. Pada masa kepemimpinannya, B.F. Matthews, ilmuwan Belanda yang mempelajari kesustraan Bugis mendapatkan ikhtisar dari epos *La Galigo* yang secara keseluruhan telah mencapai lebih dari tujuh ribu halaman. Ikhtisar epos besar ini disusun oleh Siti Aisyah We Tenriolle sendiri. Di bawah kepemimpinannya, pada tahun 1908, dia

juga mendirikan sekolah, tempat pendidikan modern pertama untuk anak-anak laki-laki dan perempuan tanpa dibedakan.

Pendapat Joss Wibisono tentang terjemahan buku yang berisi surat-menyurat Kartini yang dikumpulkan oleh Abendanon dalam bahasa Belanda itu barangkali memang penting untuk diperhatikan. Mengatakan bahwa kalau *toh* ada kemelencengan dalam terjemahan yang dilakukan Armijn Pane dan Sulastin Sutrisno hanya karena penguasaan bahasa yang kurang, saya kira itu terlalu naif. Motif politik, bukan niat jahat, saya menduga, baik pada Armijn maupun Sulastin justru kuat untuk membangun nasionalisme Indonesia. Jauh sebelum Armijn dan Sulastin menerjemahkan, tahun 1921 Agnes Louis Symmers telah menerjemahkannya ke bahasa Inggris *Letters of Javanese Princes* dan paling tidak telah tiga kali dicetak ulang. Buku ini akan bagus jika Joss menilai terjemahannya, apa ada niat buruk di belakangnya?

Akan tetapi ketika mengenang perempuan Jawa *ningrat* itu bukankah sebetulnya masih belum beranjak dari Kartini? Bukankah hampir semua gambaran tentang diri kita dan mungkin masa depan kita masih didominasi oleh imajinasi tentang kemajuan dan modernitas yang tergambar dan digambarkan oleh *dunia barat*? Sebuah kenyataan bahwa beasiswa dari pemerintah Indonesia untuk studi pasca-sarjana, sebagian besar untuk mengirimkan mahasiswa belajar ke Belanda, Prancis, Jerman, Inggris; selain ke Amerika, Australia, dan Kanada; atau yang dekat ke Singapura, Jepang, dan sekarang ke Tiongkok. Kartini sebetulnya dapat beasiswa untuk belajar ke Belanda, tetapi karena tidak didukung *terutama* oleh ayah yang sangat dicintainya, dia urungkan niatnya.

Ada yang menarik tentang alasan mengapa niat itu diurungkan dan penjelasan itu saya temukan dalam kata pengantar buku terjemahan dari surat-surat Kartini oleh Sulastin Sutrisno (Jaquet, 1987/1989), saya kutipkan: “Percakapan dari hati ke hati antara Kartini dengan Abendanon menghasilkan pertimbangan bahwa kepergian Kartini ke negeri Belanda membahayakan perkaranya sendiri. Kartini akan dituduh menjadi orang Belanda utuh dan berpandangan barat. Dengan demikian, para orang tua tidak akan mau mempercayakan anak-anak mereka kepadanya” (hlm. XIII). Membaca buku ini, sesungguhnya ada

persoalan yang agak kurang jelas, misalnya apa yang dimaksud dengan *membahayakan perkaranya sendiri* dan siapa yang dimaksud dengan *para orang tua* dalam tulisan itu? Kartini, menurut saya, tidak saja sebuah persona, tetapi menjadi enigma dalam sejarah Indonesia.

Mungkin, membaca kembali pendapat Harsya W. Bachtiar, lulusan Harvard, dan sebelumnya belajar di Universitas Amsterdam dan Cornell; tidak saja tentang Kartini, tetapi juga tentang hal-hal lain yang pernah ditulisnya merupakan sesuatu yang perlu dilakukan. Harsya W. Bachtiar, kabarnya, menulis tesis doctoral (1972) berjudul *The Formation of The Indonesian Nation*, di Universitas Harvard, tetapi siapa yang sudah membaca tesisnya?



Buku ini tidak diperjualbelikan.



Magnis Suseno

Romo Katolik ini ke mana-mana naik Vespa dengan ponco warna kuning dan helm, bertubuh tinggi besar terlihat menjulang. Salah satu hobinya mendaki gunung, sebuah kegiatan yang menuntut ketangguh-



Sumber: Harson (2021)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

an fisik yang prima, apalagi diusia yang telah lewat 80 tahun. Mungkin seperti Romo Zoetmulder, Romo Magnis memilih menjadi warga negara Indonesia dan mempelajari Jawa *habis-habisan* daripada tinggal di negeri asalnya, bekas Jerman bagian timur yang kemudian menjadi Polandia. Romo Magnis yang lahir tahun 1936, konon berasal dari sebuah keluarga *ningrat* kaya. Memilih hidup sebagai Romo mencerminkan keputusan untuk mengabdikan seluruh hidupnya tidak saja bagi kemanusiaan, namun bagi mereka yang terpinggirkan di sebuah negeri yang menurut statistik 87 persen penduduknya beragama Islam. Berposisi sebagai Romo dari agama yang tergolong minoritas di Indonesia, ia dituntut memiliki kemampuan adaptasi yang tidak selalu mudah jika harus tampil di ruang publik.

Dia masuk Indonesia tahun 1961 ketika masih berusia 25 tahun, meskipun mungkin lebih banyak menghabiskan waktu di biara Kentungan, tentulah sedikit atau banyak memberi kesempatan untuk mengalami penajaman polarisasi politik di Indonesia. Bukan mustahil, pilihan untuk menulis disertai filsafat doktoralnya tentang pemikiran Karl Max didorong oleh kebutuhan saat itu untuk memahami komunisme yang makin *merangsek* ke dunia ketiga, seperti Indonesia, di sebuah zaman yang dikenal sebagai perang dingin. Selain Marxisme, Romo Magnis memutuskan untuk mendalami Jawa dan berhasil menerbitkan buku cukup tebal *Etika Jawa* (1984) sebagai hasil dari pendalamannya. Jatuh cinta pada Jawa juga dikukuhkan dengan mengambil nama Jawa, yaitu *Suseno*, yang menjadi nama belakangnya. Dalam sebuah kesempatan, Romo Magnis menjelaskan bahwa Suseno adalah nama muda dari Adipati Karena, seorang kesatria yang memiliki rasa tanggung jawab besar harus membela Kurawa, yaitu pihak yang dianggap bersalah dalam berhadapan dengan Pandawa dalam epos besar pewayangan Mahabarata.

Sebagai seorang Romo Katolik dari Ordo Jesuit, sebagian besar waktu dihabiskan sebagai pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara yang berlokasi *nyempil* di pusat pertokoan keramik di Rawasari. Jabatan terakhirnya sebagai rektor membuktikan dedikasi yang total pada dunia pendidikan di sebuah kota yang riuh dengan berbagai persoalan kehidupan manusia urban: kemiskinan, kekumuhan, lalu lintas

semrawut; sementara di sisi lain, pameran kemewahan begitu telanjang di depan mata, mencerminkan kesenjangan, dan ketidakadilan yang mungkin tak akan terjembatani sampai kapanpun. Bisakah seorang yang telah mempelajari Marxisme dan mendalami Jawa bisa hidup *tanpa memihak*? Penolakan Bakrie Award, merupakan salah satu bukti komitmen sosial Romo Magnis pada mereka yang tersingkirkan, korban lumpur Lapindo –perusahaan keluarga Bakrie terlibat.

Ketika pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan untuk menyingkirkan becak dari wilayah ibu kota, Romo Magnis sangat menentang. Dia melawan arus dengan mengatakan bahwa menjadi tukang becak bukanlah sebuah pekerjaan yang merendahkan derajat harga diri manusia. Menurutnya, justru hal itu merupakan sebuah pekerjaan yang mulia dan kendaraan umum yang sehat, tidak menimbulkan polusi, dan cocok serta ramah untuk lingkungan hidup yang menekankan hubungan erat antarwarga. Bisa diduga, usahanya sia-sia dan dengan bersedih becak terusir dari Jakarta; sebagian dibuang ke laut menjadi sarang untuk terumbu karang dan ikan yang mungkin akan berkembang biak di situ. Akan tetapi, Romo Magnis terbukti benar ketika beberapa tahun kemudian kota seperti Kopenhagen ibu kota Denmark memutuskan mengusir mobil yang hanya menghasilkan kemacetan dan polusi serta menganjurkan warga menggunakan sepeda dan becak.

Ketika memutuskan menjadi warga negara Indonesia, Romo Magnis pasti tidak bermaksud sekadar mencari kemudahan bagi pekerjaannya sebagai rohaniawan. Mewartakan keyakinan, keimanan, kesenjangan, dan ketidakadilan *baginya* sebuah medan kurusetra, seperti Adipati Karna yang menjadi tokoh simbolik pilihan, menjalani garis hidup, membela Kurawa, dan tahu bahwa ajal sudah menjadi takdir yang telah difatwakan oleh para dewa dari sorgaloka di atas sana.

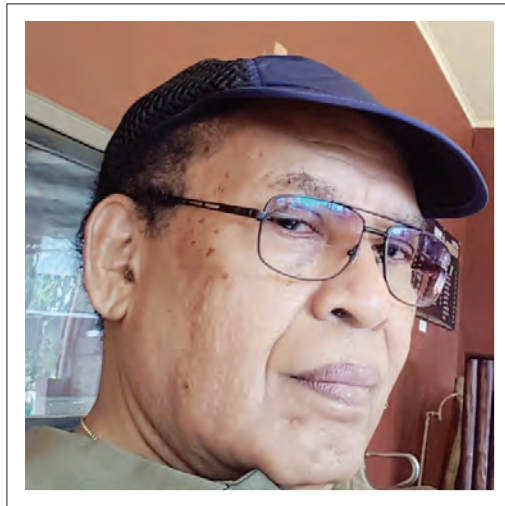
Moment of truth bagi Romo Magnis tentu telah datang berkali-kali dalam hidupnya yang panjang itu. Akan tetapi, saat menjelang pilpres yang lalu mungkin merupakan *moment of truth* yang besar ketika dia harus menulis kolom opininya sedemikian keras, bahkan seperti mencerca pada mereka yang memilih untuk Golput. Tentu, tidak sedikit orang yang terkejut membacanya. Bagi Romo Magnis, hal itu

mungkin *moment* untuk *to be or not to be, now or never*. Begitu jelas warna hitam dan putih di matanya, kenapa ragu memilih? Tulisan di kolom opini itu sering muncul di *Kompas*: tidak panjang dan berbahasa lugas tidak bertele-tele kalau hanya untuk unjuk kepintaran. Begitu pula gaya bicaranya, meskipun kental berlogat Jawa, dia sama sekali tidak hendak pamer kecerdasan dan langsung pada inti pesan yang ingin disampaikan. Masa depan Indonesia, sebuah negeri asing yang kemudian dipilih sebagai negaranya adalah segala-galanya. Dia siap memberikan segenap energi dan pemikirannya untuk yang dianggapnya pilihan terbaik, seperti Karna yang tahu akan *perlaya* di medan kurusetra di ujung panah pasopati Arjuna, musuh sekaligus saudaranya.



Manuel Kaisiepo

Gayanya tidak berubah meskipun lebih dari sepuluh tahun tidak bertemu. Bicaranya masih sama, kritis, dan memperlihatkan bacaannya yang luas. Saya masih ingat, ketika mencari buku yang baru terbit tidak



Sumber: Firmino (2020)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

semudah dan secepat sekarang, yaitu Manuel, di pertengahan tahun 1980-an dia sudah memiliki buku *Interpreting Indonesian Politics: Thirteen contributions to the debate* (1982). Buku itu merupakan kumpulan tulisan penting tentang politik Indonesia yang diedit oleh Audrey Kahin, Ben Anderson, dan Daniel Lev.

Pada pertengahan tahun 1980-an itu, beberapa anak muda antara lain, Wiladi Budiharga, Manuel Kaisiepo, Moeslim Abdurahman, Indro Tjahjono, Hermawan Soelistyo, dan lain-lain membuat terobosan dalam dunia ilmu-ilmu sosial yang dianggap *mandeg* dengan mengembangkan apa yang dinamakan “Ilmu-Ilmu Sosial Transformatif”. Meskipun sebagai sebuah perkumpulan kemudian bubar, namun masing-masing anggotanya terus memperjuangkan ide mentransformasi masyarakat.

Manuel Kaisiepo adalah seorang intelektual publik yang terus bergerak. Pada awal tahun 1990-an bersama Gus Dur, Todung Mulya Lubis, Rahman Tolleng, Marsillam Simanjuntak, dan Bondan Gunawan serta sejumlah tokoh lainnya mendirikan Forum Demokrasi. Forum tersebut diinisiasi sebagai gerakan intelektual penyeimbang terhadap kecenderungan kuat untuk membuat organisasi berbasis kesamaan agama. Hal inilah sebuah masa ketika intelektual Indonesia, seperti melupakan jati diri sebagai orang-orang yang bebas berpikir. Mereka rela menyerahkan kemerdekaan berpikir kepada organisasi sektarian yang menjanjikan kekuasaan bagi kelompok agama. Forum Demokrasi, meskipun sebuah kelompok kecil, namun menjadi bukti bahwa masih ada pemikir-pemikir bebas di negeri ini.

Abdurahman Wahid, Gus Dur panggilan akrabnya, sebagai figur utama dalam Fordem. Dia adalah seorang tokoh dan pemimpin Islam yang gigih melawan rekan-rekannya para tokoh Islam yang memilih mengabdikan pada sebuah kepentingan politik jangka pendek. Harus diakui bahwa spirit kelahiran Fordem tidak dapat dilepaskan dari *wind of change*, yang saat itu berhembus kencang di negara-negara sosialis-komunis di Eropa Timur yang ingin melepaskan diri dari hegemoni Uni-Soviet. Kemunculan Vaclav Havel, seorang penyair dan sutradara teater sebagai pemimpin perlawanan di Cekoslovakia, menjadi inspirasi para intelektual Indonesia untuk membuka dan memperluas ru-

ang publik dan tidak menyerah pada dominasi politik identitas. Ketika genggaman Uni-Soviet berhasil dilepaskan, Vaclav Havel terpilih menjadi presiden pertama Republik Ceko-slovakia.

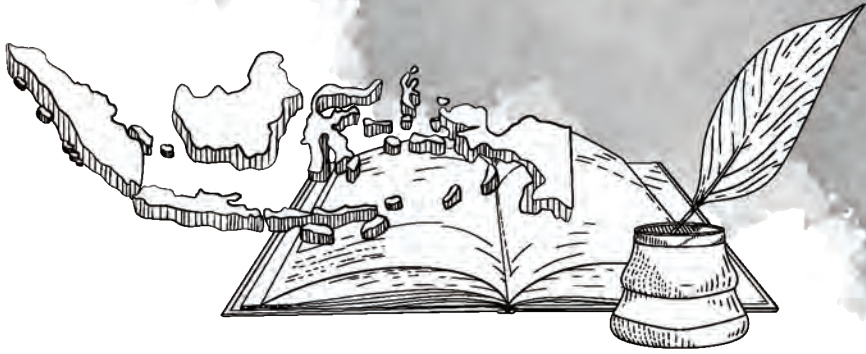
Ketika angin perubahan politik juga mulai berhembus kencang di tahun 1998, menjadi kebutuhan mendesak *siapa yang paling pantas* menjadi presiden jika Soeharto tumbang. Setelah melewati masa transisi periode kepresidenan Habibie, melalui berbagai konflik, dan ketegangan, pilihan kemudian jatuh pada Gus Dur sebagai presiden pertama versi reformasi. Dalam masa kepresidenan Gus Dur yang pendek, Manuel Kaisiepo diangkat menjadi Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Saya kira, saat itu perhatian Gus Dur sudah terarah ke Papua dan melihat urgensi untuk segera memberikan prioritas ke Papua. Manuel Kaisiepo adalah orang tepat untuk mewakili Papua dalam kabinet Gus Dur.

Setelah Aceh berhasil didamaikan, memang tinggal Papua yang belum berdamai dengan republik. Inisiatif Gus Dur untuk mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua adalah langkah simbolik penting memberikan penghormatan dan rekognisi terhadap orang Papua dan identitas kulturalnya. Gus Dur memahami identitas kultural melebihi identitas politik. Langkah penting selanjutnya yang diambil Gus Dur adalah melakukan dialog langsung tanpa perantara dengan orang Papua. Gus Dur tidak melarang Bintang Kejora –bendera Orang Papua dikibarkan berdampingan dengan republik, asal dalam posisi lebih rendah.

Gus Dur juga mulai melakukan pendekatan pribadi dengan Theys Hiyo Eluay, pemimpin karismatik Papua. Dibunuhnya Theys sebelum melakukan pertemuan dengan Gus Dur menggagalkan usaha Gus Dur untuk mendamaikan Papua. Disusul dengan penggulingan Gus Dur dari kursi kepresidenan, menghancurkan jembatan yang mulai dibangun untuk menyeberangkan orang Papua menuju kesetaraan di pangkuan republik. Apa yang kita saksikan belum lama ini, represi dan persekusi terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya adalah bukti sebagian dari masyarakat Indonesia belum berdamai dengan Papua.

Sebelum terlambat, mungkin sekarang Indonesia harus kembali mengingat Gus Dur dan mungkin juga harus mendengarkan apa

pendapat Manuel Kaisiepo tentang bagaimana harus menjalin perda-
maian dengan Papua. Bagi orang Papua, mungkin karena pengalaman
sejarah yang getir, ada yang lebih berharga dari sekadar kesejahteraan
material, yaitu martabat dan harga diri; dan itu yang selama ini dia-
baikan. Setelah Aceh, Papua adalah ujian terakhir; mampukah Indone-
sia berdiri sebagai sebuah republik yang menghargai warga negaranya
sendiri.



Marianne Katoppo

Marianne Katoppo meninggal pada tanggal 12 Oktober 2007, tutup usia pada 64 tahun, dikenal sebagai seorang pendeta Kristen, novelis, dan pemikir feminis. Novelnya *Raumanen*, terbit pertama kali



Sumber: Jurnal Perempuan (2016)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

pada 1977, mendapatkan penghargaan dari Dewan Kesenian Jakarta, Yayasan Buku Utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Hadiah Sastra ASEAN. Selain itu, ia juga menerbitkan buku non-fiksi *Compassionate and Free: An Asian Woman's Theology* terbit tahun 1979 dan diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa asing. Marianne Katoppo juga dicatat sebagai seorang aktivis yang terlibat dalam berbagai isu-isu sosial-politik, antara lain pada tahun 1980 ikut membentuk sebuah kelompok yang menentang hukuman mati (HATI); pada tahun 1991 bersama Gus Dur dan sejumlah intelektual mendirikan Forum Demokrasi (Fordem) untuk mengadvokasi pluralisme, kesetaraan warga negara, dan demokrasi. Baik dalam dunia pemikiran maupun dalam dunia aktivisme, Marianne Katoppo bisa dicatat sebagai salah satu dari sedikit aktivis perempuan yang berpemikiran mendahului zamannya.

Marianne Katoppo, seorang perempuan dengan latar belakang Kristen dan berasal dari sebuah etnis kecil, Minahasa, di Sulawesi Utara. Berdasarkan beberapa kali kunjungan ke Minahasa, saya mendapatkan kesan bahwa masyarakat Minahasa mewarisi tradisi pendidikan modern dari Belanda yang lebih dahulu daripada masyarakat lain di samping merupakan penganut agama Kristen kuat. Marianne Katoppo dibesarkan dalam keluarga yang telah terbiasa berpikir kritis yang merupakan modal dasar untuk mengembangkan diri sebagai seorang pemikir, penulis, dan aktivis yang terlibat dalam perubahan masyarakat. Mungkin tidak banyak, apalagi dari generasi yang lebih muda, mengenal sosok yang dapat disebut sebagai salah satu intelektual perempuan dengan latar belakang Kristen Protestan. Ketika hari ini isu minoritas-mayoritas menyeruak begitu kencang di ruang-ruang publik, mengingat kembali kiprah Marianne Katoppo rasanya diperlukan. *Triple minorities* yang disandangnya: perempuan, Kristen, dan berasal dari etnis kecil Minahasa; menohok dengan telak perkembangan semacam tirani yang *absurd* hari ini: tirani mayoritas.

Membaca buku-bukunya, baik novel maupun karya non-fiksi, saya dapat belajar banyak dari Marianne Katoppo. Namun demikian, perhatian utamanya bisa dipusatkan pada dua hal. Pertama, dia prihatin terhadap posisi perempuan yang masih mengalami diskriminasi dan marjinalisasi di lingkungan, baik dalam keluarga, komunitas etnis,

maupun di masyarakat lebih luas. Kedua, dia tidak terlepas dari hal yang pertama, yaitu kegelisahan terhadap ketidakbebasan umat manusia yang terus berlangsung. Poin kedua tersebut direpresentasikan dalam berbagai pengalaman ketertindasan, ketidakadilan, dan ketidakmerdekaan. Sebuah tulisan yang menceritakan pertemuannya dengan Ivan Illich, seorang teolog kiri yang memperkenalkan sebuah teologi yang disebutnya sebagai teologi pembebasan, saya pikir sangat menginspirasi pemikiran dan aktivitas Marianne Kattoppo selanjutnya.

Tatkala tahun 1995 Pramoedy Ananta Toer dinobatkan sebagai penerima hadiah Ramon Magsaysay, sebuah keanehan terjadi, komunitas intelektual Indonesia terbelah antara yang mendukung dan yang menolak terhadap pemberian penghargaan itu. Keanehan itu bagi Marianne Katoppo tampak tidak terlalu penting untuk dipertimbangkan ketika harus menjalankan tugas untuk mewakili Pramoedy menerima penghargaan itu. Pramoedy yang dipenjara, 14 tahun tanpa proses peradilan, termasuk 10 tahun dibuang ke Pulau Buru; saat itu masih dilarang bepergian ke luar negeri. Bagi Marianne, mungkin hanyalah sebuah kekonyolan, atau sikap kekanak-kanakan saja untuk terlibat dalam pro-kontra penghargaan itu. Mengapa persoalan yang sudah begitu jelas dari sisi kemanusiaan masih harus dipertentangkan?

Akhir-akhir ini, terasa sebuah kehidupan bersama yang makin pengap. Betapa tidak, ketika menyaksikan seorang gubernur dari sebuah kota metropolitan, meraih kemenangan dalam sebuah kontestasi karena lawannya dianggap telah menistakan agama. Lalu, ketika seorang calon presiden harus memilih wakilnya dengan pertimbangan: *enggak akan menang kalau tidak memainkan kartu agama*. Jika kita masih berpegang pada akal sehat, kita harus jujur untuk mengakui bahwa politik hari ini telah mengalami kemunduran yang serius karena tidak mampu membendung merangseknya agama ke ruang publik.

Politik identitas yang berkelindan dengan populisme tampak tidak hanya mewabah di kandang sendiri, tetapi telah menjadi penyakit dunia. Gejala itu muncul di Eropa dalam fenomena Brexit yang memecah belah masyarakat Inggris. Keterpilihan Donald Trump di Amerika Serikat dan *impeachment* yang dilancarkan oleh Partai Demokrat menunjukkan terdapat polarisasi warga negeri itu oleh isu-isu sektarian. Ada

gelombang zaman yang bernama politik identitas yang berlangsung bersamaan dengan ketidakadilan, represi politik, dan kekhawatiran terhadap kerusakan alam semesta.

Saya pikir, sejak awal Marianne Katoppo menyadari pentingnya bergerak di tataran global. Latar belakang keluarga yang kosmopolitan dan kemampuannya yang menguasai berbagai bahasa asing telah membuat dia terbiasa untuk bergaul dalam kancah internasional. Meskipun bukunya *Compassionate and Free* (1979) ditulis dalam bahasa Inggris untuk merepresentasikan keprihatinan lokal, buku tersebut ditawarkan untuk pembaca lintas bangsa. Marianne bisa dibilang seorang intelektual publik yang mewakili *dunia ketiga* di panggung dunia. Sebuah peran yang masih sedikit dilakukan oleh intelektual negeri ini.

Keprihatinan lokal makin berhimpit dengan kecemasan global dan gejala lokal tak lagi bisa dilepaskan dari apa yang terjadi di belahan dunia lain merupakan apa yang telah dirintis oleh Marianne Katoppo. Dia telah memperjuangkan kesetaraan warga negara tanpa lagi melihat perbedaan jender, etnisitas, ras, dan agama; sungguh makin relevan. Mengenang Marianne Katoppo mengingatkan kita terhadap pentingnya *kesetaraan* karena hanya dalam kesetaraanlah pemenuhan cita-cita kemanusiaan terhadap keadilan dan kemakmuran akan bisa direalisasikan.



Muridan Widjojo

Sosok eksentrik ini bernama lengkap Muridan Satrio Widjojo. Mungkin karena bernama *Satrio*, itu yang kemudian menjadikan garis hidup dan jalan darmanya sebagai seorang kesatria. Muridan meninggal pada



Sumber: Ariane (2015)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

2014 di usia yang tergolong muda, 47 tahun. Namun pada usia yang relatif muda, Muridan telah memberikan sumbangan penting sebagai upaya untuk penyelesaian konflik Papua secara damai. Mungkin kata *penyelesaian konflik* dianggap tidak tepat bagi pemerintah yang menganggap bahwa tidak ada masalah konflik yang serius di Papua. Selain itu, persoalan Papua mungkin dianggap tidak ada perbedaannya karena ditemukan di tempat lain, persoalan ketidakpuasan biasa saja dan persoalan ekonomi belaka.

Presiden Jokowi pun punya resep yang sama untuk Papua layaknya untuk daerah lain, yaitu pembangunan infrastruktur. Harga semen yang bisa mencapai 600 ribu untuk satu sak di Wamena dengan perbaikan infrastruktur transportasi akan sama harganya dengan di Surabaya yang cuma 60 ribu. Selain pendekatan ekonomi seperti ini, Jokowi juga menggunakan pendekatan keamanan yang pernah coba diputus oleh Gus Dur saat menjadi presiden dan menggantinya dengan pendekatan dialog. Di tengah sulitnya mengembalikan upaya dialog damai itulah, sosok dan peran Muridan Widjojo telah ditulis dalam sebuah buku untuk menghormatinya, *Liber amicorum* berjudul *Muridan: Kita & Papua*. Buku ini ditulis oleh 23 orang sahabatnya dan resmi diluncurkan Komunitas Bambu, Minggu malam di Jakarta, kurang dari dua bulan selepas kepergian mendiang Muridan, 7 Maret 2014. Pada hari Jumat, 4 April 2014, di Ruang Auditorium Utama LIPI Jakarta, dilaksanakan acara berjudul *Tribute to (alm.) Dr. Muridan S. Widjojo, Mengenang dan Merayakan Ulang Tahun* dan diskusi *Masa Depan Jakarta-Papua*.

Seperti sahabat yang lain, saya juga memiliki kenangan dengan Muridan. Saya pertama kali bertemu Muridan tahun 1993 di Lembah Baliem saat dia masih magang sebagai calon peneliti LIPI. Ketika bertemu itu, dia berbadan kurus, katanya baru terkena Malaria –sebuah penyakit yang sering menyerang teman-teman yang melakukan penelitian di Papua. Saya tidak heran jika Muridan terkena Malaria karena dia sering tidur bersama penduduk di honei-honei. Honei adalah rumah penduduk yang berbentuk bulat tertutup beratap ilalang dan hanya ada satu pintu sehingga menyimpan hangat dari api unggun di udara lembah Baliem yang dingin. Sebetulnya, pada awal saya

merasa agak aneh, anak lulusan Sastra Prancis UI ini memilih kegiatan lapangan seperti ini. Baru kemudian setelah menjadi peneliti LIPI, dia mengambil jurusan antropologi dan melanjutkan penelitian di Papua.

Pada tahun 2002, dia mendapatkan beasiswa untuk belajar sejarah di Leiden University, pertama untuk jenjang master kemudian untuk doktor. Pada tahun 2000 saat penelitian untuk S2 antropologi, Muridan sudah terlibat menjadi saksi ahli pengadilan tokoh Papua yang dianggap melawan pemerintah. Keempat tokoh yang terlibat dalam Presidium Dewan Papua itu adalah Theys Hiyo Eluay, Thaha Muhammad Alhamid, Herman Awom, Don Flasy, dan Jhon Mambor. Kisah ini dapat dibaca dalam tulisan Herdin Halidin dalam buku *Bantuan Hukum di Wilayah Konflik: Pembelajaran Tentang Konflik dan Konsep Bantuan Hukum Struktural* (2015). Herdin saat itu menjadi asisten peneliti Muridan. Saat itu, Soeharto sudah lengser dan diganti B.J. Habibie yang memang membuka ruang kebebasan untuk menyuarakan pendapat. B.J. Habibie juga mengizinkan referendum bagi Timor Timur yang kemudian lepas secara merdeka menjadi Timor Leste. Setelah Timor Leste, Aceh dan Papua adalah dua wilayah yang juga ingin melepaskan diri dari Indonesia. Jika persoalan Aceh kemudian teratasi melalui perjanjian damai yang ditandatangani di Helsinki; persoalan Papua masih belum terselesaikan hingga hari ini.

Ketika Gus Dur terpilih sebagai presiden untuk menggantikan B.J. Habibie, penyelesaian konflik Aceh dan Papua menjadi salah satu agenda utamanya. Ahmad Suaedy seorang peneliti yang dekat dengan Gus Dur mendokumentasikan dengan rinci bagaimana usaha Gus Dur melalui dialog mengupayakan jalan damai untuk menyelesaikan konflik Aceh dan Papua. Dokumentasi dan penelitian Ahmad Suaedy dapat dibaca di buku yang semula merupakan disertasi doktornya yang berjudul *Gus Dur Islam Nusantara & Kewarganegaraan Bineka: Penyelesaian Konflik Aceh dan Papua 1999–2001* (2018). Salah satu upaya Gus Dur adalah dengan mengganti nama Irian menjadi Papua dan membolehkan bendera Bintang Kejora dikibarkan asal lebih rendah dari bendera Merah Putih. Gus Dur menjalin hubungan dengan Theys Hiyo Elue yang kemudian menjadi Ketua Dewan Adat Papua untuk mencari

solusi damai melalui dialog-dialog yang mengandaikan kesetaraan antara kedua belah pihak.

Pada tanggal 10 November 2001 Theys ditemukan tewas terbunuh. Penyelidikan menunjukkan bahwa sebuah Tim Kopassus terbukti sebagai pihak yang melakukan pembunuhan itu. Apakah akibat Theys terbunuh yang kurang lebih bisa disamakan posisinya dengan Hasan Tiro di Aceh sehingga membuat kelanjutan jalan damai di Papua menjadi berantakan? Pasti persoalannya tidak sesederhana itu. Gus Dur yang lengser digantikan oleh Megawati dan tampak sejak itu telah mengubah total *pendekatan dialog* yang telah dirintis Gus Dur kembali ke pendekatan lama, *keamanan*. Jika kemudian konflik Aceh bisa diselesaikan melalui Helsinki Agreement pada 15 Agustus 2005; konflik Papua terus berlanjut.

Setelah Muridan Widjojo menyelesaikan S3 (2007) tentang perlawanan Pangeran Nuku di Tidore terhadap Belanda dan menunjukkan aliansi kultural antara Papua dengan Maluku, seperti memperoleh momentum untuk kembali meneliti Papua sambil membangun jaringan untuk mendapat solusi damai konflik Papua. Muridan bersama tim menghasilkan konsep *Papua Road Map* pada tahun 2010 yang menjadi panduan advokasi solusi damai untuk menyelesaikan konflik Papua. Sebagai seorang peneliti lapangan yang tangguh, Muridan melakukan perjalanan ekstensif untuk melihat sendiri dan memahami apa yang terjadi di tingkat akar rumput Papua. Di sisi lain, dia juga berhasil diterima oleh berbagai kalangan masyarakat sipil Papua, terutama tokoh-tokoh gereja. Dengan daya analisis dan kemampuan membangun jaringan; Muridan bersama Pater Neles Tebay menjadi dua figur sentral sebuah upaya dialog damai –sebuah upaya yang terputus sepeninggal Gus Dur.

Namun, sejarah rupanya belum berpihak pada Papua. Pada tanggal 7 Maret 2014, Muridan wafat karena kanker fasofaring dan lima tahun kemudian Pater Neles Tebay juga wafat karena kanker tulang. Sepeninggal Muridan dan Pater Neles Tebay, jaringan dialog Papua damai mengalami kendala keberlanjutan yang cukup serius. Dalam tulisan yang berjudul *Dialog Jakarta-Papua: Apa Masih Relevan?* (2021), Budi Hernawan yang mengenal dekat Muridan dan Pater Neles Tebay

mengatakan bahwa jaringan dialog Papua damai menjadi kehilangan keterkaitan dengan apa yang terjadi di akar rumput. Gerakan dialog Papua damai telah terputus dari gerakan rakyat.

Dalam buku yang akan terbit untuk menghormati Muridan, para sahabatnya berkontribusi untuk memberi testimoni dari sosok dan peran Muridan Widjojo dalam pergumulannya dengan Papua. Profesor Leonard Blusse, promotor disertasi doktornya di Universitas Leiden, dalam tulisan yang berjudul *Remembering Muridan Widjojo* antara lain menulis sebagai berikut.

What caught my special interest in Muridan was his great devotion to the welfare of the Papua's and the anthropology and history of West Irian. I will leave it to others to write about his important contribution to the emancipation of the Papuas within contemporary Indonesia. May his devotion to the Papua cause never be forgotten! (Blusse, 2021)



Buku ini tidak diperjualbelikan.



Marsillam Simanjuntak

Soebadio Sastrosatomo (1919–1998), tokoh Partai Sosialis Indonesia (PSI) di dalam buku Rosihan Anwar berjudul *Soebadio Sastrosatomo Pengemban Misi Politik* (1995, 202) ketika ditanya, “Sampai sekarang tidak jelas siapa di belakang demonstrasi mahasiswa yang dipimpin



Sumber: Imam (2010)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Hariman Siregar. Anda bisa bercerita?”. Dia menjawab seperti ini, “Sebenarnya yang ada di belakang ini Marsillam Simanjuntak dan Rahman Tolleng sebab mereka itu kecewa. Mereka itu tadinya peng-anjur kerja sama ABRI-Sipil atas dasar saling menghormati dan sama sederajat. Ingat, Rahman Tolleng dulu Sekjen Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan pemimpin redaksi Suara Karya. Dia dekat dengan partai Golkar, tetapi dia tak mau dimanfaatkan. Tidak mau jadi kuli politik”.

Demonstrasi mahasiswa pada tanggal 15 Januari 1974 yang di-pimpin Hariman Siregar yang waktu itu sebagai Ketua Dewan Maha-siswa UI, dilakukan bersamaan dengan kedatangan Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka. Demonstrasi berlangsung rusuh, Pasar Senen dibakar, mahasiswa bentrok dengan polisi, dan massa yang digerakkan untuk menandingi mahasiswa. Ali Moertopo, Aspri presiden Soeharto menuduh PSI mendalangi demo mahasiswa itu sehingga beberapa pentolan PSI ditangkap, termasuk Soebadio yang kemudian dipenjara meskipun akhirnya dibebaskan tanpa proses pengadilan.

Marsillam Simanjuntak dan Rahman Tolleng, yang juga ditahan setelah Malari, memang sudah berkawan lama dan sejak menjadi mahasiswa bersama-sama aktif mendongkel Bung Karno. Dalam acara mengenang kematian Rahman Tolleng yang diselenggarakan oleh Ma-jalah Tempo, 7 Februari 2019, Marsillam menceritakan pengalaman berkawan dengan Rahman Tolleng (Tempodotco, 2019). Pada suatu malam, sekitar pertengahan tahun 1960-an, dia ke Bandung mungkin untuk rapat konsolidasi poros Bandung-Jakarta. Setiba di sana, dia kaget karena melihat ada golok di meja Tolleng. Sambil tertawa Mar-sillam mengenang kawan dekatnya itu ternyata seorang yang juga siap berkelahi secara fisik jika memang keadaan memaksa.

Sebelum Marsillam dan Rahman Tolleng wafat, mereka memang intelektual tulen. Keduanya, selain Amaran Loebis yang meninggal pada 2 September 2019, seminggu sekali khusus datang ke kantor Ma-jalah Tempo untuk mendiskusikan isi editorial Tempo yang akan ter-bit. Ide editorial itu, kata Marsillam dalam acara mengenang Tolleng, adalah ide Tolleng dan Goenawan Mohamad karena *katanya* mereka terinspirasi dari majalah The Economist. Tidak tahu siapa yang kemu-

dian menggantikan mereka ketika dari tiga tokoh itu tinggal Marsillam—yang mengaku *malas* datang ke kantor Tempo, di Palmerah Selatan, karena *macet*.

Sejak mahasiswa, Marsillam Simanjuntak memang seorang aktivis. Menyelesaikan kuliah dan menjadi dokter, meskipun konon tidak pernah praktik dan kemudian kuliah lagi di Fakultas Hukum sampai selesai dan menulis skripsi tentang pengaruh pemikiran Hegel dalam penyusunan UUD 1945 melalui peran Supomo. Skripsi itu kemudian menjadi sangat terkenal setelah diterbitkan oleh Grafiti Press, dengan judul *Pandangan Negara Integralistik* (1994); “skripsi tetapi kualitasnya tesis doktor”, kata Daniel Dhakidae, seperti biasa dengan gaya bicaranya yang penuh retorik.

Sebagai intelektual publik, Marsillam tidak banyak menulis dibanding dengan koleganya, seperti Nono Anwar Makarim atau Arief Budiman. Namun seperti sobat kentalnya Rahman Tolleng, Marsillam seperti dimitoskan di kalangan para intelektual-aktivis mungkin karena integritas dan konsistensi dalam memegang prinsip. Meskipun tidak banyak menulis, tetapi sangat berpengaruh, seperti skripsinya yang kemudian dijadikan buku itu. Gagasan Marsillam yang disampaikan pada konferensi untuk menghormati Herb Feith, karena pensiun dari Monash University, di Melbourne 17–19 Desember 1992 juga sempat menjadi bahan perbincangan hangat. Jika waktu itu sudah ada media sosial (medsos) seperti sekarang, pastilah menjadi viral dan *trending* topik.

Kata orang yang datang dalam konferensi yang dihadiri tokoh-tokoh besar pengkaji Indonesia seperti George Kahin, Ben Anderson, dan Harold Crouch itu; Marsillam Simanjuntak benar-benar menjadi bintang dengan makalahnya: *Democratizations in the 90s: Coming to terms with gradualism?* (1992). Di catatan kaki makalah itu ada ucapan terima kasih pada satu orang, A. Rahman Tolleng. Dalam konferensi yang bertujuan untuk membandingkan demokrasi tahun 1950-an dan 1990-an ini, Marsillam melontarkan pertanyaan, apakah *gradualism*, yang bisa diartikan sebagai perubahan pelan-pelan secara bertahap, adalah pilihan terbaik bagi demokrasi Indonesia?

Awal tahun 1990-an, jagat politik Indonesia mencatat beberapa peristiwa politik yang agak penting, meskipun harapan akan kondisi membaik dari demokrasi sesungguhnya masih gelap. Pada tanggal 7 November 1989, Tembok Berlin diruntuhkan sehingga mencerminkan kemenangan blok barat dan kekalahan blok timur sekaligus sebagai tanda Perang Dingin berakhir. Desember 1991, Uni-Soviet pecah. Para pejuang demokrasi di bekas negara-negara satelit Uni-Soviet, Polandia, Cekoslovakia, dan Hongaria; seperti Lech Walensa dan Vaclav Havel, muncul sebagai pahlawan dan kemudian dipilih menjadi presiden. Peristiwa Tembok Berlin runtuh dan Uni-Soviet pecah ditanggapi oleh Orbais dan Soeharto sebagai konfirmasi keabsahan tindakan mereka menghancurkan komunis di tahun 1965. Akan tetapi, bagi para pejuang demokrasi seperti Tolleng dan Marsillam, hal ini merupakan momen untuk melakukan aksi

Pada Maret 1991, bersama Gus Dur, Bondan Gunawan, Arief Budiman, Mulya Lubis, Romo Mangunwijaya, dan sekitar 45 tokoh lain, Marsillam dan Tolleng mendirikan Forum Demokrasi (Fordem). Pada waktu yang sama, Princen dan beberapa tokoh lain juga mendirikan Liga Pemulihan Demokrasi. Sebelumnya, Desember 1990, ICMI dibentuk dan diangkat B.J. Habibie sebagai ketua yang segera diikuti oleh epigon-epigonnya –berbagai organisasi intelektual sektarian lain. Pada 12 November 1991, peristiwa penembakan di Santa Cruz Dili meletus dan membuka mata dunia atas kekejaman rezim Soeharto di Timor Leste. Selanjutnya, tahun 1992 dilakukan pemilihan umum dan 1993 kembali Soeharto ditetapkan sebagai presiden yang ke-5 kalinya.

Membaca kembali, makalah Marsillam yang dibuat akhir 1992, menjelang Soeharto dilantik sebagai presiden kesekian kalinya, saya merasa betapa tajam analisis yang dibuat setelah dia lontarkan pertanyaan retorik, apakah *gradualism* pilihan terbaik bagi demokrasi? Saya kutipkan sedikit sebagai berikut.

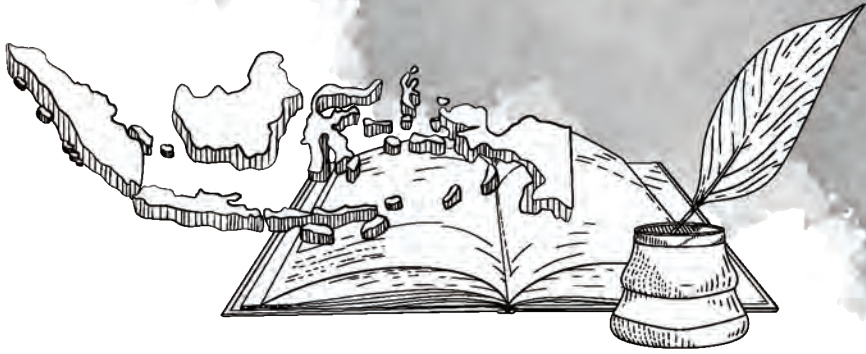
“All three types of gradualism, in their various degrees of concern in democratization, must have rest their conviction on one common assumption. That they look at the incumbent president as problem-free, or not part of the problem, in attaining democracy in this period of Indonesia’s history. And this is precisely the crux of the matter, to define

whether the president is to be relied on as the leader to solve the problem of democratization, or a problem, a complex one at that, to be solved first. Succession politics might not be identical with democratization, but at this point the question should be, is democratization possible without dealing first with succession as a problem?" (Simanjuntak, 1992).

Betapa tepat implikasi analisis Marsillam, Mei 1998, suksesi politik terjadi –*secara tiba-tiba*. Betapa tidak relevan *gradualism* yang di gadang-gadang para pendukungnya. Saat itu merupakan sebuah *moment of truth* terjadi, sayang kembali dilewatkan. Ketika Gus Dur menggantikan Habibie, Marsillam dan Bondan Gunawan juga diangkat sebagai menteri, kesempatan itu sudah jauh di belakang. Konon, salah satu dari momen penting yang seharusnya segera dilakukan, menurut Marsillam Simanjuntak, adalah *membubarkan Golkar*.



Buku ini tidak diperjualbelikan.



Masri Singarimbun

Orang Karo yang menghabiskan waktu hidupnya di kota gudeg Yogyakarta ini seorang yang penuh senyum, namun menyimpan etos kerja yang luar biasa kuat. Secara akademis, dia seorang antropolog, tesis



Sumber: Media Center Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (2012)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

doktor tentang sistem kekerabatan di kampungnya sendiri, Karo, yang diselesaikan di The Australian National University (ANU), Canberra (1966) dengan pembimbingnya, seorang antropolog terkenal Derek Freeman. Sebelum berangkat untuk menempuh program doktor di universitas yang sama dengan Pak Masri tahun 1986, saya menyempatkan untuk menemui beliau yang saat itu menjadi *country representative* The Population Council di kantor Kemang, Jakarta. Saya tahu bahwa menjadi kandidat doktor melalui program riset pasti tidak mudah dan saya ingin belajar dari Pak Masri kiat-kiat apa yang harus dipersiapkan agar bisa selesai sesuai tepat waktu. Meskipun saya tidak pernah menjadi anak buah Pak Masri, saya menganggap beliau sebagai guru dan nasihatnya sangat saya perlukan.

Bidang studi kependudukan di Indonesia yang menjadi dunia akademis saya, Pak Masri merupakan figur menarik dan menjadi model bagi saya. Meskipun keahlian formalnya adalah antropologi, apa yang dikerjakan jauh dari apa yang dibayangkan dari kerja antropolog yang konvensional. Sejak di Canberra, setelah lulus dari program doktor, Pak Masri memfokuskan perhatian pada masalah-masalah kependudukan, khususnya yang berkaitan dengan berbagai upaya untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk yang tahun 1970 dan 1980-an menjadi perhatian dunia. Pada saat itu, dunia barat sangat khawatir dengan laju pertumbuhan penduduk yang sangat cepat di negara-negara miskin di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Negara-negara seperti Cina, India, Indonesia, Meksiko, Brazil, dan Nigeria menjadi momok bagi dunia barat karena negara-negara yang berpenduduk besar, tetapi mayoritas warga miskin ini jika tidak dicegah laju pertambahan penduduknya akan mengancam kestabilan dan kedamaian planet bumi, *a doomsday scenario* –yang bakal mengganggu kenyamanan tidur penduduk negara-negara barat yang makmur.

Dana-dana dalam jumlah besar digelontorkan oleh negara-negara kaya melalui berbagai lembaga internasional, antara lain UNFPA dan The Population Council untuk mencegah ledakan penduduk di negeri-negeri miskin, berpenduduk besar seperti Indonesia. ANU mendirikan Department of Demography, dipelopori oleh Professor David Borrie dan kemudian dilanjutkan oleh Professor Jack Caldwell yang dituju-

kan untuk mendidik para ahli di bidang kependudukan (*demography*) dalam melakukan riset dan memberikan rekomendasi kebijakan dalam mengendalikan kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk. Sebagai negara imigran, Australia adalah tempat menarik untuk studi migrasi dan masyarakat multikultural.

Sebelum kembali ke Indonesia, Pak Masri, beberapa tahun bekerja sebagai *research fellow* di Department of Demography ANU –tempat melakukan kajian-kajian kependudukan bersama Professors David Borrie dan Jack Caldwell. Dalam sebuah kesempatan Jack Caldwell, seorang ahli demografi dengan reputasi internasional, mengakui pengaruh Pak Masri dalam mengembangkan sebuah metode riset yang diberi nama *quasi anthropology*. Setelah melalui proses yang panjang di UGM, Pak Masri berhasil mendirikan Pusat Studi Kependudukan sebagai tempat mencurahkan segenap tenaga dan pikiran dalam melakukan riset dan publikasi tentang berbagai isu kependudukan.

Melalui kepemimpinan Pak Masri, Pusat Studi Kependudukan UGM menghasilkan penerbitan hasil-hasil riset yang bermutu dan tidak sedikit yang merupakan kolaborasi dengan peneliti-peneliti asing. Perpektif lintas batas negara yang dianut Pak Masri terbukti menjadikan Pusat Studi Kependudukan UGM sebagai tempat persemaian peneliti-peneliti muda dari berbagai belahan dunia yang kemudian menjadi terkenal, seperti Patrick Guinness, Chris Manning, Terry dan Valerie Hull serta Benjamin White. Pak Masri juga bisa dikatakan menjadi mentor dari generasi peneliti-peneliti Indonesia yang tangguh seperti Sofian Effendy, Tajuddin Noer Effendy, Muhadjir Darwin, P.M. Laksono, Sukamdi, Irwan Abdullah, dan Pujo Semedi –yang semuanya telah menjadi profesor-profesor di UGM.

Riset sosial merupakan bidang yang ditekuni oleh Pak Masri. Bersama Sofian Effendy yang kemudian menjadi penerusnya, mereka menerbitkan buku tentang metode penelitian yang hingga sekarang masih menjadi rujukan para peneliti, dosen, dan mahasiswa. Bersama istrinya, Ibu Ira Singarimbun sebuah perpustakaan tentang kependudukan dan ilmu sosial berhasil dikembangkan dan menjadi tempat belajar yang menyenangkan. Kolaborasi riset jangka panjangnya di Desa Sriharjo, DIY bersama David Penny, seorang ahli ekonomi pertanian dari ANU

melahirkan monografi berjudul *Population and Poverty in Rural Java Some Economic Arithmetic from Sriharjo* (1973). Monografi ini sempat dilarang diedarkan oleh rezim Soeharto karena dianggap memberikan citra buruk dari keberhasilan strategi pembangunan ekonomi Indonesia di bawah Widjojo Nitisastro yang dianggap berhasil menurunkan tingkat kemiskinan secara masif.

Masri Singarimbun merupakan seorang ahli ilmu sosial yang tidak menjadikan riset sebagai sekadar profesi untuk menaikkan pangkatnya di perguruan tinggi. Riset juga bukan cara untuk mencari uang bagi dia, tetapi bagi pengembangan lembaga dan staf. Publikasi hasil riset bagi dia merupakan sesuatu yang memang seharusnya dilakukan untuk kepentingan publik dan mencerdaskan bangsa. Sebagai seorang intelektual publik, Masri Singarimbun memiliki keprihatinan yang mendalam terhadap nasib orang-orang miskin di Indonesia. Dia juga aktif menulis di kolom-kolom yang secara rutin muncul diberbagai penerbitan, antara lain di majalah Tempo, merupakan suatu bukti akan hal itu. Menulis soal kemiskinan dan ketimpangan sosial di zaman yang penuh represi bukanlah perkara yang mudah. Namun, dengan gaya tulisannya yang kadang disertai humor, hal-hal yang sensitif itu mampu diungkapkan. Masri Singarimbun, meskipun namanya telah dijadikan penanda sebuah gedung yang megah di UGM, mungkin apa yang pernah dia dilakukan sudah dilupakan orang. Patung separuh badannya bisa dilihat di lobi gedung yang megah itu, namun raut mukanya tampak seperti orang yang kesepian.



Max Lane

Orang asing yang mempelajari Indonesia dan dianggap ahli Indonesia dikenal dengan sebutan Indonesianis. Sebagai Indonesianis, Max Lane memiliki posisi yang agak unik, yaitu konsistensi sikap yang tidak



Sumber: Baskoro (2018)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

saja kritis karena tidak sedikit Indonesianis yang kritis, tetapi totalitas dia dalam membela mereka yang menjadi korban represi dan persekusi politik di Indonesia. Sikap itulah yang membuatnya berbeda dari yang lain. Sebagai warga negara Australia, Max Lane memilih untuk memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk Indonesia meskipun dia tetap memberikan perhatian pada perpolitikan di negerinya.

Memilih untuk selalu berada di sisi *kiri* jalan, Max membentuk sikap akademik dan mengarahkan cara berpoliticnya. Barangkali, ilmu pengetahuan bagi Max cuma alat untuk menganalisis dan kemudian membantunya menyusun aksi sekaligus strategi dalam mengubah keadaan. Bagi Max, gerakan politik barangkali lebih penting dari analisis politik.

Mungkin, tidak berbeda dengan para remaja Australia lain yang kemudian jatuh hati dengan Indonesia setelah mempelajari bahasa, sejarah, dan karya sastra Indonesia; Max Lane masuk Indonesia ketika rezim militer Orde Baru mulai mengembangkan kekuasaannya. Ketika itu, bangkai para korban persekusi politik yang berlangsung sejak 1 Oktober 1965 masih tercium anyir menusuk hidung. Para korban, yang mati maupun yang masih hidup, akibat represi politik dari rezim Orde Baru yang terus terjadi dan perlawanan-perlawanan yang diam-diam terus dilakukan adalah sebuah kondisi bagi Max, bisa jadi, merupakan gelanggang yang harus dimasuki dan pilihan yang membawa untuk mengarungi haru-biru kehidupan sebuah bangsa, yang secara *biologis*, bukan bagian dari dirinya.

Setelah menyelesaikan program *undergraduate*, Max sempat beberapa tahun menjadi diplomat dan ditempatkan di Jakarta sebelum kemudian diberhentikan karena kegiatannya yang dianggap *politically inappropriate*. Dia menerjemahkan tetralogi karya *Pulau Buru* dari sastrawan Pramoedya Ananta Toer yang pada awal tahun 1980-an dianggap buku berbahaya oleh rezim Soeharto dan dilarang peredarannya.

Pemecatan sebagai diplomat tampaknya justru membuat Max bersemangat untuk secara total menyelesaikan penerjemahan karya *Pulau Buru*. Kembali ke Canberra dan mendapat dukungan berupa fasilitas kamar kerja yang sangat sempit dari Profesor Anthony Johns

yang saat itu menjadi Dekan Faculty of Asian Studies, Australian National University (ANU). Kondisi tersebut menjadi pendorong Max Lane untuk segera menyelesaikan proyek penerjemahannya. Sebuah pekerjaan yang tidak saja membutuhkan kemampuan intelektual yang tinggi, namun juga kepekaan naluri dan empati yang dalam terhadap sebuah cerita rekaan yang sulit dipisahkan dengan realitas sejarah awal *kebangkitan kesadaran* sebuah bangsa yang dijajah.

ANU, sebuah universitas yang ternama, dibangun di ibu kota Australia, Canberra, memang dimaksudkan sebagai pusat akademik yang tidak saja diharapkan menjadi pelopor pengembangan berbagai disiplin keilmuan. Kampus ini juga diharapkan dapat menjadi pusat penelitian dan pemikiran yang hasilnya bisa dipergunakan oleh para pembuat keputusan dalam pemerintahan Australia.

Kedekatan antara pembuat keputusan dan para akademisi di ANU bukanlah sebuah rahasia. Dalam konteks hubungan antara pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia di bawah Orde Baru, yang oleh Herbeth Feith disebut *repressive developmentalist regime* menjadikan para akademisi di ANU cenderung konservatif dan pragmatis.

Dibandingkan universitas lain, ANU memiliki jumlah Indonesianis yang banyak. Diskusi dan seminar tentang Indonesia secara rutin diadakan, kalau tidak di departemen atau jurusan; oleh Indonesia Study Group yang hampir setiap diskusi selalu ramai peserta dan perdebatan.

Presentasi tentang perkembangan politik, ekonomi, maupun sosial yang mutakhir di Indonesia menjadi ajang tukar pikiran yang selalu menarik dalam seminar-seminar di ANU. Sejak tahun 1983 ANU juga menyelenggarakan konferensi Indonesia Update yang didanai departemen luar negeri Australia. Dalam setiap diskusi, sulit untuk dihilangkan kesan optimisme dari sebagian besar para akademisi ANU tentang perkembangan pembangunan di Indonesia, terutama dari para ahli, mahasiswa ekonomi yang merupakan murid-murid dari profesor Heinz Arndt, dan murid-murid Profesor Jamie Mackie.

Kehadiran Max Lane dalam seminar tentang Indonesia menjadi pemandangan yang selalu menarik. Hampir dalam setiap diskusi

tentang Indonesia, Max Lane selalu mempunyai posisi dan suara yang berseberangan dengan rekan-rekannya. Pada umumnya, dia selalu berpandangan optimis dengan apa yang terjadi di Indonesia, khususnya masa Orde Baru itu. Akan tetapi, saya kira pada akhirnya harus diakui bahwa posisi dan sikap Max Lane yang selalu terkesan *ngeyel* dalam mempertahankan pendapatnya dapat terbukti benar. Orde Baru dan Soeharto terbukti tumbang.

Berakhirnya rezim Soeharto dan euforia reformasi, bagi Max Lane jelas bukan tujuan akhir dari sikap kritis terhadap rezim-rezim pemerintahan sejak pergantian posisi Habibie hingga Jokowi sekarang. Sikap dan posisi politik Max Lane seperti tidak bergeser sejangkal pun. Kalau *toh* ada semacam jeda setelah hampir tiga dekade ikut dalam gerakan-gerakan progresif yang melawan Orde Baru, mungkin hal itu yang memberi dia kesempatan untuk menyelesaikan tesis doktornya, sebuah proyek pribadi yang mungkin tidak dianggap sebagai sesuatu yang penting-penting amat.

Sumbangan penulis buku *Unfinished Nation: Ingatan Revolusi, Aksi Massa dan Sejarah Indonesia* (2014) yang diterbitkan oleh Penerbit Djaman Baroe ini bagi gerakan progresif di Indonesia cukup banyak. Selain berupa karya tulis, Max menginisiasi jurnal *Inside Indonesia* untuk melibatkan diri dalam pengorganisasian kelompok-kelompok resistensi di berbagai tempat, baik Indonesia maupun Timor Leste. Dalam aktivitasnya, berurusan dengan aparat keamanan adalah hal yang sering dialami.

Sudah beberapa tahun ini Max Lane tinggal di Yogyakarta, membangun semacam padepokan untuk dia tinggal bersama istrinya Faiza. Mereka mengelola sebuah perpustakaan dan ruang diskusi yang sengaja dia sediakan untuk anak-anak muda yang mau belajar tentang apa saja, terutama ilmu sosial dan politik.

Max Lane, seperti halnya Pramoedya Ananta Toer ketika menciptakan sosok Minke dalam roman Bumi Manusia, sangat menyadari pendidikan politik bagi anak muda mutlak harus dilakukan. Hanya anak muda yang memiliki masa depan. Ingatan mereka tentang masa lalu banyak disesatkan sehingga harus dibongkar untuk membangun masa depan yang lebih adil dan bermartabat.



Mayling Oey

Pidato pengukuhan sebagai profesor di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) melukiskan kritik sekaligus keprihatinan Mayling sebagai perempuan yang bekerja dalam lingkungan akademik yang



Sumber: Jurnas (2018)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

sampai hari ini masih didominasi laki-laki. Pidato yang diucapkan pada 20 Oktober 2001 itu berjudul *Mendobrak Langit-Langit Kaca: Lambat Memang, Tapi Tak Terelakkan* mengukuhkan dia sebagai profesor perempuan pertama di fakultas yang profesornya semuanya laki-laki. FEUI memiliki reputasi sebagai pemasok menteri di setiap rezim pemerintahan, terutama yang mengurus soal keuangan dan perencanaan pembangunan. *Legacy* Widjojo Nitisastro dan tim: Ali Wardhana, Mohamad Sadli, Emil Salim, dan Subroto menjadi sejarah tersendiri dalam rezim Soeharto –yang oleh Herbeth Feith disebut sebagai *repressive developmentalist regime*.

Mayling Oey, akrab dipanggil Bu Mayling di FEUI, mengajar metode penelitian, sebuah mata kuliah yang melatih dan mengajarkan mahasiswa untuk berpikir logis, analitis, dan kritis. Latar belakang pendidikan yang seabrek, antara lain di Harvard dan doktoral di Australian National University (ANU) menjadi modal untuk tidak hanya mengajar, tetapi melakukan penelitian tentang isu-isu kependudukan, pendidikan, dan sosial ekonomi. Selain mengajar, Bu Mayling juga bekerja sebagai konsultan berbagai proyek pembangunan, khususnya pendidikan, baik sebagai pribadi maupun melalui lembaga risetnya PT. Insan Hitawasana Sejahtera. Lembaga itu didirikan bersama suaminya Dr. Peter Gardiner, bekas koleganya sewaktu sama-sama menjadi mahasiswa pascasarjana di Department of Demography, ANU menjelang akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an di bawah bimbingan ahli demografi termashur, Prof. Jack Caldwell.

Dedikasi yang panjang sebagai intelektual publik dibuktikan dengan gelar yang diterima sebagai *Cendekiawan Berdedikasi* oleh Harian Kompas pada tahun 2016. Sejak tahun 1971, dia menjadi staf pengajar di FEUI selain sempat sebentar bekerja di Lembaga Ekonomi dan Masyarakat Nasional (Leknas)-LIPI. Meskipun secara resmi telah pensiun, sampai sekarang tetap aktif di berbagai lembaga, antara lain sebagai anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI).

Pada tahun 2010 atas permintaan AusAID, Bu Mayling melakukan kajian tentang keterkaitan antara riset dan kebijakan –sebuah isu yang sampai hari ini masih tetap relevan. Dalam laporan yang dia susun, berjudul *Study of the role of the Indonesian Institute of Scienc-*

es (LIPI) in *Bridging between Research and Development Policy*(2011) diambil sebagai studi kasus kedeputan Ilmu-Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK) LIPI, yang mana dulu, meskipun sebentar, Bu Mayling sempat menjadi bagiannya.

Membaca laporan yang singkat dan padat ini (62 halaman) sesungguhnya pembaca bisa belajar banyak tentang berbagai kendala yang dihadapi oleh penelitian ilmu-ilmu sosial di Indonesia; di samping tentu saja berbagai peluang dan jalan keluar untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Salah satu temuan yang menarik adalah apa yang disebut Bu Mayling sebagai *the culture of mediocrity* yang diidap oleh lembaga penelitian, seperti dia temukan dalam diagnosis yang dilakukannya di IPSK-LIPI. Tentu dengan adanya *the culture of mediocrity* ini tidak bisa disalahkan pada para peneliti saja karena perkembangan *kebudayaan pas-pasan* ini telah jauh akarnya. Profesor Koentjaraningrat, seperti dikutip dalam laporan ini misalnya, telah mengemukakan pada tahun 1974 bahwa para peneliti biasanya sudah merasa puas jika sudah berhasil membuat laporan penelitian tanpa perlu memikirkan apakah laporan itu sudah cukup bagus, berkualitas, dan siap untuk dipublikasikan dalam *peer review journal*.

Meskipun kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah meretas batas-batas kedaulatan negara-bangsa, ternyata nasionalisme tidak menjadi makin kendur bahkan justru di berbagai belahan dunia makin menguat. Fenomena Brexit di Inggris, terpilihnya pemimpin antiimigran di beberapa negara Eropa dan Donald Trump sebagai presiden AS adalah contoh penguatan nasionalisme sempit di zaman yang disebut sebagai *borderless* ini. Dalam konteks ini, Mayling Oey menjadi sosok yang menarik.

Terlahir sebagai perempuan, berkeluarga Tionghoa, bersuami seorang warga negara AS, juga putra semata wayangnya Coenrad yang suatu saat dengan bangga dia ceritakan sedang mengikuti wajib militer di Timur Tengah; memperlihatkan betapa kompleks identitas yang melekat pada diri Bu Mayling. Akan tetapi, identitas sesungguhnya adalah sesuatu yang bersifat fiktif, yaitu sesuatu yang diimajinasikan belaka. Sayangnya, banyak dari yang tidak cukup cerdas menilai bahwa identitas sebetulnya hanya fiksi, bukan realitas yang sebenarnya. Kare-

na kekurangcerdasan dalam perkara ini, banyak orang terus terperangkap pada apa yang disebut sebagai politik identitas, menjadi korban para *ethnic entrepreneur* yang terus menggaungkan identitas yang sesungguhnya *palsu*. Para politisi semacam ini memang tidak mungkin menang dalam kompetisi jika menggunakan fakta-fakta yang sesungguhnya.

Mayling dengan Peter Gardiner dengan mudah bisa bekerja dan bisa hidup nyaman di Australia, Amerika, atau di negeri manapun yang mereka suka. Kredensial akademik dan kapabilitas profesional memungkinkan Mayling menjadi ekspatriat dan menjadi bagian dari apa yang populer disebut sekarang sebagai diaspora. Nyatanya, Mayling tetap memilih bekerja di Indonesia sebagai dosen universitas negeri. Mayling juga terlibat aktif sebagai intelektual publik bersama tokoh-tokoh aktivis lain untuk mengadvokasikan tidak saja tentang isu-isu perempuan, tetapi juga isu-isu ketidakadilan lain. Bersama profesor Saparinah Sadli, Samsiah Ahmad, dan para aktivis seperti Kamala Chandrakirana; Prof. Mayling ikut membidani kelahiran Komnas Perempuan sebagai platform advokasi kesetaraan gender.

Mayling Oey membuktikan bahwa nasionalisme, *social engagement* sebagai intelektual publik kepada bangsanya, tidak perlu dipertentangkan dengan internasionalisme –sebuah prinsip yang diusulkan oleh Bung Karno dalam pidatonya di depan Sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, yang kemudian terkenal sebagai lahirnya Pancasila. Setelah mengusulkan “kebangsaan” sebagai sila yang pertama, Bung Karno mengusulkan “internasionalisme dan peri kemanusiaan” sebagai sila yang kedua. Saat itu, jauh sebelum kata globalisasi dikenal, Bung Karno sudah menunjukkan pemikirannya yang visioner bahwa “nasionalisme” harus diimbangi oleh “internasionalisme” agar tidak berkembang menjadi *chauvinism* atau nasionalisme yang sempit.

Bu Mayling Oey, saya pikir orang sangat menyadari bahwa mencintai bangsanya tidak berarti harus membenci bangsa lain, juga akan pentingnya kerja sama yang bersifat global. Tantangan manusia akan makin bersifat global seperti *global warming* dan *climate change* yang justru akan menghambat penanganan jika yang berkembang adalah nasionalisme sempit –seperti jauh-jauh hari sudah digaungkan oleh

Bung Karno dalam prinsip dasar yang disebutnya sebagai “internasionalisme dan peri kemanusiaan” yang bagi Bung Karno juga berarti humanisme.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Buku ini tidak diperjualbelikan.



Melly G. Tan

“It all becomes politics!”, dengan nada tinggi, sedikit getir, dan ketus; ucapan Bu Melly terasa menyentak. Bu Melly, panggilan akrab Melly G. Tan, melontarkan kata-kata itu sebagai kalimat terakhir dari komentar panjang pada sebuah diskusi di suatu siang di Pusat Penelitian



Sumber: Aurelia V (2021)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI. Seminar internasional hari itu diisi oleh presentasi Dr. Koji Tsuda, ahli antropologi, peneliti, dan dosen dari Universitas Tokyo tentang masyarakat Tionghoa di Indonesia pasca-Soeharto tahun 2005. Koji Tsuda melakukan penelitian mendalam tentang masyarakat Tionghoa melalui sejarah kelenteng Konghucu di Rembang, yaitu sebuah kota di Pantura tidak jauh dari Lasem. Selain menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa, kota-kota di Pantura juga merupakan kota-kota yang menjadi pusat perdagangan dan pemukiman orang Tionghoa.

Bu Melly, adalah seorang ahli sosiologi, mungkin bisa dibilang sebagai orang Indonesia pertama yang mendalami tentang seluk beluk masyarakat Tionghoa. Karier akademis dimulai sebagai sarjana UI, kemudian melanjutkan ke Cornell University dan mendapatkan gelar master dengan tesis tentang *The Chinese of Sukabumi: A Study in Social and Cultural Accommodation*. Gelar doktor di peroleh dari Universitas California Berkeley dengan tesis berjudul *Social Mobility and Assimilation: The Chinese in the United States*. Sepulang dari studi pada 1968, Melly G. Tan bergabung kembali dengan peneliti-peneliti lain segenerasinya di Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional (Leknas) LIPI yang dia masuki sejak 1963. Sejak 1966 hingga direorganisasi tahun 1986, selama 20 tahun mungkin Leknas-LIPI masih menjadi pusat kegiatan ilmu-ilmu sosial yang penting, bahkan terpenting di Indonesia. Bu Melly bisa dikatakan salah satu tokoh ilmuwan sosial penting, terutama tentang Tionghoa dan kemudian tentang isu perempuan.

Saat itu, saya sebagai juniornya di Leknas-LIPI menjelang Leknas di reorganisasi dan dilebur dengan Lembaga Riset Kebudayaan Nasional (LRKN), yang saat itu diketuai oleh Lie Tek Tjeng, seorang yang ahli tentang Tiongkok, dan kemudian Alfian, ahli ilmu politik. Seminar internasional yang hampir diadakan minimal seminggu sekali merupakan kesempatan yang paling baik untuk belajar bagi junior pada seniornya. Dalam seminar yang pesertanya tidak terlalu besar itu bertukar pikiran dan beradu argumentasi bisa sengit dan intensif. Konon, sepulang dari Harvard, Arief Budiman mau bergabung di Leknas, meskipun kemudian memilih bekerja di UKSW. Saya teringat di awal

tahun 1980-an itu, Arief Budiman hadir di seminar internasional yang diisi presentasi Harry T. Oshima dan saya saksikan bagaimana Arief berdebat keras dengan Oshima tentang isu pembangunan ekonomi.

Melly G. Tan, seperti Arief Budiman, Thee Kian Wie, dan Ong-hokham adalah ilmuwan sosial top saat itu yang berlatar belakang etnis Tionghoa. Namun, tidak sedikitpun dari mereka ada semacam *inferiority complex* karena mereka Tionghoa. Juga tidak ada sedikit pun kegenitan karena mereka Tionghoa, tidak ada, bahkan mungkin bagi mereka sebuah sikap yang tidak punya harga diri *to play as victim*. Melihat mereka, bagi saya seperti melihat Indonesia masa depan. Sebuah Indonesia dengan warga negara yang penuh martabat, integritas, tidak mau mengemis untuk diperlakukan khusus karena punya identitas khusus. Bukan Indonesia yang minta dibelaskasihani, Indonesia yang mengemis dan mengiba-iba. Mungkin latar belakang keluarga yang sudah kosmopolitan sejak zaman kolonial membuat mereka tidak punya kompleks rendah diri itu.

Bu Melly, Pak Thee, Pak Adri Lopian, Edi Masinambow, dan Hilman Adil, para senior saya di LIPI itu kadang-kadang seperti punya ceruk (*niece*) dan tidak jarang terlihat ngobrol atau bercanda dalam bahasa Belanda yang para juniornya tidak tahu apa yang diobrol dan disendaguraukan. Generasi tua ilmuwan sosial itu, di mata saya saat itu, memang seperti punya kelas sendiri, yaitu kelas generasi yang menjalani profesi sebagai peneliti ilmu sosial tidak untuk mencari makan, mencari kedudukan, tidak pernah terlihat sibuk, bahkan kerja lembur untuk menulis proposal guna mendapatkan proyek penelitian pesanan karena dari situ mereka akan dapat uang. Jika terlihat sampai malam, seperti saya sering lihat dari Pak Thee Kian Wie, saat menjelang malam saya mengunjungi kamarnya dan dia masih serius bekerja, tampaknya untuk menulis makalah atau artikel, biasanya dalam bahasa Inggris.

Dalam setiap diskusi, Bu Melly selalu serius dan tidak bisa bercanda. Kritiknya selalu tajam *to the point*, tidak melingkar-lingkar, dan tidak ada basa-basi untuk keder peneliti junior yang presentasi. Tidak jarang dalam seminar internasional Bu Melly memamerkan buku baru yang dimilikinya. Hal ini yang membuat saya agak *disrespect* kepadanya karena dia tidak akan membolehkan kami meminjamnya untuk difo-

tokopi. “Nanti rusak”, katanya. Bukunya banyak; saat dia pensiun dan saya menempati bekas kamarnya di lantai 9, gedung bundar LIPI di Jalan Gatot Subroto 10, sebagian buku-buku yang belum sempat dibawa pulang masih teronggok dalam beberapa kardus. Buku-bukunya sekarang tidak mungkin lagi dibacanya. Tanpa difotokopi pun, akhirnya buku-buku itu akan rusak dan nyaris tak terbaca. *Oh... Bu Melly.*

Ketika Soeharto lengser dan digantikan oleh B.J. Habibie, Bu Melly salah seorang yang aktif menyuarakan kepedulian terhadap nasib perempuan. Hari-hari menjelang Soeharto lengser, ibu kota dipenuhi suasana yang menegangkan. Mahasiswa gencar berdemo untuk menuntut Soeharto turun dan situasi keamanan kota Yogyakarta menjadi tak terkendali. Selain beberapa kali terjadi penembakan terhadap mahasiswa, berbagai tindak kekerasan terhadap warga sipil dari kelompok-kelompok yang tidak dikenal terjadi di berbagai tempat. Penculikan terhadap para aktivis yang vokal juga terjadi di beberapa tempat. Peristiwa yang sangat mengesankan adalah terjadi tindak kekerasan seksual terhadap perempuan-perempuan Tionghoa di berbagai pemukiman mereka. Ketika sebuah tim investigasi independen menemukan fakta-fakta itu, Melly G. Tan bersama sejumlah aktivis perempuan yang dipimpin oleh Saparinah Sadli mendatangi B.J. Habibie di istana. Mereka meminta pertanggungjawaban negara terhadap kekerasan seksual dan ketidakadilan yang terjadi. Salah satu hasil dari pertemuan Bu Melly dan tokoh-tokoh perempuan itu adalah pembentukan Komisi Nasional Perempuan yang memiliki kewenangan melindungi hak-hak kaum perempuan.

Dalam seminar Koji Tsuda tentang masyarakat Tionghoa dan nasib agama Konghucu, saya kira kesimpulan Bu Melly benar, *semua akhirnya menjadi politik*. Keputusan presiden Gus Dur itu menambah jumlah agama resmi yang diakui pemerintah menjadi enam; Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kita juga tahu belum lama ini pemerintah memutuskan para penghayat kepercayaan boleh mencantumkan “kepercayaan” dalam kolom agama di KTP-nya. Setelah diskusi yang hangat tentang Tionghoa dan Konghucu itu, saya belum ketemu lagi dengan Bu Melly. Kata teman-teman yang selalu mene-ngok beliau, biasanya di hari ulang tahunnya, keadaan fisiknya makin

lemah, tetapi semangatnya masih menyala seperti dulu. Bu Melly lahir 11 Juni 1930, berarti tahun ini akan berusia 92 tahun!

Buku ini tidak diperjualbelikan.

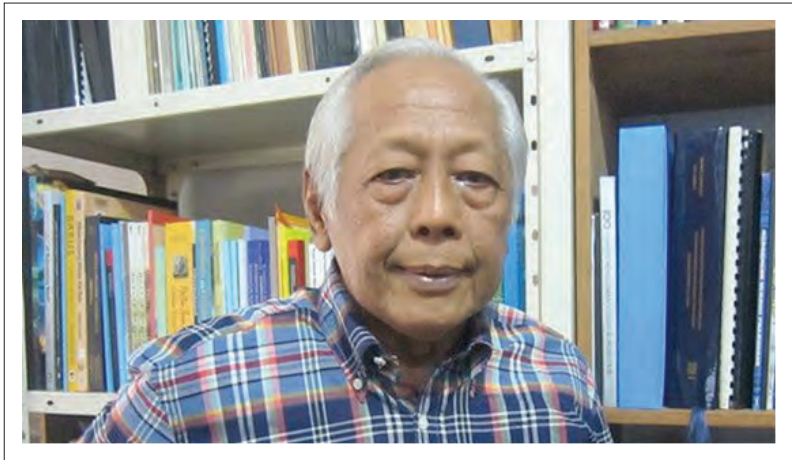


Buku ini tidak diperjualbelikan.



Mundardjito

Arkeolog senior ini tidak bisa diam, terus bergerak dan berpikir meski suatu saat tubuhnya harus terbaring karena tulang ekornya sempat bermasalah. Terlibat dalam berbagai kegiatan, namun tetap berfokus pada bidang arkeologi, mungkin hal ini yang membuatnya tampil de-



Sumber: BBC News (2012)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

ngan berwibawa dan penuh integritas. *Down to earth* untuknya bukan lagi metafor, tetapi realitas yang dijalaninya sebagai arkeolog tulen. Profesor emeritus ini suatu hari bilang “banyak orang tidak menyadari kalau sepatu pengunjung yang setiap hari memadati Borobudur akan pelan-pelan mengikis permukaan batu, saya pernah sarankan supaya disediakan karet pelapis sepatu agar Borobudur bisa tahan lebih lama”.

Mundardjito, arkeolog kelahiran Bogor, 8 Oktober 1936 ini di mata saya adalah “*a no nonsense character*”. Ucapannya tadi mencerminkan pandangannya yang sangat rasional, melihat Borobudur betul-betul sebagai “*an archeological artifact, no more no less*”. Di saat lain dia bercerita, “Kalau saya sebenarnya orang Jawa, ada rumah keluarga sampai sekarang di Solo, tapi saya dibesarkan di Bogor dan Jakarta”. Mungkin itu juga, dalam hati saya membatin, yang membuatnya “*untypically Javanese*”.

Pada umumnya, ketika orang Jawa melihat Candi, pastilah yang terbayang adalah sisi kerohanian candi itu. Akan tetapi, Pak Mundardjito akan melihat sisi fisik dan sosialnya, dia akan membayangkan mengapa dan bagaimana candi itu didirikan di tempat itu, dengan penjelasan lain, dimensi sosio-ekologi. Mengaku mempelajari teori di Yunani dan sempat belajar di Amerika; Mundardjito, meskipun agak lambat, berhasil mempertahankan disertasi doktor pada 1993 yang lulus *cumlaude* tentang *Pertimbangan dalam Penempatan Situs Masa Hindu-Budha di Daerah Yogyakarta: Kajian Arkeologi-Ruang Skala Makro*.

Saya mengenal Pak Otti, panggilan akrab Prof. Mundardjito, agak dekat dan belum lama ketika kami tertarik untuk mengamati masyarakat di sekitar tiga cagar budaya besar di Jawa: Borobudur, Trowulan, dan Banten Lama. Tidak sedikit para arkeolog yang kemudian menjadi teman, salah satunya Pak Otti, guru besar yang sudah tak terhitung muridnya dan segudang pengalamannya. Dari banyak hal yang menarik dari Pak Otti, ada hal dua bagi saya paling berkesan dan sangat penting. Pertama, telah saya singgung sedikit, adalah rasionalitasnya yang sangat kuat. Baginya, kebesaran Majapahit hanya akan berupa dongeng jika tidak berhasil ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan kebesaran itu. Bagi saya, pernyataan yang tampak sepele itu mengandung makna luar biasa. Kita tahu, sebagian besar dari masyarakat yakin

bahwa Majapahit yang besar itu benar-benar ada. Namun, sejauh mana keyakinan itu didasari oleh fakta bukan fiksi atau dalam bahasa Pak Otti *cuma dongeng*.

Sebagai arkeolog, Pak Otti berurusan dengan masa lampau dan peninggalan-peninggalan apa yang bisa menjadi bukti terhadap apa yang pernah terjadi pada masa lampau. Mungkin karena hal itulah beliau begitu total dalam melakukan ekskavasi di Trowulan dan berusaha menunjukkan bukti-bukti arkeologis bahwa Trowulan memang sebuah bekas ibu kota Majapahit. Artefak-arterfak yang sudah ditemukan cukup banyak, tetapi Pak Otti yakin masih banyak yang perlu digali. Ekskavasi merupakan satu-satunya cara untuk menemukan bukti, tentu agak bercanda ketika dia bilang modalnya cuma *cetok*.

Hal itu pula yang membuat Pak Otti marah besar ketika mengetahui Jero Wacik, menteri pariwisata saat itu, mendirikan sebuah bangunan raksasa di Trowulan dengan cara mengecor tiang pancang yang jelas merusak artefak-arterfak yang masih terkubur di dalam tanah. Saya rasa, kemarahan Pak Otti bukan karena romantisme terhadap Majapahit, tetapi karena tindakan Jero Wacik itu akan menghancurkan artefak-arterfak yang diperlukan jika kita ingin menunjukkan bahwa Majapahit *bukan cuma dongeng*.

Untuk menghentikan proyek perusakan artefak di Trowulan yang dilakukan oleh Jero Wacik, Pak Otti betul-betul bergerak sebagai seorang aktivis dan hal kedua ini yang menurut saya penting untuk diketahui dari Pak Otti. Salah satu strategi yang terbukti ampuh dari yang dia lakukan adalah mendorong rekan-rekan mudanya, sebagian mungkin dulu mahasiswanya yang bekerja sebagai wartawan. Ada dua wartawan Kompas yang eks Mapala UI, yaitu Rudi Badil dan Norman Edwin. Badil lulusan antropologi dan Norman lulusan arkeologi.

Strategi perlawanan Pak Otti mencegah kerusakan yang telah dibuat oleh Jero Wacik adalah dengan meminta Kompas menurunkan tulisan berseri tentang apa yang sedang terjadi di Trowulan (Suhartono, 2009). Melalui proses yang panjang, akhirnya Jero Wacik menyerah dan menghentikan proyek tersebut. Namun, *the damage has been done*. Dalam sebuah kesempatan Pak Otti menunjukkan bekas-bekas tiang

pancang itu dan kerusakan yang tidak mungkin diperbaiki dari bata-bata terakota Majapahit, termasuk sebuah sumur tua yang bagi Pak Otti sangat penting artinya guna membuktikan sistem drainase yang telah dibuat dengan teknik yang canggih pada zaman itu. Kolam Segaran yang indah di Trowulan tidak mungkin terlihat seperti sekarang tanpa jerih payah Pak Otti saat mengekskavasinya.

Ketika terjadi keramaian dan berkembang pendapat bahwa di Gunung Padang ditemukan sebuah situs purbakala yang lebih tua dari piramid di Mesir, Pak Otti tidak bisa diam. Bagi Pak Otti klaim itu sebuah pembohongan publik dan dia melihat ada kepentingan politik dibalik klaim itu. Bagi Pak Otti, klaim itu sebuah *ketidakmasukakalan* karena tidak ada bukti-bukti yang mendukung klaim tersebut. Seperti saat berhadapan dengan Jero Wacik, dalam kasus Gunung Padang, Pak Otti juga tahu kalau dia berhadapan dengan pihak yang dekat dengan kekuasaan.

Dalam kasus Gunung Padang, saya melihat sendiri bagaimana Pak Otti memobilisasi rekan-rekan wartawan muda untuk membangun opini publik untuk menolak apa yang menurut keahliannya sebagai arkeolog sebuah *ketidakmasukakalan*. Dari Dr. Daud Aris Tanurejo, arkeolog UGM dari generasi yang lebih muda dari Pak Mundardjito, saya belajar tentang apa yang disebut sebagai *arkeologi publik* dan *arkeolog publik* (*public archeologist*). Pak Otti adalah contoh yang baik dari seorang arkeolog publik.

Komentar tentang kebesaran Majapahit hanya *akan* merupakan dongeng belaka jika tidak ditemukan bukti-buktinya, menurut saya hal ini adalah sebuah peringatan yang sangat penting untuk bersama. Ada anggapan kuat bahwa kita adalah sebuah bangsa yang besar dengan sejarah kejayaan masa lampau yang gemilang. Secara geografis dan demografis, Indonesia adalah negara yang besar tentu tidak ada yang membantah. Tapi anggapan bahwa kita adalah bangsa yang besar karena kita bangsa maritim, memiliki Majapahit dan Sriwijaya, bahkan memiliki peninggalan yang lebih tua dari piramid di Mesir, sepertinya layak untuk direnungkan kembali.

Ketika medan akademik sebagai tempat insan akademis mengembangkan pemikiran kritis menjadi makin terancam oleh kooptasi negara, kepungan korporasi dan tekanan agama; orang seperti Pak Otti yang sangat rasional dengan karakter yang tidak menerima *ketidakmasukakalan* itu ibarat mercusuar yang dibutuhkan saat kapal oleng dihempas badai di lautan lepas. Prof. Mundardjito adalah seorang *scientist par excellence*. Arkeologi, baginya adalah disiplin ilmu dengan teori dan metodologi untuk menemukan fakta. Peninggalan masa lalu, betapapun keyakinan kita mengagungkannya, seperti halnya Muara Jambi, Sriwijaya, dan Majapahit; *hanya dongeng* kalau tidak bisa dibuktikan bahwa imperium dan peradaban besar itu memang pernah ada. Mungkin dongeng diperlukan *sebagai pelipur lara*. Akan tetapi, sebagai sebuah bangsa yang diperlukan adalah *bukan dongeng*. Jika tidak, kita akan menjadi bangsa yang *tidak mengenal dengan diri sendiri* dan tidak mau melihat kekurangan dengan berblindung pada dongeng-dongeng masa lampau yang penuh kegemilangan.

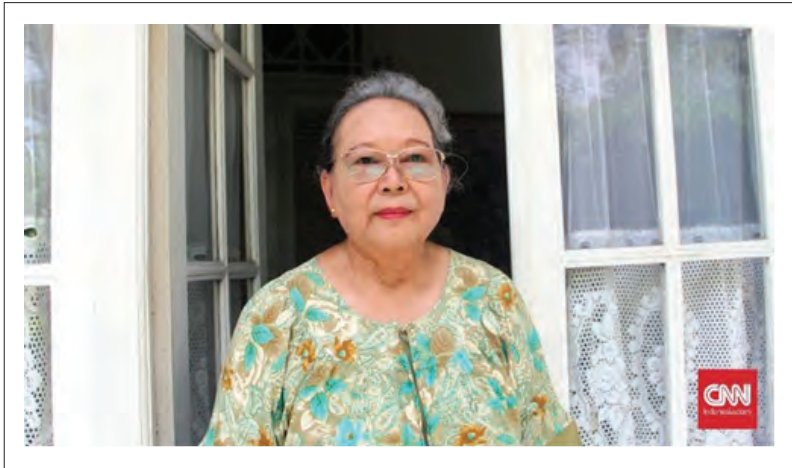


Buku ini tidak diperjualbelikan.



Nh. Dini

Nama lengkapnya sangat panjang, Nurhayati Srihardini Siti Nukatin, biasa dipanggil Nh. Dini. Lahir di Semarang, 29 Februari 1936 sebagai anak bungsu dari lima bersaudara. Setelah hidup melanglang buana, Prancis, Jepang, Amerika Serikat, untuk menyebut beberapa



Sumber: Gallkano (2018)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

negeri yang dia tinggali cukup lama. Menjelang akhir hidupnya, nasib ternyata membawa Nh. Dini kembali ke kota kelahiran dan meninggal tidak lama setelah mengalami kecelakaan ketika hendak pulang ke Ungaran dari Semarang, 4 Desember 2018, di usia 82 tahun. *A full circle of life*, sebuah lingkaran hidup seorang anak manusia yang penuh dan kaya, telah utuh menjadi miliknya. Kepenuhan dan kekayaan hidup Nh. Dini mungkin tidak pernah menjadi bagian rencana, akan tetapi kemudian dapat dinikmati oleh kita yang masih hidup, melalui buku-bukunya, baik dalam bentuk novel maupun kumpulan cerita pendek yang jumlahnya mencapai puluhan.

Saya pertama kali mengenalnya, mungkin sekitar akhir tahun 1970-an, dari novel *Pada Sebuah Kapal, Namaku Hiroko*, dan seterusnya. Sebagai orang yang membaca novel karena merasa nikmat saja, bagi saya novel dan cerita-cerita pendeknya membawa saya seperti bertamasya, tidak saja untuk menikmati suasana dari tempat-tempat yang menjadi latar ceritanya, namun juga suasana hati tokoh-tokohnya. Ya, Nh. Dini seorang pencerita yang pandai menciptakan suasana melalui imajinasi naratif yang dicipta dan dibentuk. Seringkali dalam uraiannya yang sangat rinci tentang sebuah tempat di mana si tokoh berada, tanpa sadar pembaca diajak masuk ke dalam suasana hati si tokoh, persoalan yang sedang dihadapi, ketegangan, dan konflik yang sedang berkecamuk di batinnya. Namun, tentu saja ada kegembiraan dan sukacita yang sedang merona di dalam kalbunya. Dalam novel *Pada Sebuah Kapal* (1985) yang mungkin merupakan novel terbaiknya, hubungan dua kekasih yang dipertemukan dalam sebuah perjalanan digambarkan dengan memikat, juga persenggamaan yang dilakukan di antara rasa cinta yang menggelegak, namun disertai gelisah dan mungkin rasa bersalah karena keduanya belum menikah, digambarkan oleh Nh. Dini dengan halus dan indah.

Oleh beberapa pengamat atau pengagumnya, Nh. Dini dianggap sebagai seorang feminis. Saya sendiri tidak melihat demikian. Nh. Dini dibesarkan dalam sebuah keluarga dan lingkungan Jawa di Semarang, kota pelabuhan yang sejak lama merupakan tempat bertemu dan bercampur berbagai kelompok masyarakat yang berlatar belakang etnis berbeda. Sebuah kota dengan masyarakat yang berkebudayaan hibrida.

Semarang adalah kota yang didesain untuk menjadi pusat pemukiman kelas menengah Belanda, pusat pengendalian pemerintahan dan perdagangan; dalam sejarahnya telah ikut membawa masyarakat *pribumi* tidak saja memasuki modernitas, namun juga melahirkan kelompok yang progresif pada zamannya. Melalui sejarah, Sarekat Islam, Mas Marco, dan pemogokan buruh berlangsung di Semarang. Lingkungan sosial kota Semarang yang *hybrid* telah membentuk Nh. Dini, saya kira, menjadi kosmopolitan di dalam dirinya dan dalam konteks itu sejak muda dia bersikap secara egaliter dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Melalui Wikipedia, saya memperoleh informasi bahwa Nh. Dini sejak tahun 1956 bekerja sebagai pramugari Garuda dan pada tahun 1960 dia menikah dengan seorang diplomat, Yves Coffin, konsulat Prancis di Kobe, Jepang. Sejak itu, dia ikut suami yang ditempatkan sebagai diplomat Prancis di Pnom Penh (Kamboja), Manila (Filipina), dan Detroit (USA). Pada tahun 1984, secara resmi dia bercerai, memutuskan kembali ke tanah air, dan menjadi warga negara Indonesia kembali.

Pada tahun 2003, Nh. Dini mendapatkan penghargaan SEA Award saat dia sudah tinggal di sebuah Panti Wredha di Sleman, Yogyakarta. Buku-bukunya, berupa novel dan kumpulan cerita pendek, dimulai dari *Dua Dunia* (1956), *Hati Yang Damai* (1961), *Pada Sebuah Kapal* (1973), *La Barka* (1975), *Namaku Hiroko* (1977), dan yang terakhir *Gunung Ungaran: Lerep di Lerengnya, Banyumanik di Kakinya* (2018). Buku terakhir itu berkisah tentang kediamannya di Wisma Lansia Langen Wredasih di lereng gunung Ungaran yang sejuk itu rupanya menjadi penggalan akhir dari garis hidupnya (Dini, 2018).

Membaca buku-buku Nh. Dini, bagi saya adalah membaca seorang perempuan Indonesia yang menjadikan menulis sebagai kerja panggilan yang dijalani sepanjang hayatnya. Buku-bukunya, meskipun kadangkala menokohkan orang di luar dirinya, namun sebagai sang pencerita, Nh. Dini sesungguhnya selalu hadir di sana. Dalam novel *La Barka* (1975) misalnya, melalui tokoh-tokoh Monique, Francine, dan lain-lain yang bertemu di villa bernama La Barka di pinggir pantai Prancis Selatan, dia kisahkan perjalanan lika-liku mereka dengan sa-

ngat rinci, akan tetapi sebagai sang pengkisah, *si aku*, Nh. Dini sendiri pada saat yang berbarengan juga mengisahkan hidupnya sendiri, terutama hubungan dia dengan suaminya yang tampaknya mulai dingin. Sejauh yang bisa saya tangkap, meskipun selalu ada ketegangan, Nh. Dini tidak menggunakan novel atau cerita-cerita pendeknya sebagai alat pemberontakan atau sekadar menggugat ketidakadilan. Mungkin itu juga yang membuat pembaca menyukainya karena tidak ada pesan moral yang terlalu berat menjadi beban.

Dugaan saya, Nh. Dini selalu mendasarkan tulisan-tulisannya dari hal-hal yang dialami atau dirasakan. Hal itu terjawab ketika membaca kata pengantar dari kumpulan cerpen pertamanya, *Dua Dunia* (1956) yang dia tulis saat masih SMA, diterbitkan ulang setelah kesekian kalinya dan di tahun 2002 Nh. Dini menulis: “Tulisan-tulisan saya lebih banyak mengandung kenyataan hidup daripada hanya khayalan”. Hal yang Nh. Dini tidak kemukakan adalah kenyataan hidup yang menjadi dasar ceritanya telah mampu diolah dengan daya imajinasi seorang pengarang yang luar biasa dengan jam terbang tinggi.

Membaca kisah-kisahnyanya kita dibawa ke dalam suasana dan situasi hubungan-hubungan antarmanusia yang sesungguhnya tidak pernah sederhana, meskipun sepiantas hubungan-hubungan itu tampak sepele. Daya olah yang tidak mungkin dimiliki tanpa proses pengalaman menulis yang panjang, hampir tanpa jeda, sepanjang masa hidupnya itu, menjadikan tulisan-tulisan Nh. Dini menjadi bacaan yang renyah, mencerahkan, dan menenangkan. Tema-tema cerita yang dipilih bukanlah tema-tema besar dan jauh dari pretensi ingin membawa pembaca memasuki persoalan-persoalan besar dari sejarah negerinya. Pengalaman hidup dalam dua dunia, menyelam dalam berbagai kebudayaan dan meresap menjadi miliknya sendiri: membiasakan diri melihat perbedaan sebagai sesuatu yang lumrah. Hidup bagi Nh. Dini, seperti orang Jawa bilang, *urip mung mampir ngombe* (hidup hanya mampir untuk minum).

Novel atau cerita pendek memang sebuah cerita rekaan, fiksi bukan fakta, namun di tangan Nh. Dini, cerita rekaan itu terasa dekat dengan kita sebagai pembaca yang menikmatinya. Kita seolah-olah melihat dan menemukan diri kita dalam tokoh-tokoh yang diceritakan oleh

Nh. Dini. Ketika beranjak tua, Nh. Dini semakin banyak menulis apa yang dia sebut sebagai cerita kenangan, tentang masa kecil di Sekayu, juga tentang hari-hari tuanya setelah sekian tahun tinggal dan kembali ke tanah air, ke kampung halamannya. Berturut-turut kisah mengalir dari tempat kediamannya di Jalan Lembang di Jakarta, di rumah yang dibeli dan kemudian dijual di Jalan Beringin di Semarang, di Panti Wredha di Yogyakarta, dan terakhir di Rumah Lansia Langen Werdasih di Ungaran. *Lerep*, sebuah kata dalam bahasa Jawa yang berarti mengendap, tenang, diam, sepi; adalah nama sebuah desa di lereng gunung Ungaran yang menjadi tempat tinggalnya yang terakhir. *Lerep*, seperti telah disiapkan untuk dirinya, sebagai pemberhentian terakhir dari bepergian yang jauh dan berpindah-pindah singgah –dari kerja kepengarangan, dari menulis yang hampir tanpa jeda.



Buku ini tidak diperjualbelikan.



Nono Anwar Makarim

Nono, begitu teman-teman dekatnya memanggil, mungkin sudah menulis esai sejak menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) atau bahkan sebelumnya, yaitu ketika masih menja-



Sumber: Kristiono (2020)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

di pelajar di Pekalongan. Kehidupan mahasiswa di Jakarta tahun 1960-an pastilah sangat seru. Berada di bawah bayang-bayang Perang Dingin, polarisasi politik antara kaum kiri dan kanan, antara yang pro-Soekarno dan anti-Soekarno, dan tentu saja kaum oportunistis yang bisa ke kiri atau ke kanan, semua campur aduk ada di sana. Nono, tidak saja berada di tengah lingkungan kampus yang penuh *passion* itu, tetapi juga di tengah keluarga intinya yang merupakan elite Partai Sosialis Indonesia (PSI). PSI, partai politik yang didirikan Sutan Sjahrir memiliki lapisan atas yang dikenal sebagai tokoh-tokoh intelektual terkemuka, yaitu Soedjatmoko, Soemitro Djodhadikusumo, kakak beradik Soedarpo dan Soebadio Sastrosatomo, Sarbini Soemawinata, dan Hamid Algadri (mertua Nono). Meskipun sebagai partai, menurut almarhum Prof. Slamet Iman Santoso, Dekan pertama Fakultas Psikologi UI, “anggotanya cuma *segenggem* (sekepalan tangan), tetapi keintelektualan kelompok kecil ini memberi warna tersendiri pada jagat politik Indonesia”.

Begitu Soekarno jatuh dan Soeharto mengambil alih kekuasaan, Nono dan beberapa tokoh mahasiswa lain, seperti Marie Muhamad, Sugeng Sarjadi, dan Rahman Tolleng termasuk yang diangkat menjadi anggota DPR-GR untuk mewakili golongan mahasiswa yang memiliki kontribusi dalam menumbangkan Soekarno dan Orde Lama. Sebelum naik Semeru akhir 1969 dan menemui ajal di atas gunung itu, Soe Hok Gie dan beberapa temannya di Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) UI sempat mengirim paket berisi pakaian dalam dan alat kecantikan wanita untuk rekan-rekannya yang menjadi anggota DPR-GR. Akan tetapi, mungkin karena pada dasarnya Nono adalah seorang intelektual, dia memutuskan berhenti sebagai anggota DPR-GR. Memimpin *Harian Kami* di Jakarta dan pada saat yang hampir bersamaan, Rahman Tolleng memimpin koran *Mahasiswa Indonesia* di Bandung; dua surat kabar mahasiswa yang bersuara kritis terhadap Orde Baru.

Tolleng dan Nono adalah dua intelektual penting pasca-1965, di samping Marsillam Simanjuntak, Sjahrir, dan Soe Hoek Gie; yang sempat sebentar berbulan madu dengan Soeharto dan Orde Baru, tetapi kemudian kecewa dan memilih berada di luar kekuasaan. Ketika Ali Sadikin menjadi Gubernur DKI dan melakukan berbagai pembaruan awal tahun 1970-an, termasuk bidang kebudayaan dengan mendirikan

Pusat Kesenian Jakarta (PKJ) - Taman Ismail Marzuki (TIM), salah satu yang mendapat perhatian adalah usaha percetakan (PT. Pustaka Jaya) dan penerbitan majalah kebudayaan (*Budaya Jaya*). Sebagai pemimpin redaksi majalah *Budaya Jaya*, Nono selalu menulis dalam rubrik Kaleidoskop yang merupakan refleksi dan analisisnya yang tajam dan kritis tentang berbagai isu sosial politik yang saat itu sedang atau bakal hangat.

Bulan madu para intelektual kritis dengan Orde Baru memburu dan meruncing pada Januari 1974 dengan demonstrasi besar oleh mahasiswa untuk menuntut perubahan arah pembangunan yang dinilai hanya menguntungkan modal asing. Peristiwa yang kemudian terkenal sebagai Lima Belas Januari (Malari) itu didalangi oleh orang-orang yang dekat dengan PSI dan sejumlah tokoh buntutnya ditangkap, bahkan beberapa diadili. Mereka adalah Aini Chalid (Yogyakarta), Sjahrir dan Ketua Dewan Mahasiswa UI, Hariman Siregar yang saat itu menantu Prof. Sarbini. Mereka yang ditangkap antara lain Prof. Sarbini, Subadio Sastrosatomo, Soedjatmoko, Dorodjatun Kuntjorojakti, dan Juwono Sudarsono. Mungkin, jika Nono dan Arief Budiman masih di Jakarta, mereka termasuk yang ditangkap, tetapi Nono dan Arief saat itu sudah nongkrong di Harvard, Amerika Serikat. Harvard adalah sebuah universitas idaman dan Nono masuk di Fakultas Hukum mungkin sebagai fakultas yang paling prestisius, sementara Arief Budiman di Fakultas Sosiologi. Nono meraih gelar doktor tahun 1978 dengan disertasi tentang *Companies and Business in Indonesia*.

Setiba di Indonesia sempat bergabung dengan Adnan Buyung Natution, kemudian mendirikan firma hukum (*law firm*) atas namanya sendiri dan menjadi firma hukum papan atas. Nono dengan kesuksesannya, mendirikan beberapa yayasan filantropis dan tetap menulis esai yg tajam dan kritis. Barangkali ini sebuah ironi, ketika Peristiwa Malari tahun 1974, intelektual dan mahasiswa menuntut keluarnya modal asing. Sementara itu, awal tahun 1980-an berbagai firma hukum didirikan untuk melayani kepentingan inverstor-investor asing yang ingin beroperasi di Indonesia di mana persoalan hukum adalah kendala tersendiri yang memerlukan peran para pengacara yang tahu bagaimana menembus hutan belantara peraturan dan perizinan untuk

memuluskan investasi asing sehingga menjadikan negeri ini pantas diberi label *Indonesia Incorporated*.

Buku berjudul *Indonesia: The rise of capital* (Robison, 1986), meskipun terdengar sarkastis, satu-satunya yang masih revolusioner adalah kapitalisme. Pasca golongan kiri dihabisi di Indonesia tahun 1965, hanya menyisakan golongan kanan. *Sekritis* apa pun para intelektual, seperti Nono Anwar Makarim dan Rahman Tolleng, mereka *enggak* mungkin jadi kiri. Mungkin hal ini kutukan dari ribuan korban pembunuhan dari orang-orang yang dianggap kiri –yang tidak pernah dibuktikan kesalahannya. Indonesia pasca 1965 menjadi kapitalistik, kapitalisme malu-malu kucing, kata Arief Budiman, awal 1990-an.

Berbeda dengan kapitalisme di negeri induknya, yang tetap menghasilkan kesejahteraan, kapitalisme di sini menjadi kanibalistik; menghasilkan segelintir orang kaya dan meremukkan hidup mayoritas warga negara. Ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosial merupakan buah dari akumulasi kebijakan Orde Baru yang menjadikan kedaulatan ekonomi jargon kosong. Sejak Peristiwa Malari 1974, tidak ada lagi kritik yang mendasar terhadap Orde Baru. Kejatuhan Soeharto pada Mei 1998 tidak melahirkan keberanian dari para presiden yang menggantikan untuk mengubah struktur ekonomi yang timpang dan makin tergantung pada korporasi multinasional itu.

Pada usia ke-80-an itu, Nono Anwar Makarim pastilah masih sangat menaruh *perhatian* pada persoalan ketidakadilan sosial dan ketimpangan ekonomi Indonesia. Namun, waktu sudah lewat, tentu dia merasa telah berbuat sesuatu bagi negerinya. Kita juga tidak tahu apakah dia menyesali pilihan masa lalunya atau tidak. *Mungkin* dia akan berkata, “seandainya aku muda lagi, aku akan memilih melakukan ini, karena tanpa ini, kesenjangan tak akan terjembatani dan ini sangat berbahaya untuk kelangsungan hidup bangsa,” *mungkin*.



Nurcholish Madjid

Suatu kali, Goenawan Mohamad mengatakan bahwa intelektual Indonesia pasca tahun 1970-an paling banyak berasal dari kalangan Islam. Sampai hari ini, di antara intelektual Islam yang banyak itu tampak-



Sumber: Triraharjo (2019)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

nya Nurcholish Madjid yang paling dalam sekaligus luas wawasan pemikirannya. Tumbuh pada awal 1970-an pasca tragedi politik 1965, sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Nurcholish Madjid dalam waktu singkat langsung dikenal sebagai tokoh muda yang menonjol dan cemerlang pemikirannya. Lulusan pondok pesantren modern Gontor di Ponorogo dan alumni IAIN Syarif Hidayatullah di Ciputat memberi legitimasi tersendiri bagi Ketua HMI ini untuk mulai mengembangkan sayapnya di ruang publik baru yang bersamaan dengan rezim Soeharto yang sedang menata struktur politiknya.

Sumbangan pemikiran Nurcholish muda dalam pembaruan pemikiran Islam sudah terlihat dari ketajaman dalam mengemukakan ide-ide segar yang memang dibutuhkan oleh sebuah masa ketika kevakuman politik sangat dirasakan. Awal tahun 1970-an merupakan sebuah zaman ketika guncangan politik 1965 masih kuat. Sebagai imbasnya, masyarakat belum sadar penuh dengan apa yang sebenarnya terjadi. Posisinya sebagai Ketua HMI, sebuah organisasi kemahasiswaan ekstra kampus yang dekat dengan pusat kekuasaan yang didominasi oleh militer dan teknokrasi memberikan kesempatan bagi Nurcholish Madjid muda untuk memainkan peran politik sekaligus menawarkan konsep-konsepnya yang tidak jarang dianggap kontroversial di tengah kemapanan pemikiran tokoh-tokoh Islam yang menjadi seniornya.

Pada tahun 1971, sebagai Ketua HMI Nurcholish memberi pidato di Taman Ismail Marzuki (TIM) pada sebuah ruang publik baru di ibu kota yang dibangun oleh Ali Sadikin, seorang gubernur yang sangat progresif. Saat itu, TIM dimaksudkan sebagai tempat untuk menampilkan karya anak bangsa dalam berbagai aspek kebudayaan; tidak hanya karya seni, tetapi juga pemikiran dan gagasan di berbagai segi kehidupan yang saat itu sedang memasuki babak yang baru. Ketika dirasakan ada kevakuman ideologis dalam memasuki babak yang baru, Nurcholish Madjid muda, seperti terlahir dan terpanggil untuk mengisi kevakuman itu.

Pidatonya di TIM yang berjudul *Keharusan pembaharuan pemikiran Islam di tengah masalah integrasi umat* menyentak perhatian publik. Nada polemis dalam pidato yang bisa dianggap sebagai tonggak baru pemikiran Islam Indonesia modern selain tulisan-tulisannya

yang tersebar luas; segera mengundang respons dan reaksi dari berbagai kalangan, terutama dari komunitas Islam sendiri. Tokoh Islam seperti Natsir, Hamka, dan Rasjidi; yang merupakan panutan Islam tingkat nasional, terpancing untuk memberikan komentar terhadap lontaran gagasan-gagasan keislaman yang diartikulasikan dengan jernih oleh Nurcholish Madjid yang saat itu masih berusia 30-an.

Beberapa jargon seperti “Islam *Yes*, Politik *No*”, “Sekularisasi bukan sekularisme”, adalah frasa-frasa yang merupakan beberapa nada polemis dan gaya retorik dari Nurcholish Madjid yang tak pelak lagi mengguncang jagat pemikiran Islam dan politik di Indonesia. Islam yang memiliki tradisi pemikiran yang panjang oleh Nurcholish Madjid ditafsir ulang secara rasional dan ditempatkan dalam perspektif kebangsaan dan keindonesiaan yang baru.

Nurcholish Madjid, pemikir Islam modern yang berbeda dengan banyak koleganya yang memilih menjadi politisi ketika politik berada dalam fase kemandulan di bawah rezim militer-teknokrat Orde Baru Soeharto. Menjadi PNS sebagai staf peneliti Leknas-LIPI dan melanjutkan studinya di Universitas Chicago hampir berbarengan dengan Syafii Maarif. Memilih topik pemikiran Ibnu Taimiyah, filsuf Islam yang dianggap kontroversial sebagai tesis doktor di bawah bimbingan Prof. Fazlur Rahman, memperlihatkan kehausannya untuk terus menggali kekayaan khazanah pemikiran Islam klasik. Mendirikan Yayasan Paramadina bersama sahabat-sahabat, sudah tak terhitung lagi buku yang ditulis, di samping kader-kader muda yang menjadi penerus, seperti Budi Munawar Rahman dan Komaruddin Hidayat.

Akhir-akhir ini ketika Islam konservatif makin memenuhi ruang-ruang publik dan bahkan bilik-bilik istana, sosok Nurcholish Madjid yang membawa keteduhan tidak hanya bersifat superfisial terasa benar sebagai sebuah kehilangan besar. Indonesia modern bagi Nurcholish Madjid adalah sebuah bangsa yang harus bertumpu pada kemajemukan juga dalam keberagaman. Oleh karena itu, Indonesia hanya akan menjadi besar dan dihargai dunia jika pemimpinnya mengerti arti kemajemukan tidak sekadar sebagai gincu peradaban, namun sungguh-sungguh sebagai makna yang terdalam dari nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban. Ketika seorang pemimpin melihat

kemanusiaan dan keberagaman lebih banyak dari sudut pandang kelompoknya sendiri sangat dikhawatirkan akan berkembang sebuah pengastan baru yang meniadakan kesetaraan warga negara maupun kesamaan kelompok-kelompok masyarakat sebagai pemilik bersama negara-bangsa ini.



Pengendum Tampung

Sekitar pinggiran di sebuah pemukiman transmigrasi yang tampak sudah lama tidak diurus lagi oleh pemerintah, kami turun dari mobil sewaan yang membawa kami selama hampir enam jam dari kota



Sumber: Pengendum Tampung (2014)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Jambi. Rupanya, tempat ini adalah pemberhentian terakhir yang bisa dijangkau oleh kendaraan roda empat sebelum memasuki kawasan pemukiman Orang Rimba. Dari tempat ini, kami masih harus naik motor sekitar dua jam lebih melalui hutan karet untuk mencapai batas terluar dari Makekal Hulu, sebuah perkampungan Orang Rimba yang terletak di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas. Saat itu, saya mulai berkenalan dengan Pengendum Tampung, anak muda yang mengendarai motor tanpa pelat nomor yang saya boncengi, melewati jalan tanah berlumpur dan di berbagai ruasnya hampir mustahil dilewati motor kecuali mereka yang sudah terbiasa. Dengan kakinya yang kuat, beberapa kali harus menahan agar motor tidak tergelincir masuk kubangan lumpur membuat saya kagum akan ketangguhan fisiknya.

Pengendum Tampung adalah seorang pemuda aktivis dari Sokola, sebuah LSM yang didirikan oleh Butet Manurung, sarjana antropologi UNPAD. Bersama beberapa rekannya yang suka naik gunung kemudian membantu WARSI, sebuah LSM lingkungan di Jambi. Seperti biasa terjadi dalam kehidupan LSM, ketika sudah merasa cukup untuk membuat LSM sendiri, Butet pun melepaskan diri dari WARSI, mendirikan Sokola, dan memilih Makekal Hulu sebagai lokasi kegiatannya.

Sokola adalah “sekolah” dalam bahasa Orang Rimba. Butet Manurung dan kawan-kawannya memang kemudian memfokuskan LSM pada kegiatan pendidikan “literasi” untuk Orang Rimba yang bermukim di Makekal Hulu. Pengendum Tampung adalah salah satu murid Butet dari angkatan yang pertama, bersama Mijak teman seangkatannya merupakan dua pemuda generasi baru Orang Rimba yang setelah tahu baca tulis dan berhitung, menguasai bahasa untuk berkomunikasi dengan birokrat, aktivis maupun akademisi. Komunikasi saya terakhir dengan Pengendum adalah ketika dia bersiap-siap untuk menghadiri sebuah konferensi *indigenous people* di Kanada.

Saat Gus Dur menjadi presiden tahun 2002, dia memutuskan untuk menjadikan Bukit Dua Belas sebagai sebuah Taman Nasional yang berbeda dengan taman nasional lain yang biasanya tidak ada penduduknya karena di Bukit Dua Belas ada pemukiman-pemukiman Orang Rimba. Seorang aktivis senior WARSI yang ikut menemui Gus

Dur saat meminta agar Bukit Dua Belas dijadikan Taman Nasional, menceritakan bagaimana Gus Dur sambil tertawa mengatakan, “biar saja yang ini taman nasional yang ada orangnya”.

Orang Rimba, pada masa lalu dikenal sebagai Orang Kubu, hidup sebagai peramu dan pemburu, selalu berpindah tempat sambil berladang dengan cara yang sangat sederhana. Malapetaka demi malapetaka silih berganti mendera nasib mereka ketika hutan mulai ditebang, wilayah dijadikan perkebunan karet dan pemukiman transmigrasi. Malapetaka terbesar ketika perkebunan sawit mulai merambah dan mengubah hutan tropis tempat mereka bermukim menjadi hutan sawit. *Kisah Orang Rimba* adalah kisah sedih dari warga negara yang terusir dari ekologi yang selama ini menghidupinya.

Pemerintah tentu telah berusaha dengan berbagai proyek pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan Orang Rimba yang oleh pemerintah diganti namanya menjadi Suku Anak Dalam (SAD). Dalam sebuah *focus group discussion* (FGD) yang kami adakan di Jambi seorang pejabat dari Dinas Transmigrasi dengan nada geram mengatakan bahwa Orang Rimba ini susah sekali diajak hidup yang berbudaya. Pandangan pejabat Dinas Transmigrasi ini tipikal pandangan birokrat terhadap Orang Rimba, juga terhadap orang-orang lain yang dianggap masih terbelakang. Pejabat ini tidak memiliki empati bahwa betapapun sederhana, orang-orang ini memiliki kebudayaan sendiri. Saya jadi teringat ucapan bapak antropologi Indonesia, Koentjaraningrat, “koteka itu pakaian orang Papua, mengapa harus diganti”. Koentjaraningrat dengan itu tidak sekadar menunjukkan empati, tetapi lebih dari itu “*compassion*” terhadap orang Papua.

Pada saat ini, meskipun sebagian kecil masih berusaha hidup dalam perkampungan yang masih dikelilingi hutan seperti kami lihat di Makekal Hulu, mereka tidak memiliki jaminan untuk bertahan karena sebagai Taman Nasional jelas memiliki aturan-aturan yang bisa berbenturan dengan kebutuhan Orang Rimba. Ketika kami menginap beberapa malam di rumah yang berdinding kayu beratap seng milik Mijak di Makekal Hulu, kami mulai sedikit mengenal Orang Rimba dan masalah-masalah yang mereka hadapi. Pengendum Tampung membeberkan panjang lebar berbagai undang-undang yang harus mereka ketahui

sebelum mereka memutuskan untuk mau melakukan apa. Meskipun hanya belajar dari Sokola Rimba, pengetahuannya tentang berbagai pasal dan ayat dari UU tentang Lingkungan Hidup atau tentang Desa; membuat saya terhenyak kagum. Betapa saya, yang peneliti dari kota, malah tidak mengetahui sampai serinci itu.

Pengendum Tampung yang jika di kampung melepaskan celana *jeans* dan lebih suka pakai cawat karena memudahkannya mengejar babi buruan; mungkin tidak punya KTP, motor pun tidak berpelat nomor, polisi biasanya membiarkan; sangat menyadari kalau sebagai Orang Rimba mereka tidak mungkin tetap hidup dengan cara yang lama, tetapi juga tahu pilihan hidup ke depan juga tidak banyak. Pengendum dan Mijak tahu kalau mereka tidak memperjuangkan nasib sendiri, mereka akan terus menjadi korban dari kebijakan atau berbagai tindakan dari orang lain.

Kisah Orang Rimba adalah kisah warga negara Indonesia yang mengesankan. Ketik wabah penyakit menyebar, secara beruntun belasan Orang Rimba meninggal dalam hitungan hari. Berita ini segera menjadi berita nasional dan mendorong Presiden Jokowi untuk mengunjungi mereka dan langsung melihat dari dekat kehidupan mereka. Foto Presiden Jokowi *ngobrol* sambil jongkok dengan beberapa Orang Rimba di bawah kerimbunan pohon sawit sungguh fenomenal. Seorang presiden *ngariung* dengan warga negara yang masih memakai cawat. Kita tidak tahu apa yang diobrolkan, mungkin juga janji untuk memperbaiki nasib mereka yang terlunta-lunta, kita tidak tahu. Seperti juga janji Presiden Jokowi waktu bertemu dengan rombongan dari *sedulur sikep* yang meminta pabrik semen di Rembang ditutup karena mengancam pertanian, setelah pertemuan dengan Orang Rimba pun tampaknya tidak ada perubahan apa-apa.

Presiden Jokowi, tak diragukan lagi, mampu memperlihatkan *gesture* dan *gimmics* yang memperlihatkan kedekatan secara fisik dengan *wong cilik*, dengan Orang Rimba, dengan *sedulur sikep*, dan dalam skala yang lebih besar dengan orang Papua. Akan tetapi, saya kira yang dibutuhkan lebih dari *gesture* dan *gimmics*, yang diperlukan adalah *compassion*, tetapi *jangan-jangan itu yang tidak dimilikinya*.



Paramita Abdurachman

Ruth McVey, dalam obituari mengenang Paramita Abdurachman, menceritakan salah satu yang menyenangkan setiap kali berkunjung ke Indonesia adalah *ngobrol* dengan Paramita Abdurachman: “*One of the most knowledgeable and generous guides to Indonesia*”. Ruth McVey



Sumber: McVey (1988)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

yang bersama Ben Anderson menulis *Cornell Paper* sekaligus membuat marah antek-antek Soeharto; mengatakan generasi yang kemudian akan kehilangan orang seperti Paramita Abdurachman. Saya kira Ruth McVey benar. Di LIPI, saya tidak termasuk mereka yang beruntung mengenal secara dekat Ibu Yo, begitu Paramita Abdurachman biasa dipanggil. Saya tahu, teman-teman biasa *ngariung* dengan Bu Yo begitu akrab dan sangat menyayangi Ibu Yo, layaknya ibu mereka sendiri. Ada kehangatan berdekatan dengan orang seperti Ibu Yo, dugaan saya, beliau membimbing, tetapi tidak menggurui. Berlatar belakang sebagai *ningrat* dan terlibat total pada perjuangan bangsanya, menjadikannya arif dalam melihat masalah-masalah sosial dan kebudayaan, meski tidak menyangang gelar akademis.

Pak Adri Lopian, sobat dekatnya, suatu ketika bilang, “setelah Bu Yo *enggak* ada, Indonesia barangkali akan kehilangan ahli yang menguasai, tidak hanya bahasa Portugis dan Spanyol, tetapi juga sejarahnya”. Pak Adri memiliki *passion* yang sama dengan Bu Yo tentang sejarah maritim yang erat dengan perdagangan rempah-rempah di kepulauan Maluku. Setelah Bu Yo dan Pak Adri Lopian tidak ada lagi; mengikuti orang-orang berceloteh tentang negara maritim, lebih banyak retorik, *ngomong* tanpa data, *an empty concept*.

Ketika tahun 1980 saya melamar masuk Leknas-LIPI di Jalan Gondangdia Lama 39 Jakarta Pusat, orang yang saya temui karena pintu kamarnya kebetulan terbuka adalah Pak Edi Masinambouw. Pak Edi menyarankan untuk ikut Pak Adri Lopian yang sedang melakukan penelitian tentang masyarakat maritim jika nanti diterima. Saya cuma bisa mengiyakan, meskipun setelah saya benar-benar masuk Leknas-LIPI, oleh direktur saat itu, Pak Suharso, saya ditempatkan di bidang penelitian yang lain, kependudukan. Pak Adri Lopian, Pak Edi Masinambouw, dan Bu Yo adalah peneliti yang tidak menjadikan penelitian sekadar proyek, tetapi kegiatan yang dilakukan dengan penuh gairah, rasa ingin tahu, dan kecintaan. Tetap ada kedalaman di sana—sesuatu yang tampaknya makin hilang sekarang.

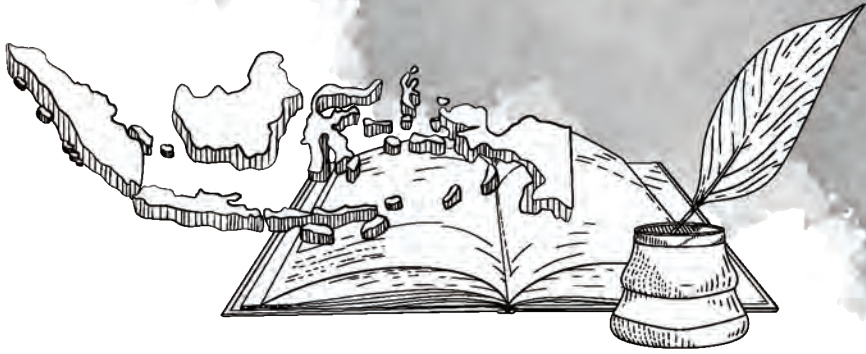
Sebagai penghormatan terhadap mentor, pada tahun 2008 para peneliti bekas bimbingannya, Thung Ju Lan, Yasmin Sungkar, dan Musiana Adenan mengumpulkan tulisan dari Bu Yo yang sebelumnya

terserak, menjadi sebuah buku dan berjudul *Bunga Angin Portugis di Nusantara: Jejak-Jejak Kebudayaan Portugis di Indonesia* (2008). Buku ini memperlihatkan minat Bu Yo yang mendalam tentang salah satu fase penting dalam sejarah Indonesia dan akhir-akhir ini orang merindukan *seolah-olah* kita benar-benar pernah menjadi negeri bahari yang besar. Pak Adri Lopian, seperti Bu Yo, yang hampir seluruh hidupnya didedikasikan untuk melakukan penelitian sejarah maritim; bagi generasi sekarang hanya sayup-sayup kedengaran namanya, tetapi sesungguhnya tidak pernah serius melanjutkan jejak penelitiannya. Satu hal yang masih menarik buat sejarawan tentang Ibu Yo adalah justru cerita gosipnya tentang kedekatannya dengan tokoh legendaris sejarah Indonesia Tan Malaka.

Semasa muda, Ibu Yo memang pernah menjadi sekretaris Tan Malaka dan diduga menjalin hubungan percintaan dengan Tan Malaka. Sejarawan Harry Poeze dan Asvi Warman termasuk yang berusaha mengorek kebenaran cerita gosip tersebut. Tentu, menjadi kekasih tokoh sebesar Tan Malaka adalah cerita bersejarah tersendiri bagi Paramita Abdurachman. Tan Malaka adalah sebuah enigma dalam sejarah politik negeri ini. Alfian, almarhum, ahli politik dari Leknas-LIPI, dalam sebuah tulisan menyebut Tan Malaka sebagai “pejuang revolusioner yang kesepian” (1997). Meskipun diakui sebagai pahlawan nasional, akhir hidupnya diakhiri secara tragis. Paramita Abdurachman, mungkin orang yang mengetahui dari dekat kedalaman hati dan pikiran Tan Malaka. Simpatinya dan mungkin juga cintanya, yang mendalam pada Tan Malaka; dibawa terus menapaki sejarah politik Indonesia yang tragis. Bisa jadi, hal ini yang telah memaksa Paramita Abdurachman untuk menyimpan kenangan tentang Tan Malaka hanya untuk diri sendiri, *sampai akhir hayatnya*.

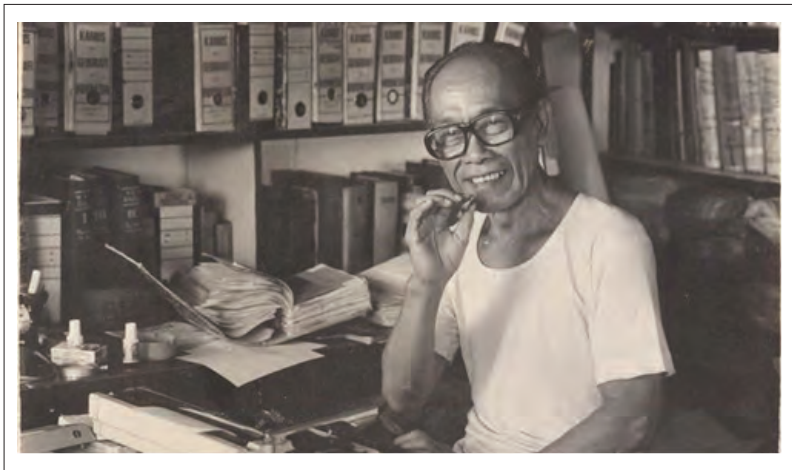


Buku ini tidak diperjualbelikan.



Pramoedya Ananta Toer

Ketika diminta memberikan sambutan pada pembukaan pameran lukisan Yos Suprpto di TIM tahun 1994, Pramoedya Ananta Toer menceritakan bahwa dia tidak pernah meminta apa pun dari Tuhan. Menurut Pram, Tuhan telah memberinya otak dan dua tangan dan



Sumber: Suriyanto (2019)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

itu sudah cukup. Dengan otak dan dua tangan yang telah diberikan oleh Tuhan itu, Pram mengatakan bisa berpikir dan bekerja sehingga dia tidak merasa perlu meminta apa-apa lagi dari Tuhan. Bagi saya, mendengarkan langsung kata demi kata yang diucapkan dengan nada yang jelas dan tegas keluar dari mulut Pramoedy itu, sama sekali bukan sebuah kesombongan, apalagi keinginan untuk tidak mengakui keberadaan Tuhan. Pernyataannya itu memperlihatkan bahwa sebagai manusia kita harus bersyukur dan wajib menggunakan apa yang telah diberikan oleh Tuhan itu sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya bagi Pramoedy saya kira adalah bekerja sekeras mungkin untuk kepentingan masyarakat dan memperbaiki nasib bangsa.

Pramoedy mungkin masih menjadi novelis terbesar yang dimiliki Indonesia. Namanya beberapa kali masuk dalam nominasi penerima hadiah Nobel sastra. Buku Pram terutama tetralogi *Pulau Buru – Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca* – telah berhasil menginspirasi generasi muda meskipun oleh Orde Baru buku-buku itu sempat dilarang karena dianggap mengajarkan komunisme. Sebuah tuduhan yang tidak berdasar dan mencerminkan apresiasi rendah terhadap intelektualisme. Dalam menulis tetralogi itu, Pram memang secara sadar ingin mewariskan ceritanya untuk generasi muda, agar mereka mengetahui sejarah bangsa. Pramoedy menulis bukan untuk mengejar keindahan sastrawi, namun menggunakan sastra untuk menggugah semangat anak muda akan nasib bangsa yang sebagian masih mengalami penindasan.

Dalam rubrik Iqra majalah Tempo Edisi 13–19 Juli 2020, ditampilkan sosok Oey Hiem Hwie, mantan wartawan koran *Trompet Masyarakat*, seorang Sukarno, Sekretaris Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) cabang kabupaten Malang yang bertemu dengan Pram karena pada akhir 1965 sama-sama dipenjarakan di Nusakambangan dan kemudian satu dek dalam kapal menuju pembuangan mereka ke kamp konsentrasi tapol di Pulau Buru. Di pulau Buru, Oey Hiem Hwie adalah orang yang membantu Pram melahirkan novel-novel tetralogi Pulau Buru. Dikisahkan dalam Tempo itu bagaimana Oey Hiem Hwie mencari kertas dan pensil untuk Pram sehingga dia bisa menulis. Kantong semen bekas dia kumpulkan, dia

potong menjadi ukuran A4 HVS untuk menjadi kertas tulis. Pensil dia dapatkan dengan menukar telur ayam hutan melalui petugas yang sering ke kota. Ketika harus menyelundupkan naskah itu, dia harus pura-pura menggigil demam agar tidak digeledah penjaga. Draf *Bumi Manusia* tulisan tangan Pram di kertas semen itu sekarang bisa disaksikan di perpustakaananya *Medayu Agung* di Jalan Medokan Ayu Selatan GG IV No. 42, Surabaya.

Pramoedya Ananta Toer sepanjang hidup telah membuktikan bahwa dia bekerja dengan keras, tidak berhenti menulis meskipun dalam lingkungan yang tidak hanya tidak bersahabat, tetapi membelenggu secara fisik. Pramoedya adalah orang yang mengalami dipenjarakan baik pada zaman Soekarno maupun Soeharto. Gaya tulisan Pram, di mata saya yang bukan ahli di bidang kesusastraan, mirip narasi etnografis seorang antropolog, deskripsi yang rinci tentang realitas sosial yang dia lihat. Ketika bercerita tentang peristiwa yang terjadi dalam sebuah episode sejarah seperti yang dibaca dalam tetralogi *Pulau Buru*, meskipun tokoh-tokohnya sebagian adalah rekaannya, namun dia memiliki referensi dari tokoh yang sesungguhnya, misalnya Tirto Adhi Soerjo – dalam buku nonfiksi yang lain, dia sebut sebagai Sang Pemula.

Blora, tempat lahir dan Pram tumbuh besar, adalah kawasan yang banyak dihuni oleh Sedulur Sikep atau Samin. Samin menjadi sebutan buat orang Jawa yang mengikuti ajaran Samin Surosentiko. Samin Surosentiko yang oleh Belanda ditangkap karena dianggap memimpin sebuah pembangkangan, antara lain dengan mengajak para pengikutnya untuk tidak mau membayar pajak, kemudian diasingkan sampai meninggal sekitar tahun 1914 di Sawahlunto, Sumatra Barat. Dalam sejarah politik, fenomena Samin yang melawan pemerintah kolonial tanpa menggunakan kekerasan adalah sebuah enigma. Samin muncul mendahului gerakan-gerakan perlawanan yang lebih modern. Sejauh yang saya tahu, Pram tidak pernah menyinggung soal Samin Surosentiko dalam tulisan-tulisannya. Saya sendiri merasa bahwa ajaran Samin Surosentiko pada dasarnya memiliki persamaan dengan ajaran-ajaran Jawa lain yang menekankan pada etika keselarasan antara manusia dengan sesama maupun dengan alam semesta. Tuhan dalam ajaran Jawa disebutkan sebagai *tan keno kinoyo ngopo*, tak terdeskripsikan, *undiscribable*.

Bagi Pramoedya, menulis cerita untuk diwariskan kepada generasi muda bangsanya, saya kira adalah manifestasi pilihan tingkah laku untuk ikut membangun karakter bangsanya. Dalam sebuah wawancara, dia mengatakan tidak ada rasa dendam di hati terhadap mereka yang telah memperlakukannya secara kejam selama menjadi tapol. Bagi Pram, terlalu rendah harga dirinya jika dia masih menyimpan dendam bagi mereka yang di matanya sudah tidak punya nilai lagi. Jika ada orang yang masih dia hormati, katanya waktu itu, hanya Gus Dur. Presiden Soeharto, selalu dia bahasakan sebagai Harto saja, memperlihatkan di matanya sebagai orang yang tidak memiliki harga. Dalam sebuah kunjungan ke rumahnya di Utan Kayu, Rawamangun, Jakarta Timur (1984) karena dititipi oleh Max Lane gambar *cover* buku *The Earth of Mankind*, terjemahan *Bumi Manusia* yang akan diterbitkan oleh Penerbit Penguin, sambil tertawa keras Pram menunjuk telinganya yang rusak pendengarannya, katanya karena dipukul popor senjata oleh tentara.

Pram minta agar saya berbicara agak keras karena dia bilang telinganya setengah tuli. Pram sendiri, di sela-sela hisapan rokok kreteknya, berbicara dengan suara keras, tegas dengan sesekali gemeretak suara gigi gerahamnya beradu, merefleksikan kekerasan hidup yang dialami. Di perjalanan pulang sehabis bertemu Pram, saya berkata dalam hati bagaimana orang sekeras itu bisa menulis cerita yang sangat menyentuh hati. Ketika diangkut dengan kapal ke Pulau Buru, Oey Hwim Wie menempati dek atas bersama dengan Pramoedya dan para tapol yang digolongkan sebagai kelas ringan, sementara mereka yang digolongkan kelas berat ditempatkan di dek bawah yang lebih sempit dan pengap. Karena selalu bersama-sama itulah Oey Hwim Wie merasa dekat dengan Pram dan bertekad membantu Pram agar bisa menuliskan cerita-ceritanya. Setelah mereka dibebaskan, pada tahun 1979 Pram sempat berkunjung ke Surabaya saat peresmian perpustakaan *Medayu Agung*.

Pram dan Oey Hwim Wie adalah contoh dari ribuan orang yang dipenjara dan dibuang ke Pulau Buru tanpa pernah ada proses pengadilan yang membuktikan apa dan di mana kesalahan mereka. Mereka dianggap sebagai komunis yang tidak bertuhan. Komunisme, yang

oleh Orde Baru telah diratakan dengan tanah, alias sudah tidak ada lagi, ternyata setiap tahun masih selalu menjadi bulan-bulanan dan setiap kali seperti dibunuh kembali. Frans Magnis Suseno, yang telah mendalami Marxisme dan Komunisme dalam satu kolom di *Kompas* 10 Juli 2020, menulis dengan judul Komunisme Memang Gagal. Yang terasa aneh, dalam tulisan pendek itu Magnis Suseno menyarankan supaya TAP MPRS Nomor XXV/1966 justru jangan dicabut karena TAP ini mempunyai kekuatan simbolis penting, yaitu “menegaskan bahwa di Indonesia tidak ada tempat bagi suatu ideologi dan gerakan politik yang mendasarkan diri pada ateisme”. Membaca tulisan ini ingatan saya melayang ke TIM saat Pram menyambut pameran lukisan sahabat saya Yos Suprpto. Bagi saya pernyataan Magnis Suseno ini sungguh sangat mengecewakan. Sebagai orang yang mendalami Etika Jawa, dia telah luput memahami agama Jawa dan tidak membaca sejarah. Pernyataan Magnis Suseno tentang komunisme dan ateisme adalah pernyataan politik yang lebih didasari oleh keyakinan ideologi keagamaan daripada kearifan yang dilandasi oleh nalar yang memancarkan kecerahan akal budi.



Buku ini tidak diperjualbelikan.



Raden Saleh

Raden Saleh (1807–1880), pelukis legendaris, sepuluh tahun lebih tua dari Karl Marx (1818–1883), mereka boleh dikatakan hidup sezaman. Raden Saleh, mungkin orang pertama dari Nusantara yang menerima



Sumber: Kraus (2021)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

beasiswa untuk belajar di Belanda. Kegeniusan sebagai pelukis membuatnya memperoleh gelar pelukis istana dan menikmati hidup mewah sebagai bagian dari kelas atas para bangsawan Eropa. Selain tinggal di Belanda, Raden Saleh juga sempat bermukim di Jerman dan Prancis, selain Italia, total selama 20 tahun. Kembali ke Hindia Belanda pada tahun 1852, pada puncak tanam paksa yang menyengsarakan bangsa Indonesia. Apakah selama di Eropa Raden Saleh sempat bertemu atau paling tidak mendengar tentang Karl Marx? Mungkin sekali Raden Saleh telah membaca Karl Marx, sebagai seniman papan atas di Eropa saat itu semangat *aufklarung* menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan filsafat, ilmu, dan seni; yang pasti disesapnya. Melihat tema-tema lukisan dan kehidupan yang selalu berada di lingkungan bangsawan Eropa, barangkali memang Raden Saleh tidak pernah ber-singgungan hidup dengan Karl Marx, dunia orang miskin dan tertindas hanya melintas samar-samar di matanya.

Kisah anak jajahan yang menjadi besar dan terkenal karena belajar di negeri *si penjajah* selalu menarik ketika benih-benih perlawanan terhadap penindasan mulai tumbuh. Dibandingkan Jose Rizal (1861–1896), bapak bangsa Filipina, seorang dokter dan pengarang novel *Noli Me Tangere* yang lama berkelana di Eropa (Madrid, Paris, Belgia, dan Berlin), Raden Saleh terhitung setengah abad lebih dahulu. Nasionalisme anak jajahan saat itu belum tumbuh, belum terbayangkan bahwa kolonialisme akan berakhir. Karl Marx pun memberi perhatian kecil pada kemungkinan perjuangan kelas berkembang di Asia. Revolusi komunis pertama oleh kaum Bolshevik pimpinan Lenin justru pecah di Saint Petersburg, ibu kota Rusia, tahun 1917. Komunisme memang tidak pernah tumbuh besar di Eropa.

Raden Saleh hidup di Eropa pada zaman keemasan feodalisme dan kolonialisme. Masa itu, Lisbon, Madrid, Paris, London, Edinburgh, Amsterdam, Berlin, St. Petersburg, Vienna, Budapest, dan Praha adalah kota-kota yang dipenuhi istana-istana dan kastel-kastel tempat para ratu dan pangeran hidup dalam kelimpahan harta, bahkan seni tumbuh dengan sempurna. Eropa pascaperang salib melewati zaman *aufklarung* ketika filsafat dan ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Masa keemasan yang menjadi puncak dari semangat menjela-

jahi daratan dan lautan di luar Eropa terjadi sebelumnya. Masa ketika benua-benua baru ditemukan, penduduk setempat diburu, dibunuh, dijadikan budak, dirampas, sehingga dari sana lahirlah kolonialisme dan imperialisme. Pengerukan kekayaan alam, eksploitasi, dan perbudakan inilah yang menjadikan kota-kota di Eropa tumbuh cemerlang.

Raden Saleh dilahirkan di Semarang, di tengah feodalisme Jawa dan pemerintahan kolonial di bawah kekuasaan Gubernur Jenderal, yang mengambil alih VOC saat bangkrut, mulai menguasai wilayah-wilayah di Nusantara. Talenta menggambarnya secara cepat mengubah jalan hidup sehingga tidak seperti nasib para inlander yang melata, yang dalam pandangan waktu itu memang begitulah sudah nasibnya. Tidak ada yang bisa disalahkan dari Raden Saleh ketika dia harus meninggalkan “bangsa” yang harus berperang melawan sang penjajah. Perang dipimpin seorang pangeran Jawa, Diponegoro, yang dilahirkan 20 tahun lebih dahulu dari dirinya (1785–1855). Oleh karena itu, Raden Saleh memiliki persentuhan cukup kuat dengan Diponegoro, di lubuk hati, dia memiliki rasa hormat terhadap pangeran Jawa yang berani memberontak kepada Belanda.

Perang Jawa yang berlangsung selama 1825 hingga 1830 memakan banyak korban dari kedua belah pihak dan membangkrutkan pundi-pundi Belanda. Untuk memulihkan pundi-pundi Belanda, tenaga orang Jawa harus diperas dan kekayaan alamnya dikuras. Sistem tanam paksa dari 1830 sampai 1870 menjadi strategi akumulasi kapital yang paling menguntungkan. Hasil dari sistem tanam paksa mengalir deras ke pusat kekuasaan Belanda sekaligus menjadi modal mempercantik istana dan kastel-kastel para bangsawan yang minta dilukis potret dirinya. Dekat dengan raja Belanda membuat dia diminta untuk memberikan kesaksian atas keaslian keris Diponegoro, Kyai Nogo Siluman, yang konon diberikan sebelum penangkapannya. Pemberontakan Diponegoro yang disebut sebagai *De Java Oorlog* (Perang Jawa) berlangsung sebelum benih-benih nasionalisme tumbuh. Seperti halnya Kartini yang lahir setengah abad kemudian dan dari surat-suratnya terbaca rasa keprihatinan yang mendalam terhadap kaumnya, belum memperlihatkan kesadaran tentang nasib orang-orang yang bukan Jawa. Ide tentang Indonesia masih di awang-awang.

Saat ini, khalayak pembaca sangat beruntung karena dua buku tentang Raden Saleh terbit belum lama ini. Buku yang pertama, *Raden Saleh: Kehidupan dan Karyanya* (2018) tentang sejarah Raden Saleh, aslinya ditulis oleh Werner Krauss dan Irina Vogeslang, dua orang ahli dari Jerman, terbitan KPG; dan yang kedua, *fresh from the oven*, novel *Pangeran dari Timur* ditulis bersama oleh Iksana Banu dan Kurnia Effendi, diterbitkan oleh Panerbit Bentang, Februari 2020. Jika buku yang pertama merupakan buku sejarah yang ditulis berdasarkan sebuah riset akademik melalui fakta-fakta yang berhasil dihimpun dengan sangat teliti, sedangkan buku yang kedua adalah karya imajinatif, fakta yang digubah secara kreatif menjadi fiksi setebal 600 halaman. Iksana Banu dan Kurnia Effendi telah memanfaatkan dengan baik sejarah yang telah dituliskan dengan teliti oleh Werner Krauss dan Irina Vogeslang, melengkapi riset yang dilakukan oleh mereka sendiri, antara lain dengan mengunjungi lokasi-lokasi yang pernah ditempati Raden Saleh, baik di Eropa maupun di Jawa.

Novel *Pangeran dari Timur* (2020), ditulis dengan sebuah strategi yang cerdas yang memungkinkan penulis mengembangkan imajinasi sepenuhnya tanpa mengingkari fakta sejarah riwayat hidup Raden Saleh. Plot novel itu dibuat berdasarkan dua alur sejarah, biografi Raden Saleh (1811–1880) serta sejarah sosial menjelang dan setelah kemerdekaan (1920–1953). Pada alur sejarah sosial inilah imajinasi kita tentang Raden Saleh yang hidup dalam alam feodalisme Jawa dan Eropa beserta kolonialisme Belanda, terhubung dengan dunia pergerakan kaum nasionalis melawan kolonialisme. Antara dua alur itu sosok Diponegoro dimunculkan dalam novel ini sebagai perekat, menjadikan buku *Pangeran dari Timur* ini bisa disebut sebagai novel yang berlatar belakang sejarah dan tidak saja tentang seorang pelukis dari Jawa yang meraih ketenaran di Eropa, namun juga tentang kompleksitas hubungan rasial yang bercampur dengan ketidakadilan antarkelas di Hindia Belanda. Meskipun sebagai tokoh sentral, Raden Saleh telah meninggal pada tahun 1880 dan kisahnya terus berlanjut dengan tokoh-tokoh fiksi yang hidup dalam arus pergerakan nasional menuju kemerdekaan.

Sejak halaman pertama, novel ini telah menggiring pembaca memasuki ruang sejarah melalui suasana kolonial dan karakter tokoh-

tokoh dengan latar Kota Bandung, pusat kaum pergerakan tahun 1924 hingga 1925. Percintaan di tengah ketegangan politik, dari Syafei, pemuda pergerakan yang bengal dan urakan, anggota PKI cabang Bandung dengan Ratna Juwita yang cantik, tetapi sedikit *naïf*, adalah anak tiri Thadeus van Geelman, wartawan senior *Preanger Bode* menjadikan novel ini renyah. Imajinasi kita dibawa ke masa lalu Bandung yang sangat menghidupkan buku *Pangeran dari Timur* ini. Kedua penulis merajut dengan indah melalui tokoh Syafei, yang ditangkap setelah meletus pemberontakan PKI di Banten dan Silungkang 1926, dibuang ke Digul dan mati di sana. Dalam fase sejarah sosial, yang dikenal sebagai *jaman balik buwono* atau *zaman bergerak* inilah kita seperti dipertemukan dengan Karl Marx yang hidup sezaman dengan Raden Saleh di Eropa.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Buku ini tidak diperjualbelikan.



Sangkot Marzuki

Dalam sebuah diskusi kecil di LIPI beberapa waktu yang lalu tentang *science, technology, and society* (STS), koordinator tim penelitian STS LIPI, Prof. Thung Julan mengundang Prof. Sangkot Marzuki, mantan Direktur Lembaga Molekuler Biologi Eijkman dan Ketua Akademi



Sumber: Renganis (2020)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) untuk berbagi pengalaman sebagai peneliti yang lama bekerja di luar negeri. Di luar dugaan, beliau ternyata orang yang rendah hati, tidak ada kesan sombong sama sekali; sebagai orang yang bereputasi internasional. Bicaranya pun, meskipun lama di Melbourne, masih terdengar rada medok Sunda dan setelah *ngobrol*, ternyata beliau orang Medan.

Dari berbagai isu yang muncul dari diskusi kecil itu ada satu hal menarik yang disampaikan Prof. Sangkot berdasarkan pengalamannya, yaitu tentang *research culture*. Menurut Sangkot Marzuki, *research culture* ini yang absen di Indonesia. Mungkin memang tidak ada orang lain yang lebih tepat dari Sangkot Marzuki untuk menilai tentang absensi *research culture* di Indonesia. Dari pemaparannya yang singkat itu, saya tidak tahu apakah Sangkot Marzuki sendiri telah berhasil membangun *research culture* di Lembaga Eijkman yang dipimpinnya sejak 1992 hingga 2014. Pada waktu yang sama, B.J. Habibie yang saat itu Menteri Riset dan Teknologi, meminta Sangkot Marzuki untuk pulang dari Australia dan memimpin Lembaga Eijkman. Selain menjadi direktur Lembaga Eijkman karena reputasi yang tinggi, Sangkot juga diangkat menjadi Ketua AIPI, lembaga bentukan B.J. Habibie yang beranggotakan ilmuwan paling top, yang tidak sedikit merupakan profesor emeritus dari berbagai disiplin ilmu.

Sangkot Marzuki menceritakan bahwa *research culture* itu sudah begitu mapan di tempat dia bekerja di Universitas Monash di Australia. Sebagai peneliti yang datang dari Indonesia, dia langsung bisa bekerja dengan nyaman, tanpa ada kerisauan apakah dana penelitian cukup atau tidak. *Research culture* sejauh yang bisa saya tangkap dari cerita Sangkot Marzuki, merupakan kondisi yang membuat peneliti dapat bekerja dengan tenang, bebas, dan kreatif. Kondisi ini, menurut Sangkot Marzuki adalah hasil dari proses pembelajaran tingkah laku peneliti, baik sebagai individu maupun dalam *teamwork* yang telah berlangsung lama dan menjadi mapan sebagai budaya penelitian. Sangkot Marzuki juga menjelaskan bahwa ada *trust* dan *transparency* yang berhasil diciptakan dalam hubungan, baik antarpeneliti maupun antara peneliti dengan mereka yang mengelola administrasi riset. Hal itu juga yang berdasarkan pengalamannya di Indonesia, *absen*.

Di Indonesia, dia melihat dana penelitian sangat tergantung dari pemerintah dan diatur berdasarkan aturan birokrasi yang siklus kerjanya terkait dengan sistem pertanggungjawaban administratif jangka pendek. Hal ini sangat menyulitkan bagi lembaga penelitian yang memiliki program jangka panjang karena tiba-tiba pemerintah bisa memotong anggaran di tengah jalan, *misalnya*, sedang kesulitan uang dan harus mengalokasikan untuk proyek yang dianggap lebih mendesak. Oleh karena itu, *research culture* bukanlah keadaan yang berdiri sendiri, terisolasi dari komitmen dan kestabilan politik anggaran pemerintah. Mungkin karena tidak ada kepastian terhadap pendanaan penelitian inilah yang mendorong Sangkot Marzuki ingin AIPI sebagai otoritas keilmuan mempunyai dana abadi dalam jumlah yang cukup agar bisa membiayai penelitian-penelitian strategis jangka panjang. Bagaimana hasil dari inisiatif ini? Kita tunggu saja, para profesor paling top itu akan bertelur emas.

Apa yang diceritakan oleh Prof. Sangkot perihal *research culture* itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Mereka yang pernah belajar di luar negeri sebagai mahasiswa pascasarjana (S2 dan S3) atau yang pernah mengikuti program *post-doctoral*, misalnya di Jepang, Singapura, Australia, Inggris, Jerman, Belanda, Prancis, Kanada atau Amerika Serikat; pastilah sedikit atau banyak telah merasakan apa yang namanya *research culture* itu. Di negara-negara itu, *research culture* memang telah mapan, dibandingkan apa yang kita lihat di Indonesia. Riset dalam disiplin ilmu apa pun di negeri ini seperti berjalan di tempat, bahkan mundur; pemerintah yang silih berganti juga tidak henti-hentinya membongkar-pasang lembaga penelitian dan lembaga perguruan tinggi. Mengapa IAIN dan IKIP harus menjadi universitas. Mengapa Fakultas Kedokteran harus ada di lembaga pendidikan yang semula berurusan dengan ilmu agama? Mengapa Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi tiba-tiba harus menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis? Pendidikan memang telah menjadi industri dan mahasiswa memang komoditas yang tak kenal musim.

Selama kepemimpinan Presiden Jokowi, lembaga perguruan tinggi dilepaskan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lalu disatukan dengan Kementerian Riset dan Teknologi, dipimpin oleh seo-

rang menteri yang disorongkan oleh partai politik sebagai balas budi, *ngomong* bahasa Inggrisnya saja *glepotan*. Dalam periode kepemimpinan yang kedua, lembaga perguruan tinggi itu dikembalikan lagi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga Kementerian Riset kembali berdiri sendiri. Sebelum ramai-ramai Covid-19 ini, terdengar kabar bahwa seluruh lembaga riset pemerintah akan disatukan agar efektif dan efisien di sebuah lembaga yang *konon* akan dinamai Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Berdasarkan apa yang kita saksikan, riset belum menjadi prioritas bagi para pemimpin politik dan bisa dimengerti kalau *research culture* tidak mapan di negeri ini.

Dalam studi STS, *research culture* menjadi bagian yang penting karena merupakan sebuah titik temu dari *science*, *technology*, dan *society*. Pengembangan ilmu pengetahuan (*science*) tidak mungkin terjadi jika *research culture* absen. Akan tetapi, *research culture* tidak mungkin hadir tanpa lingkungan politik (*society*) yang memahami dan mendukung bahwa riset diperlukan oleh masyarakat. Teknologi (*technology*) sebagai buah dari riset, baik berupa *tools* maupun *practices* yang diperlukan oleh masyarakat akan terhambat produksinya dan akan merugikan masyarakat tanpa hadirnya *research culture* yang menjadi tunggunya.

Pandemi virus korona yang menyerang umat manusia ini makin menyadarkan kita akan perlunya membangun *research culture* yang bisa menjadi tungku pemasak ilmu pengetahuan. Bahkan, pada saat yang tepat akan membuahkan teknologi yang diperlukan masyarakat. Wabah penyakit yang bergerak cepat dan mematikan ini tidak mungkin ditangkal jika ilmu pengetahuan tidak mampu menghasilkan vaksin yang tepat. Ketika vaksin itu belum ditemukan, jaring pengaman sosial (*social safety net*) sangat dibutuhkan terutama bagi warga masyarakat yang paling rentan terjangkit virus korona ini. Jokowi tampaknya telah memilih kembali Menteri Kesehatan yang kurang kredibel ketika manajemen kesehatan nasional dihadapkan pada krisis yang sangat memerlukan tindakan cepat dan untuk segera diatasi.

Tahun 1929, Christiaan Eijkman bersama kolega Frederick Hopkins mendapat hadiah Nobel. Lembaga riset yang dipimpinnya di Batavia berhasil menemukan vitamin yang bisa menangkal penyakit beri-beri yang saat itu mewabah dan membunuh banyak orang di Hindia

Belanda. Ketika B.J. Habibie meminta Sangkot Marzuki *pulang kampung* dan menjadikannya direktur Lembaga Eijkman, sepertinya bukan motif politik yang ada di benaknya. Mungkin, saat itu Sangkot Marzuki membayangkan hadiah nobel dari lembaga yang tetap menggunakan nama Eijkman itu. Namun sekarang, setelah 90 tahun Eijkman dapat hadiah nobel kedokteran, kita tahu, itu cuma akan jadi khayalan belaka tanpa kehadiran *research culture* yang memadai di bumi Nusantara.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Buku ini tidak diperjualbelikan.



S.K. Trimurti

Surastri Karma Trimurti (S.K. Trimurti) masih berumur 4 tahun 9 hari ketika organisasi para priyayi Jawa, Budi Oetomo dibentuk pada tanggal 20 Mei 1908 oleh beberapa dokter Jawa, seperti Wahidin Sudirohu-



Sumber: Blessty (2017)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

sodo dan Sutomo. Organisasi sosial pertama yang dianggap sebagai penanda mulai muncul kesadaran berbangsa itu didirikan oleh segelintir kecil mereka yang telah mengenyam pendidikan modern. Sejak itulah sejarah seperti bergulir cepat, pendidikan barat mengajarkan tidak saja *knowledge*, tetapi juga melatih *know-how*, bagaimana membuat organisasi, dan bagaimana menyatukan kepentingan bersama dengan penjelasan lain *bagaimana berpolitik*.

Setelah 1908, tercatat kelahiran Sarekat Dagang Islamiyah (1909), Muhammadiyah (1910), Indische Partij (1912), dan seterusnya. Proses politik yang bergulir cepat itu seperti terkulminasi ketika Sumpah Pemuda diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda Kedua di Jakarta. Pada tanggal 22–25 Desember 1928 kaum perempuan mengadakan kongres yang pertama di Yogyakarta. S.K. Trimurti beranjak dewasa dalam poses politik yang bergulir cepat itu dan politik seperti telah menyatu dengan darah dan dagingnya.

Tahun 1926, dua tahun sebelum diadakan Kongres Pemuda Kedua dan Kongres Perempuan Pertama, adalah tahun yang sangat istimewa dalam sejarah sosial politik Indonesia. Pada tahun 1926, PKI merupakan partai politik pertama yang didirikan orang Indonesia melakukan pemberontakan di Banten dan Sumatra Barat. Pada tahun 1926 Bung Karno juga menulis artikel berjudul “Islam, Marxisme, dan Nasionalisme” di koran *Suluh Indonesia Muda*. Sebuah artikel yang gaungnya masih terasa hingga hari ini. Pada tahun 1933 karena tergerak oleh pemikiran-pemikiran Bung Karno, S.K. Trimurti bergabung dengan Partindo di Bandung, tempat dia bekerja sebagai guru SD, setelah menyelesaikan pendidikan sekolah gurunya di Solo. Pada tahun 1936 karena aktivitas politik, S.K. Trimurti ditangkap Belanda dan disekap di penjara Bulu Semarang. Sekeluar dari penjara, S.K. Trimurti meninggalkan pekerjaan sebagai guru dan menjadi wartawan. Pada tahun 1930-an tidak sedikit wartawan yang sekaligus adalah tokoh pergerakan. Tirto Adi Surjo, Mas Marco, dan Haji Misbach, adalah wartawan-wartawan yang menggunakan dunia kewartawanan sebagai medan perlawanan terhadap penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda.

Pada masa pendudukan Jepang, karena tulisan-tulisannya yang dianggap menyudutkan tentara Jepang, S.K. Trimurti dijebloskan ke penjara –kali ini di Blitar. Konon, di penjara Blitar, Trimurti berjumpa dengan Umi Sardjono, yaitu pejuang perempuan sekaligus pengagumnya. Mereka bersama-sama kemudian mendirikan organisasi Barisan Buruh Wanita (BBW) dan Gerakan Wanita Sedar (Gerwis) yang tahun 1954 berubah menjadi Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani). Pada tahun 1960-an, S.K. Trimurti menjauh dari Gerwani setelah organisasi ini mendekati ke PKI. Ketika terjadi ontran-ontran politik 1965, S.K. Trimurti dan Sayuti Melik, suaminya, selamat melewati masa yang serba tidak menentu itu. Pada masa Orde Baru, keduanya bersimpang jalan; SK Trimurti ikut menjadi bagian dari mereka yang kritis di luar kekuasaan, sementara Sayuti Melik memilih ikut mereka yang berkuasa, menjadi anggota DPR-GR mewakili Golkar. Pada tahun 1980, S.K. Trimurti termasuk salah seorang yang ikut menandatangani *Petisi 50*, sebuah protes dan kritik yang ditujukan kepada Presiden Soeharto. Petisi ini ditandatangani oleh tokoh-tokoh dari berbagai kalangan yang berisi menyuarakan keprihatinan tentang situasi bangsa dan negara yang dinilai memburuk karena pemerintahan yang makin represif.

Ada banyak fase dalam kehidupan S.K. Trimurti yang membuatnya menjadi istimewa, semuanya tidak bisa dilepaskan dari politik: pendidikan, kewartawanan dan perburuhan. Setiap fase dalam kehidupannya sangat kaya sebagai teladan kehidupan perempuan yang hidup *seperti melampaui zamannya*. Dalam konteks eksploitasi ekonomi, kegiatan S.K. Trimurti dalam memperjuangkan hak-hak kaum buruh menjadi sangat relevan hari ini ketika nasib buruh seperti tidak beranjak meskipun Indonesia merdeka sudah mendekati tiga perempat abad. Ada yang terasa ironis ketika nasib buruh hari ini tidak ada perbedaan dengan apa yang terjadi pada masa lalu ketika pemerintah kolonial bekerja sama dengan para para investor. Susan Blackburn (2004) dalam bukunya *Women And The State In Modern Indonesia* mengutip John Ingelson, menulis:

“The colonial power was closely aligned with the interest of foreign investors, a measure of successful colonialism being a flourishing export

economy. Consequently, workers lacked effective protective legislation, and the emerging union movement in the Indies suffered state repression”.

Betapa mirip dengan apa yang sedang terjadi sekarang, ketika UU Cipta Lapangan Kerja sengaja disebut pertama-tama untuk menarik investasi akibat menekan hak-hak buruh. Dalam kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Sjarifudin, dua perempuan diangkat sebagai menteri, S.K. Trimurti diangkat sebagai Menteri Perburuhan dan Maria Ulfah Santoso sebagai Menteri Sosial. Ada dua buku yang ditulis S.K. Trimurti tentang perburuhan: *A.B.C. Perjuangan Buruh, diterbitkan oleh Pusat Pimpinan PBI, Yogyakarta, 1948; dan Hubungan Pergerakan Buruh Indonesia dengan Pergerakan Kemerdekaan Nasional, Yayasan Idayu-Jakarta, 1975.*

Saya hanya bisa membayangkan betapa seru kehidupan S.K. Trimurti dan Sayuti Melik, dua orang muda yang sangat idealis, sama-sama menjadi aktivis politik tahun 1930-an dan 1940-an, menjalin hubungan selagi melakukan kegiatan politik, lalu memutuskan menikah. Keduanya aktif dalam berbagai gerakan bawah tanah, ikut terlibat langsung dalam detik-detik proklamasi kemerdekaan, dan menapaki hari-hari setelah kemerdekaan yang diperjuangkan dicapai, alangkah kaya nuansa hidup mereka. Kita yang hidup dalam alam kemerdekaan ini tampak miskin dalam pengalaman dan kelihatan gagap untuk sekadar mengapresiasi perjuangan mereka dulu. Di dunia ke-wartawanan yang penuh *passion* inilah S.K. Trimurti bertemu Sayuti Melik, wartawan yang lebih senior kemudian mememinangnya. Bagi generasi sekarang, sulit membayangkan bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia pada masa itu, apalagi membayangkan para tokoh pergerakan politik yang berada dalam pengawasan mata-mata polisi pemerintah kolonial Belanda. Memang arsip penting, penulisan kembali sejarah, film dokumenter, novel, cerita pendek, biografi, dan film-film yang sengaja dibuat berdasarkan sejarah dan kehidupan tokoh-tokoh pada masa lalu.

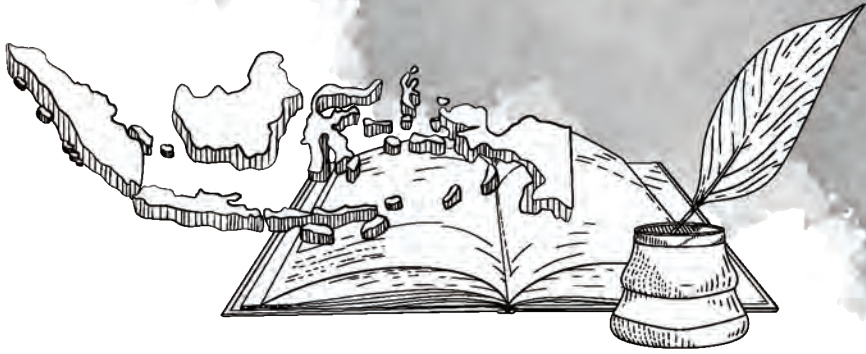
S.K. Trimurti wafat 20 Mei 2008 dan Sayuti Melik wafat 27 Februari 1989; adalah dua orang yang menjadi pelaku sejarah, tidak hanya di pinggiran, tetapi di jantungnya. Penjara bukan hal yang ditakutkan, konon keduanya selalu menyiapkan sebuah koper di rumah jika

sewaktu-waktu ditangkap mereka sudah siap. Keduanya bisa digolongkan sebagai bagian dari Gerakan Kiri, dalam pengertian sejarawan Harry Poeze yang mendedikasikan hidupnya untuk meneliti dan menulis tentang Tan Malaka dan Gerakan Kiri di Indonesia. Keduanya sudah aktif ketika PKI melakukan pemberontakan terhadap kolonial Belanda tahun 1926, Sayuti Melik termasuk yang dibuang ke Digul (1927–1933) menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diketuai Soekarno, termasuk pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, lalu mengetik naskah proklamasi. S.K. Trimurti dan Sayuti Melik juga berada dalam pusaran konflik yang terjadi di antara elite politik pada saat Peristiwa Madiun tahun 1948: Sukarno, Hatta, Sjahrir, Nasution, Musso, Amir Sjarifuddin, Tan Malaka. Pada ontran-ontran tahun 1965, mereka pun tidak jauh dari pusat gempa yang terjadi.

Gerakan Kiri, Golongan Kiri, apa dan siapa sesungguhnya mereka? Saya meraskan ada sebuah *grey areas* (wilayah abu-abu) ketika menyebut gerakan dan golongan kiri ketika begitu banyak orang mati karena dianggap sebagai orang kiri. Rasanya, ada yang salah (*a fault line*) ketika yang abu-abu dalam sekejap menjadi hitam-putih. Dalam sebuah kesempatan ngobrol dengan Harry Poeze sambil makan siang di ruang seminar KITLV di Leiden, Harry Poeze mengiyakan ketika saya kemukakan kegelisahan saya tentang keberadaan “*a political fault line*” di wilayah abu-abu yang bisa mematikan banyak orang itu.

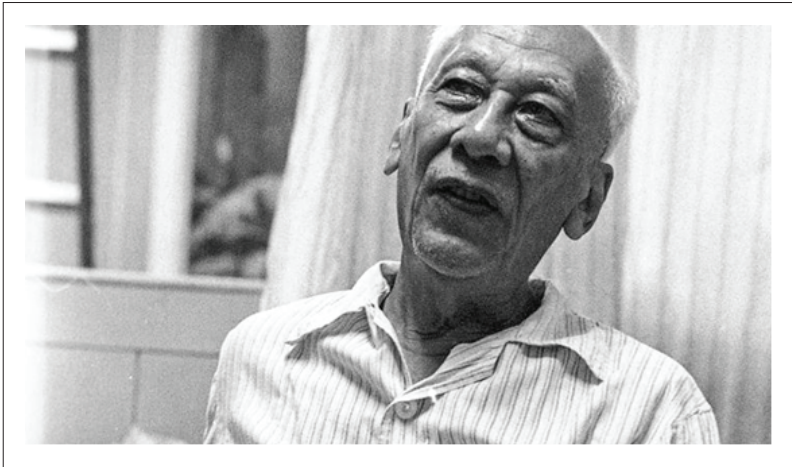


Buku ini tidak diperjualbelikan.



Slamet Iman Santoso

Slamet Iman Santoso, biasanya dipanggil Pak Slamet, lahir 7 September 1907 dan wafat 9 November 2004; adalah seorang psikiater atau dokter jiwa. Ketika tahun 1952 diminta oleh Bung Hatta, wakil presiden, untuk memberikan orasi di ITB yang saat itu menjadi bagian



Sumber: Anoda (2020)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dari Universitas Indonesia. Pak Slamet memilih menyampaikan hasil pemikirannya tentang dunia pendidikan, khususnya bagaimana pendidikan bisa mencapai tujuan untuk menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat (*the right man in the right place*). Gagasannya itu menjadi awal mula perintisan pendidikan psikologi di Indonesia. Menurut Pak Slamet, melalui ilmu psikologi bisa dikenali watak seseorang dan pekerjaan apa yang cocok untuk watak seseorang.

Sebagai pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Pak Slamet kemudian mendirikan program pendidikan asisten ahli psikologi di bawah fakultas kedokteran. Pada tahun 1960, pendidikan sarjana psikologi ini secara resmi berdiri sendiri sebagai Fakultas Psikologi UI yang kita kenal sekarang. Sebagai pendiri dan dekan pertama Fakultas Psikologi UI, Pak Slamet adalah pionir dalam pengembangan ilmu psikologi di Indonesia. Berlatar belakang sebagai seorang psikiater yang merupakan cabang dari ilmu kedokteran, melihat psikologi meskipun berdekatan dengan psikiatri, sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri. Melalui kiprahnya, kita melihat bagaimana Pak Slamet adalah seorang ilmuwan sejati dan sangat menyadari terdapat batas-batas antardisiplin ilmu pengetahuan yang tidak begitu saja bisa diterabas. Psikologi sebagai sebuah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia harus mampu mengembangkan metode ilmiahnya sendiri yang bagi Pak Slamet merupakan sebuah tantangan tersendiri.

Sebagai seorang ilmuwan, Pak Slamet mengerti bahwa untuk memahami tingkah laku manusia, psikologi membutuhkan bantuan disiplin ilmu-ilmu lain yang sama-sama melihat manusia dalam keutuhan. Salah satu disiplin ilmu yang bagi Pak Slamet sangat penting bagi psikologi adalah filsafat, khususnya filsafat manusia. Untuk itulah Pak Slamet meminta Prof. Beerling, seorang ahli filsafat untuk mengajar di Fakultas Psikologi. Ketika Prof. Beerling harus kembali ke Belanda, Pak Slamet meminta Prof. Driyarkara untuk menggantikannya. Ketika Prof. Driyarkara wafat, kedudukannya sebagai pengajar filsafat digantikan oleh Fuad Hassan lulusan pertama Fakultas Psikologi UI yang minat utamanya memang filsafat. Fuad Hassan juga menggantikan Pak Slamet sebagai dekan ketika Pak Slamet pensiun. Meskipun tidak menjadi dekan lagi, Pak Slamet tetap aktif di Fakultas Psikologi se-

lain berbagai kegiatan lain yang diembannya di UI, antara lain sebagai Pembantu Rektor Bidang Akademis di bawah Rektor Syarif Thajeb dan Sumantri Brojonegoro. Sumantri wafat pada tahun Pak Slamet diangkat sebagai Rektor sampai digantikan oleh Mahar Mardjono 1973 menjelang Peristiwa Malari 1974.

Salah satu yang tidak pernah dilepaskannya adalah kedudukan sebagai ketua tim seleksi penerimaan mahasiswa baru yang saat itu mulai dilakukan secara serentak dengan menggunakan stadion olahraga Senayan. Kekukuhannya dalam memegang prinsip bahwa mahasiswa harus diseleksi dengan benar mendorong Pak Slamet untuk mengawasi dan mengendalikan langsung proses penerimaan mahasiswa baru ini. Pak Slamet menganggap bahwa proses seleksi yang benar akan menyaring para calon mahasiswa menjadi calon-calon sarjana yang diharapkan pada saatnya nanti menjadi orang tepat di tempat yang tepat (*the right man on the right place*).

Keteguhan dalam melihat sentral pendidikan bagi kemajuan bangsa dan negara dibuktikan dengan diterimanya kedudukan sebagai wakil ketua sebuah tim yang dibentuk pemerintah saat itu untuk menyusun konsep pendidikan nasional yang diketuai oleh Menteri Pendidikan saat itu, Daoed Joesoef. Tugas itu bukan merupakan tugas yang ringan di usia beliau yang sudah sepuh, namun telah diselesaikan dengan baik. Dalam sebuah kesempatan, beliau mengatakan silakan pemerintah memutuskan mau dipakai atau tidak konsep yang telah disusunnya dengan susah payah itu. Meskipun bukan orang yang terlibat dalam dunia politik, Pak Slamet menyadari bagaimana politik bekerja dan dalam beberapa kesempatan terlihat sikap sinis yang beliau tidak bisa sembunyikan terhadap tingkah laku para politisi. Di kampus, terutama di Fakultas Psikologi UI, meskipun sudah resmi pensiun, Pak Slamet berusaha mengajar, antara lain dalam kuliah yang dia sebut sebagai *studium generale*.

Dalam kuliah umum ini, materi yang diberikan adalah sejarah ilmu pengetahuan. Kumpulan kuliah umum ini ternyata kemudian ditulis kembali dan diterbitkan menjadi sebuah buku sejarah ilmu pengetahuan. Tidak lama setelah buku ini terbit, sebuah tulisan muncul dan mengkritik beberapa bagian dari isi buku yang dianggap keliru.

Penulis kritik ini adalah Profesor Saleh Iskandar Poeradisastra, seorang mantan Tapol Pulau Buru, yang ahli dalam sejarah dan kesusastraan. Yang sangat menarik, ternyata Pak Slamet menerima kritik terhadap buku dan tanpa ragu-ragu meminta agar bukunya dicabut dari peredaran sampai dia perbaiki bagian yang dinilai keliru tersebut. Saya kira Pak Slamet sampai wafatnya belum sempat memperbaiki naskah buku sejarah ilmu pengetahuan yang telah ditulisnya itu. Namun dari kasus ini, terlihat betapa tinggi nilai kejujuran dan integritas akademik bagi beliau. Bagi beliau kejujuran dan integritas pribadi adalah nilai tertinggi dalam hidup.

Di antara kalangan murid-muridnya di lingkungan psikologi, selalu terngiang ucapan beliau ini: “Jika seorang dokter salah mendiagnosis pasien, akibatnya pasien bisa mati, tetapi jika seorang psikolog salah mendiagnosis kliennya, kesalahan itu akan dipertontonkan seumur hidupnya”. Mengingat Pak Slamet ketika dunia pendidikan tinggi sedang didera oleh tata kelola yang *amburadul* dan kemunculan berbagai gejala yang mengindikasikan akal sehat sekarat, barangkali sangat penting untuk mengetahui bahwa pernah ada seseorang yang telah mengabdikan hidupnya untuk menegakkan integritas dan martabat akademik yang merupakan pilar utama bagi dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi itu.

Belum lama ini, secara berturut-turut *Majalah Tempo* melaporkan hasil investigasinya tentang plagiarisme (2020) dan obral doktor *honoris causa* (2021) sebagai contoh gejala dari tata kelola perguruan tinggi yang *amburadul*. Meskipun berbagai gejala yang muncul akhir-akhir ini punya akar sejarah yang panjang dari tak konsep pendidikan nasional yang tak pernah tuntas, namun kekisruhan dalam lima atau enam tahun terakhir ini bisa jadi berawal dari kehendak Presiden Jokowi sendiri yang menginginkan riset dan ilmu pengetahuan harus berguna secara langsung dan kongkrit dalam meningkatkan produktivitas ekonomi yang *diyakini* akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masih jelas dalam ingatan saya ketika kami berhasil mengundang Jokowi yang saat itu baru memenangkan pemilihan presiden untuk memberikan kuliah umum di LIPI dia menantang

apakah riset LIPI bisa menghasilkan jenis tanaman yang mempunyai produktivitas tinggi dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam periode pemerintahan yang pertama, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi disatukan dengan tujuan jelas untuk menyinergikan sumber daya yang terkumpul di universitas sehingga menghasilkan riset yang lebih produktif. Mungkin karena tidak jalan, pada periode pemerintahan yang kedua, kedua lembaga itu kembali dipisahkan. Pergeseran-pergeseran birokrasi yang menangani riset dan perguruan tinggi ini pastilah berdampak pada kekisruhan dan tata kelola pendidikan tinggi yang saat ini amburadul. Ada persoalan mendasar yang tampak perlu dibenahi secara sungguh-sungguh jika sebagai bangsa tidak ingin digolongkan sebagai *bangsa medioker*, bahkan tertinggal dari bangsa-bangsa yang lain.

Jika mau, tidak ada yang tidak bisa diperbaiki di dunia ini, termasuk membenahi dunia riset dan pendidikan kita betapapun *amburadulnya*. Mungkin pada momen-momen ketika dunia pendidikan, terutama pendidikan tinggi didera oleh berbagai skandal karena tidak ada integritas dan kejujuran akademik. Ada sisi baik kita mengingat kembali Prof. Slamet Iman Santoso dan membuka kembali jejak-jejak pikiran yang pernah beliau tuliskan dalam berbagai bentuk, antara lain konsepnya tentang sistem pendidikan nasional.



Buku ini tidak diperjualbelikan.



Sardono Waluyo Kusumo

Bagi mereka yang tidak memperhatikan dunia kesenian nama Sardono Waluyo Kusumo tentu tidak dikenal. Sardono tidak mungkin dilupakan jika orang mau mencari intelektual cum seniman yang melaku-



Sumber: Agustin (2016)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kan pemberontakan dari kungkungan tradisi kesenian Jawa dalam penciptaan tari. Seperti W.S. Rendra yang melakukan pembaruan dalam dunia teater sambil mengejek kebudayaan Jawa yang diibaratkan sebagai kasur tua; Sardono juga menjungkirbalikkan pakem tari Jawa dan menciptakan karya-karya tari baru yang membuat para penjaga kebudayaan Jawa geleng-geleng kepala.

Seperti juga W.S. Rendra, Sardono lahir di Surakarta, nama lain dari Kota Solo, Jawa Tengah; hidup dalam keluarga dengan tradisi kebudayaan Jawa yang kuat. Sardono memang tidak cocok belajar ilmu ekonomi di UGM sehingga kemudian memang terbukti *drop out*. Belajar tari Jawa klasik sejak kecil, menjadi penari andalan sendratari Ramayana yang pentas secara rutin di Candi Prambanan, Sardono tak pelak lagi tumbuh dengan seni tari sebagai darah dagingnya. Akan tetapi, Sardono bukan seperti kebanyakan penari Jawa klasik yang takut kwalat jika keluar dari pakem, tidak tahu dari mana datangnya, dia seperti tidak peduli lagi dengan pakem. Salah satu eksperimen awalnya, *Samgita Pancasona* meskipun dipuji karena semangat pembaruannya, konon sempat dilempari telur busuk saat dipentaskan di depan publik di kota Solo.

Setelah bereksperimen dengan *Samgita Pancasona* yang kontroversial itu, Sardono pindah ke Jakarta dan menemukan Jakarta sebagai tempatnya berkiprah, mereguk kemerdekaan total dalam menciptakan tari. Jakarta akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an memang sebuah kota yang aneh. Trauma dan residu peristiwa berdarah 1965 pastilah masih sangat kuat, tetapi geliat dan gelegak kreativitas seperti tak tertahankan dan tetap dalam bayang-bayang represi politik. Ali Sadikin, sebagai gubernur baru Jakarta yang penuh karisma itu tentu salah satu faktor, tetapi pasti ada banyak faktor lain. Kreativitas seniman dan intelektual seperti tak terbandung. Taman Ismail Marzuki menjadi kancha lahirnya berbagai pembaruan kesenian dan juga pemikiran. Pada masa ini kita catat berkembangnya *Majalah Tempo*, *Jurnal Pemikiran Prisma*, koran *Kompas*, LBH Jakarta, LP3ES, dan LSM-LSM lain.

Dalam suasana kebebasan berkreasi kota Jakarta awal tahun 1970-an dan 1980-an inilah Sardono W. Kusumo menciptakan karya-karya

tarinya yang mendunia. Karya-karyanya antara lain *Dongeng dari Dirah*, *Cak Rina*, *Hutan yang Merintih*, *Mahabutha*, *Meta Ekologi*, *Diponegoro*, *Passage Through The Gong*, dan *Soloensisolo*. Selain menata tari, Sardono juga melukis dan membuat film. Dalam sesi seminar International Gamelan Festival di Solo Agustus 2018 lalu, Sardono masih membiarkan rambut panjangnya tergerai, hanya tubuhnya tidak lagi langsing tampil sebagai pembicara layaknya ilmuwan, keluar dari perannya sebagai maestro tari. Sepanggung, antara lain dengan Jenifer Lindsey yang lembut, Sutanto Mendut yang urakan, dan Endo Suanda sebagai moderator, Sardono menceritakan perjalanan panjang melakukan riset. Cara yang ditempuh adalah hidup bersama berbulan-bulan di tengah masyarakat, tidak saja dengan masyarakat Bali, tetapi juga dengan masyarakat Dayak di Kalimantan dan masyarakat Asmat di Papua.

Sardono bukan penari atau penata tari biasa, kesadarannya sebagai cendekiawan sangat kuat dan baginya bergaul serta mengamati kehidupan langsung para petani, peladang, peramu, dan pemburu adalah satu-satunya cara untuk tidak saja memahami. Agar dapat melakukan empati total tidak saja hanya masuk dalam kehidupan keseharian, namun merasuk ke dunia dalam mereka. Sardono memahami bahwa kesenian tumbuh dalam kebudayaan sebuah masyarakat yang berlangsung pelan dan lama. Setiap masyarakat dan kebudayaannya betapapun kelihatan sederhana, sesungguhnya telah menghasilkan karya kesenian yang tak ternilai dan tak terbandingkan. Sardono dengan caranya menunjukkan betapa klise istilah “kearifan lokal” yang sering terdengar dari mulut birokrat atau peneliti tanpa memahami apa yang dimaksud sebenarnya.

Dalam seminar itu Sardono juga menunjukkan bahwa keraton meskipun makin tampak dekaden, dalam sejarahnya merupakan sumber kesenian dan kebudayaan yang berasal dari desa-desa; kreasi-kreasi yang menonjol dari desa-desa itulah yang kemudian diolah menjadi kesenian keraton. Lagi-lagi Sardono menunjukkan bahwa masyarakat desa, baik di mana pun, Jawa, Bali, Kalimantan, maupun Papua; yang sesungguhnya menjadi mata air (tuk) perkembangan dan kemajuan kesenian dan kebudayaan. Kesenian dan kebudayaan bukanlah sesuatu

yang terjadi secara instan dan menjadi muskil ketika kebudayaan di-
jadikan sebuah program atau proyek.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Sayogyo

Penampilannya sederhana, suaranya halus seperti bergumam, namun senyum kecil dan sorot matanya mengisyaratkan sebuah kedalaman. Mengenang beliau berarti mengenang sebuah generasi ilmuwan masa lalu, sejenis aristokrasi karena dimilikinya sebuah kualitas yang disebut



Sumber: Adicondro (2012)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

oleh seseorang *Kompas*, Swantoro, sebagai asketisme. Saya kira, Sayogyo tidak hanya memiliki asketisme, semacam panggilan untuk terus mencari kebenaran, namun kebenaran ilmiah yang dicarinya tidak berada di jalan sunyi, tetapi dalam keramaian pasar di mana kemiskinan dan ketidakadilan riuh rendah.

Di negeri ini, tidak banyak ilmuwan yang namanya tidak hanya terus dikenang, tetapi seperti tidak berhenti memberi inspirasi bagi generasi muda yang ingin meneladaninya. Sebuah pilihan yang tidak mudah ketika zaman berubah dan asketisme adalah sebuah kemewahan yang makin mahal harganya. Perubahan sosial dan politik memang akan terus berlangsung dan tantangan bagi mereka yang bekerja di dunia ilmu-ilmu sosial sudah pasti akan makin rumit dan meminta ketelitian dan ketekunan baru, yang lebih kreatif dan imajinatif.

Sayogyo meniti karier sebagai peneliti di bidang yang sesungguhnya sangat vital di negeri ini, namun sekarang makin ditinggalkan, seperti dunia pertanian dan pedesaan. Secara sempit mungkin sosiologi bisa dianggap sebagai disiplin keilmuannya. Menjadi asisten sekaligus murid Prof. Wim Wertheim, seorang ahli sosiologi Belanda yang meyakini sosialisme adalah jalan ideologis yang tepat bagi negara-negara pascakolonial seperti Indonesia, membuat Sayogyo dekat dengan Soekarno dan bersimpati mendalam terhadap gerakan-gerakan progresif di negeri ini. Sayogyo, yang saat itu masih bernama Kampto Utomo, bersama Sediono Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, adalah pewaris garis Wertheim dalam tradisi dunia ilmu-ilmu sosial, yang semenjak ditinggalkan Belanda memasuki babak baru yang lebih positivistik, pengaruh dari ahli-ahli ilmu sosial Amerika dan Australia.

Disertasi doktornya tentang migran spontan di Way Sekampung, Lampung (1975) didasarkan pada penelitiannya pertengahan tahun 1950-an membuktikan bahwa migrasi dari Jawa ke luar Jawa sebetulnya tidak perlu melalui transmigrasi yang sering menjadi sarang korupsi dan ditumpangi berbagai kepentingan itu. Disertasi itu juga memberikan petunjuk penting tentang terbentuknya komunitas-komunitas baru dan implikasi-implikasi sosial politik yang sejak awal perlu menjadi perhatian pemerintah, jika tidak ingin konflik komunal terjadi antara pendatang dan penduduk setempat, seperti yang saat ini sering

terjadi di Papua. Rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan sudah hampir pasti akan mendorong terjadinya migrasi spontan untuk mencari peluang ekonomi yang lebih baik. Belajar dari studi Sayogyo di Lampung, perencanaan sosial (*social planning*) perlu dilakukan untuk mengantisipasi implikasi-implikasi sosial politik dari migrasi penduduk yang bisa saja berlangsung secara besar-besaran dan tidak terkendali. Masalahnya, hasil riset sosial biasanya kalah cepat dengan perubahan sosial yang terjadi.

Sayogyo, juga Gunawan Wiradi melewati masa sulit karena dianggap Soekarno, ketika kampus IPB tempat mereka bekerja memasuki periode “pembersihan politik” pasca-1965. Sempat menjabat sebagai rektor IPB, tetapi diberhentikan. Dengan berbagai tantangan yang dihadapi Sayogyo, bersama Sediono Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi terbukti “*survived*” dan meneguhkan sebuah kelompok ilmuwan kritis melalui riset-riset dengan bendera Survei Agro Ekonomi (SAE). Kelompok ini memilih untuk menekuni dinamika kehidupan kaum buruh tani yang makin terdesak kedaulatan hidupnya akibat merangseknya kapitalisme dalam seluruh sendi kehidupan sosial ekonomi setelah tamatnya gerakan-gerakan progresif di tahun 1965.

Riset sosial dalam rezim otoriter barangkali lebih gampang, dalam arti yang boleh dan yang tidak boleh cukup jelas “*boundaries*”-nya, tetapi dalam rezim-rezim semi-otoriter pasca-1998, menjadi lebih kabur batas-batasnya dan salah paham tentang apa yang disebut sebagai kebebasan akademik lebih mudah terjadi. Ketika para intelektual publik dan gerakan masyarakat sipil menganggap bahwa ruang publik telah makin terbuka, menjadikan over ekspektasi mudah terjadi dan ekspresi kebebasan dihadapkan pada “*real politics*” dan menemui jalan terjal. Dalam dunia riset yang segalanya masih serba tanggung, tidak mengherankan jika kebebasan akademik masih dianggap barang mewah oleh penguasa. Akan tetapi, justru di sini dilemanya, mungkinkah dunia riset yang sehat berjalan tanpa kebebasan akademik, tanpa jaminan bagi yang memilih untuk berpikir kritis ketika ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosial masih menjadi warna dasar lanskap politik kita?

Jokowi adalah seorang negarawan pragmatis yang memandang riset tidak lebih sebagai sebuah alat untuk membantu mencari solusi dari masalah-masalah mendesak yang dihadapi bangsa Indonesia. Pada sebuah pagi, saat masih berkantor di balai kota DKI, tidak lama setelah dinyatakan memenangkan pemilihan sebagai presiden, kami mengundang beliau ke LIPI untuk memberikan semacam kuliah umum, sambil mengingatkan bahwa LIPI secara kelembagaan berada langsung di bawah presiden. Dalam kuliah singkatnya itu Jokowi antara lain menantang peneliti LIPI, “Bisa enggak menanam *sorghum* yang tingginya 2 meter dan dipanen 3 kali?”. Belum lama ini, dalam sambutannya pada rapat koordinasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) lembaga baru yang dibentuk untuk mengintegrasikan seluruh riset agar efektif dan efisien Jokowi kembali menantang “Bisa enggak dunia riset membantu menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa?”.

Apa yang telah disumbangkan Sayogyo dalam membantu menyelesaikan persoalan bangsa melalui riset yang dilakukannya? Persoalan bangsa sangat banyak, mulai dari yang sangat konkret, seperti mencegah wabah penyakit atau meningkatkan produksi pertanian; sampai yang sangat abstrak seperti meningkatkan kesadaran bela negara atau menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai orang yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap nasib buruh tani yang miskin dan makin kehilangan kedaulatannya, saya kira komitmen Sayogyo melakukan riset untuk mencari solusi bagi persoalan bangsanya, tidak perlu dipertanyakan lagi. Ketekunannya melakukan riset tentang kemiskinan berhasil menemukan sebuah metode sederhana untuk menentukan garis kemiskinan. Dengan empati yang dalam terhadap nasib petani gurem, Sayogyo bisa menunjukkan betapa program pemerintah yang bermaksud baik untuk pemerataan hasil pembangunan justru bisa menjadi masalah karena konsep yang dipakai tidak tepat dan salah menentukan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran.

Pemerintah sering salah paham karena menganggap telah melakukan kebijakan yang baik demi rakyat, namun sebuah riset menunjukkan temuan yang berbeda dari apa yang diklaim sebagai telah dihasilkan dengan baik oleh pemerintah. Sayogyo dengan perspektif yang memihak rakyat miskin menunjukkan bahwa modernisasi yang

dilakukan oleh Orde Baru, yang dikenal sebagai revolusi hijau, intinya adalah perubahan dalam berbagai aspek teknologi pertanian. Revolusi hijau ini justru menghasilkan apa yang oleh Sayogyo disebut sebagai “*underdevelopment*”. Hal ini karena dianggap bersuara miring, monografinya “*modernization without development*” sempat dilarang untuk disebarluaskan.

Presiden Jokowi dan pembantu-pembantunya, perlu memiliki wawasan yang tidak cupet tentang riset untuk mencari solusi bagi persoalan bangsa, dalam arti bahwa riset yang menghasilkan kritik juga diperlukan. Dunia riset yang sehat, yang saat ini diharapkan dari dibentuknya BRIN, sudah seharusnya didasari oleh definisi tentang riset dalam pengertiannya yang bersifat ilmiah-akademis, bukan politis-ideologis. Landasan ideologis dan kebijakan politik sangat penting untuk memilih prioritas dan arah dunia riset merupakan keharusan, tidak berarti kebebasan akademik dan berpikir kritis harus diberangus. Dalam sebuah kesempatan Sayogyo mengatakan bahwa sebuah riset yang baik tidak selalu harus menghasilkan sebuah solusi, tetapi menghasilkan deskripsi yang akurat tentang duduk perkara sebuah persoalan yang sedang dihadapi sudah merupakan hasil riset yang baik.



Buku ini tidak diperjualbelikan.



Semsar Siahaan

Ketika Taman Ismail Marzuki (TIM) direnovasi tahun 1993, Semsar Siahaan, mengubah bangunan yang berantakan itu menjadi media instalasi ekspresi seni rupanya. Kebetulan, saat TIM sedang porak-porand



Sumber: Sitompul (2018)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

da itu, bersamaan dengan berlangsungnya Biennale Senirupa. Ekspresi berkesenian Semsar di mata saya mengingatkan karya-karya seniman zaman perjuangan, yang berkesenian sebagai alat perlawanan terhadap ketidakadilan, untuk merebut kemerdekaan. Lukisan-lukisan Semsar selalu menggambarkan wajah-wajah yang penuh semangat di satu sisi dan figur-figur buruk birokrat dan tiran di sisi lain. Pertentangan kelas selalu ditampilkan sebagai tema dari lukisan-lukisannya.

Bagi Semsar, kemerdekaan dan keadilan bukan bagi si seniman sendiri, melainkan bagi rakyat. Hal itu tampaknya menjadi credo keseniannya. Di dinding tembok-tembok TIM yang tinggal setengah badan itu, selain goresan kasar kuasnya dalam lukisan-lukisan realis dan surealis itu, tertulis berbagai kata-kata antiposmo, yang saat itu juga mulai menjadi mode seniman dan intelektual Indonesia. Semsar seperti menggebrak dunia kesenian dan intelektual untuk kembali melihat kenyataan yang ada, masyarakat yang tertindas dan miskin.

Di lantai yang sedang dibongkar itu Semsar membuat kubangan dan didasarnya dia bentuk sosok-sosok seperti mayat bergelimpangan. Saat Semsar membentuk torso-torso dalam pameran yang diberi nama “Penggalian Kembali” itu, saya menyaksikan Sardono W. Kusumo, didampingi istrinya Amna, asyik memainkan *handycam*-nya, merekam apa yang sedang berlangsung di situ. Kalau itu terjadi sekarang mungkin cukup direkam dengan HP seperti saya selalu lihat Tanto Mendut merekam kegiatan rekan-rekan lima gunungnya.

Semsar Siahaan meninggal dalam usia muda di Bali setelah sebelumnya tinggal di Kanada sehabis mengalami pengalaman-pengalaman getir di tanah airnya sendiri. Kakinya patah kena *gebug* tentara ketika bersama penyair W.S. Rendra dan lain-lain melakukan demo menentang pemberedelan majalah *Tempo*, *Editor*, dan *Detik* Juni 1994 di depan kantor Departemen Penerangan di Jalan Merdeka Barat. Luka dan tulang kaki yang retak membuatnya harus berobat cukup lama dan menggunakan kruk untuk berjalan. Jenazah Semsar dimakamkan di Bengkel Teater Rendra di Cipayung Bogor.

Membaca potongan-potongan berita tentang riwayat hidupnya, saya membayangkan Semsar sebagai perupa yang memilih jalan akti-

visme sebagai panggilan hidup. Jalan aktivisme berarti melakukan aksi konkret yang dia tahu penuh risiko. Ketika masih menjadi mahasiswa di jurusan Seni Rupa ITB, dia membakar patung dosen yang menurutnya mencerminkan sebuah hipokrisi. Kejadian yang menghebohkan itu sontak membuat namanya terkenal sebagai mahasiswa dan pelukis muda pemberang.

TIM yang dibangun Ali Sadikin, Gubernur DKI yang diangkat oleh Soekarno sebelum di kudeta Soeharto, hari-hari ini sedang didekonstruksi meminjam istilah kaum posmo oleh Anies Baswedan, Gubernur DKI yang memenangi pemilihan dengan mengendarai politik identitas. Pembongkaran TIM yang ditentang banyak seniman karena ingin diubah menjadi hotel dan mal memperlihatkan rendahnya cita rasa seni sang gubernur. Kisruh yang terjadi di TIM, hanyalah salah satu saja dari beberapa kisruh yang terjadi setelah Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Sebelumnya ada kisruh Aika-Aibon yang lucu, menyusul kisruh banjir tahun baru yang terus mengundang perdebatan tidak bermutu, naturalisasi apa normalisasi sungai, melupakan korban banjirnya sendiri. Kisruh paling hangat adalah heboh penebangan pohon dan akan digelarnya balap mobil Formula E di lapangan Monas. Ketika sebagian warga Jakarta masih terus dilanda banjir, keinginan gubernurnya menggelar balap mobil dengan anggaran negara miliaran dengan cara merusak lingkungan dan menggusur cagar budaya, adalah kebijakan konyol.

Akan tetapi, Anies Baswedan bukan orang bodoh, dia doktor ilmu politik dari Amerika Serikat, baginya ini memang strategi ninabobo, mengalihkan perhatian publik pada ilusi komodernan, melupakan kondisi riil yang memerlukan langkah konkret meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Anies Baswedan memang bukan orang yang cocok untuk menjadi pejabat publik, dia terbukti memang tidak memiliki kemampuan untuk membenahi Jakarta.

Saya membayangkan jika Semsar masih hidup pastilah ia akan melibatkan diri dalam gerakan perlawanan terhadap pembodohan publik ini. Hampir bisa dipastikan dia akan bergabung dengan para

seniman yang memprotes pembongkaran TIM dan dia juga akan terlibat dengan gerakan mereka yang ingin menyelamatkan lingkungan cagar budaya dan kawasan hijau di seputar Monas.

Kepedulianya terhadap lingkungan tidak saja dia tuangkan dalam kanvas, tetapi juga bergabung dengan Sekretariat Kerjasama Perlindungan Hutan Indonesia (SKEPHI) pada tahun 1980-an, yaitu sebuah LSM progresif yang dipimpin oleh mantan aktivis ITB, Indro Tjahjono. Saat itu kita tahu bahwa kerusakan hutan belum separah sekarang dan gerakan penyelamatan lingkungan terbukti tidak mampu menahan laju penebangan hutan tropis ketika hutan-hutan dikonversi menjadi kebun kelapa sawit. Saat ini, hutan-hutan yang tersisa di Papua tinggal menunggu waktu saja untuk dihabisi. Gerakan masyarakat sipil, baik atas nama pelestarian lingkungan maupun penyelamatan komunitas adat, mungkin sudah waktunya mengaca diri, tidakkah perlu dicari cara dan strategi perlawanan yang lain?

Mengingat kembali Semsar Siahaan, dengan wajah legam dan rambut hitam ikal serta sorot matanya yang tajam mengiris; seperti menghidupkan kembali hasrat dan kerinduan kita akan sebuah gerakan kesenian yang melebur dan meluluhkan diri dengan gelora denyut nadi rakyat. Rakyat, sebuah entitas sosial yang sesungguhnya tidak pernah jelas, siapa yang dimaksud dengan kata rakyat itu. Hari ini, masihkah kita percaya dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat? Reformasi politik yang tadinya kita harapkan bisa mengubah nasib rakyat, saat ini terbukti seperti meninggalkan rakyat. Di tengah agenda besar Jokowi untuk mengubah keadaan, tantangan terbesar yang dihadapinya justru datang dari para wakil rakyat yang lebih mengutamakan kepentingan elite partai politik yang juga mengatasnamakan kepentingan rakyat.

Rakyat yang kita rindukan, seperti Semsar Siahaan selalu mengidentikkan dirinya, mungkin adalah rakyat dalam ekspresinya semasa perjuangan kemerdekaan ketika tentara pun adalah laskar-laskar rakyat. Rakyat adalah sebuah imajinasi tentang geliat perlawanan merebut kemerdekaan, kebebasan, dan keadilan. Mungkin sudah waktunya kita meninjau kembali kata rakyat ketika makin hari makin kabur apa yang kita maksudkan sebagai rakyat. Penduduk? Warga negara? Atau siapa?

Hari-hari ini ketika imajinasi kita tentang rakyat seperti digambarkan oleh Semsar Siahaan dalam lukisan-lukisannya, telah makin kabur, didekonstruksi menjadi umat oleh politik identitas yang direkayasa oleh para “*ethnic entrepreneur*” untuk merebut kekuasaan, sebagai sebuah bangsa kita sejatinya sedang mengalami krisis identitas. Bukan hal yang aneh ketika para analis politik mulai berbicara tentang populisme, sebagai representasi dari “*the people*” kata Vedi Hadiz (Kanal Pengetahuan Fakultas Filsafat UGM, 2019). Tapi siapa “*the people*” dalam konteks Indonesia? Rakyat?

Kita, jangan-jangan sedang melewati sebuah tikungan tajam yang berbahaya, mungkin jika Semsar masih ada, dia akan menggebraknya melalui lukisan-lukisan yang abstrak surealis, tetapi sekaligus realis itu. Manubilis mungkin akan digambar lagi, namun dengan wajah para tiran yang baru, bukan saja muka politisi busuk, melainkan wajah tiran-tiran baru yang sering mengatasnamakan umat, “*the People*” ?



Buku ini tidak diperjualbelikan.



Sinta Nuriyah Wahid

Tumbuh dalam keluarga kiai dan pesantren yang kuat, Bu Sinta, demikian beliau biasa dipanggil, anak tertua dari delapan bersaudara, mengenal dengan baik apa yang disebut sebagai komunitas Islam



Sumber: Ali (2019)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dan masalah-masalah yang dihadapi. Kemudian, menjadi istri Abdurrahman Wahid, seorang *extraordinary* intelektual Muslim, pastilah menempatkan dirinya dalam sebuah situasi yang tidak selalu nyaman karena kontroversi yang hampir selalu menyertai sepak terjang Gus Dur, panggilan akrab Abdurrahman Wahid.

Bu Sinta, dugaan saya, sangat menyadari posisinya dan tidak ingin sekadar sebagai istri dari seorang tokoh nasional yang sempat menjadi Presiden Republik Indonesia. Namun, yang menjadikannya menarik adalah kiprahnya sebagai tokoh perempuan dalam sebuah masyarakat yang belum menempatkan perempuan dalam posisi setara dengan laki-laki. Terutama dalam komunitas Islam yang sering dipersepsi sebagai sebuah masyarakat yang masih menempatkan perempuan dalam posisi di bawah laki-laki. Membesarkan keempat putrinya menjadi dewasa dan memilih kiprahnya masing-masing; tentu dalam bayang-bayang kebesaran peran ayahandanya yang telah tergores begitu dalam sebagai tokoh pembaru dalam perjalanan sejarah bangsa.

Selain sebagai seorang ibu, perempuan kelahiran Jombang, 8 Maret 1948, ini adalah seorang yang sejak muda telah berkecimpung di ruang publik, tidak saja untuk menambah penghasilan sebagai sebuah keluarga muda, tetapi juga dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Ketika masih tinggal di Jombang, selain mengajar, untuk menambah pendapatan keluarga, Bu Sinta dan Gus Dur tidak segan-segan untuk berjualan makanan-makanan kecil. Ketika sudah pindah ke Jakarta, Bu Sinta sempat bekerja di *Majalah Zaman* kemudian di *Majalah Tempo*, pada tahun 1970-an dan 1980-an, saat itu Gus Dur, suaminya, secara rutin menulis kolom-kolomnya yang penuh humor, antara lain, serialnya tentang para kyai sepuh NU yang dikupasnya dengan gaya jenaka. Dari lingkungan intelektual sekitar *Majalah Tempo* inilah bisa kita bayangkan dunia publik telah menjadi bagian hidup dari Sinta Nuriyah Wahid sejak muda.

Pada 1999, Bu Shinta bersama para aktivis perempuan Muslim yang lebih muda mendirikan Puan Amal Hayati, sebuah LSM yang bergerak seputar isu-isu perempuan. Melalui LSM inilah antara lain beliau membuat program-program yang bertujuan untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas untuk kaum perempuan. Akan tetapi, tidak

hanya itu, Puan Amal Hayati terbukti telah menjadi semacam platform berbagai kegiatan untuk merayakan keragaman dan memihak mereka yang terpinggirkan. Belum lama ini, Puan Amal Hayati merayakan ulang tahunnya yang ke-20 yang dirayakan pada salah satu kegiatan yang secara rutin dilakukan, yaitu acara buka puasa bersama yang memang selalu dilakukan setiap tahun secara berkeliling dari satu kota ke kota lain.

Mungkin pilihan ibu empat anak ini untuk terlibat secara langsung ke dalam berbagai upaya untuk mengubah keadaan, terutama yang dihadapi oleh kaum perempuan merupakan sesuatu yang tidak terbayangkan oleh banyak orang. Keputusan untuk belajar lagi di program studi gender di Universitas Indonesia memperlihatkan kesadaran akan perlunya memperluas cakrawala dengan menambah khazanah pemikiran dari barat.

Sebagai anak pesantren khazanah pemikiran yang berbasis pada Kitab Kuning tentulah sangat kuat. Inilah mungkin yang membuat Sinta Nuriyah Wahid memiliki otoritas, yang tidak dimiliki oleh para aktivis muslim segenerasinya atau yang lebih muda dalam melakukan penafsiran terhadap teks-teks yang ada dalam kitab suci dan hadis nabi, khususnya yang menyangkut posisi perempuan. Ketika konservatisme seperti mendung yang menutup cakrawala dan ortodoksi sedang melanda masyarakat, kiprah dan sosok Sinta Nuriyah Wahid yang selalu tampil dengan wajah segar dengan kerudung sederhana yang sejak lama telah biasa dipakai umumnya perempuan di negeri ini, seperti mengingatkan bahwa tidak selayaknyalah jika keberagaman mematikan keragaman dan upaya-upaya untuk keluar dari ketertindasan dan ketertutupan tidak dibuka untuk memperbaiki keadaan.



Buku ini tidak diperjualbelikan.



Sucoro

Meskipun Borobudur telah menjadi milik banyak orang dan bahkan telah menjadi milik dunia, ada satu orang yang bagi saya memiliki hubungan khusus dengan Borobudur. Sucoro atau Mas Coro, yang di



Sumber: Sukandar (2021)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

sebuah senja, ketika menemani saya berjalan-jalan di halaman Borobudur, sambil menunjuk tempat penjualan tiket masuk, berkata “Dulu rumah Bapak saya di situ, di tempat yang sekarang jadi tempat penjualan karcis”. Betapa dekatnya, bagaimana rasanya tidur setiap malam di samping Candi Budha yang merupakan cermin ketinggian sebuah peradaban umat manusia itu.

Segera mesin waktu di kepala saya seperti memutar kembali ke tahun 1950 dan 1960-an, ke foto-foto hitam putih Borobudur yang di sana-sini masih memperlihatkan puing-puing candi berserakan, di beberapa bagian bahkan dililit pohon beringin yang tumbuh liar. Juga foto-foto pengunjung, umumnya berpakaian Jawa, prianya dengan *blangkon* dan surjan, sedangkan perempuannya memakai kain jarik dan kebaya, ada yang berkerudung. Sebagian dari mereka duduk lesehan dengan menggelar tikar makan bekal bawaannya yang mungkin dimasak sendiri sebelum berangkat. Ada sebuah foto, katanya dibuat pas hari lebaran, merayakan lebaran sambil berwisata di sebuah candi Budha, di zaman itu.

Foto-foto itu memang kami kumpulkan tahun 2012–2015 karena sering ke Borobudur, mencoba mengamati bagaimana masyarakat di sekitar candi Borobudur merespons apa yang berlangsung di seputar candi. Banyak yang tidak tahu bagaimana Borobudur menjadi seperti tertata rapi sebagaimana terlihat hari ini. Pada tahun 1970-an dan 1980-an sebuah proyek raksasa yang bernama restorasi Borobudur, telah menggusur penduduk yang sudah turun-temurun bermukim di sekitar Candi Budha itu keluar kawasan candi. Saat itu katanya untuk membuat candi Borobudur menjadi taman nasional. Dalam proyek raksasa yang dilakukan dengan cara paksa itu, keluarga Sucoro termasuk yang tergusur bersama ribuan keluarga lainnya.

Kisah penggusuran paksa ribuan penduduk demi sebuah proyek nasional ketika belum ada media sosial seperti sekarang, adalah sebuah drama yang dipentaskan di teater tertutup, hanya penonton dan pemainnya yang tahu. Sucoro yang saat itu masih pemuda belasan tahun adalah pemain sekaligus penonton dari resistansi terhadap proyek restorasi yang dilakukan secara paksa oleh pemerintahan Soeharto. Ingatan, foto-foto, dan klipng koran yang disimpannya; menjadi ba-

gian dari arsip sejarah proses penataan sebuah cagar budaya terbesar yang dimiliki negeri ini. Hasil restorasi paksa itu terbukti membuahkan hasil dengan dijadikannya Borobudur sebagai *World Heritage* menurut kriteria UNESCO.

Yang kita lupakan adalah nasib keluarga-keluarga yang digusur dengan paksa itu. Candi Borobudur menjadi megah, sebuah hotel mewah dibangun di pelatarannya, orang masuk harus membeli karcis, turis mancanegara berbondong-bondong datang, lahan sekitar menjadi mahal karena orang berebut mendirikan hotel, restoran, dan berbagai aktivitas bisnis lainnya. Namun, sebagian besar penduduk yang berusaha mempertahankan hidup di sekitar Borobudur hidupnya tetap pas-pasan, kalau tidak dibilang miskin. Dalam proses perubahan, baik fisik maupun sosial di dan seputar Borobudur itu, Sucoro menjadi sebuah ikon penting yang tak tergantikan.

Sucoro adalah sebuah ikon resistansi dan sekaligus resiliensi. Resistansinya sudah dibuktikan dengan aksi-aksi yang diikutinya menentang penggusuran paksa yang dialami bersama ribuan tetangganya. Ayahnya, bersama rekan-rekan yang melawan penggusuran bekerja sama dengan tokoh-tokoh, seperti Adnan Buyung Nasution dan Rendra bersama berbagai LSM yang praktis baru mulai tumbuh saat itu, seperti KSBH yang berkantor di Yogya, menggalang dukungan untuk melawan. Dalam arsip klipings koran bisa dilihat Sucoro muda yang gondrong duduk bersama Rendra dan para aktivis lainnya dalam sebuah pertemuan advokasi menentang penggusuran yang digalang saat itu.

Dalam usianya yang hampir 70 tahun sekarang ini, Sucoro tetap konsisten membiarkan rambutnya gondrong meskipun warnanya tidak lagi hitam, tetapi telah berubah menjadi mengilat keperakan. Rambut gondrong, seperti Che Guevara, adalah lambang resistansi dan resiliensi yang terus dia lakukan, praktis seorang diri, sepanjang hidupnya. Saat ini, Mas Coro tinggal dalam sepetak tanah dengan berbagai bangunan di atasnya, persis di tepi jalan di pinggir pagar halaman depan candi, di mana bersama istri dan anak-anaknya membuat warung dan bengkel motor sebagai sumber nafkah hidupnya. Tanah yang ditempatinya adalah juga cermin kekukuhan hatinya untuk tetap tinggal dekat candi,

tidak menjualnya sebagai aset yang saat ini pastilah bernilai ekonomi sangat tinggi.

Respons masyarakat terhadap berbagai perubahan yang berlangsung di dan seputar Borobudur tentulah beragam. Begitupun yang bisa digolongkan mereka yang terus melakukan resistansi. Borobudur adalah sebuah magnet raksasa yang mampu mengisap ribuan bahkan jutaan orang untuk mendekatinya. Sebagai sebuah warisan, Borobudur merupakan warisan yang terus hidup dan menghidupi orang-orang yang mendekatinya. Sutanto, atau Tanto Mendut, seorang seniman serba bisa yang memiliki galeri yang diberi nama Studio Mendut karena letaknya tak jauh dari Candi Mendut, semacam anak candi Borobudur; juga orang yang terisap, namun dengan caranya sendiri melakukan perlawanan alternatif terhadap komodifikasi dan desakralisasi Borobudur.

Tanto berhasil menggerakkan komunitas-komunitas kesenian yang tinggal di lereng-lereng bukit di sekitar Borobudur membuat festival kesenian rakyat yang diadakan secara rutin setiap tahun dengan tempat yang bergantian di lima gunung yang mengelilingi Candi Borobudur. Festival Lima Gunung dengan Tanto Mendut sebagai presiden seumur hidupnya, adalah bukti kesuksesan pengorganisasian secara kreatif resistansi dan resiliensi komunitas-komunitas kesenian rakyat tampil dengan penuh integritas dan harga diri di tengah makin gencarnya gempuran komersialisasi budaya untuk kepentingan pariwisata.

Sucoro, berbeda dengan Tanto Mendut yang meskipun kalau bicara terkesan seenaknya itu, namun menjadi bagian dari elite intelektual Indonesia, tidak memiliki potongan dan bahasa untuk menjadi bagian dari elite yang kosmopolitan seperti dinikmati Tanto Mendut itu. Mas Coro tidak memiliki kemewahan dan kekenesan sebagai budayawan atau elite intelektual Indonesia. Namun, justru di sana saya kira kelebihanannya. Sucoro yang lahir dan berkembang secara organik dengan Borobudur, baik sebagai candi batu maupun sebagai roh dari sebuah peradaban, mampu mengisap Borobudur secara *genuine* menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam tubuh dan jiwanya.

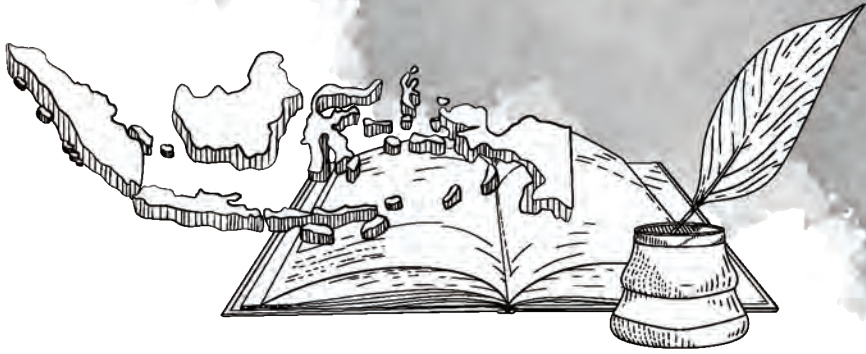
Jika Festival Lima Gunung seperti mengepung dan melawan komersialisasi Borobudur dari pinggiran, Sucoro melakukan resistansi

dan desakralisasi Borobudur justru dari dalam, di hatinya, di halaman Candi. Sebuah gelar kebudayaan yang ia namai Ruwat Rawat Borobudur yang setiap tahun diselenggarakan dengan bantuan kawan-kawan dekat dan anggota keluarganya, membuktikan kecintaan dan pengabdian yang tanpa pamrih terhadap Borobudur. Kelompok-kelompok kesenian yang tersebar di berbagai desa diajaknya berpentas. Tradisi, ritual, dan cerita-cerita rakyat yang telah menjadi legenda dan dilupakan diolah dan ditampilkan kembali dalam berbagai bentuk ekspresi kesenian dan kerohanian; sebagai bukti bahwa Borobudur adalah sebuah totalitas kehidupan yang sudah semestinya dirayakan.

Dalam menyelenggarakan acara Ruwat Rawat Borobudur Mas Coro seperti tidak peduli apakah pemerintah akan mendukung atau tidak, dia pun juga seperti tidak peduli apakah akan dianggap sebagai budayawan atau bukan, juga tidak ada kekenesan agar dianggap sebagai intelektual. Kalau ada pihak yang memberi dana atau dukungan, seperti tampaknya yang akan terjadi secara besar-besaran nanti di bulan Februari tahun depan; tidak akan membuat Mas Coro menjadi jumawa. Dia tetap hidup sederhana bersama keluarganya; sambil diam-diam menuliskan berbagai pengalaman dan pemikirannya menjadi buku. Paling tidak, seingat saya, sudah tiga buku tebal telah diterbitkannya. Suatu saat nanti, kita akan melihat Sucoro tidak hanya sebagai tokoh tradisi lisan, tetapi sebagai teks yang bisa kita baca kiprah resistansi dan resiliensinya terhadap komodifikasi dan desakralisasi Borobudur yang bakal makin besar di era pemerintahan Jokowi yang kedua ini.



Buku ini tidak diperjualbelikan.



Sumarsih

Saya belum pernah bertemu, saya hanya melihat fotonya, jika kebetulan *Kompas* meliput acara Kamisan yang setiap hari Kamis dia lakukan bersama para aktivis lainnya di depan Istana Merdeka. Dari informasi



Sumber: Suhendra (2020)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

yang saya baca dari Wikipedia (2020), aksi ini telah dimulai sejak tanggal 18 Januari 2007. Pemrakarsa acara ini tiga keluarga, yaitu keluarga Maria Katarina Sumarsih, keluarga Suciwati, dan keluarga Bejo Untung yang mewakili korban 65.

Jumat minggu lalu foto wajahnya saya lihat lagi *Kompas*, dengan rambutnya yang makin memutih seperti perak, berkaos oblong hitam, berkacamata dengan wajah yang mengekspresikan optimisme, di bawah payung hitam. Aksi Kamisan tidak mungkin ada tanpa *perseverance* dari orang-orang seperti Bu Sumarsih untuk terus melakukannya. Motivasinya jelas, meminta pertanggungjawaban negara terhadap pelanggaran yang telah dilakukan dalam kasus Trisakti, Semanggi, 1965, dan pembunuhan Munir. Putra Bu Sumarsih, Wawan (Bernardinus Realino Norma Irawan) mahasiswa Universitas Atma Jaya, tewas ditembak pada peristiwa Tragedi Semanggi. Ketika itu ribuan mahasiswa melakukan turun ke jalan menuntut Soeharto turun. Saat di Semanggi mahasiswa yang berasal dari berbagai kampus itu berhadapan dengan barisan polisi dan tentara yang menghalangi mahasiswa menuju kompleks parlemen di Senayan.

Melihat *Kompas* sering menampilkan foto wajahnya, barangkali memang Bu Sumarsih peserta aksi Kamisan yang paling konsisten sementara yang lain *on and off*, mungkin sudah bosan, bisa jadi tidak punya waktu atau sudah capek dan putus asa. Minggu lalu saja sudah aksi yang ke-626, tidak tahu aksi ini akan sampai kapan. Karena melihat tuntutanannya, mana berani rezim yang berkuasa bakal memenuhi. Masih ingatkan, SBY sesumbar, “Kasus Munir *is a test of history*”. Kebayang SBY ngomongnya pake bahasa Inggris, *fluent, elegant, and very convincing!* Akan tetapi, memang semua juga akhirnya tahu itu *cuman pepesan* kosong. *Evasive*, kata Mochtar Pabottingi dalam kolom opininya yang selalu tajam dan mendalam di harian *Kompas*. Jamie Davidson dalam buku barunya *Indonesia Twenty Years of Democracy* menyebutkan bahwa selama 10 tahun SBY berkuasa sebagai periode stagnasi.

Nah, sekarang *the test of history* itu memang jatuh ke sang pengusaha mebel yang menjadi presiden, Joko Widodo alias Pak Jokowi. Simpati Pak Jokowi terhadap para korban pelanggaran HAM pada awal tampaknya lebih *genuine*, meskipun ngomong Inggrisnya enggak

fluent, enggak *elegant*, tetapi nyaris secara resmi mengucapkan permintaan maaf kepada keluarga korban 65, tetapi terbukti kemudian seperti menarik ludah sendiri. Ada yang *nggandoli*, ada yang mungkin mengancam, jika permintaan maaf itu diucapkan. Ongkosnya, setelah dikalkulasi terlalu mahal. Kalkulasi, kata ini memang sering diucapkan oleh Jokowi. Namun, Jokowi juga tidak tega melihat Bu Sumarsih dan kawan-kawan, setiap hari Kamis kepanasan atau kehujan di depan istana. Pada tanggal 31 Mei 2018 Presiden Jokowi menerima Bu Sumarsih dan kawan-kawan di istana. Jokowi memang terkenal jago jika soal undang-mengundang mereka yang *ngeyel* enggak mau nurut. Caranya, diundang ke istana untuk ngobrol dan makan bersama. Biasanya taktik ini cukup ampuh, membuat yang tadinya *ngeyel* langsung kendor, lupa *ngeyel* lagi, meskipun cuma diajak makan rames atau lontong sayur di istana. Urusan biasanya beres dan ongkosnya juga pasti enggak mahal.

Masalahnya, saya kira, Bu Sumarsih bukan tipe orang *ngeyel*. Aksi Kamisan yang dilakoninya dengan konsisten, bukan lagi soal rasa kehilangan putra tercintanya yang tak mungkin bisa ditebus dengan apa pun. Aksi Kamisan itu, dalam tafsiran saya, memang telah dijadikan *laku-topo*, semacam tirakat panjang yang tidak lagi sekadar menutup, namun menjadi laku ibadah yang dijalannya tanpa pamrih, tanpa mengharapkan rasa kasihan dari orang lain, bahkan dari seorang presiden sekalipun. Bu Sumarsih saya kira tahu, bagi seorang presiden yang pada hakikatnya seorang pragmatis, mantan pebisnis, seperti Pak Jokowi, dikalkulasi dengan cara apa pun, hasilnya sama, kemahalan ongkosnya.

Jokowi yakin investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memakmurkan rakyat. Untuk mengundang investor, infrastruktur fisik harus digenjot, hukum sapu jagat harus dirancang, dan SDM yang terampil harus dipersiapkan. Ibu kota baru pun harus dibangun agar semua tidak menumpuk dan menjadi beban Jakarta dan Jawa. Membangun ibu kota baru dengan sendirinya akan mengundang investor, menciptakan lapangan kerja, dan secara perlahan-lahan tetapi pasti pusat gravitasi Indonesia akan bergeser dari Jawa ke luar Jawa, sebuah proyek besar yang selama ini gagal dilakukan

oleh rezim-rezim yang berkuasa sebelumnya. Ibu kota baru adalah *panacea*, obat mujarab segala penyakit.

Unprecedentedly, the test of history is now. Pandemi virus korona mengadang impian Jokowi tentang ibu kota baru dan segenap proyek ikutannya. Melihat kemampuan mitigasi terhadap bencana yang kita miliki hampir pasti bahwa kita akan menghadapi jalan terjal dan siap dengan tidak sedikit korban akan berjatuh. Jokowi yang selama ini melihat Tiongkok sebagai model, harus lebih serius lagi mengikuti jejak Tiongkok dalam memerangi masifnya penyebaran virus korona.

Apa yang dilakukan Bu Sumarsih, bukan seperti Sisyphus dalam mitos Yunani yang mendorong batu ke puncak gunung yang sampai di puncak batu akan menggelundung kembali dan dia akan mendorong kembali ke puncak dan begitu seterusnya. Bu Sumarsih, saya kira paham, tidak ada puncak itu, yang ada jalan landai, namun seperti tak berujung dan dia hanya bisa mendorong terus batu itu, tidak ada puncak, batu itu pun tidak akan menggelinding ke bawah, yang ada, dia tahu, mungkin semacam fatamorgana, di keluasan horison, semacam ufuk di timur, namun yang tidak pernah beranjak menjadi siang, apalagi malam.

Pelanggaran HAM, apalagi yang dikategorikan sebagai berat, di negeri ini tidak pernah berhasil ditempatkan sebagai persoalan kemanusiaan, seperti pernah berhasil dilakukan di Afrika Selatan atau di Jerman. Disadari atau tidak oleh elite politik kita, pelanggaran HAM berat masih ditempatkan sebagai persoalan politik, persoalan kekuasaan, yang memerlukan kalkulasi untung rugi, *cost and benefit*, bisa mengancam atau menggoyahkan kekuasaan. Kita gagal *move on* karena kita masih belum selesai dengan diri kita sendiri kata Agus Widjojo, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) yang ayahnya terbunuh menjelang subuh pada 1 Oktober 1965.

Dalam persoalan ini Tiongkok bukan model yang baik bagi Jokowi, Indonesia tidak punya partai rakyat yang bisa menopang kerja birokrasi. Indonesia juga tidak punya tentara merah yang siap menggilas para demonstran yang antipemerintah. Kemakmuran terbukti tidak bisa dipertukarkan dengan kebebasan bagi generasi muda di

Hongkong, mereka mati-matian melawan Beijing *at all cost!* Indonesia mungkin terlanjur berpretensi menjadi negara demokrasi ala barat dan terlanjur berpretensi menjunjung tinggi HAM, sementara Tiongkok tidak. Selain Tiongkok, tampaknya Jokowi terkesan dengan Singapura, mungkin lebih pada cara Lee Kuan Yew, yang sukses membangun secara bertahap negeri kota ini, ketika ekonomi beres baru memikirkan bikin gedung teater. Apakah generasi muda Singapura beda dengan rekan senenek moyangnya di Hongkong. Keduanya bisa dikatakan punya akar pada *sinic culture* peradaban yang disebut Samuel Huntington, jika kita percaya, bakal *clash* dengan barat, dengan liberalisme, demokrasi, dan HAM?

Demokrasi dan HAM memang barang impor, tetapi investasi juga barang impor, apa bedanya? Indonesia memang harus mencari jalannya sendiri. Jalan Kebudayaan? Pancasila? Di mana demokrasi dan HAM dalam Pancasila? HAM jelas tidak bisa disamakan dengan gedung teater. Jokowi harus menemukan formula dan ini memang soal pelik karena buat apa pembangunan kalau bukan untuk manusia. Jokowi memang harus lebih serius membaca Sumarsih.



Buku ini tidak diperjualbelikan.



Suprpto Suryodarmo

Tanpa terasa 100 hari sudah Suprpto Suryodarmo meninggalkan kita. Dalam tradisi Jawa biasanya diadakan upacara 100 hari (*nyatus*) untuk mendoakan arwah yang telah meninggal. Dalam bahasa Jawa yang



Sumber: Adi (2019)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

meninggal biasanya dipanggil dengan tambahan kata *suwargi*, jadi mendiang Suprpto Suryodarmo dipanggil sebagai *Suwargi* Suprpto Suryodarmo. *Suwargi* adalah kata lain dari “*suwargo*” yang artinya surga, nirwana, *heaven*.

Harus saya katakan terus terang bahwa pengetahuan saya tentang *ngelmu Jowo*, sesuatu yang beberapa kali saya dengar dari mulut Mbah Prpto, panggilan akrab Suprpto Suryodarmo dalam kesempatan bertemu beliau, tidak cukup mendalam. Dalam tafsir saya, orang Jawa memanggil yang telah wafat sebagai *suwargi* karena dalam pemahamannya, meninggal berarti kembali ke *sangkan paraning dumadi* (asal dan tujuan kejadian), *suwargo*, keheningan, dan kedamaian alam semesta.

Jasad Suprpto Suryodarmo dikremasi dan abunya dimakamkan tepat 40 hari setelah wafatnya. Empat puluh hari juga hari yang penting dalam tradisi upacara kematian orang Jawa. Meskipun sempat diupacarakan menurut keyakinan agama Budha pada pagi harinya, pemakaman abu menurut saya dilakukan dengan cara yang khas, sederhana, tetapi indah. Malam sebelumnya acara mengenang Mbah Prpto juga diadakan di Studio Mendut, sekaligus merayakan 17 tahun usia Festival Lima Gunung, antara lain dengan pagelaran wayang kulit oleh teman-teman dari Tutup Ngisor Merapi yang di-*pandegani* Mas Sitras Anjilin.

Di pemakaman umum yang letaknya tidak jauh dari bekas rumahnya dan padepokan Lemah-Putih, tempat dia kerap mengajarkan *Joged Amerta*, di pinggiran kota Solo, Mojosongo, makam Mbah Prpto yang berupa nisan semen cor segi empat sama kaki, dugaan saya 1x1 meter, berada dalam kerindangan segerumbul pohon jati muda yang meneduhkan. Iringan seruling dan gendang dari Galih, putranya, dan beberapa kawan, menyertai penaburan bunga dari pelayat yang berasal dari berbagai tempat dan negara, ditutup ucapan terima kasih dari Melati, putrinya, dan ajakan untuk makan siang bersama. Peristiwa pemakaman itu indah karena keluar dari kebiasaan yang telah kehilangan makna.

Mengenang 100 hari meninggalnya Mbah Prpto bagi saya berarti mengenang kehidupan seperti yang dimaknai oleh Mbah Prpto. Beta-

papun singkat perjumpaan saya dengan Suprpto Suryodarmo, seperti telah saya ceritakan dalam obituari yang saya tulis (Tirtosudarmo, 2019), beliau meninggalkan sebuah warisan berupa epistemologi baru tentang kejawaan. Saya juga berani menafsirkan bahwa epistemologinya sangat radikal karena mengembalikan makna kehidupan pada hal-hal yang bersifat ragawi, bukan yang ukhrawi.

Baginya yang ukhrawi harus disedot ke dalam yang ragawi. Epistemologinya menjadi baru karena secara radikal diam-diam telah menolak epistemologi Jawa lama yang meyakini bahwa sukmalah yang penting bukan raga. Segenap epistemologi Jawa mengajarkan bahwa manusia bisa “*ngrogo sukmo*” menerbangkan sukma dari raga. Raga juga diartikan sebagai sumber segala yang buruk, kasar, dan rendah; tempat bermuaranya hawa nafsu dan segala sifat yang buruk dari manusia. Untuk mencapai itu, manusia harus mampu “*ngrogo-sukmo*”, menghentikan semua gerak dalam keheningan total sujud-semadi.

Suprpto Suryodarmo, dalam tafsir saya memberontak dari tradisi cara memandang kehidupan (epistemologi) seperti itu. Dalam perjalanan hidupnya, seperti yang dikisahkan oleh orang-orang yang mengenalnya, Suprpto Suryodarmo semula berguru dan menekuni *Sumarah* dari pamongnya Sudarno Ong di Solo. Kemudian Suprpto Suryodarmo menolak untuk didapuk sebagai pamong, bahkan seperti keluar dari *Sumarah* dan mengembangkan tanpa jeda apa yang dipahami dan diolahnya sendiri. Itulah yang kemudian dia namakan sebagai *Joged Amerta*.

Joged Amerta, dalam tafsir saya adalah sebuah ajaran tentang cara, metode, atau strategi untuk dan dalam memaknai kehidupan. Buku kumpulan tulisan dari murid-murid ketika memperingati ulang tahun ke-70 dirinya yang diberi judul *Embodied Lives* merefleksikan dengan sangat tepat apa yang digagas oleh Suprpto Suryodarmo yang secara tekstual dia sebut sebagai *Joged Amerta*. Dalam tulisan saya yang terdahulu (“Remembering Suprpto Suryodarmo”) saya mengatakan terbangunnya semacam *vocabulary* yang khas Mbah Prpto sebagai hasil dari rangkaian proses pelatihan *Joged Amerta*. Yang menarik, *vocabulary* itu hampir semuanya dalam bahasa Inggris yang juga khas diciptakan oleh Suprpto Suryodarmo.

Ketika buku yang judul lengkapnya *Embodied Lives: Reflections on the influence of Suprpto Suryodarmo and Amerta Movement* (Bloom, Galanter, & Reeve, 2014) diluncurkan di Balai Soedjatmoko Solo, selain diskusi juga ada pementasan gerak dari Suprpto Suryodarmo sendiri. Mbah Prapto dengan wajah yang dilumuri warna hitam putih, baju dan celana serta destar hitam, perlahan-perlahan muncul dari tumpukan kayu dan ranting kering, menyibak-menguak dan bergerak merengkuh alam bebas, seperti anak sapi atau kambing yang baru lahir, menggeliat keluar, dari selaput ketuban induknya. Gerak-Obah-Urip, yang bersifat ragawi, adalah hakikat dan makna dari kehidupan, *an embodied life*, “kehidupan yang diperagakan”?

Buku itu sendiri berisi tulisan-tulisan yang menjadi testimoni mereka yang pernah belajar dari Suprpto Suryodarmo. Mereka berasal dari berbagai profesi dan latar belakang yang mendapatkan semacam pencerahan (*enlightenment*) setelah mengikuti dan mempraktikkan *Joged Amerta*. Buku ini sangat menarik karena ditulis oleh 30 orang yang berasal dari berbagai kebangsaan yang menunjukkan pengaruh luar biasa dari Suprpto Suryodarmo. Adakah orang Jawa lain, dalam konteks seperti ini, sebesar Suprpto Suryodarmo?

Dari sekian banyak tulisan yang dimuat dalam buku *Embodied Lives* itu, hanya ada satu tulisan dari orang Indonesia. Fakta ini harus dilihat sebagai autokritik bagi kalangan pemikir kebudayaan Jawa, apa makna dari fakta itu. Selain buku ini, ada beberapa buku lain tentang Suprpto Suryodarmo dan *Joged Amerta*, sebagian merupakan disertasi atau semula merupakan disertasi. Salah satu yang penting adalah *Amer-ta Movement of Java, 1986–1997: An Asian Movement Improvisation*, yang ditulis oleh Lise Lavelle (2015). Buku ini penting selain karena menuliskan secara rinci perjalanan hidup Suprpto Suryodarmo juga karena memberikan analisis yang tajam tentang apa yang diajarkannya.

Suprpto Suryodarmo hampir selalu membawa murid-muridnya untuk latihan *Joged Amerta* ke tempat-tempat yang memiliki jejak dari masa lampau, tempat itu bisa berupa lanskap alam maupun artefak arkeologis, seperti candi, pura atau sekadar tumpukan batu alam. Di berbagai tempat itu, ada semacam aura purbakala yang masih mengengang kuat bagi mereka yang mau meluluhkan diri ketika melakukan

gerak di sana. Sebelum melakukan latihan Mbah Prapto selalu meminta murid-muridnya untuk diam bertafakur sebentar setelah sebelumnya diuraikan mengapa tempat itu dipilih. Dalam proses latihan selama beberapa hari di tempat itu, aura purba itu seperti tersedot dalam gerak bebas yang diperagakan para peserta latihan dan Suprpto Suryodarmo sendiri.

Mungkin apa yang dikembangkan dan ditularkan oleh Suprpto Suryodarmo bukan sesuatu yang baru dalam komunitas epistemik global para pencari kebahagiaan di luar tradisi agama-agama langit. Salah seorang “guru” dalam bidang ini adalah Russel Delman dari Amerika Serikat yang secara sistematis mengembangkan metode dan teknik mencapai *a holistic wellness*, berangkat dari tradisi Zen Buddhism. Suprpto Suryodarmo sendiri memilih agama bumi, Buddha, sebagai agama resminya dan mungkin dari tradisi agama-agama bumi yang menempatkan alam bukan untuk dikuasai, melainkan diakrabi, para pencari kebahagiaan itu menemukan cara untuk meraihnya. Mungkin cara yang dipraktikkan Mbah Prapto bisa dimasukkan dalam apa yang disebut meditasi gerak meskipun setahu saya Mbah Prapto tidak menyebutnya demikian. Sebagai label dia menamakannya *Joged Amer-ta*.

Sambil duduk di pinggiran kolam di Goa Gajah Ubud, Mei tahun lalu, Suprpto Suryodarmo menceritakan pengalamannya melakukan latihan di Borobudur karena dia penasaran dan ingin membuat patung Buddha yang duduk diam itu bergerak. Baginya gerak bisa terjadi dalam diam, dan diam adalah gerak. Esensi hidup adalah gerak. Mengenang Suprpto Suryodarmo berarti mengenang seorang pencari sejati, seorang yang menjadikan hidupnya, raganya selalu mencari kesetimbangan baru yang baginya, mungkin tidak pernah akan didapatkannya. Mengenang 100 hari wafatnya Suprpto Suryodarmo adalah mengenang kehidupan (Gerak-Obah-Urip) bukan mengenang kematian. Kematian bukanlah akhir dari kehidupan, tetapi sebuah gerak kembali dan menyatunya jasad dalam kedamaian dan keheningan alam semesta, “*Sangkan paraning dumadi*”.



Buku ini tidak diperjualbelikan.



Soe Hok Gie

Ketika meninggalkan Jakarta tanggal 12 Desember, mungkin dengan hati gundah, ini ternyata menjadi perjalanannya yang terakhir karena tanggal 16 Desember 1969 di puncak Gunung Semeru, Jawa Timur, ia



Sumber: Ardi (2020)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

terjebak uap beracun dan meninggal, persis sehari sebelum hari ulang tahunnya yang ke-27. Kegundahan, mungkin juga kemarahan, tecermin dari aksinya mengirimkan kado yang berisi alat-alat kecantikan untuk teman-temannya yang menjadi anggota DPR-GR sebelum dia berenam, antara lain Herman Lantang, Aristides Katoppo, dan Rudi Badil meninggalkan Jakarta. Teman-temannya yang menjadi anggota DPR-GR diangkat untuk mewakili mahasiswa terdiri dari 13 orang, antara lain Fahmi Idris, Mari'e Muhamad, Slamet Sukirnantanto, Soegeng Sarjadi, Cosmas Batubara, dan Liem Bian Khoen (Sofyan Wanandi). Alat-alat kecantikan itu dikirim agar para anggota DPR-GR wakil mahasiswa itu bersolek biar terlihat cantik di depan penguasa. Sebagian tokoh mahasiswa itu memang tidak saja menjadi komprador, tetapi pengusaha kaya Orde Baru. Soe Hok Gie seperti sudah mempunyai firasat bahwa negerinya sedang menggelincir ke pelukan otoritarianisme dan kapitalisme.

Dalam obituari yang dimuat di jurnal *Indonesia* Cornell University, Ben Anderson (1970) mengatakan Soe Hok Gie adalah orang Indonesia pertama yang berani menulis secara terbuka tentang perlakuan buruk terhadap para tapol korban 1965 dan keluarganya. Soe Hok Gie seorang penulis yang sangat produktif, seperti kita bisa baca dari artikel-artikelnya yang terbit di berbagai koran saat itu. Warisan Soe Hok Gie memang bukan cuma cerita tentang buku, pesta, dan cinta, tetapi tulisan-tulisannya yang berisi gejala batinnya melihat ketidakadilan. *Speak truth to power* adalah ciri tulisan Soe Hoek Gie. Setengah abad bukan waktu yang pendek untuk melupakan seseorang, juga untuk menerima kenyataan bahwa para tapol dan keluarganya itu telah hidup normal.

Akan tetapi, nyatanya tidak, hantu itu terus dihidupkan dan penderitaan para eks-tapol yang sebagian masih hidup kita tahu masih terus berlangsung. Tiga tahun yang lalu ketika kami mengadakan seminar tentang “Masyarakat Pinggiran” di Universitas Brawijaya Malang, dalam salah satu panel kami mengundang seorang anak tapol yang bapaknya terbunuh, anak tapol ini meminta kami menyamakan namanya dalam program seminar. Rasa takut itu masih kuat menghantui mereka. Negara cuci tangan seolah-olah para eks-tapol dan anak

cucunya itu bisa menyembuhkan luka batinnya sendiri. Apakah negara berpikir bahwa keadilan sudah diberikan kepada mereka? Ataukah negara sedang dibebani rasa bersalah dan sangat berat mengakui kejahatan kemanusiaan yang pernah dilakukannya?

Membaca kembali Soe Hok Gie, anak muda yang telah dikonstruksi sebagai Sang Demonstran dan dipahat sebagai patung pahlawan yang menjatuhkan Bung Karno, bagi saya seperti menemukan pertanyaan-pertanyaan yang saya tahu tidak mungkin diperoleh jawabnya. Seperti dikatakan oleh Ben Anderson dia anak muda pertama yang secara terbuka mengecam perlakuan tidak manusiawi terhadap mereka yang dituduh PKI dan keluarganya. Soe Hok Gie hidup persis di seputar 1965, dia hidup ketika *the great turning point in the history of Indonesia* terjadi, atau dalam bahasa Hilmar Farid, momen kelahiran “*The Original Sin*” yang mengubah secara total Indonesia ke pelukan kapitalisme (lihat “Indonesia’s Original Sin: Mass Killing and Capitalist Expansion, 1965–1966”, *Inter-Asia Cultural Studies*, Volume 6, Number 1, 2005). Tahun-tahun seputar 1965 juga menjadi kajian tesis Hermawan Sulistyono di Arizona State University “*The Forgotten Years: The Missing History of Indonesia’s Mass Slaughter*” (1997) yang secara mendalam melakukan studi sejarah sosial di wilayah Jombang-Kediri, tahun 1965–1966.

Meninggal di puncak gunung, sebuah tempat dia menemukan kemurnian, menjelang akhir tahun 1969 adalah sebuah takdir yang aneh. Tahun 1970 menandai awal dari transformasi sosial besar yang terjadi di negeri ini dan Soe Hok Gie tidak lagi bisa menyaksikan apa yang kemudian berubah dari bangsanya. Keberhasilannya ikut menumbangkan Soekarno yang lama menjadi incaran “dunia barat” mulai menuai hasil persis sepeninggalnya. Soe Hok Gie juga tidak menyaksikan penderitaan mereka yang dituduh PKI dan keluarganya berlanjut, dia tidak menyaksikan ribuan orang dibuang ke Pulau Buru dan dibiarkan bertahan hidup sendiri; Akan tetapi, yang tidak kalah penting adalah dia tidak menyaksikan Indonesia baru tanpa Soekarno yang dikeruk kekayaan alamnya dan membuncah kesenjangan sosialnya. Setelah Soe Hok Gie dan Soekarno yang meninggal setahun setelah dirinya (1970, 6 Juni lalu berulang tahun yang ke-119), bisa tega me-

lihat jutaan perempuan dan laki-laki mengalir ke luar negeri hanya untuk menjadi pembantu rumah tangga dan kuli perkebunan, sebagian menerima perlakuan tidak manusiawi? Tidakkah ucapan Bung Karno menjadi kenyataan, kita benar-benar telah menjadi bangsa kuli?

Soe Hok Gie, yang menurut Ben Anderson lebih suka menyebut dirinya sebagai anarkis, sejak awal sudah tertarik pada golongan kiri. Sebagai mahasiswa jurusan sejarah Fakultas Sastra UI, adik kelas Ong Hok Ham ini menaruh perhatian besar pada Marxisme. Skripsi sarjana mudanya “Di Bawah Lentera Merah” (1990) selain berdasarkan arsip, juga ditulis berdasarkan hasil wawancaranya dengan Darsono dan Semaoen, dua tokoh penting Partai Komunis Indonesia yang beruntung masih bisa ditemui sebelum keduanya menjadi seperti tertelan oleh sejarah. Menurut sejarawan Domini Hera, kedua tokoh pergerakan awal kemerdekaan itu sudah tidak terlibat lagi dengan kegiatan PKI, mereka meninggal karena usia tua, Semaoen tahun 1971 dan Darsono 1976. Skripsi yang diselesaikan Soe Hok Gie pada tanggal 6 September 1964 itu berarti persis setahun sebelum peristiwa 1965. Dalam skripsi sarjana muda itu, Soe Hok Gie memfokuskan studinya pada pergerakan Sarekat Islam Cabang Semarang (1917–1920). Soe Hok Gie menilai mulai tahun 1917 tendensi-tendensi sosialistik dari pergerakan politik mulai jelas dan pada bulan Mei 1920, hanya selang tiga tahun kemudian, PKI resmi didirikan.

Soe Hok Gie menekankan pentingnya perubahan struktur sosial dalam sejarah. Setelah sistem tanam paksa (1830–1870) berakhir, dimulailah periode sistem ekonomi liberal dan modal asing dibolehkan masuk menggarap pertambangan, perkebunan, dan industri. Akibatnya terjadi pergeseran struktur ketenagakerjaan dengan makin banyaknya orang Indonesia bekerja sebagai buruh upahan. Kebutuhan akan lahan yang luas untuk perkebunan mendorong terjadinya alih fungsi lahan dari pertanian ke perkebunan sehingga mereka yang sebelumnya petani berubah menjadi buruh (*coolie*). Ketika menulis skripsi sarjananya, Soe Hok Gie melanjutkan studinya tentang golongan kiri, judulnya “Simpang Kiri dari Sebuah Jalan: Kisah Pemberontakan Madiun 1948” (1969). Hatinya seperti selalu mengajaknya untuk memihak mereka yang kalah dan tersingkirkan.

Sejarah kita, 1908, 1928, 1945 adalah rangkaian tidak terputus gerakan politik merebut kemerdekaan. Setelah tragedi politik 1965 Indonesia tidak lagi mendayung di antara dua karang, seperti diibaratkan Bung Hatta, namun telah kandas di sebuah karang. Arief Budiman, kakak Soe Hok Gie, menyesal telah ikut demonstrasi menumbangkan Bung Karno karena setelah Bung Karno tumbang yang lahir adalah sebuah rezim militer yang represif (Lihat obituari Garry van Klinken untuk Arief Budiman, *New Mandala*, 29 Mei 2020). Apakah Soe Hok Gie juga akan menyesal dengan kenaifan yang pernah dilakukannya, seperti diungkapkan kakaknya? Kita tidak tahu, itu juga pertanyaan yang tidak bisa kita temukan jawabnya. Kita cuma bisa menduga-duga karena simpati yang selalu dia berikan pada para korban dan perhatiannya pada golongan kiri; pastilah akan membuatnya berang melihat kondisi bangsa Indonesia. Setelah 50 tahun kematian Soe Hok Gie dan Soekarno, kita yang hari-hari ini masih menghirup udara di tengah kecemasan tertular virus Corona, melihat makin sayup keyakinan akan terjadinya arus balik sejarah. Penetrasi kapitalisme telah sangat mendalam, kekuatan penangkal di tubuh kita makin hilang, dan sejarah hampir mustahil di putar balik arahnya.



Buku ini tidak diperjualbelikan.



Syafii Maarif

Seorang rekan dalam ceramahnya kemarin, banyak ditanya tentang apa yang mesti dilakukan dalam situasi politik yang makin bebas pasca-tumbangnya rezim represif Soeharto? Rekan ini, seorang yang selama Orde Baru terus bergerilya melawan, meyakini satu-satunya jalan



Sumber: Subekti (2018)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

adalah mengisi ruang kebebasan yang makin terbuka itu. Sampai di situ saya jadi teringat seorang tokoh yang riwayat hidupnya telah melewati banyak titik-titik kisar, begitulah beliau mengistilahkanya “titik-titik kisar di perjalananku”.

Tokoh yang saya maksud tidak lain adalah Buya Syafii Maarif. Meski telah berusia 84 tahun, tidak terlihat tanda-tanda menurunnya komitmen Syafii Maarif untuk mengisi ruang kebebasan yang makin terbuka, yang juga diisi oleh berbagai ekspresi kepentingan yang tidak selalu mencerminkan kedalaman pemahaman keagamaan.

Sebagai seorang tokoh Islam, Ahmad Syafii Maarif sangat memahami paham keagamaan dalam Islam yang justru mengerdilkan wawasan, seperti terlihat dalam berbagai gerakan atau pun kegiatan yang mengatasnamakan Islam. Sepeninggal dua tokoh pembaru Islam yang paling menonjol pasca-1970-an, yaitu Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid, pria kelahiran 31 Mei 1935 ini seperti tampil terdepan mewakili wawasan keislaman yang bersifat inklusif.

Lahir dan dibesarkan dalam alam Sumatra Barat yang egaliter, kemudian berkarier sebagai dosen di IKIP (sekarang Universitas Negeri Yogyakarta) dan aktif di Muhammadiyah, mengantarkannya ke puncak karier sebagai Guru Besar di UNY dan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah. Tak hanya itu, keberhasilannya mengenyam pendidikan barat sampai tingkat doktor di Universitas Chicago, Amerika Serikat, menjadikan dirinya sebagai intelektual Muslim yang paripurna. Pemahamannya tentang hubungan antara keislaman dan kebangsaan, tak perlu diragukan karena kedua hal ini menjadi bahan kajiannya ketika menulis disertasi doktornya di Universitas Chicago; seangkatan dengan Amin Rais dan Nurcholish Madjid.

Buya Syafii mengenal betul berbagai sisi Islam antara lain potensinya yang besar sebagai *contending power* dari negara, baik semasa penjajahan maupun setelah kemerdekaan dan ini telah terbukti dalam perjalanan sejarah bangsa. Namun, yang menjadi menarik dari Syafii Maarif adalah pilihan sikap politiknya untuk menolak menjadikan negeri ini sebagai negara Islam.

Ketika rezim militer Soeharto-Orde Baru jatuh dan ruang kemerdekaan berekspresi terbuka lebar, tidak aneh jika aspirasi negara

Islam bahkan kekhalifahan, muncul dan berkembang. Sisi gelap Islam politik yang terekspresikan dalam bentuk intoleransi terhadap keberagaman dan berkembangnya paham radikalisme di kalangan muda dan mahasiswa di kampus-kampus; mendorong Syafii Maarif setiap saat menyuarakan pendirian dan keyakinannya tentang Islam yang merupakan agama pembawa rahmat bagi alam semesta beserta seluruh isinya.

Di tengah keluasan pemeluk agama yang tokoh-tokohnya mengklaim sebagai mayoritas, sosok Syafii Maarif yang makin terlihat sepuh itu seperti sebuah mercusuar di bukit karang di pinggir pantai yang sinarnya sering terlihat sayup-sayup di tengah hujan badai dan kilatan petir. Syafii Maarif sangat menyadari pilihannya untuk melawan arus masyarakat yang mudah terbuai oleh dogma-dogma agama, yang mereka telan mentah-mentah dari apa yang dengan suara geram disebutnya sebagai “preman-preman berjubah”.

Syafii Maarif jelas tidak berjuang sendiri. Sebuah yayasan yang mengambil nama dirinya menjadi tempat berkiprah anak-anak muda yang sepaham dengan dirinya dan dalam cuaca hari ini, mau tidak mau menjadi sebuah benteng bagi tegaknya akal sehat dan kewarasan publik. Seperti sahabatnya, Romo Magnis, Buya Syafii juga selalu menuliskan kepeduliannya jika muncul sebuah isu sosial tertentu yang harus diresponsnya, antara lain, di Harian *Kompas*. Mirip dengan Romo Magnis, kolomnya pendek, dengan bahasa yang lugas meskipun selalu dalam nuansa kemanusiaan yang kuat. Seorang intelektual publik adalah mereka yang dengan konsisten selalu menyuarakan keprihatinannya tentang keadaan publik, menyuarakan kritik secara jujur dan tanpa kegenitan terhadap pemegang kekuasaan, tidak ragu mengatakan kebenaran, menunjukkan ketidakadilan untuk kemashalatan orang banyak.

Menurut Pramoedya Ananta Toer, nama Indonesia, sesungguhnya tidak tepat bagi sebuah negeri yang masyarakatnya begitu kaya dengan keberagaman kebudayaan². Dalam sebuah wawancara, novelis terbesar yang pernah dimiliki oleh negeri ini, mengatakan bahwa nama yang tepat adalah “Nusantara” atau “Dipantara”. Kita tidak tahu, apakah kita

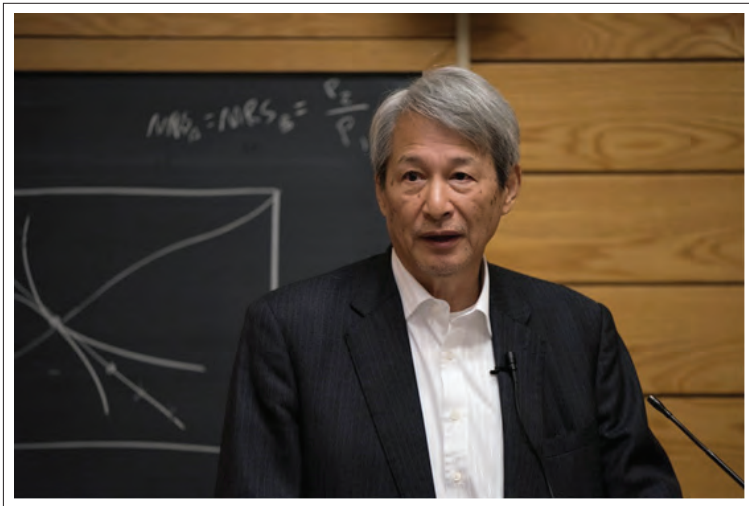
² Pendapat Pramoedya Ananta Toer ini diungkapkan oleh Max Lane, sang penerjemah buku-buku karya beliau, kepada penulis lewat sebuah percakapan personal.

akan bernasib lain jika nama negeri ini diganti. Satu hal yang pasti, tampaknya, dan tentang hal ini, Ahmad Syafii Maarif telah menunjukkan keyakinan dan pendiriannya, paham keislaman yang inklusif, mestilah menjadi bagian yang penting bagi sebuah bangsa yang terlahir dengan berbagai keragaman yang melekat dalam dirinya. Keislaman dalam alam yang demikian tidak lagi merupakan identitas sebuah kelompok, tetapi telah luluh lebur menyatu ibarat garam yang tanpa terlihat diam-diam mengasinkan air laut.



Takashi Shiraishi

Takashi Shiraishi, saya kira adalah sedikit dari “Indonesianis” Jepang yang cara berpikirnya strategis. Dia paham *knowledge is power* dan dia juga tahu *the mechanics of power*. Sebagai ilmuwan sosial, analisis



Sumber: Ra (2019)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Takashi Shiraishi *succinct*, mendalam, dan *locating social issues in a wider perspective*. Mungkin, ilmu hubungan internasional yang dipelajarinya sebelum mengambil studi pascasarjana di Cornell, membiasakannya untuk selalu mempertimbangkan pentingnya dimensi geopolitik dan relasi kekuasaan antarbangsa dan negara. Tulisan-tulisannya yang terakhir cenderung ke wilayah politik-ekonomi meskipun dimensi sejarah tetap menjadi perhatiannya.

Suatu hari, di sela-sela mengikuti acara konferensi yang diselenggarakan sebuah universitas di Tokyo beberapa tahun yang lalu, saya menyempatkan mengunjungi Yasukuni, sebuah kuil agama Shinto yang dianggap kontroversial. Agama Shinto adalah sebuah agama lokal yang melalui proses sejarah politik berliku menjadi agama negara dan ikut membentuk semangat patriotisme militer Jepang. Jepang kalah hanya setelah Amerika menggunakan bom atom yang meluluhlantakkan kota Hiroshima dan Nagasaki. Sebuah peristiwa traumatis yang menjadi ingatan kolektif orang Jepang. Setelah menyerah di bawah Jenderal MacArthur, Jepang harus menyusun konstitusi yang memisahkan agama dari negara, selain tidak boleh memiliki angkatan perang kecuali untuk pertahanan negara. Yasukuni merupakan sebuah kompleks yang cukup luas, di samping bangunan utama sebagai tempat melakukan ibadah, terdapat sebuah museum yang menyimpan artefak dari seluruh perang yang pernah dilakukan Jepang, terutama Perang Pasifik. Museum ini merupakan bagian yang terbuka untuk umum. Hal yang menjadi kontroversi adalah sikap, antara lain yang tergambar dari isi museum itu, bahwa Jepang tidak pernah merasa kalah dan tidak mengakui telah melakukan kesalahan dalam perang Pasifik itu. Saat ini, masyarakat Jepang yang cenderung antiperang akan menggelar aksi protes setiap kali ada perdana menteri yang menyambangi Yasukuni.

Ketika di Cornell, Takashi Shiraishi menulis disertasi doktornya tentang satu periode penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia, jauh sebelum kemerdekaan. Periode itu adalah antara tahun 1912–1926 yang oleh para tokohnya, disebut sebagai zaman “*balik buwono*”, jagat atau dunia yang sedang *sungang-sumbang*. Disertasi Takashi Shiraishi kemudian diterbitkan sebagai buku *An Age in Motion: Popu-*

lar Radical Movements in Java 1912–1926 (1990a) dan terjemahannya *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912–1926* (1997) dikerjakan oleh Hilmar Farid, doktor lulusan National University of Singapore, intelektual-aktivis yang terlibat dalam dan memandang pentingnya *grass root politics*. Sejak Jokowi menjadi presiden, Hilmar Farid diangkat menjadi Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud, hingga sekarang. Dalam novel *Pangeran dari Timur* yang berkisah tentang Raden Saleh, *Zaman Bergerak* digambarkan dengan hidup oleh Iksana Banu dan Kurnia Effendi, melalui tokohnya Syafei, anggota PKI Bandung, yang ikut ditangkap setelah pemberontakan PKI 1926 dan di-Digoel-kan. “Digoel” sebuah vokabuler penting dalam sejarah, khususnya *grass root politics* di Indonesia. Digoel adalah sebuah kamp konsentrasi untuk mengisolasi para aktivis pergerakan nasional yang dianggap berbahaya bagi pemerintah kolonial Belanda. Angkatan pertama para tapol yang dibuang ke Digoel, yang terpencil di ujung tenggara Papua, adalah mereka yang terlibat pemberontakan PKI di Silungkang dan Banten, tahun 1926, akhir periode riset Takashi Shiraishi untuk doktornya.

Selain disertasi doktornya, Takashi Shiraishi membuat analisis penting tentang bagaimana pengawasan politik dilakukan pemerintah kolonial Belanda untuk memata-matai (*surveillance*) gerak-gerik, tingkah laku, dan pergerakan para aktivis politik tahun 1920–1930-an di Hindia Belanda. *The mechanics of surveillance politics* ini juga digambarkan dengan baik oleh Pramodya Ananta Toer dalam *Rumah Kaca* (1988) dengan tokohnya, seorang mata-mata, Jacques Pangemanann. Mereka yang dianggap berbahaya ditangkap untuk kemudian diasingkan. Setelah meletus pemberontakan PKI 1926 Belanda membangun kamp konsentrasi di Boven Digoel yang bisa menampung para tapol yang jumlahnya besar. Sebuah artikel menarik lain ditulis Takashi Shiraishi (1990b) berdasarkan analisis terhadap pengakuan Dangir, seorang Samin (Sedulur Sikep) yang ditangkap (1928) dan diadili karena dicurigai sebagai PKI. Dalam artikel ini terlihat ketelitian Takashi Shiraishi melihat kemungkinan kembalinya Saminisme yang dianggap mati bersamaan dengan diasingkannya Samin Surosentiko 1907 ke Payakumbuh, Sumatra Barat. Apa yang ditulis oleh Takashi Shiraishi adalah sebuah sejarah pergerakan nasional penting yang bisa jadi tidak banyak

diketahui oleh generasi milenial Indonesia sekarang, tokoh-tokoh yang ditampilkannya adalah pemimpin-pemimpin rakyat, seperti Mas Marco wartawan yang memilih menulis dalam bahasa Melayu dan ikut membuat jurnal dua mingguan “Doenia Bergerak” dan Haji Misbach pemimpin Sarekat Islam progresif di Solo. Ironinya, nama-nama tokoh yang selama hidupnya memperjuangkan kemerdekaan dan mati di penjara kolonial ini, tidak pernah disebut sebagai pahlawan nasional. Setelah mati kuburan mereka pun dilupakan orang. Herman Hidayat dan Suwarsono dari LIPI yang melakukan penelitian tentang Haji Misbach harus melacak dengan tidak mudah sebelum berhasil ditunjukkan makamnya yang sudah tertutup ilalang di sebuah pemakaman umum di Manokwari, Papua. Politik pengasingan dan kamp konsentrasi Boven Digoel berakhir ketika Jepang menduduki Indonesia 1942.

Takashi Shiraishi hampir selalu menduduki posisi puncak di lembaga tempat bekerja, sepulang dari mengajar di Cornell, antara lain menjadi profesor di Center for Southeast Asian Studies (CSEAS) Kyoto University, Presiden Institute of Developing Economies (IDE), Rektor Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), dan sekarang menjadi Chancellor di Universitas Kumamoto; memang *a high flyer*, selain nasihatnya selalu diperhitungkan oleh pemerintah Jepang dalam hubungannya dengan pemerintah Indonesia, siapa pun presidennya. Berkat jasanya, mungkin karena dianggap berhasil dalam mempererat hubungan Indonesia dan Jepang, pada tahun 2017 Takashi Shiraishi mendapatkan Bintang Jasa Utama, penghormatan tertinggi untuk warga negara asing dari pemerintah Indonesia. Saya belum pernah bertanya mengapa Takashi Shiraishi tertarik pada sejarah Indonesia dan menekuni arsip-arsip dan koran-koran lama yang tersimpan di Jakarta, Cornell, Leiden, dan tempat-tempat lainnya untuk bisa menulis *Zaman Bergerak* yang penuh *passion* itu. Di museum kuil Yasukuni yang terletak di *suburb* Chiyoda di Tokyo itu, begitu memasuki ruang pameran yang pertama kita lihat adalah diorama besar di sebuah dinding. Diorama itu berupa peta Asia berwarna dan di permukaannya terlihat titik-titik dengan keterangan. Di bagian Asia Tenggara ada satu titik yang terlihat mencolok dan keterangan di situ menunjukkan Perang Diponegoro (1825–1830). Diorama itu memang mau bercerita tentang perlawanan

orang-orang Asia, di bawah kepemimpinan Jepang, menghadapi kolonialisme negara-negara barat. Mungkinkah Takashi Shiraishi mendapat inspirasinya dari kuil Yasukuni?

Jepang secara historis mempunyai peranan besar dalam proses kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Sejak Orde Baru, Indonesia menjadi tempat menanam modal Jepang yang besar, selain Indonesia menjadi penyedia sumber daya alam (SDA) bagi Jepang. Peristiwa Malari 1974 dipicu oleh kedatangan PM Kakue Tanaka yang dianggap mewakili kepentingan modal asing yang dipandang mahasiswa telah mengisap darah rakyat.

Dengan pengetahuan yang mendalam tentang sejarah sosial politik Indonesia, Takashi Shiraishi mungkin merupakan ilmuwan Jepang yang paling berpengaruh dalam hubungan dengan Indonesia saat ini. Takashi Shiraishi dan para Indonesians lainnya, di Australia, Belanda, dan Amerika sedikit atau banyak akan ikut memengaruhi perkembangan bangsa Indonesia, melalui buku-buku dan tulisan-tulisan, nasihatnya terhadap pemerintah negara, dan yang tak kalah pentingnya melalui murid-murid yang telah dibimbingnya menjadi “master” dan “dokter”. Peran Takashi Shiraishi yang kecil atau besar melalui posisi-posisi yang didudukinya, baik dalam pemerintahan, perguruan tinggi, maupun dalam masyarakat pada umumnya. Keterbukaan hubungan antarnegara dan antarbangsa pada era pascakolonial ini seharusnya memungkinkan kerja sama yang lebih adil dan menguntungkan dari kedua belah pihak, meninggalkan pola hubungan yang timpang dan eksploitatif seperti pernah dialami penduduk negeri ini pada masa penjajahan Belanda atau pada zaman pendudukan Jepang dulu.



Buku ini tidak diperjualbelikan.



Th. Sumartana

Apa yang terjadi seandainya Th. Sumartana tidak meninggal pada 24 Januari 2003 dan terus memimpin Demos yang baru didirikannya bersama Asmara Nababan dan sejumlah intelektual lainnya? Tujuh belas



Sumber: Chaniago (2001)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

tahun bukan waktu yang sebentar. Dalam kurun waktu sepanjang itu kita menyaksikan tidak sedikit intelektual yang keluar masuk di pemerintahan, sebagian kita tahu karena balas jasa dari presiden yang telah didukung dalam pemilihan yang lalu.

Seseorang seperti Th. Sumartana, betapapun, sulit kita bayangkan akan duduk menjadi bagian dari rezim yang sedang berkuasa. Asmara Nababan, sahabatnya, merasa ada yang lucu ketika mendengar Th. Sumartana, ikut membentuk sebuah partai baru yang didirikan pada awal reformasi. Konon, setelah keduanya bertemu, Asmara baru mengerti bahwa Th. Sumartana membayangkan partai baru itu menjadi semacam forum dialog karena partai baru ini memang dibentuk oleh tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang agama yang berbeda.

Apa yang diceritakan oleh Asmara Nababan tentang harapan Th. Sumartana terhadap partai baru itu sebagai forum dialog sangatlah bisa dimengerti. Melihat kiprahnya dan membaca tulisan-tulisannya, Th. Sumartana sangat terobsesi akan hadirnya sebuah masyarakat yang tidak tersekat oleh perbedaan dalam beragama. Skripsinya di Sekolah Tinggi Teologi (STT) Jakarta yang berjudul “Soal-soal Teologis dalam Pertemuan Antar Agama” (1971), juga dalam disertasi doktornya yang diselesaikan dua dekade kemudian, di Vrije Universiteit Amsterdam Belanda (1992) adalah bukti konsistensinya untuk terus menggeluti problem klasik hubungan antaragama ini.

Dalam kedua karya ilmiah itulah landasan berpikir Th. Sumartana tentang krusialnya hubungan antarkeyakinan dalam beragama dan konflik yang ditimbulkannya sebagai persoalan yang perlu terus diupayakan solusinya. Mungkin, terlahir sebagai orang Jawa yang kristiani, menyadari posisinya sebagai bagian dari sebuah kelompok dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, namun pada saat yang sama menyembunyikan sengketa-sengketa internal yang di matanya tidak dapat dilepaskan dari sejarah kolonialisme yang dialami bangsanya. Keputusan untuk mendalami dimensi sejarah keagamaan bangsanya inilah, dugaan saya, yang mendorong dan memutuskan untuk memilih topik sejarah misi dan dilemnya di tengah kehidupan bangsa, sebagai bahan untuk disertasi doktornya.

Judul lengkap disertasi itu adalah “*Mission at the Crossroad: Indigenous Churches, European Missionaries, Islamic Association, and Socio-religious change in Java 1812–1936*” (1993) yang telah diterbitkan oleh Penerbit BPK Gunung Mulia, hanya setahun setelah dipertahankannya dalam ujian doktornya. Salah satu bagian dalam disertasinya mengupas secara menarik pengalaman keagamaan dari Kartini, perempuan ningrat Jawa, istri Bupati Rembang yang sepeninggalnya dalam usia yang relatif muda meninggalkan kumpulan surat-menyuratnya dengan sahabat-sahabatnya orang Belanda. Oleh Th. Sumartana surat-menyurat yang berkisah tentang dimensi keagamaan Kartini ditampilkan sebagai cermin ketegangan dan pergulatan batin yang dirasakan seorang Jawa dan Islam melihat diri dan masyarakatnya dalam hubungan dengan keyakinan dan keberagaman orang Belanda dan kekristenan.

Dalam kata pengantarnya untuk buku *Kumpulan Catatan Pinggir Goenawan Mohamad Jilid 1* yang terbit tahun 1983; kita bisa membaca ketajaman dan erudisi Th. Sumartana tentang makna intelektual publik dan dilema-dilema yang dihadapi dalam konteks perubahan sosial politik yang dialami bangsanya. Di situ kita baca kalimatnya, “Idealisme tanpa pijakan realitas menjadikan orang pemimpi dan sekaligus pembohong. Sedangkan realisme tanpa nilai-nilai ideal akan menjadikan orang hidup tanpa martabat”. Selain itu, di bagian lain kata pengantar itu tertulis, sebagai berikut.

“... pemikiran skeptis memang tak jarang menjengkelkan orang, karena ia jauh dari kepentingan praktis. Dari satu segi –katakanlah segi pemegang kekuasaan– sikap semacam itu secara teknis sering disebut sikap seorang ‘liberal’. Karena titik tumpunya bukan komitmen atau loyalitas terhadap kekuasaan, tetapi justru pemikiran ulang terhadap kekuasaan dan penggunaan kekuasaan. Sedang dari sisi lain –katakanlah sisi para pengkritik keadaan– sikap skeptis dianggap sebagai sikap ragu terhadap perlunya perubahan. Keraguan yang akhirnya menelantarkan penderitaan para korban yang nyata dari keadaan. Dua tujuan dari dua sisi itu punya arah yang berbeda tetapi tuntutan yang sama –tuntutan untuk mengambil pihak”.

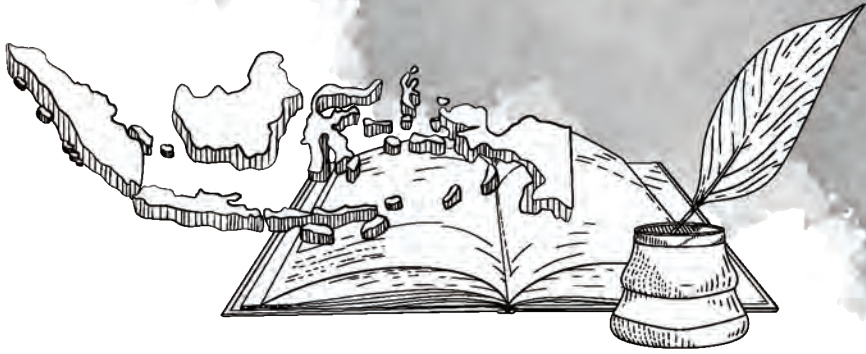
Th. Sumartana meninggal pada usia yang relatif muda, 59 tahun, setelah lebih dari sepuluh tahun, sejak 1991 hingga 2003, memimpin

sebuah lembaga yang berusaha membangun jembatan antar-pemeluk agama yang berbeda, Interfidei. Th. Sumartana mungkin merasa perlu melangkah lebih lanjut, tidak terbatas pada forum dialog antarimam, yang barangkali dirasakan terbatas ruang geraknya dan persoalan iman memang tidak mungkin dilepaskan dari konteks sosial-politiknya.

Demos yang didirikannya bersama Asmara Nababan, seorang intelektual publik yang berbeda dengan dirinya yang lebih terbiasa bergerak di ruang pemikiran, seorang aktivis kawakan yang rentang pengalamannya sulit dicari bandingannya. Asmara Nababan meninggal akibat kanker paru-paru 20 Oktober 2007, dalam usia 61 tahun, menyusul Th. Sumartana, setelah 4 tahun memimpin Demos.

Menjelang 17 tahun sejak kematiannya, pada tanggal 24 Januari 2003, saya kira harapan dan obsesi Th. Sumartana bahwa di negerinya bisa dilangsungkan kehidupan bersama tanpa dibatasi oleh sekat-sekat agama, tampaknya makin jauh dari kenyataan, jika tidak dikatakan telah kandas di tengah jalan. Partai baru yang ikut didirikan dengan harapan akan menjadi forum dialog dari pendirinya yang lintas agama, ternyata tumbuh menjadi partai yang didominasi oleh tokoh-tokoh dari sebuah agama tertentu, menjauh dari niat awalnya.

Sepeninggal Th. Sumartana berbagai lembaga, institut, yayasan, atau perkumpulan didirikan untuk mencari jalan keluar dari ketegangan dan konflik yang timbul akibat perbedaan keyakinan dalam beragama itu. Kosakata baru muncul seperti intoleransi, radikalisme; dan berbagai proyek dan program dengan dana besar, dari dalam maupun luar negeri; diperebutkan untuk menggarap persoalan itu. Tujuh belas tahun sejak wafatnya Th. Sumartana meskipun kesibukan kita meningkat untuk mengatasi problem klasik hubungan antaragama ini, jangan-jangan kita cuma riuh mengurus badan wadagnya, tetapi luput menangkap dan memahami rohnya –sesuatu yang lama menjadi obsesi Th. Sumartana.



Toeti Herati Noerhadi

Terlahir pada 1933 sebagai anak dari Ir. Roeseno yang dekat dengan Bung Karno karena sama-sama lulusan THS (sekarang ITB), Bu Toeti begitu dia biasa dipanggil, dikaruniai usia panjang dan kecukupan



Sumber: Untung (2017)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

materi. Melihat rekam jejaknya di dunia akademis, kesenian dan masyarakat sipil, usia tampaknya bukan isu buat Bu Toeti. Jejaknya tidak mungkin terhapus karena telah menyentuh begitu banyak orang dan kalangan.

Bu Toeti, jauh lebih tua dari generasi Goenawan Mohamad dan Arief Budiman yang meskipun masih beruntung merasakan zaman Bung Karno, namun tidak bisa dibanding dengan Bu Toeti yang pasti mengenal Bung Karno sejak proklamasi kemerdekaan dan masa kejayaannya. Bu Toeti menjadi orang langka hari ini karena mewakili generasi pasca-kemerdekaan yang menguasai bahasa Belanda dengan sangat fasih dan mencerap dengan baik pendidikan barat.

Bu Toeti, perempuan yang telah terliberasi, tidak hanya beruntung karena hidupnya selalu dekat dengan gravitasi kekuasaan, tetapi memilih terlibat dan dengan caranya sendiri ikut menentukan arah kekuasaan. Tidak banyak orang yang dikaruniai sumber daya kultural yang melimpah dan mau terlibat dalam gerakan untuk mengubah masyarakat. Ketika Soeharto mulai menunjukkan tanda-tanda keruntuhan Bu Toeti menyediakan rumah dan sekaligus galerinya di Menteng untuk rapat membentuk Majelis Rakyat (MARA) yang kemudian menjelma menjadi Partai Amanat Nasional (PAN). Konon Goenawan Mohamad dan Amin Rais di antara yang hadir dalam rapat itu.

Mungkin di masa Ali Sadikin sebagai Gubernur Jakarta di awal Orde Baru inilah *renaissance* kesenian Indonesia terjadi dan TIM adalah kiblatnya. Pada tahun 1970a-n ini bisa kita saksikan dengan tampilnya Rendra, Arifin C. Noer, Teguh Karya, Sardono W. Kusumo, Jack Lesmana, Syumanjaya, D. Djajakusuma, Ami Prijono, Nashar, dan Srihadi Soedarsono. Dalam masa penuh kreativitas itu Bu Toeti ada di dalamnya, terlibat dan ikut memberi arah. Yang menarik ketika musim berganti di ujung Orde Baru, Bu Toeti pun ada di sana. Membidani, mendorong, dan mengarahkan gerak perubahan yang terjadi.

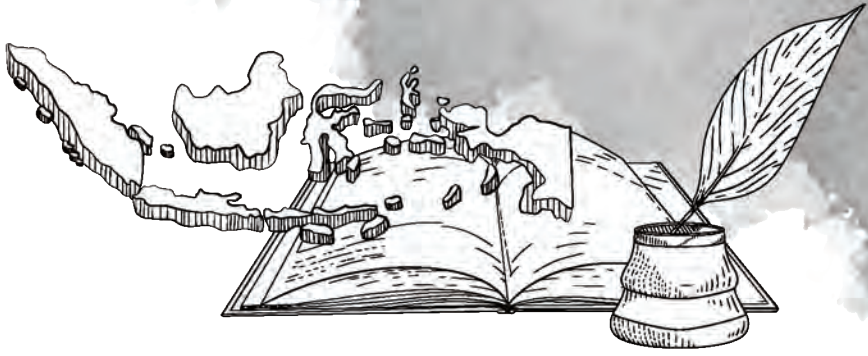
Riwayat pendidikannya memperlihatkan minatnya pada soal manusia dan kebudayaan. Sebelum menyelesaikan pendidikan di Fakultas Psikologi UI, Bu Toeti sempat kuliah sebentar di FKUI. Di Fakultas Psikologi UI, yang didirikan oleh Prof. Slamet Iman Santoso, seorang

psikiater, tahun 1952, mungkin Bu Toeti seangkatan dengan Pak Fuad Hasan dan Bu Saparinah Sadli –yang berturut menggantikan Prof. Slamet Imam Santoso sebagai Dekan Fakultas Psikologi UI. Adalah Prof. Slamet Imam Santoso yang mengundang Prof. Beerling, seorang ahli filsafat Belanda untuk mengajar filsafat di Fakultas Psikologi UI, sebelum kemudian diganti oleh Romo Driyarkara. Terbukti filsafat kemudian menjadi bidang keahlian Bu Toeti, setelah kemudian mendapatkan gelar doktor di Universitas Leiden dengan promotor Prof. van Peurson dan disertasi berjudul “Aku dalam Budaya”. Ketika di UI dibuka jurusan Filsafat dan kemudian menjadi Fakultas Filsafat, Bu Toeti-lah yang ikut membidani dan kemudian mengetuainya.

Bu Toeti bisa dibilang sebagai “orang lama” yang hidup di “alam baru”. Sebagai “orang lama” dia bisa bercerita tentang intelektual publik zaman itu: S.T.A., Soedjatmoko, Mochtar Lubis, H.B. Jassin, Umar Kayam, mungkin juga Natsir dan Buya Hamka. Ketika peralihan zaman terjadi, saya kira Bu Toeti bersama para intelektual zaman itu menjadi penasihat Ali Sadikin yang giat membangun pusat kesenian dan membentuk DKJ dan IKJ. Bu Toeti tercatat sebagai rektor IKJ pertama. Pendidikan kesenian di IKJ dan filsafat di Universitas Indonesia; tercatat sebagai tempat Bu Toeti menyemai intelektual-intelektual publik Indonesia baru seperti Seno Gumira Ajidarma dan Karlina Supelli; bisa disebut sebagai contoh yang saat ini menonjol.



Buku ini tidak diperjualbelikan.



Toeti Kakiailatu

Saya tidak tahu dari mana semangatnya yang menggebu-gebu itu berasal. Mbak Toeti, begitu biasanya dia dipanggil, menghabiskan kariernya sebagai wartawan di Majalah Berita Mingguan (MBM) Tempo.



Sumber: Keretawaktu (2013)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kalau tidak salah dia bergabung sejak Tempo didirikan pada tahun 1971, bahkan mungkin sebelumnya ketika majalah itu masih bernama Ekspres. Sebagai wartawan perempuan, dia boleh dibilang bagian dari minoritas, ketika dunia kewartawanan hingga hari ini masih sangat didominasi oleh laki-laki.

Sebagai perempuan Jawa, Toeti Soewarti Kakiailatu, lagi-lagi tergolong rada aneh karena stereotip wanita Jawa yang dikenal sebagai halus dan tidak agresif, seperti tidak melekat pada kepribadiannya sama sekali. Toeti Kakiailatu tidak mungkin bertahan dan mengembangkan kariernya sebagai jurnalis, sebuah profesi yang membutuhkan kecepatan bergerak, penciuman yang tajam untuk mengendus isu sosial, dan mutlak harus memiliki kemampuan bahasa tulis yang tinggi. Semua klasifikasi itu hampir tidak mungkin dimiliki jika dia bukan seorang yang asertif, berani, cakap dalam profesi sebagai jurnalis, dan melihat posisinya sebagai perempuan yang setara dengan pria.

Jurnalisme sebagai profesi berkembang bersamaan dengan kesadaran berpolitik dari segelintir orang yang sempat mengecap pendidikan dari Belanda. Selain itu juga sejalan dengan perkembangan bahasa Melayu Pasar sebagai bahasa pergaulan antarkelas dan golongan yang masing-masing memiliki bahasa etnisnya sendiri. Tirta Adhi Suryo, yang oleh Pramoedya Ananta Toer dianggap sebagai Sang Pemula adalah seorang yang berasal dari etnis Jawa. Setelah gagal menjadi dokter, memelopori pembuatan koran Medan Priyayi, sebagai bagian dari perdagangan, tetapi kemudian berubah menjadi koran politik. Oleh karena itu, secara historis seorang jurnalis sudah seharusnya juga seorang intelektual publik, orang yang memiliki keprihatinan dan komitmen sosial yang tinggi, kritis, dan bersemangat untuk mendorong perubahan.

Perkembangan jurnalisme, harus diakui, tidak sedikit disumbangkan oleh para jurnalis yang berasal dari etnis Tionghoa. Selain karena dunia dagang adalah dunia mereka, kelompok ini juga berpolitik melalui surat kabar dan telah banyak kita warisi. Koran terbesar hari ini, *Kompas*, tidak mungkin ada tanpa peranan P.K. Oyong (Auw Jong Peng-Koen). Jurnalisme sebelum Orde Baru menjadi sangat represif, yaitu jurnalisme yang hampir selalu membawa misi politik. Kita bisa

menyebut seorang tokoh yang mungkin paling penting, Mochtar Lubis, yang berprinsip lebih baik menutup koran dan membuat pabrik tahu, daripada harus menuruti kemauan pengusaha.

Toeti Kakiailatu adalah generasi jurnalis masa peralihan, dari jurnalisme perjuangan ke jurnalisme pragmatis yang erat dengan dunia bisnis. Surat kabar dan majalah saat ini disebut sebagai bagian dari apa yang dinamakan industri pers. Mungkin di antara berbagai penerbitan, baik surat kabar maupun majalah berita, tinggal *MBM Tempo* yang masih membawa misi perjuangan itu. Berkali-kali diberedel, berkali-kali terjadi konflik internal, *Tempo* terbukti masih eksis dan tetap menyuarakan kepentingan publik. Dalam sejarah panjang *Tempo* itu, Toeti Kakiailatu setia di dalamnya dan menjadi bagian dari kelompok jurnalis yang masih membawa misi perjuangan politik pers. Kelompok jurnalis ini kini seolah-olah menjadi “*a rare and endangered species*” di tengah makin kuatnya belitan gurita para pemilik modal, kekuatan kartel, dan para oligark. Revolusi teknologi informasi juga membuat media cetak makin tersaingi oleh media virtual yang melahirkan media sosial.

Menarik juga, ketika mereka yang merasa perlu menegaskan diri sebagai para pejuang kesetaraan gender dan sebutan feminis terasa begitu *fashionable* dan menjadi bagian dari selebritas. Sosok Toeti Kakiailatu terlihat berbeda karena gegap gempita dan kekenasan itu seperti tidak ditemukan pada dirinya, dia terkesan tidak peduli dengan kecenderungan-kecenderungan itu. Sebagai pekerja pers, dia bekerja dengan standar profesionalisme yang biasa-biasa saja dan tidak terlihat minta diperhatikan karena dia perempuan. Penampilannya juga seperti tidak terusik ketika pada sisi lain dari wajah masyarakat kita akhir-akhir ini memperlihatkan gejala menguatnya semacam kesalehan baru yang harus diperhatikan melalui cara berpakaian yang untuk wanita menjadi serba tertutup.

Toeti Kakiailatu ternyata memiliki *passion* lain di luar jurnalisme, yaitu di dunia akademia. Dengan menyisihkan waktunya yang sudah padat sebagai pemburu dan penulis berita, dia mendalami ilmu pengetahuan secara formal, dengan belajar antropologi dan kemudian sejarah. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu Toeti Kakiailatu, secara

kebetulan, di University Club UGM, dia bilang mau konsultasi disertasi dengan pembimbingnya, Prof. Bambang Purwanto. Beberapa waktu kemudian, saya bertemu lagi, juga secara kebetulan, di pesta pernikahan anak Bachrun Suwatdi, mantan wartawan *Tempo*. Saat pertemuan yang terakhir itu, Mbak Toeti sudah kelihatan payah, konon sebelumnya terkena *stroke*.

Raut mukanya masih menyisakan semangatnya yang menggebu-gebu, masih cerita niatnya untuk menyelesaikan disertasi, tapi saya kira fisiknya seperti tidak mau lagi diajak berkompromi. Seorang teman memberi tahu, semenjak ditinggal Om Fritz, suaminya, orang Ambon, dokter istana, yang halus dan kelihatan penyabar itu, Mbak Toeti seperti sangat kehilangan dan kesehatan fisiknya menurun drastis. Akan tetapi, semangat yang menggebu-gebu itu yang saya tidak tahu dari mana datangnya; dan sikapnya yang asertif dan penuh percaya diri itu membuatnya tak mungkin dilupakan. Dengan semangat tersebut, dia telah membuktikan diri mampu berdiri sejajar dengan koleganya di dunia jurnalistik yang seperti profesi-profesi lain, masih didominasi oleh kaum pria.



Umbu Landu Paranggi

Kepergian Umbu Landu Paranggi menjelang dini hari, 6 April 2021 seperti mengiringi melayangnya puluhan nyawa para korban banjir bandang yang dalam beberapa hari terakhir ini melanda berbagai tem-



Sumber: Setiawan (2016)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

pat di Nusa Tenggara Timur (NTT), termasuk di Sumba Timur, kampung halamannya.

Saya masih menyimpan foto keluarga itu. Foto keluarga berbingkai yang tersangkut di dinding rumah keluarga besar Umbu Landu Paranggi. Foto itu memperlihatkan kebahagiaan Umbu dikelilingi ketiga anak dan dua menantu. Foto itu, kata Umbu Wulang Tanaamahu, anak terkecil Umbu Landu Paranggi, dibuat di sebuah tempat di Bali, tidak lama setelah ia menikah. Mereka ke Bali menemui bapaknya, yang lama meninggalkan keluarga. Umbu Wulang bercerita pertemuan itu pun tidak lama katanya, hanya sekitar dua jam, setelah itu mereka berpisah lagi. Umbu Wulang menceritakan bahwa bapaknya meninggalkan rumah ketika ia belum berumur dua tahun dan pertemuan itu adalah pertemuan pertama dan terakhir.

Di rumah keluarga besar Umbu Landu Paranggi yang sudah tampak tua, namun masih terlihat kuat itu, saya menyaksikan sebuah ritus adat. Malam itu, setelah disampaikan beberapa kata sambutan, selembar kain Sumba tua yang terlipat rapi diserahkan dari perwakilan tetua adat Sumba Tengah ke tetua adat di Sumba Timur. Penyerahan kain tua itu menandai diteruskannya tanggung jawab penyelenggaraan Festival Air yang sejak beberapa tahun ditradisikan oleh masyarakat adat Sumba.

Festival Air, yang dalam bahasa Sumba adalah Festival Way Humba, digagas oleh para pegiat sosial di Sumba yang menganggap bahwa air sebagai sumber kehidupan harus dimuliakan. Para pegiat sosial ini melihat bahwa masyarakat harus disadarkan akan perlunya menjaga sumber-sumber air yang sangat langka di pulau yang mulai dikepung oleh industri turisme itu. Festival terakhir itu dipusatkan di Desa kelahiran Umbu Landu Paranggi, Desa Kananggar, Kecamatan Paberiwai, Kabupaten Sumba Timur.

Desa ini memiliki letak yang sangat unik, untuk sampai ke Desa ini kita harus melewati bukit-bukit batu dan padang sabana, dengan jalan meliuk di kiri-kanan jurang yang terjal. Dari atas hamparan bukit batu dan sabana itu yang kita lihat hanyalah sebuah keluasan, ke atas hamparan langit putih dan ke samping laut biru yang membentang

jauh seolah membentuk cakrawala tak bertepi. Desa yang sehari-hari kita tuju itu seperti menyuruk ke kedalaman sebuah lembah hijau yang subur. Rumah keluarga besar Umbu Landu Paranggi berada dalam perkampungan tersebut dan persawahan padi bisa dilakukan di lembah yang subur ini

Umbu Wulang Tanaamahu, anak terkecil dari tiga bersaudara, yang saat ini menjadi Direktur Walhi NTT itu, kami jemput di rumahnya di Waingapu. Kemudian kami mengarungi bukit dan sabana menuju desanya yang akan menjadi pusat Festival Air atau Festival Way Humba atau *kalarat wai*. Rupanya festival ini menjadi yang terakhir karena setelah itu pandemi Covid-19 menghentikan semua kegiatan yang mengundang banyak orang. Saat itu, setelah mengikuti Summer Program yang diselenggarakan oleh Elcid Li dari IRGSC dan Profesor Adam Seligman dari CEDAR selama hampir 2 minggu berakhir di Kupang, saya memutuskan berkunjung ke Sumba, menemui Romo Mike Keraf yang memimpin sebuah yayasan kemanusiaan di Waikabubak, Sumba Barat.

Seperti biasa, saya mengunjungi sebuah tempat tanpa agenda yang jelas. Begitupun waktu berkunjung ke Sumba. Salah satu yang ingin saya ketahui adalah tentang Marapu, sebuah agama lokal di Sumba yang konon mulai hidup kembali. Ketika bertemu dengan Romo Mike Keraf dalam sebuah konferensi yang membicarakan agama lokal di Yogya; saya mengatakan bahwa pernah berkeinginan ke Sumba dan rupanya kesempatan itu datang juga. Setelah *ngobrol* ke sana kemari pada hari pertama di kantornya, Yayasan Dobders, Romo Mike menawarkan apakah saya mau ikut mobil yang akan ke Sumba Timur untuk mengurus rencana Festival Air. Secara spontan saya mengiyakan dan ikut rombongan teman-teman dari Yayasan Donders yang akan mengambil terlebih dahulu kain Sumba dari tetua di Sumba Tengah, kemudian menyerahkannya ke tetua di Sumba Timur.

Saya hanya mendengar nama Umbu Landu Paranggi dari potongan-potongan berita, dari beberapa orang yang mengenalnya, dan dari Umbu Wulang Tanaamahu, sepanjang perjalanan dari Waingapu ke desanya, yang menurut saya begitu jauh terpencil. Rumah dan kampung itu seperti sebuah dunia tersendiri, dunia Orang Sum-

ba dan kuda-kudanya yang sangat terkenal itu. Saya membayangkan bagaimana dari kampung yang terpencil itu mereka menuju ke Waingapu, kota terbesar dan terdekat; sebelum kemudian menyeberang ke Jawa, ke Yogyakarta, tempat Umbu Landu Paranggi memulai kisahnya dan menjadi sebuah legenda tersendiri di dunia intelektual Indonesia. Umbu Landu Paranggi lahir tahun 1943, dua tahun sebelum kemerdekaan dan pada 1970-an saat sudah di Yogya berarti dia sudah berumur 27 tahun, sebuah usia yang tidak remaja lagi, tetapi juga belum dewasa. Kisahnya menjadi mentor para penyair muda Yogya rupanya diteruskan sejak 1980-an di Denpasar Bali.

Saya tidak tahu apakah Umbu Landu Paranggi termasuk yang dimasukkan oleh H.B. Jassin, Paus Sastra Indonesia, ke dalam sastrawan Angkatan 66, sebuah angkatan yang seperti dilahirkan sebagai bagian dari para penumbang Bung Karno. Kalau toh dimasukkan, saya kira Umbu Landu Paranggi juga tidak peduli. Saya ingat salah seorang penyair Angkatan 66, Taufik Ismail, menuliskan salah satu sajaknya untuk Umbu. Bagi saya yang menarik adalah kebiasaannya untuk tidak menampilkan diri dalam ruang publik, sebuah kebiasaan yang selalu dilakukan dari apa yang disebut sebagai intelektual publik. Dalam sebuah wawancara dengan novelis Salman Rusdhie, Edward Said mengatakan bahwa istilah intelektual publik adalah sebuah *redundancy* (Tripoli, 2013). Menurut Edward Said seorang intelektual dengan sendirinya selalu publik, tidak ada intelektual yang tidak publik, katanya.

Umbu Landu Paranggi seorang tokoh, penyair, mentor seni anak-anak muda yang oleh banyak kalangan dianggap sebagai pribadi yang misterius karena menghindari publikasi itu; mungkin inilah contoh yang paling tepat dari gambaran seorang intelektual. Sebagai intelektual, mungkin tulisan-tulisan beliau tidak cukup banyak, namun tetap berpengaruh begitu besar, membius; di ruang publik yang justru seperti tidak pernah dijamahnya, selalu dihindarinya. Semasa hidupnya, tidak sedikit yang mengagumi kiprahnya, tidak sedikit yang berusaha menemuinya; terbius ingin bertemu dan melihat langsung sosoknya yang misterius itu.

Ketika berada di tengah keluarga besarnya, saya menyatakan keinginan untuk menemui Umbu Landu Paranggi dan mereka meny-

takan senang jika nanti saya mencarinya di Bali. Secara kebetulan ketika di Malang saya bertemu dengan Ni Made Purnamasari, penyair dan penulis muda Bali yang mengatakan bahwa dia cukup dekat mengenal Umbu. Ketika saya menanyakan apakah dia bisa membantu jika suatu saat saya ingin bertemu Umbu, Ni Made Purnamasari menjawab “dengan senang hati” dan dia mengatakan tahu bagaimana cara untuk menemui Umbu. Ketika mendengar Umbu wafat, ada rasa sesal, mengapa Umbu pergi begitu cepat, padahal saya sudah merencanakan ingin sekali menemuinya.



Buku ini tidak diperjualbelikan.



Van Vollenhoven

Nama lengkapnya Cornelis van Vollenhoven, lahir 1874 dan meninggal 1933, sezaman dengan Kartini dan Dewi Sartika. Namanya diabadikan sebagai nama sebuah institut di Universitas Leiden, Institute van Vollenhoven, selain merupakan pusat penelitian, juga mendidik para



Sumber: Deadnaual (2019)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

calon master dan doktor di bidang hukum. Tidak sedikit doktor hukum dari Indonesia lulusan lembaga ini. Pada tanggal 22–24 Mei 2017 sebuah konferensi diadakan di Leiden dengan tema: “*Adat law 100 year on: Towards a new interpretation?*” dan kebetulan saya termasuk peserta konferensi ini. Dalam jeda makan siang, saya sempat ngobrol sebentar dengan direktur Vollehoven Institute saat itu, Profesor Jan Michiel Otto dan bertanya kepadanya, “Tidakkah kiprah van Vollenhoven di Indonesia didorong oleh motif politik?” Tampak kaget mendengar pertanyaan saya, sejenak dia terdiam dan kemudian menjawab, agak singkat: “Kalau Snouck iya, kalau dia enggak”. Snouck yang dimaksud oleh Professor Otto adalah Christiaan Snouck Hurgronye (1857–1936) alias Abdul Ghafar.

Snouck Hurgronye dan van Vollenhoven adalah dua orang sarjana Belanda yang ahli tentang bahasa dan budaya timur. Keduanya erat bekerja sama membantu pemerintah kolonial Belanda di tanah jajahannya, yang saat itu bernama Hindia Belanda. Menggunakan istilah Edward Said, kedua sarjana Belanda ini bisa digolongkan sebagai orientalis yang mengabdikan ilmunya bagi kepentingan pemerintah kolonial, seperti juga banyak ditemukan di Portugis, Spanyol, Inggris, Jerman, Prancis, dan Belgia. Ilmu-ilmu sosial di tangan para orientalis ini menjadi alat penting untuk mempelajari kebiasaan dan tingkah laku orang-orang yang dijajahnya agar kebijakan kolonial dapat berlangsung mulus tanpa kesulitan. Mereka tahu secara rinci watak orang jajahan dan bagaimana mengendalikan tingkah laku mereka di Hindia Belanda. Selain itu, mereka juga menemukan bahwa satu-satunya penghalang utama bagi kolonialisme saat itu adalah Islam dan orang Islam yang paling sulit ditaklukkan adalah orang Aceh. Setelah menyatakan masuk Islam dan naik haji, Snouck Hurgronye masuk dan tinggal lama di Aceh untuk meneliti watak orang Aceh. Akhirnya, Aceh memang berhasil ditaklukkan.

Ketika melakukan penelitian di Aceh inilah Snouck Hurgronye menemukan istilah adat dan memperkenalkan apa yang sampai sekarang disebut hukum adat (adat *recht*). Hal yang menarik, orang yang kemudian mengembangkan hukum adat menjadi sebuah kodifikasi hukum yang lengkap adalah Van Vollenhoven. Namun, berbeda deng-

an Snouck Hurgronje yang melakukan penelitian lama, menetap, dan beristri dua berasal dari Pasundan; Van Vollenhoven hanya berkunjung dua kali, itu pun singkat, ke Hindia Belanda. Van Vollenhoven lebih banyak bekerja di perpustakaan Leiden, menganalisis data, dan mengumpulkan informasi dari para asisten dan murid-muridnya yang sebagian adalah orang Indonesia. Salah satu muridnya adalah Supomo yang setelah kemerdekaan menjadi Menteri Kehakiman RI yang pertama.

Menurut Profesor Jan Michiel Otto –dalam pidato pengantar konferensi memperingati 100 tahun Van Vollenhoven– Van Vollenhoven sebagai “*a dreamer*” yang berniat untuk menyejahterakan rakyat jajahan, yaitu mengusulkan hukum terpisah antara yang diberlakukan bagi orang Belanda dan bagi rakyat jajahan dan itulah hukum adat.

Sepulang dari konferensi peringatan tersebut, saya harus memperbaiki *paper* karena oleh panitia konferensi akan diterbitkan dalam sebuah jurnal. Untuk merevisi *paper*, saya harus membaca cukup banyak buku, terutama tentang pemikiran-pemikiran Vollenhoven. Beruntungnya, sebagian telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Daniel Lev, sarjana Amerika, menulis disertasi doktornya di Universitas Cornell tentang evolusi hukum di Indonesia. Dalam resensinya terhadap buku Van Vollenhoven, Daniel Lev mengemukakan hal yang menurut saya sangat menarik dan penting, namun seperti tidak ada orang yang memperhatikan.

Daniel Lev (1984) dalam resensi itu mengutip kata-kata Van Vollenhoven yang menurut hemat saya kalimat kunci, demikian: “*The destruction of adat law will not pave the way for our codified law, but for social chaos and Islam*”. Bagi saya ini pernyataan menarik dan interpretasi baru terhadap pemikiran Vollenhoven harus dimulai dari sana, dan konteks sosial politik masa itu menjadi krusial untuk mengembangkan tafsir baru tentang adat dan hukum adat.

Tahun 1888 keresahan petani hampir merata di seluruh Jawa sehingga terjadi pemberontakan petani di Banten yang dipimpin oleh para ulama Islam. Dalam keresahan itu Islam memberikan inspirasi bagi perlawanan terhadap penindasan dan ketidakadilan yang dirasakan. Seperti di Aceh, Islam adalah satu-satunya *contending power*

bagi kekuasaan kolonial saat itu. Membaca ini secara singkat, kesimpulan saya penerapan hukum adat adalah strategi penting pemerintah kolonial untuk melumpuhkan Islam politik ketika pan-Islamisme mulai merebak. Ingat, saat itu nasionalisme belum tumbuh di Hindia Belanda.

Hari-hari ini, ketika pembicaraan kita tentang hukum adat dan masyarakat adat seperti menemui jalan buntu, tampaknya kita harus membaca sejarah Van Vollenhoven dengan lebih teliti. *Adatrechtpolitiek* (politik hukum adat), yang menjadi cikal bakal diskursus tentang hukum setelah Indonesia merdeka, hingga hari ini, perlu kita telaah dengan sungguh-sungguh jika kita ingin keluar dari impase politik gerakan masyarakat adat yang marak di era pasca-Orde Baru ini. Sebagai sebuah “*rallying point*” untuk mendapatkan rekognisi akan adanya komunitas-komunitas yang terpinggirkan dan menuntut untuk dikembalikannya tanah-tanah adat yang diambil secara paksa (*land dispossession*) oleh negara dan korporasi; memang perlu sebagai strategi jangka pendek, tetapi bagaimana prospek jangka panjangnya?

Membaca kembali Van Vollenhoven, tafsir saya mengatakan bahwa hukum adat yang diciptakannya adalah sebuah rekayasa politik untuk mencegah meluasnya Islam politik di Nusantara, strateginya bisa disebut sebagai “*identity politics from above*”, yaitu sebuah politik identitas dari atas. Sebagai politik identitas, *adatrecht politiek*, dalam “*new interpretation*” adalah taktik untuk mengalihkan perhatian dari politik kelas (*class politics*) yang sangat ditakuti oleh penguasa di mana pun. Di Amerika Serikat saat ini, Bernie Sanders, kandidat calon presiden yang sedang bertarung, ditakuti bahkan oleh rekan-rekannya sendiri di Partai Demokrat karena menggunakan *class politics* dan *democratic socialism* sebagai platformnya.

Apabila kita amati, rezim Jokowi yang semula seperti ingin memberikan perhatian pada komunitas-komunitas adat, saat ini seperti melupakannya. Janji Jokowi akan mengembalikan tanah dan hutan adat yang menjadi salah satu tema kampanye pada 2014 saat ini terlihat melemah. Mungkin ini saat yang tepat untuk memikirkan kembali apa yang sebaiknya dilakukan oleh mereka yang peduli dengan nasib warga komunitas adat yang selalu terpinggirkan. Gerakan politik

masyarakat adat, jika tidak hati-hati dapat terjebak pada politik identitas, seperti memang begitulah yang dimaksudkan oleh pembuatnya, Van Vollenhoven di awal abad ke-19, untuk membendung pesatnya perkembangan dan pengaruh Islam politik.

Profesor Tania Murray Li, antropolog dari Kanada yang banyak melakukan penelitian di Sulawesi Tengah, dalam epilog yang ditulisnya sebagai penutup kumpulan artikel konferensi 100 tahun Van Vollenhoven di Leiden yang dimuat dalam jurnal TAPJA (Murray Li, 2020) itu, menyimpulkan bahwa kegagalan dalam advokasi gerakan masyarakat adat yang telah berlangsung sekitar 25 tahun berhubungan dengan problematik yang diidap oleh konsep adat itu sendiri, tidak terkonsolidasinya kekuatan yang bisa merepresentasikan “rakyat” untuk mengubah ketidakadilan yang makin menganga. Oleh karena itu, memang diperlukan strategi baru agar mampu membangun aliansi yang bersifat multietnik, mengikutsertakan anak muda, baik di desa maupun di kota, dengan kata lain dibutuhkan platform politik yang bersifat inklusif.



Buku ini tidak diperjualbelikan.



Widjojo Nitisastro

Widjojo Nitisastro baru berusia setahun ketika Sumpah Pemuda dideklarasikan di Batavia 28 Oktober 1928. Lahir di Malang, Jawa Timur, pada tanggal 23 September 1927 dari keluarga nasionalis. Tidak aneh ketika menjadi siswa SMA di Malang, Widjojo remaja sudah



Sumber: Winarno (2012)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

ikut Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) dan terlibat dalam pertempuran melawan sekutu di Surabaya.

Ayahnya sendiri bekerja sebagai seorang Penilik Sekolah Rakyat, anggota Partai Republik Indonesia Raya (PARINDRA) yang aktif sebagai tenaga sukarela dalam organisasi petani. Ayahnya memilih menjadi guru Taman Siswa daripada menjadi guru sekolah resmi Belanda. Setelah perang usai dan lulus SMA, Widjojo masuk FEUI dan dekan pada saat itu adalah Soemitro Djojohadikusumo, seorang tokoh Partai Sosialis Indonesia (PSI). Sejak mahasiswa Widjojo sudah bekerja di Biro Perancang Negara (cikal bakal Bappenas) yang diketuai Soemitro Djojohadikusumo di bawah Perdana Menteri Djuanda. Pada saat inilah (1952–1953) Widjojo berkenalan dengan Nathan Keyfits, seorang ahli demografi berkebangsaan Kanada yang diperbantukan di Biro Perancang Negara. Pada tahun 1954, Widjojo dan Keyfits menulis buku berjudul *Penduduk dan Pembangunan Indonesia*.

Pada tahun 1955 dalam sebuah simposium, Widjojo, saat itu masih mahasiswa, berdebat dengan Wilopo, seorang sarjana hukum mantan perdana menteri dan petinggi Partai Nasional Indonesia (PNI), tentang peran negara dalam pembangunan ekonomi. Widjojo saat itu tidak sependapat dengan Wilopo yang mengatakan bahwa negara harus sepenuhnya mengendalikan arah pembangunan ekonomi. Widjojo berpendapat bahwa negara perlu memasukkan peran ekonomi pasar (*market economy*) agar tidak menjadi negara totaliter. Dalam debat yang intinya berkisar pada interpretasi terhadap Pasal 33 UUD 1945 itu sudah terlihat bahwa Widjojo Nitisastro pada dasarnya meragukan kegunaan prinsip “kekeluargaan” dalam mengelola pembangunan ekonomi. Setelah lulus dengan predikat *cumlaude* (1955) Widjojo diangkat menjadi Direktur Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM), FEUI. Tahun 1957 dengan beasiswa dari Ford Foundation Widjojo melanjutkan studi di Universitas Berkeley. Widjojo hanya memerlukan waktu 3,5 tahun untuk menyelesaikan doktornya, dengan tesis yang berjudul “*Migration, Population, Growth and Economic Development in Indonesia: A Study of the Economic Consequences of Alternative Patterns of Inter-island Migration*” (1961), sebuah studi

yang memperlihatkan perhatiannya pada dimensi demografis yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan di negerinya.

Sepulang dari Berkeley, pada Juni 1962, dalam usia 34 tahun, Widjojo dikukuhkan sebagai guru besar di FEUI dengan orasi yang berjudul “Analisa Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan”. Selain mengajar di FE UI, Widjojo dan Mohamad Sadli mengajar di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) dipimpin oleh Brigjen Suwanto yang bersahabat dengan Guy Pauker dari Rand Corporation yang punya kaitan dengan CIA. Tahun 1964 Widjojo menjadi Dekan FE UI menggantikan Soemitro Djohadikusumo yang hengkang ke luar negeri. Pada tahun itu juga Widjojo diangkat sebagai Direktur Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan (Leknas) LIPI. Setelah peristiwa 1965 meletus, Widjojo Nitisastro sudah mengetahui di mana dia harus memihak.

Pada tahun 1966 sebuah peristiwa penting terjadi yaitu dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret yang menjadi legitimasi bagi Soeharto untuk mengendalikan keadaan. Ketika situasi politik telah dikuasai oleh Soeharto dan operasi penghancuran PKI atau yang dianggap PKI mulai dilakukan, keadaan perekonomian sudah bisa dipastikan tidak terkendali. Paling tidak ada dua pertemuan “ilmiah” penting yang sangat menentukan arah rekayasa sosial (*social engineering*) selama 50 tahun kemudian. Pertemuan “ilmiah” pertama diselenggarakan oleh Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dengan nama “Simposium Menjelajah Tracee Baru”, 6–9 Mei, di mana Widjojo menyampaikan makalah berjudul “Menyusun Kembali Sendi-Sendi Ekonomi dengan Prinsip-Prinsip Ekonomi”. Pertemuan “ilmiah” yang kedua adalah Seminar Angkatan Darat ke-2, 25–26 Agustus, di mana Emil Salim menyampaikan makalah berjudul “Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Rencana Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi”. Tidak lama kemudian Widjojo diangkat sebagai Ketua Tim Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan oleh Jenderal Soeharto, dengan anggota antara lain Mohamad Sadli, Subroto, Ali Wardhana, dan Emil Salim.

Ketika tahun 1966 inflasi dikabarkan mencapai 600 persen, yang terjadi adalah stagflasi; dan adalah Widjojo Nitisastro dan tim

ekonom-teknokratnya yang menyusun agenda pemulihan ekonomi. Widjojo Nitisastro bisa dinilai sebagai pemimpin yang berhasil membuat Indonesia keluar dari krisis. Sebuah keputusan penting yang dampak negatifnya tidak terbayangkan saat itu adalah dikeluarkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) No 1/1967. Jeffrey Winters, dalam *Power in Motion: Capital Mobility and the Indonesian State* (1996) mengungkapkan dengan rinci proses negosiasi antara para CEO perusahaan-perusahaan multinasional dan perwakilan RI yang dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Bak Kuda Troya kepentingan para kapitalis menjebol kedaulatan negara melalui UU ini. Benteng kedaulatan negara memang telah runtuh di tahun 1965 dan Soekarno yang lama diincar untuk dijatuhkan telah dilucuti kekuasaannya pada tanggal 11 Maret 1966. Sejak itu sebuah *practical ideology* yang bernama pembangunan mulai menjadi haluan negara. Pembangunan ekonomi adalah sebuah ideologi kerja (*a working ideology*) yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi dengan prinsip dasar pragmatisme. Bagi Widjojo Nitisastro apa yang dikatakan orang sebagai kemajuan (progres) tidak lain adalah hasil dari sebuah perencanaan pembangunan ekonomi secara bertahap.

Widjojo Nitisastro adalah seorang intelektual yang berhasil membangun reputasinya sebagai seorang patron bagi sebuah kelompok ekonom-teknokrat yang melalui proses kolegal yang cukup lama berhasil menjadi sebuah *team-work* yang sangat solid. Oleh para koleganya Widjojo dianggap sebagai “lurah” sebuah tipe kepemimpinan tradisional Jawa yang menonjolkan bukan sekadar rasa hormat, tetapi rasa segan atas otoritas kekuasaan yang melekat pada diri sang “lurah”. Otoritas kekuasaan dari sang “lurah” bukan karena faktor usia yang lebih tua dari yang lain, namun karisma yang dibangun dari kemampuan memimpin, menemukan solusi, dan menunjukkan arah yang harus dipilih dalam sebuah situasi yang penuh ketidakpastian. Sebagai “lurah” Widjojo tidak mau banyak bicara, jika dicari wartawan dia cukup menyuruh Emil Salim sebagai juru bicaranya. Sampai akhir hayatnya Widjojo selalu menolak untuk ditulis biografinya. Widjojo Nitisastro tidak hanya memiliki daya nalar yang jernih, tetapi juga intuisi politik yang tajam. Keberhasilan Widjojo Nitisastro terletak pada kombina-

si faktor kepemimpinan dan *team-work*-nya yang teruji dalam waktu yang cukup panjang.

Widjojo Nitisastro boleh dibilang tidak lama menduduki posisi resmi dalam pemerintahan. Pada tahun 1983, saat masih berusia 55 tahun, sebuah usia yang masih relatif muda, Widjojo Nitisastro memilih untuk tidak meneruskan duduk secara resmi di pemerintahan. Seorang bekas asistennya menceritakan ada alasan pribadi yang membuatnya memilih berhenti duduk di pemerintahan. Posisinya sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, digantikan oleh orang kepercayaannya, Ali Wardhana. Meskipun tidak memiliki jabatan resmi, Widjojo Nitisastro tetap berkantor dan diberi tempat yang istimewa oleh Ali Wardhana. Kita tidak mungkin membayangkan Widjojo Nitisastro benar-benar pensiun. Meskipun mungkin jabatan resminya sekadar sebagai penasihat, hampir bisa dipastikan nasihatnya itulah yang akan menjadi dasar pertimbangan Ali Wardhana dan menteri-menteri ekonomi dan keuangan lainnya untuk mengambil sebuah kebijakan. *Legacy* Widjojo Nitisastro adalah pada keberhasilannya mengonstruksi sebuah ideologi kerja (*a working ideology*) yang secara konsisten diterapkan dalam pembangunan ekonomi yang terencana dan bertahap. Ideologi kerja yang ditanamkan oleh Widjojo Nitisastro ini terbukti mampu bertahan melewati berbagai perubahan politik, termasuk Reformasi 1998. Presiden dan pemerintahan boleh berganti, tetapi ideologi-kerja yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi dan investasi dengan prinsip pragmatisme; terus bertahan sampai hari ini. Mohamad Sadli, salah seorang anggota tim inti Widjojo yang mungkin paling ideologis dibandingkan yang lain suatu kali mengatakan pada Thee Kian Wie, “*What is good is what works*”, sebuah ungkapan yang mengingatkan pada Teng Hsiao Ping, perdana menteri yang berhasil mereformasi Tiongkok yang mengatakan, “Tidak peduli kucing itu putih atau hitam yang penting bisa menangkap tikus”.

Legacy Widjojo Nitisastro sejak dia mengubah strategi pembangunan dengan mantra pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan sampai sekarang. Keberhasilannya menurunkan angka kemiskinan adalah sebuah fakta yang tidak bisa dibantah, namun juga merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa kesenjangan ekonomi selama 50 tahun

meningkat dengan tajam. Kalau kita memang bangsa yang cerdas, ketika saat ini pandemi sudah pasti mengakibatkan krisis ekonomi; inilah kesempatan yang tepat untuk meninjau ulang ideologi kerja ala Widjojo Nitisastro. Kalau mau jujur, ideologi kerja ala Widjojo Nitisastro inilah sesungguhnya yang diam-diam telah menjadi haluan negara dan melandasi setiap RUU, UU, dan berbagai kebijakan pemerintah, di mana pertumbuhan ekonomi menjadi pertimbangan utama bukan keadilan sosial.



Epilog

Antologi *Ngrasani* Intelektual Publik

Ruth Indiah Rahayu

Pak Riwanto tidak mengenal saya, pun saya tidak mengenal Pak Riwanto. Melalui Mbak Maria Hartiningsih, mantan wartawan senior Kompas, kami ‘diperkenalkan’ sebagai nama. Jaminan Mbak Maria rupanya membuat Pak Riwanto maupun saya saling percaya hingga saya mendapat kesempatan membaca naskah tulisannya sebelum naik cetak. Selama saya membaca tulisannya, saya meraup dua jenjang perkenalan, *pertama* mengenai apa gagasan “Mencari Indonesia” yang menyertai Pak Riwanto dalam menyusun antologi tokoh publik ini. *Kedua*, realitas Pak Riwanto sebagai “dunia personal” yang ia pantulkan melalui cara membaca para tokoh publik yang dituliskannya.

Buku ini menurut saya hasil semacam antologi profil tokoh-tokoh yang disebut Pak Riwanto dengan istilah “tokoh publik” atau terkadang disebutnya “intelektual publik”. Apa pengertian tokoh yang

Buku ini tidak diperjualbelikan.

mendapat sandangan intelektual publik? Saya mengutip gagasan Pak Riwanto, selanjutnya saya *ikut-ikutan* memanggil Pak Ri, yang tertulis pada “Prakata” yang bunyinya sebagai berikut:

Tokoh-tokoh yang sosok-sosoknya saya tampilkan dalam kumpulan esai ini, dalam tafsir saya, adalah orang-orang yang di dalam dirinya itu menampilkan keindonesiaan. Dari mereka, melalui karya, kiprah dan pemikiran-pemikirannya, saya merasa menemukan, sedikit atau banyak, keindonesiaan itu (“Prakata” Pak Riwanto, paragraf 6).

Namun, frasa “menemukan keindonesiaan” bakal menimbulkan perdebatan dan sebelum perdebatan itu terbuka, Pak Ri telah mengakui bahwa pilihan tokoh –yang bermuatan keindonesiaan– lebih mengikuti intuisi Pak Ri atau saya katakan mengikuti pengetahuan intuitif Pak Ri daripada mengikuti kaidah riset yang ketat metodologi! Lalu, apakah hal ini memadai kebenarannya? Artinya, apakah intuisi Pak Ri merupakan sumber yang memadai kebenarannya dalam menilai tokoh publik yang telah membangun keindonesiaan?

Mengenai pengetahuan intuitif itu saya teringat pada pendapat Baruch de Spinoza (1632–1677), seorang filsuf klasik yang berasal dari Portugal dan kemudian hijrah ke Netherland. Dalam karyanya *The Ethics* (1677)³, Spinoza menjelaskan tentang kesatuan tubuh dan rasio sebagai sumber pengetahuan. Menurut Spinoza, pengetahuan manusia merupakan hasil kerja dari tubuh dan rasio serta kebenarannya berjenjang seturut status sumber pengetahuan tersebut. Sumber pertama berasal dari tanda-tanda yang ditangkap oleh pancaindra (*sensory*) yang masih berupa gambaran (*images*). Tangkapan indra tubuh ini setiap waktu diterima manusia, seperti gigitan semut merah pada kulit menimbulkan rasa perih (tidak dapat disimpulkan bahwa semut itu binatang buas). Sumber pengetahuan tangkapan indrawi itu menghimpun data-data kasar yang belum dapat disebut sebagai pengetahuan karena belum terverifikasi.

3 Diterjemahkan dari Latin ke Inggris oleh R. H. M. Elwes pada tahun 2009; lihat juga Lloyd (1994, 107-110).

Sumber pengetahuan yang kedua, dikatakan Spinoza berasal dari pengalaman manusia yang diperoleh secara acak (random). Data kasar atau data indrawi yang terkumpul tadi –dalam beberapa hal– memberikan pengalaman acak pada manusia dalam hubungannya dengan dunia luar. Contohnya tubuh kita seketika menghindar begitu bertemu dengan semut merah karena memori akan gigitannya yang membuat kulit perih. Emosi termasuk dalam kategori sumber pengetahuan ini, yang delusif (menipu), sebab merupakan gambaran (*images*) yang dipengaruhi oleh tubuh dan tubuהל yang mengakibatkan keadaannya.

Sumber pengetahuan yang ketiga, disebut Spinoza, intelek dan nalar, yaitu sumber pengetahuan hasil olahan rasio yang telah bekerja menyeleksi pengalaman acak, memberikan penjelasan atas suatu kejadian dan akibat-akibatnya (sebab-akibat) melalui prosedur rasional. Spinoza mengaku sumber pengetahuan olahan rasio ini mengandung kebenaran yang memadai.

Adapun sumber pengetahuan yang keempat, disebut Spinoza sebagai sumber pengetahuan tertinggi yang disebut *intuitive knowledge* yang mengandung kebenaran esensial (bukan kebenaran kalkulatif seperti kebenaran rasional). Pengetahuan ini diyakini Spinoza sebagai curahan intelek Tuhan ke dalam pikiran manusia yang lantas menjadi ide tubuh yang memiliki aneka ragam kapasitas (modalitas). Pengetahuan intuitif dapat menjamah pengetahuan diri (*self-knowledge*) manusia yang terhubung dengan atribut Tuhan yang disebut kasih. Karena kasih intelek Tuhan (*the intellectual Love of God*) diberikan kepada keindividuan manusia maka manusia dapat melakukan perbuatan-perbuatan besar untuk penyelamatan kehidupannya di dunia. Pengetahuan intuitif menerbitkan cahaya kesadaran diri yang tak lain adalah kesadaran reflektif atas kebertubuhan manusia. Kebenaran (*truth*) pengetahuan intuitif itu menurut Spinoza bersifat niscaya (*necessities*).

Apabila mendasarkan pada pandangan Spinoza tersebut, pengetahuan intuitif Pak Ri saat memilih para tokoh yang ditulisnya mengandung kebenaran nonkalkulatif, tetapi esensial sebagai hasil refleksinya terhadap dua perihal: pengertian Pak Ri tentang membangun keindonesiaan dan subjek yang melakukannya (*agency*). Hal itu me-

mantulkan pengetahuan diri Pak Ri (*self-knowledge*) yang dibentuk dalam kesehariannya sebagai peneliti di LIPI yang berkedudukan di Jakarta. Oleh sebab itu, daya jelajah Pak Ri cukup luas dalam menemukan tokoh-tokoh yang menurutnya memberikan sumbangan dalam “Mencari Indonesia”, meskipun sebatas pada tokoh yang artikulasinya banyak digaungkan, baik oleh media massa maupun karena publikasi tulisan-tulisannya. Simak pengakuan Pak Ri:

Sulit dihindari ada bias pribadiku dalam memilih seorang tokoh yang sosoknya ingin kutampilkan. Mereka umumnya memang tokoh publik yang sudah dikenal bahkan terkenal, jadi itu menjadi bias yang pertama, pilihannya cenderung elitis. Bias yang lain adalah, dan ini tidak mudah disembunyikan, adalah adanya semacam rasa hormat terhadap ketokohan dari sosok yang ingin ditampilkan itu (“Prakata” Pak Riwanto, paragraf 5)

Ada 67 orang tokoh publik dalam antologi ini dan sebanyak 19 orang adalah perempuan (lebih kurang 28 persen, masih di bawah kuota 30 persen perempuan). Seperti halnya relasi Pak Ri dengan tokoh yang ditulisnya, di antara tokoh publik itu ada yang saya kenal dalam relasi yang dekat, seperti Ibu Karlina, dosen dan promotor saya di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Ibu Dolorosa Sinaga, Ibu Sumiarsih, Pak GWR (Gunawan Wiradi), Pak Asvi Warman Adam, Rm. Magnis-Suseno, Asmara Nababan, Pramoedya Ananta Toer, Pak Herb (Herbert Feith), Pak Masri Singarimbun, Bu Trimurti, Asfinawati maupun Anis Hidayah. Ataupun yang saya kenal melalui karya tulisannya dan tidak mempunyai relasi dengan mereka, seperti A.B. Lopian, Takashi Shiraishi, Abdurrahman Surjomihardjo, Goenawan Mohamad, Marianne Katoppo, Mayling Oey, Ayu Utami, Toeti Herati Noerhadi. Ada juga yang kami pernah bertemu di sejumlah forum, seperti Ibu Gunarti, Muridan Widjoyo, dan Sinta Nuriyah Wahid. Bahkan ada yang baru saya kenal namanya melalui tulisan Pak Ri ini, seperti Agus Purwadianto, Pengendum Tampung, dan Aris Ananta. Terhadap tokoh publik yang saya kenal, informasi dan refleksi yang ditulis Pak Ri mengenai mereka terasa singkat dan umum. Namun, terhadap tokoh baik yang saya kenal melalui tulisannya atau baru saya kenal melalui tulisan Pak

Ri ini, informasi yang disajikan Pak Riwanto cukup membantu untuk tahu tentang “yang tidak saya ketahui”.

Dalam penyusunan antologi tokoh publik itu, tampaknya Pak Ri tidak bermaksud menyusun biografi, tetapi juga bukan biodata singkat. Cara menulis tentang para tokoh itu seperti orang Jawa bilang *ngrasani* (membicarakan seseorang tanpa orang tersebut tahu atau mengulas seseorang di belakang yang bersangkutan). *Ngrasani* tidak selalu bertendensi negatif, meskipun dalam praktiknya sering kali negatif. Tentu yang dilakukan Pak Ri adalah *ngrasani* yang positif, informatif, dan bahkan reflektif. Ketika Pak Ri *ngrasani*, tak jarang menggunakan sumber-sumber lain, termasuk menyenggol tokoh-tokoh lain yang terkadang tidak secara langsung punya kaitan dengan tokoh yang ditulisnya.

Tokoh publik yang mempunyai relasi dekat dengan Pak Ri tentu saja berkisar pada lingkup LIPI. Cerita Pak Ri menjadi informatif bagi pembaca seperti saya yang hanya mengenal mereka dari publikasi hasil risetnya. Salah satu peneliti sejarah yang dirasani Pak Ri dalam buku ini adalah sejarawan senior, Abdurrachman Surjomihardjo yang salah satu hasil penelitiannya membuat saya merenungkan tentang metodologi penelitian sejarah sosial yang bias gender. Dalam salah satu publikasi Pak Dur dengan judul *Kota Yogyakarta Tempo Doeloe: Sejarah Sosial 1880–1930* (2008), saya merasa betapa sebuah kota atau ruang sosial yang bernama Yogya hanya dihuni oleh laki-laki, padahal saya tahu di Yogya ada banyak aktivitas perempuan yang signifikan. Apa yang keliru dalam metodologi penelitian sejarah sosial sehingga perempuan seperti hilang dalam proses memproduksi ruang maupun kebudayaan? Namun, Pak Ri lebih memusatkan sumbangan Pak Dur pada sejarah nasionalisme, menurut saya hal itu tidak keliru.

Secara keseluruhan, Pak Ri memang tidak *ngrasani* karya tokoh publik yang ditulisnya, apakah dalam karya tersebut bias gender, bias kelas, bias ras, bias Jawa, atau bias-bias lainnya, melainkan semata menyoroti kiprah atau aktivitas yang memberikan sumbangan membangun keindonesiaan yang plural. Contohnya, Pak Ri kagum pada Asfinawati yang dengan terang-terangan tidak mengucapkan salam dalam bahasa Arab: *assalamualaikum* di depan forum yang tidak seluruhnya

muslim. Sikap Asfin itu mencerminkan keindonesiaan yang plural tanpa dominasi mayoritas. Hampir serupa dengan kiprah Gus Dur dan Gus Mus yang berupaya untuk mewujudkan Islam yang Indonesia (bukan Islam Arab) yang menerima perbedaan dan keragaman sebagai kekayaan “Mencari Indonesia”.

Sumbangan “Mencari Indonesia” dalam pandangan Pak Ri juga berarti mengangkat harkat dan hak warga negara yang dikorbankan dan dikucilkan oleh mereka yang memiliki kekuasaan atas nama negara. Pak Asvi dan Pak Asmara merupakan dua tokoh yang bekerja untuk itu meski dalam lapangan yang berbeda. Pak Ri merefleksikan Pak Asvi dalam gambaran seperti ini:

Sejak perasaannya tersentuh melihat wajah-wajah tua para tapol itu Asvi tergerak niatnya dan seperti berjanji pada diri sendiri bahwa dia harus membela mereka, para eks tapol itu, sebagai warga negara yang telah diperlakukan secara tidak adil dan dirampas hak-hak sipil dan politiknya. Sebagai sejarawan, Asvi Warman Adam melihat ada narasi sejarah yang sengaja dibuat oleh Orde Baru untuk melegitimasi kekuasaan yang diperoleh melalui cara-cara yang penuh kekerasan (“Asvi Warman Adam”, paragraf 3)

“Mencari Indonesia” rupanya tak hanya dalam konteks manusia, sebab Pak Ri juga tertarik pada tokoh publik yang menyuarakan perusakan ekologi, ruang dan lanskap manusia Indonesia bermukim dan hidup. Pak Ri mengangkat Ibu Gunarti yang sangat lantang menyuarakan hak masyarakat adat atas ruang hidup di sekitar Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah Utara. Hampir serupa tetapi dalam kapasitas makro ialah George Junus Aditjondro (GJA) yang banyak mengungkap perusakan ekologi secara sistematis di Indonesia. Mungkin karena persoalan ruang Indonesia itu pula, Pak Ri tertarik pada karya Van Vollenhoven yang memberikan kontribusi terhadap masalah hukum adat dan pertanahan di Indonesia. Demikian pula peranan Pak Gunawan Wiradi (GWR) yang sampai akhir hayatnya secara konsisten menyuarakan perlunya revolusi agraria di Indonesia untuk menata kembali kepemilikan atas ruang Indonesia secara adil.

Tampaknya Pak Ri juga risau terhadap bertumbuhnya politik identitas yang berpotensi menghambat proses “Mencari Indonesia”. Pak Ri mengapresiasi Ibu Karlina Supelli yang tak hanya menyoroti dimensi kosmologi, melainkan juga kondisi kehidupan manusia di bumi, khususnya Indonesia yang berada dalam tantangan politik identitas. Politik identitas tak hanya berkaitan dengan agama, ras atau suku, melainkan juga politik gender untuk menyembunyikan kontribusi perempuan dalam membangun keindonesiaan. Mengenai hal terakhir ini, Pak Ri bahkan mengangkat Kartini dan Dewi Sartika yang telah berjuang membangun keindonesiaan sebelum Indonesia dideklarasikan secara resmi.

Konteks membangun keindonesiaan di mata Pak Ri tak hanya berasal dari warga yang berkebangsaan Indonesia. Pak Ri menempatkan para Indonesianis, seperti Pak Herb, Pak Ben, Rm. Magnis-Suseno juga telah menyumbangkan gagasan keindonesiaan, baik melalui penelitian-penelitian maupun melalui pembangunan pendidikan.

Tentu saja tokoh publik yang dinyatakan telah membangun keindonesiaan oleh Pak Ri itu hanya sebagian kecil dari banyak manusia Indonesia yang berbuat banyak tetapi tidak disebut sebagai tokoh. Mereka tersembunyi dari Sabang sampai Merauke dan belum mempunyai kesempatan publikasi diri, mungkin tidak pernah bersuara di depan media, tidak mempunyai publikasi tulisan, atau tidak tinggal di ibu kota negara. Mereka ada dan menunggu orang seperti Pak Ri untuk menuliskannya. Sesuatu yang telah dilakukan Pak Ri ini, dengan segala keterbatasannya, merupakan upaya mendokumentasi supaya publik tahu, jika bukan kenal, bahwa frasa “Mencari Indonesia” itu sungguh kaya dimensi kerja.

Selamat untuk Pak Ri!

Cengkareng, 4 November 2021

Ruth Indiah Rahayu

Kandidat Doktor di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara,
Pegiat penulisan sejarah perempuan, dan
Pegiat di Masyarakat Filsafat Indonesia (MFI)



Buku ini tidak diperjualbelikan.



Epilog

Mewujudkan Impian Lama

Mohamad Sobary

Bung Riwanto itu sejak dulu, pada tahun-tahun kemahasiswaan di Asrama Mahasiswa Daksinapati, Rawamangun, memang tak banyak bicara. Sampai hari ini, di masa tuanya. Dia cenderung tampil sunyi. Macam ungkapan dunia para dalang; *'ning koyo banyu, neng koyo watu'* intinya diam. Dia tak suka promosi, tak suka pameran biarpun di dunia akademik hal itu tak perlu dianggap buruk. Kita justru diminta bertukar pikiran dan mengomunikasikan gagasan, ide atau pikiran yang sedang kira garap agar orang tahu dan mungkin memberikan tanggapan dan komunitas akademik kita menjadi dinamis dan hidup. Promosi dan menceritakan 'proyek' apa yang sedang kita kerjakan, mungkin termasuk kebajikan hidup di dunia akademik. Begitu pula di dalam komunitas akademik di LIPI. Kelihatannya Bung Riwanto memilih sikap: orang lain tak perlu tahu kapan kerjanya tapi tahu hasil-hasilnya. Rupanya ini menjadi pilihan untuk memhindarkan diri dari *'kokean omong'* besar mulut dan *'kokean cangkem'*.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Saya, orang yang paling dekat dengannya sejak zaman mahasiswa; dan teman-teman lain di LIPI, tak pernah tahu bahwa diam-diam dia menyimpan pikiran *'I have a dream'* dan tak seorang pun tahu pelan-pelan dia telah mewujudkannya. Dia tidak menyimpan impian politik, seperti Martin Luther King. Juga bukan *'a song to sing'* seperti dambaan ABBA. Tapi mirip sebaris lirik ABBA, Bung Riwanto pun berani *'... take the future even if you fail'* dan dia tidak *'fail'* sama sekali. Dia meninggalkan disiplin psikologi untuk menekuni disiplin lain, demografi, bukan untuk mencurahkan perhatian pada urusan-urusan teknis membatasi kelahiran, memuji-muji peran kondom, spiral atau pil, mencatat dengan takzim *'norma keluarga kecil bahagia sejahtera'* yang dibanggakan, melainkan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang lebih besar, lebih ideologis: profil keindonesiaan kita. *'I have a dream'* yang dia simpan dan tak diceritakan pada siapa pun itu mungkin menjadi sumpah yang menderanya siang malam sampai lahirnya Mencari Indonesia 1, 2, 3, dan buku keempat ini.

Buku Mencari Indonesia mungkin menunjukkan romantisme seorang akademisi yang *'rindu'* pada apa yang belum pernah dikenal wujud dan sifat-sifatnya, tetapi ada dalam imajinasi dan gambaran idealnya. Itu sebabnya dia memakai idiom *'mencari'*. Dan *'mencari'* itu menghadirkan banyak pertanyaan. Baginya, mungkin, Indonesia yang ada sekarang ini dianggap sosok yang mengecewakan sejak zaman Orde Baru ketika ia menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Psikologi pada akhir 1970-an. Pada periode itu dia menjadi aktivis mahasiswa yang gigih berbicara tentang politik dan membahas ketidakadilan dan rasa kecewa menyaksikan cara pemerintah mengelola Indonesia. Dia jengkel pada kaum teknokrat yang tak punya visi keindonesiaan yang jelas, tapi mereka itu *'kekasih'* Presiden Soeharto. Mau apa mahasiswa? Mereka memang tak bisa berbuat lain kecuali kecewa dan marah setinggi langit. Dulu itu, mahasiswa menjadi harapan untuk menjadi pusat perubahan dan mahasiswa juga tahu dirinya punya makna.

Tak mengherankan dirinya merasa penting dan saat itu mereka pun menjadi bagian dari ungkapan keren yang sedang mengumandang dalam jiwa yang penuh rasa bangga: *'the angry young men'*. Yang tak seperti mereka jelas kaum penjilat penguasa militer yang menindas. Ini

masa inkubasi pembentukan kesadaran politik yang dalam dan tak terlupakan hingga sekarang. Di luar kampus gema serupa terdengar dari kelompok Bang Ali, kaum pembangkang yang bermartabat dan gigih menggemakan kesadaran berkonstitusi. Mereka dimusuhi Orde Baru dan para pemujanya, tetapi Bang Ali dipuja puja mahasiswa.

Di sekitar ketegangan yg bersifat hitam putih macam inilah orientasi politik mahasiswa dibentuk. Di luar panggung resmi Senat Mahasiswa, Bung Riwanto masih punya dunia lain: dunia sastra. Dia aktif dalam kelompok diskusi sastra tiap malam Sabtu di Taman Sastra, di dalam kampus Rawamangun. Ini kelompok kecil, *'unorganized'* dan tak penting sama sekali bagi media yang majenun; dan tak tahu apa-apa tentang kekuatan tersembunyi di balik sastra yang dibahas dengan penuh gairah.

Diskusi sastra, apa lagi sastra Russia, sering berubah menjadi diskusi politik yang membara. Pengalaman ini agaknya tak terhapus dari dalam jiwa Bung Riwanto. Orientasi sastra-politik di masa lalu dan sekarang demografi-politik, artinya di mata Bung Riwanto berbagai hal ditinjau dari dimensi politiknya, bukan sebuah kesalahan metodologis dalam menafsirkan realitas sosial di sekitar kita. Agama pun baginya politik dan *'everything is politics'* ini memberinya fasilitas luar biasa untuk meninggalkan demografi yang sibuk menghitung jumlah penduduk menjadi demografi politik yang menempatkan seorang warga negara ke dalam *frame* politik yang lebih besar; *frame* keindonesiaan yang belum jelas konsep operasionalnya, tetapi terlihat remang-remang bayangannya dan Bung Riwanto merasa cukup dengan bayang-bayang ini. Sebagai akademisi dia hanya bertanya dan 'mencari' sesuatu yang tak tentu apa jawabnya dan dia niscaya akan menyampaikan pada kita apa yang ditemukan dalam pencariannya itu.

Buku ini dikerjakan selama masa pandemi yang membuat kebanyakan orang tak kreatif. Dia sebaliknya tak pernah bicara apa pun sebelumnya; tiba-tiba saya menerima hasilnya. Saya dikirim profil demi profil para tokoh yang ditulisnya di media sosial dan saya menduga dia menebus kekurangan (?) di masa lalunya? Dulu tak pernah dia menulis profil para tokoh seperti ini dan di masa pensiunnya dia membuat dirinya siap menyediakan waktu untuk menulisnya. Saya bertanya untuk

apa dan saya tak menemukan jawabnya sampai sekitar dua bulan lalu ketika saya tahu sejarah pemikiran para tokoh itu dihimpun dalam satu buku untuk diterbitkan. Di buku ini dia tak mencantumkan tambahan keterangan 'Mencari Indonesia' tapi saya paham, ini masih bagian dari rangkaian panjang pertanyaan mengenai keindonesiaan itu.

Kita dihadapkan pada teks panjang berisi 67 sketsa pemikiran kaum intelektual Indonesia dari 'Raden Saleh sampai Ayu Utami' untuk menggambarkan pluralitas tokoh yang dipilih dan ekspektasi tentang variasi pemikiran mengenai Indonesia dan keindonesiaan dari para tokoh tersebut. Penulis menyadari perlunya keseimbangan gender untuk memperoleh gambaran pemikiran yang tidak '*male centris*'. Dari 'Raden Saleh sampai Ayu Utami' juga mencerminkan jarak generasi yang sudah disadari sejak awal akan dengan sendirinya menampilkan variasi pemikiran mengenai Indonesia dan keindonesiaan. Jarak generasi dan keseimbangan gender ditampilkan dalam analisis yang bersifat khusus dan terpisah sebagai tanda bahwa penulis bekerja dengan kesadaran metodologis, bukan bertindak intuitif, agar bisa disebut berhak memperoleh data atau informasi yang 'sahih' mengenai apa yang dicarinya. Mungkin perlu diingat baik-baik bahwa di dalam buku ini, sebuah buku yang ditulis dengan gaya esai hasil penelitian kepustakaan dan bukan laporan deskriptif analitis dari lapangan, artinya bukan sebuah etnografi, penulis tampil bukan sebagai seorang sarjana yang harus selalu membangun orientasi akademik yang bersifat '*theoretically tight controlled*'. Produksi ilmu pengetahuan di dalamnya bukan dilakukan dengan gaya '*craftmanship*' seorang sarjana ahli yang ketat menampilkan dan menata data, membuat interpretasi, dan membangun teori sesudahnya.

Di buku ini, produksi ilmu pengetahuan dilakukan oleh penulis sebagai seorang intelektual yang berpikir reflektif, di luar batas-batas data dan hal teknis lainnya, serta di luar bangunan teoretik yang mungkin sudah terumus dengan baik. Berpikir runtut dengan gaya pertukangan seorang sarjana memang dapat menghasilkan simbol dan maknanya untuk sampai pada wujud pengetahuan tertentu. Namun, seorang intelektual yang berpikir reflektif dalam menulis suatu esai, bisa menempuh prosedur akademik yang lain. Esai, semua jenis esai, juga yang

ada di dalam buku ini, tak harus mengikuti kaidah-kaidah akademik yang baku, standar, dan kering. Di dunia antropologi ada rasa bangga mengatakan bahwa sebuah etnografi yang ditulis secara reflektif pada dasarnya merupakan sebuah *'artful science'*. Bung Riwanto mungkin juga boleh merasa sudah pada tempatnya menulis pemikiran para tokoh di dalam buku ini dan membiarkan mereka berkata semaunya tentang Indonesia dan keindonesiaan sebagaimana ada dalam imajinasi mereka. Saya kira pada tempatnya bahwa cara berpikir reflektif Bung Riwanto tak mengharuskan dirinya untuk membuat model-model, kategori-kategori, dan ukuran standar tentang Indonesia dan keindonesiaan sesuai dengan gagasannya sendiri. Pada prinsipnya, seperti sudah disinggung di atas, dia membiarkan para tokohnya berbicara secara merdeka dan dia mendengarkan suara atau mungkin aspirasi mereka itu dengan rasa bahagia seorang pendengar yang jiwanya juga merdeka. Jadi, dengan kata lain dia hanya memotret apa yang ada. Akan tetapi, di buku ini juga terasa bahwa tidak berarti dia sepenuhnya taat pada etika untuk meneliti hanya apa yang ada.

Di buku ini juga terasa bahwa dia ingin pula mendengar apa yang harus ada. Tulisannya tentang Ayu Utami dan pemberontakannya pada segala kemapanan estetika, politik, dan agama tampak agak samar-samar merefleksikan keinginannya untuk mendengar pula apa yang harus ada. Ayu bagian dari kaum muda dan kelihatannya yang termuda, pasti masih memiliki gambaran lain lagi yang belum dinyatakan secara simbolik maupun ekspresif tentang Indonesia dan keindonesiaan. Penulis berharap yang belum dinyatakan itu perlu dinyatakan dan keinginannya bukan sebuah dosa metodologis. Sebagai orang yang mengenal Bung Riwanto sejak mulai belajar berpikir metodologis dan teoritik di awal karier akademik di LIPI hingga di hari tuanya sekarang ini, ada kemajuan yang bisa disebut progresif revolusioner di dalam pemikiran teoritiknya. Buku ini membuat saya terkejut karena tiba-tiba dia seperti dilahirkan kembali sebagai manusia baru yang menampilkan orientasi akademik yang juga baru. Sekarang ini dia merasa tak ada sesuatu pun yang aneh bila dalam tema akademiknya dia menggunakan novel, dunia seni, sebagai bahan mentah dan landasan analisis untuk memahami suatu fenomena dalam ilmu sosial. *Pangeran dari*

Timur, novel tentang Raden Saleh dan beberapa karya terbaik Ayu Utami, ditampilkan di buku ini sebagai cara memahami fenomena kehidupan di luar dunia sastra ini. Ini menggambarkan pilihan metodologis dan orientasi teoritik yang tak dijerat secara kaku hanya oleh hukum-hukum ilmu sosial.

Orang yang sudah mampu mengembangkan perspektif dan disiplin keilmuannya secara lintas batas seperti ini kelihatannya sukar diminta pertanggungjawaban teoritik yang teknis sifatnya dan formil atas kajiannya yang reflektif mengenai suatu bidang. Ini seorang Riwanto baru yang mungkin pencariannya tentang Indonesia membuat kita bertanya apa bedanya jika disandingkan dengan kaum pelancong yang menempuh jarak jauh di negeri asing dan menorehkan catatan mengenai ilmu bangsa-bangsa dalam buku-buku catatannya dan sangat berharga bagi dunia ilmu pengetahuan di abad-abad berikutnya. Saya tak bisa meramal, tetapi saya menjadi saksi bagaimana Bung Riwanto berkembang di hari tuanya.

Jika dalam kesibukan kerja lapangan untuk melakukan tafsir atas simbol simbol yang dihadapinya, peneliti bertanya tidak hanya pada para aktor lapangan, yaitu warga desa yang mungkin jawabannya sangat terasa tidak mencerminkan makna realitas simbolik yang ditelitinya; maka dengan sendirinya peneliti juga bertanya pada pihak lain yang diduga lebih otoritatif, misalnya Romo Pastur yang membimbing warga desa bersangkutan. Di sini ada yang penting dicatat, bahwa peneliti tidak puas atas jawaban dari aktor-aktor lapangan tadi dan beralih pada Romo Pastur bukan karena ketidakpuasan pribadi melainkan karena ketidakpuasan metodologis. Kepada pihak lain lagi yang juga dianggap otoritatif dalam tafsir simbol pun, bukan hanya Romo Pastur, peneliti dibenarkan mendiskusikan tafsir simbolik itu secara terbuka. Proses *'negotiated meaning'* itu dilakukan secara akademik untuk memperoleh pemahaman yang paling dekat dengan makna realitas yang dibungkus simbol-simbol tersebut.

Negosiasi penulis dengan para tokoh yang dituliskannya memang tidak dinyatakan secara eksplisit seperti dilakukan orang antropologi di lapangan. Makna atas tafsir itu pun tak disebutkan secara eksplisit pada para pembaca. Produk pemikiran reflektif seperti ini tidak melu-

kai metodologi dan tidak menodai teori yang mana pun lewat orientasi akademiknya yang makin luas; dan ini pula potret Bung Riwanto yang di hari tuanya ‘Uro-uro’ dalam *‘the sound of silence’* dan bergerak mewujudkan impian lamanya.

Mohamad Sobary

Mantan Direktur Kemitraan dan
Direktur Kantor Berita Antara,
seorang budayawan yang menerbitkan
buku kumpulan esai dan beberapa novel.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Buku ini tidak diperjualbelikan.



Sumber Karangan

- Abdurrahman Surjomihardjo Tirtosudarmo, R. (2020, 29 September). Abdurrahman Surjomihardjo. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-11694-post-abdurrahman-surjomihardjo.html>
- A.B. Kusuma Tirtosudarmo, R. (2020, 1 Juli). A.B. Kusuma. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-11096-post-ab-kusuma---.html>
- Adnan Buyung Nasution Tirtosudarmo, R. (2019, 8 Juli). Adnan Buyung Nasution. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-8609-post-adnan-buyung-nasution.html>
- Adri B. Lopian Tirtosudarmo, R. (2020, 24 September). Adrian B. Lopian. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-11659-post-adrian-b-lopian.html>
- Agus Purwadianto Tirtosudarmo, R. (2020, 30 Maret). Agus Purwadianto. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-10485-post-agus-purwadianto.html>
- Anis Hidayah Tirtosudarmo, R. (2020, 21 Januari). Anis Hidayah. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-9945-post-anis-hidayah.html>
- Arbi Sanit Tirtosudarmo, R. (2021, 25 Maret). Arbi Sanit. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-12296-post-arbi-sanit.html>

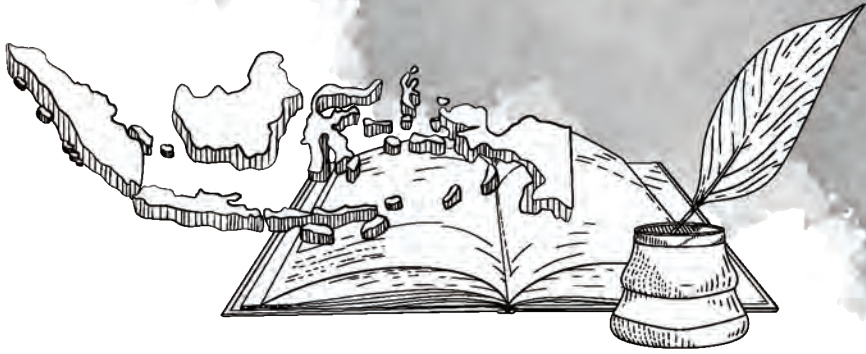
- Arief Budiman Tirtosudarmo, R. (2019, 27 Mei). Arief Budiman. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-8297-post-arief-budiman.html>
- Aris Ananta Tirtosudarmo, R. (2020, 28 Januari). Aris Ananta. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-10005-post-arisananta.html>
- Asfinawati Tirtosudarmo, R. (2019, 7 Oktober). Asfinawati. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-9315-post-asfinawati.html>
- Asmara Nababan Tirtosudarmo, R. (2020, 13 Januari). Asmara Nababan. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-9880-post-asmara-nababan.html>
- Asvi Warman Tirtosudarmo, R. (2019, 30 September). Asvi Warman. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-9261-post-asvi-warman---.html>
- Ayu Utami Tirtosudarmo, R. (2020, 10 Februari). Ayu Utami. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-10108-post-ayu-utami.html>
- Bambang Hidayat Tirtosudarmo, R. (2019, 29 Juli). Bambang Hidayat. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-8810-post-bambang-hidayat.html>
- Ben Anderson Tirtosudarmo, R. (2019, 17 Juni). Benedict Anderson. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-8428-post-benedict-anderson.html>
- Dewi Sartika Tirtosudarmo, R. (2020, 5 Maret). Dewi Sartika. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-10278-post-dewi-sartika.html>
- Dolorosa Sinaga Tirtosudarmo, R. (2019, 17 September). Dolorosa Sinaga. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-9151-post-dolorosa-sinaga---.html>
- Edi Sedyawati Tirtosudarmo, R. (2019, 2 September). Edi Sedyawati. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-9030-post-edisedyawati---.html>
- Garin Nugroho Tirtosudarmo, R. (2020, 17 Februari). Garin Nugroho. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-10155-post-garin-nugroho.html>
- Gus Dur Tirtosudarmo, R. (2020, 1 Juni). Gus Dur. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-10915-post-gus-dur.html>

- Gus Mus Tirtosudarmo, R. (2020, 18 Mei). Gus Mus. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-10831-post-gus-mus.html>
- George Junus Aditjondro Tirtosudarmo, R. (2019, 10 Juni). George Junus Aditjondro. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-8377-post-george-junus-aditjondro.html>
- Goenawan Mohamad Tirtosudarmo, R. (2019, 20 Mei). Goenawan Mohamad. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-8231-post-goenawan-mohamad.html>
- Gunarti Tirtosudarmo, R. (2019, 18 November). Gunarti. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-9558-post-gunarti.html>
- Gunawan Wiradi Tirtosudarmo, R. (2019, 26 November). Gunawan Wiradi. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-9612-post-gunawan-wiradi.html>
- Herbert Feith Tirtosudarmo, R. (2020, 13 Juli). Herbert Feith. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-11175-post-herbert-feith-.html>
- Herman Lantang Tirtosudarmo, R. (2020, 14 Mei). Herman Lantang. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-10807-post-herman-lantang.html>
- Hikmat Budiman Tirtosudarmo, R. (2021, 19 Juli). Hikmat Budiman dan Mimpi Ilmuwan Sosial Indonesia. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-12534-post-hikmat-budiman-dan-mimpi-ilmuwan-sosial-indonesia---.html>
- Jalaludin Rakhmat Tirtosudarmo, R. (2019, 19 Agustus). Jalaludin Rakhmat. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-8943-post-jalaludin-rakhmat.html>
- Karlina Supelli Tirtosudarmo, R. (2019, 15 Juli). Karlina Supelli. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-8666-post-karlina-supelli.html>
- Kartini Tirtosudarmo, R. (2020, 13 April). Kartini. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-10599-post-kartini.html>
- Magnis Suseno Tirtosudarmo, R. (2019, 23 September). Franz Magnis-Suseno. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-9207-post-franz-magnissuseno.html>
- Manuel Kaisiepo Tirtosudarmo, R. (2019, 26 Agustus). Manuel Kaisiepo. *Kajanglako*. <http://kajanglako.com/id-8983-post-manuel-kaisiepo.html>

- Marianne Katoppo Tirtosudarmo, R. (2019, 31 Desember). Mariane Katoppo. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-9799-post-mariane-katoppo.html>
- Muridan Widjojo Tirtosudarmo, R. (2021, 19 Maret). Muridan Widjojo. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-12291-post-muridan-widjojo.html>
- Marsillam Simanjuntak Tirtosudarmo, R. (2019, 11 November). Marsillam Simanjuntak. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-9507-post-marsillam-simanjuntak-.html>
- Masri Singarimbun Tirtosudarmo, R. (2019, 22 Juli). Masri Singarimbun. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-8734-post-masri-singarimbun.html>
- Max Lane Tirtosudarmo, R. (2019, 10 September). Max Lane. *Kajanglako*. <http://kajanglako.com/id-9101-post-max-lane.html>
- Mayling Oey Tirtosudarmo, R. (2019, 10 Desember). Mayling Oey. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-9691-post-mayling-oey.html>
- Melly G. Tan Tirtosudarmo, R. (2020, 7 Mei). Mely G Tan. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-10790-post-mely-g-tan.html>
- Mundardjito Tirtosudarmo, R. (2019, 23 Desember). Mundardjito. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-9766-post-mundardjito.html>
- Nh. Dini Tirtosudarmo, R. (2020, 6 Juli). Nh Dini. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-11128-post-nh-dini--.html>
- Nono Anwar Makarim Tirtosudarmo, R. (2019, 4 November). Nono Anwar Makarim. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-9463-post-nono-anwar-makarim.html>
- Nurcholish Madjid Tirtosudarmo, R. (2019, 23 Oktober). Nurcholis Madjid. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-9405-post-nurcholis-madjid.html>
- Pengendum Tampung Tirtosudarmo, R. (2019, 2 Desember). Pengendum Tampung. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-9644-post-pangendum-tampung.html>
- Paramita Abdurachman Tirtosudarmo, R. (2019, 24 Juni). Paramita Abdurachman. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-8497-post-paramita-abdurachman.html>

- Pramoedya Ananta Toer Tirtosudarmo, R. (2020, 20 Juli). Pramoedya Ananta Toer. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-11207-post-pramoedya-ananta-toer---.html>
- Raden Saleh Tirtosudarmo, R. (2020, 20 April). Raden Saleh. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-10660-post-raden-saleh.html>
- Sangkot Marzuki Tirtosudarmo, R. (2020, 6 April). Sangkot Marzuki. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-10539-post-sangkot-marzuki.html>
- S.K. Trimurti Tirtosudarmo, R. (2020, 16 Juni). S.K. Trimurti. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-11013-post-sk-trimurti---.html>
- Slamet Iman Santoso Tirtosudarmo, R. (2021, 15 Februari). Slamet Iman Santoso. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-12259-post-slamet-iman-santoso.html>
- Sardono Waluyo Kusumo Tirtosudarmo, R. (2019, 1 Juli). Sardono W. Kusumo. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-8564-post-sardono-w-kusumo.html>
- Sayogyo Tirtosudarmo, R. (2020, 3 Februari). Sajogyo. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-10050-post-sajogyo.html>
- Semsar Siahaan Tirtosudarmo, R. (2020, 26 Februari). Semsar Siahaan. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-10215-post-semsar-siahaan.html>
- Sinta Nuriyah Wahid Tirtosudarmo, R. (2019, 12 Agustus). Sinta Nuriyah Wahid. *Kajanglako*. <http://kajanglako.com/id-8903-post-sinta-nuriyah-wahid---.html>
- Sucoro Tirtosudarmo, R. (2019, 16 Desember). Sucoro. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-9724-post-sucoro.html>
- Sumarsih Tirtosudarmo, R. (2020, 23 Maret). Sumarsih. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-10427-post-sumarsih.html>
- Suprpto Suryodarmo Tirtosudarmo, R. (2019, 29 Desember). Remembering Suprpto Suryodarmo. *Kajanglako*. <http://kajanglako.com/id-9795-post-remembering-suprpto-suryodarmo.html>
- Soe Hok Gie Tirtosudarmo, R. (2020, 8 Juni). Soe Hok Gie. *Kajanglako*. <http://kajanglako.com/id-10958-post-soe-hok-gie.html>

- Syafii Maarif Tirtosudarmo, R. (2019, 15 Oktober). Syafii Maarif. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-9361-post-syafii-maarif.html>
- Takashi Shiraishi Tirtosudarmo, R. (2020, 27 April). Takashi Shiraishi. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-10712-post-takashi-shiraishi---.html>
- Th. Sumartana Tirtosudarmo, R. (2020, 6 Januari). Th. Sumartana. *Kajanglako*. <http://kajanglako.com/m/id-9834-post-th-sumartana.html>
- Toeti Herati Noerhadi Tirtosudarmo, R. (2019, 3 Juni). Toeti Heraty Noerhadi. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-8354-post-toeti-heraty-noerhadi.html>
- Toeti Kakiailatun Tirtosudarmo, R. (2019, 28 Oktober). Toeti Soewarti Kakiailatun. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-9427-post-toeti-soewarti-kakiailatun.html>
- Umbu Landu Paranggi Tirtosudarmo, R. (2021, 7 April). Umbu Landu Paranggi. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-12324-post-umbu-landu-paranggi.html>
- Van Vollenhoven Tirtosudarmo, R. (2020, 9 Maret). Van Vollenhoven. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-10302-post-van-vollenhoven.html>
- Widjojo Nitisastro Tirtosudarmo, R. (2020, 24 Juni). Widjojo Nitisastro. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-11070-post-widjojo-nitisastro.html>



Daftar Pustaka

- Abdurachman, P. R. (2008). *Bunga angin Portugis di Nusantara: Jejak-jejak kebudayaan Portugis di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia; LIPI Press.
- Adi, G. N. (2019, 30 Desember). Obituary: Suprpto Suryodarmo, 'free movement' guru for hundreds of dancers. *The Jakarta Post*. <https://www.thejakartapost.com/life/2019/12/30/obituary-suprpto-suryodarmo-free-movement-guru-for-hundreds-of-dancers.html>.
- Adicondro, G. Y. (2012, 17 Maret). [Profil guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr. Sayogyo di kantornya, Bogor, 27 Agustus 1977]. Dalam S. Movementi, Bapak sosiologi pedesaan Prof. Sajogyo tutup usia. *Tempo*. <https://nasional.tempo.co/read/390803/bapak-sosiologi-pedesaan-prof-sajogyo-tutup-usia>.
- Agnes, T. (2018, 14 Agustus). Sastrawan Ayu Utami akan terima Achmad Bakrie Award 2018 [Gambar]. *Detik.com*. <https://hot.detik.com/book/d-4165163/sastrawan-ayu-utami-akan-terima-achmad-bakrie-award-2018>.

- Agustin, D. (2016, 11 Agustus). Sardono W Kusumo tampilkan 3 pertunjukan di Singapura [Gambar]. *Republika*. <https://www.republika.co.id/berita/obq5h0328/sardono-w-kusumo-tampilkan-3-pertunjukan-di-singapura>.
- Alfian. (1997). Tan Malaka: Pejuang revolusioner yang kesepian. *Prisma*, 8, 57–76.
- Ali, M. (2019, 12 September). Sahur keliling dan sekotak kurma, kenangan Sinta Wahid dengan Habibie [Gambar]. *Jawa Pos*. <https://www.jawapos.com/nasional/12/09/2019/sahur-keliling-dan-sekotak-kurma-kenangan-sinta-wahid-dengan-habibie/>.
- Alim, M. (2018, 21 Februari). Pendidikan “zaman now” didominasi kaum perempuan [Gambar]. *Jurnas*. <https://www.jurnas.com/artikel/29486/Pendidikan-Zaman-Now-Didominasi-Kaum-Perempuan/>.
- Almudatsir, H. (2019, 7 Oktober). Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati [Gambar]. *Jawa Pos*. <https://www.jawapos.com/opini/wawancara/07/10/2019/soal-perppu-kpkasfinawati-presiden-harus-mampu-melihat-dengan-jernih/>.
- Ananta, A. (2005). The negative and positive uses of socio-economic statistics. Dalam V. R. Hadiz, & D. Dhakidae (Ed.), *Social science and power in Indonesia*. Equinox Publishing & ISEAS.
- Anderson, B. (1970). In memoriam: Soe Hok Gie. *Indonesia*, 9, April, 225–227.
- Anderson, B. (1983). *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of Nationalism*. Verso.
- Anderson, B. (1999). *Nasionalisme Indonesia kini dan di masa depan*. Anjing Galak Penerbitan.
- Anderson, B. R. O’G., & Kahin, A. (Eds.). (1982). *Interpreting Indonesian politics: Thirteen contributions to the debate*. Equinox Publishing.
- Anoda, A. (2020, 15 Agustus). Arsitek fakultas psikologi [Gambar]. *Tempo*. <https://majalah.tempo.co/read/laporan-khusus/161191/riwayat-hidup-dokter-slamet-iman-santoso-pelopor-pendidikan-psikologi-di-indonesia>

- Anonim. (1966). *Simposium kebangkitan semangat '66 mendjeladjah tracee baru*. Universitas Indonesia.
- Anonim. (2020, 23 November). Aksi kamisan. *Wikipedia*. https://id.wikipedia.org/wiki/Aksi_Kamisan.
- Anonim. (t.t.). NH Dini. *Wikipedia*. https://id.wikipedia.org/wiki/Nh._Dini (terakhir diperbarui pada 13 Juli 2021).
- Anwar, R. (1995). *Soebadio Sastrosatomo: Pengemban misi politik*. Pustaka Utama Grafiti.
- Aqsa, A., Trisasonoko, D., Moreira, D. D. P., Yonesta, F., Halidin, H., Efendi, J., Putra, M. S., & Agus, S. A. (2015). *Bantuan hukum di wilayah konflik: Pembelajaran tentang konflik dan konsep bantuan hukum struktural*. LBH Jakarta.
- Ardi, G. (2020, 16 Desember). Soe Hok Gie: pemuda Indonesia yang merdeka [Gambar]. *Zenius*. <https://www.zenius.net/blog/biografi-soe-hok-gie>.
- Ariane, Z. (2015, 8 Maret). Muridan, hari ini, setahun yang lalu [Gambar]. *LIPi*. <http://lipi.go.id/lipimedia/muridan-hari-ini-setahun-yang-lalu/11817>.
- Aurelia V [@senjatanuklir]. (2021, 21 Februari) kata 'giok' berasal dari topolek hokkien untuk yu dalam bahasa mandarin [Gambar]. Twitter. <https://twitter.com/senjatanuklir/status/1363476447562719232>.
- Bachtiar, H. (1979). Kartini dan peranan wanita dalam masyarakat kita. Dalam Katoppo, A. (Ed.), *Satu abad Kartini*. Sinar Harapan.
- Badrun, U. (2021, 11 Februari). Robohnya marwah universitas (dari korupsi hingga jual beli doktor honoris causa). *Tempo*. <https://kolom.tempo.co/read/1431946/robohnya-marwah-universitas-dari-korupsi-hingga-jual-beli-doktor-honoris-causa>.
- Baihaqi. (2019, 21 April). Mengenal Gunarti, Kartini dari Pegunungan Kendeng yang getol menolak pabrik semen [Gambar]. *Jatengtoday*. <https://jatengtoday.com/mengenal-gunarti-kartini-dari-pegunungan-kendeng-yang-getol-menolak-pabrik-semen-22088>.
- Banu, I., & Effendi, K. (2020). *Pangeran dari Timur*. Bentang Pustaka.

- Baskoro, Y. (2018, 18 Mei). Max Lane on how not to get lost in translating Pramoedya Ananta Toer [Gambar]. *Jakarta Globe*. <https://jakartaglobe.id/culture/max-lane-not-get-lost-translating-pramoedya-ananta-toer/>.
- Basri, A. (2002, 11 Oktober). Herbert Feith [Gambar]. *Data Tempo*. <https://www.datatempo.co/foto/detail/P1110200200217/herbert-feith>.
- BBC Indonesia. (2013, 17 Juni). 'Menarilah' bersama pematung Dolorosa [Gambar]. *BBC Indonesia*. https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2013/06/130617_senibudaya_pameranpatung_dolorosa.
- BBC News. (2012, 31 Juli). Kepedulian arkeolog Mundardjito [Gambar]. *BBC News Indonesia*. https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2012/07/120731_tokoh_juli2012_mundardjito.
- Beatty, A. (1999). *Varieties of Javanese religion, an anthropological account*. Cambridge University Press.
- Beauvoir, S. D. (1949). *The second sex*. Gallimard.
- Blackburn, S. (2004). *Women and the state in modern Indonesia*. Cambridge University Press.
- Blessty, B. (2017, 14 Agustus). Mengenang SK Trimurti [Gambar]. *Remotivi*. <https://www.remotivi.or.id/kabar/411/mengenang-sk-trimurti>
- Bloom, K. (2014). *Embodied lives: Reflections on the influence of Suprpto Suryodarmo and amerta movement* (S. Reeve dan M. Galanter, Eds.). Triarchy Press.
- Blusse, L. (2021). Remembering Muridan Widjojo. Dalam R. Tirtosudarmo & C. Pamungkas (Eds.). *Emansipasi Papua: Tulisan para sahabat untuk mengenang dan menghormati Muridan S Widjojo (1967-2014)*. Imparsial, FAPD, Kampung Limasan Tonjong, dan TIFA.
- Breman, J., & Wiradi, G. (2002). *Good times and bad times in rural Java: Case study of socio-economic dynamics in two villages towards the end of the twentieth century*. KITLV Press.
- Budiman, H. (1997). *Pembunuhan yang selalu gagal: Modernisme dan krisis rasionalitas menurut Daniel Bell*. Pustaka Pelajar.
- Budiman, H. (2002). *Lubang hitam kebudayaan*. Kanisius.

- Budiman, H. (Ed.). (2019). *Ke Timur haluan menuju: Studi pendahuluan tentang integrasi sosial, jalur perdagangan, adat, dan pemuda di kepulauan Maluku*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Budiman, H. (Ed.). (2020). *Sudah senja di Jakarta*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Carey, P. (2012). *Kuasa ramalan: Pangeran Diponegoro dan akhir tatanan lama di Jawa, 1785-1855*. KPG.
- Chaniago, B. (2001, 23 Januari). TH. Sumarta [Gambar]. *Tempo*. <https://www.datatempo.co/foto/detail/P1207200217571/th-sumartana>.
- Deadnauval. (2019, 29 April). Sejarah hidup Cornelis Van Vollenhoven, bapak hukum adat Indonesia [Gambar]. *Tirto.id*. <https://tirto.id/sejarah-hidup-cornelis-van-vollenhoven-bapak-hukum-adat-indonesia-dner>.
- Dekker, E. D. (1860). *Max havelaar*. J. De Ruyter.
- De Haan. (1935). *Oud Batavia: Gedenkboek uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen naar aanleiding van het driehonderd jarig bestaan der stad in 1919*. Nix, Dua Djilid.
- Dian, N. (2015, 23 September). Adnan Buyung deserves to be hero: Jimly [Gambar]. *Tempo English Version*. <https://en.tempo.co/read/703236/adnan-buyung-deserves-to-be-hero-jimly>.
- Dini, N.H. (1956). *Dua dunia: Kumpulan cerpen*. Grasindo
- Dini, N.H. (1985). *Pada sebuah kapal*. Gramedia Pustaka Utama.
- Dini, N.H. (2000). *La barka*. Grasindo.
- Dini, N.H. (2018). *Gunung Ungaran: Lerep di lerengnya, Banyumanik di kakinya*. Media Pressindo.
- Drooglover, P. (2009). *An act of free choice: Decolonisation and the right to self-determination in West Papua*. One World Academic.
- Elson, R. E. (2008). *The idea of Indonesia: A history*. Cambridge University Press.
- Farid, H. (2005). Indonesia's original sin: Mass killing and capitalist expansion, 1965–1966. *Inter-Asia Cultural Studies*, 6(1).

- Feith, H. (1962). *The decline of constitutional democracy in Indonesia*. Cornell University Press.
- Firmino, R. (2020, 1 Juni). 'Kazoku kokka' – negara integralistik [Gambar]. *Independensi*. <https://independensi.com/2020/06/01/kazoku-kokka-negara-integralistik/>.
- Friedman, T. (2000, 4 Oktober). Country too big to fail, yet too messy to work. *The New York Times*.
- Gallkano, S. (2018, 4 Desember). Kisah hidup novelis 3 zaman Nh Dini [Gambar]. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20181204175215-241-351125/kisah-hidup-novelis-3-zaman-nh-dini>.
- Gie, S. H. (1969). *Simpang kiri dari sebuah jalan: Kisah pemberontakan Madiun 1948* [Skripsi]. Universitas Indonesia.
- Gie, S. H. (1990). *Di bawah lentera merah: Riwayat Sarekat Islam Semarang sampai tahun 1920*. Bentang.
- Goss, A. (2011). *The floracrats: State-sponsored science and the failure of the enlightenment in Indonesia*. University of Wisconsin Press.
- Harson, S. (2021, 20 Mei). Indonesian priest decries 'bid to castrate' graft busters [Gambar]. *UCA News*. <https://www.ucanews.com/news/indonesian-priest-decries-bid-to-castrate-graft-busters/92535#>.
- Herlambang, D. (2019, 7 Januari). Gunawan Wiradi: jangan asal klaim reforma agraria [Gambar]. *Kumparan*. <https://kumparan.com/kumparannews/gunawan-wiradi-jangan-klaim-asal-reforma-agraria-1546837202998054483>.
- Herman Lantang Camp [@hermanlantangcamp]. (2016, 12 Juli). Visiting Hydroponic Plant near to #hermanlantangcamp #glamping #hermanlantang #lettuce #hydroponics [Gambar]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/BHxFKquhFPW/>.
- Hermawan, B. (2021). Dialog Jakarta-Papua: Apa Masih Relevan? Dalam R. Tirtosudarmo & C. Pamungkas (Eds.). *Emansipasi Papua: Tulisan para sahabat untuk mengenang dan menghormati Muridan S Widjojo (1967-2014)*. Imparsial, FAPD, Kampung Limasan Tonjong, dan TIFA.

- Heryanto, A. (2015, 13 Desember). Ben Anderson: tidak ada duanya [Daring]. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151213180149-21-97899/ben-anderson-tidak-ada-duanya>.
- Hidayah, A. (2016, 13 Juli). Pekerja rumah tangga tak berhak mudik [Gambar]. *Migrant Care*. <https://migrantcare.net/2016/07/pekerja-rumah-tangga-tak-berhak-mudik/>.
- Imam. (2010, 27 Mei). Marsillam ditunjuk jadi komisaris medco [Gambar]. *Tempo*. <https://bisnis.tempo.co/read/250895/marsillam-ditunjuk-jadi-komisaris-medco>.
- Institut Teknologi Bandung. (2018, 3 Desember). *Seri Kuliah Umum FMIPA: Prof. Bambang Hidayat* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=VFUSgl4w_Pc&t=1s.
- IUSSP. (2021). Directory profile: Aris Ananta [Gambar]. *International Union for the Scientific Study of Population*. <https://iussp.org/en/directoryprofile/30973>.
- Jaquet, F. G. P. (Ed.). (1989). *Kartini: Surat-surat kepada Ny. R.M. Abendanon-Mandri dan suaminya* (S. Sutrisno, Penerj.). Djambatan. (Karya asli diterbitkan 1987).
- Kahin, G. (1952). *Nationalism and revolution in Indonesia*. Cornell University Press.
- Kakophōnia. (t.t.). Lukisan potret Hikmat Budiman [Gambar]. Diakses pada 18 Maret 2022 dari https://hikmatbudiman.id/resources/hikmat_drawing.jpg.
- Kanal Pengetahuan Fakultas Filsafat UGM. (2019, 11 Maret). *Islamic and nationalist populisms-Vedi Hadiz, Fassa* [Video]. YouTube. <https://youtu.be/qUc2PW1mHrA>.
- Kartodirdjo, S. (1984). *Pemberontakan petani Banten 1888*. Dunia Pustaka Jaya.
- Katoppo, M. (1977). *Raumanen*. Gaya Pavorit Press.
- Katoppo, M. (1979). *Compassionate and free: An Asian woman's theology*. Orbis Books.

- Kayam, U. (1991). *Para priyayi*. Pustaka Utama Grafiti.
- Keretawaktu. (2013, 2 Mei). Dahlan maju presiden tergantung elektabilitas [Gambar]. *Keretawaktu*. <http://www.keretawaktu.com/2013/05/dahlan-maju-presiden-tergantung.html>.
- Koji, T. (2005, 12–15 Juli). *From Vihara to Klenteng, and to national hero's monument?: The changing status of Chinese temples and the struggles of ethnic-Chinese in Rembang*. 4th International Symposium of the Journal Antropologi Indonesia. Depok. <https://simposiumjai.ui.ac.id/wp-content/uploads/20/2020/03/4.3.4-Tsuda-koji.pdf>.
- Komisi Nasional Saintifikasi Jamu. (2015). *Body of knowledge sistem pengobatan tradisional Indonesia*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
- Kraus, W. (2018). *Raden Saleh: Kehidupan dan karyanya*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Kraus, W. (2021, 30 Januari). Raden Saleh: Perusak warisan budaya Jawa? [Gambar]. *Kompasiana*. https://www.kompasiana.com/reireinhart/60142a8c8ede481a5f02e642/raden-saleh-perusak-warisan-budaya-jawa?page=all&page_images=1.
- Kristiono, N. (2020, 25 September). Mengenal Nono Anwar Makarim, dari aktivis yang jadi pengacara kondang [Gambar]. *Minews*. <https://www.minews.id/kisah/mengenal-nono-anwar-makarim-dari-aktivis-yang-jadi-pengacara-kondang>.
- Kusuma, A.B. (2004). *Labirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat salinan dokumen otentik badan oentoeik menyelidiki oesaha-oesaha persiapan kemerdekaan*. FH UI.
- Kusuma, A.B. (2006). Catatan seputar restorasi Pancasila. Dalam *Restorasi Pancasila: Mendamaikan politik identitas dan modernitas*. FISIP UI.
- Kusuma, A.B. (2011). *Sistem pemerintahan “pendiri negara” versus sistem presidensial “Orde Reformasi”*. FH UI.
- Lapian, A.B. (2009). *Orang laut, bajak laut, raja laut: Sejarah kawasan laut Sulawesi abad XIX*. Komunitas Bambu.

- Latief, Y. (2011). *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualisasi Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama.
- Lavelle, L. (2015). *Amerta movement of java, 1986–1997: An Asian movement improvisation*. Lund University Press.
- Lev, D. S. (1984). Book review: Van Vollenhoven on Indonesian adat law. *Journal of Legal Pluralism*, 22(14), 147–55.
- Lev, D. S. & McVey, R. (1966). *Making Indonesia*. Southeast Asia Program Publications.
- Lloyd, G. (1994). *Part of nature: Self-knowledge in Spinoza ethics*. Cornell University Press.
- McVey, R. (1988). In memoriam: Paramita Rahayu Abdurachman, 1920–1988. *Indonesia*, 46, 127–129. <http://www.jstor.org/stable/3351049>.
- Media Center Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada. (2012, 30 Agustus). Prof. Dr. Masri Singarimbun: generasi pertama antropolog Indonesia [Gambar]. *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/mediapskkugm/55173daa813311a3669de4a0/prof-dr-masri-singarimbun-generasi-pertama-antropolog-indonesia>.
- Media Joang. (2019, 1 Februari). Perubahan hirarkhi norma rumusan pancasila [Gambar]. *Media Joang*. <https://mediajoang.com/perubahan-hirarkhi-norma-rumusan-pancasila/>.
- Misrawi, Z. (2016, 25 November). Gus Mus, guru bangsa kita [Gambar]. *Geotimes*. <https://geotimes.id/kolom/gus-mus-guru-bangsa-kita/>.
- Mohamad, G. (2020, April). Yang akrab dengan yang murni. *Tempo*. <https://majalah.tempo.co/read/catatan-pinggir/160276/catatan-pinggir-goenawan-mohamad-yang-akrab-dengan-yang-murni>.
- Mukthi, M.F. (2011, 23 Juli). Warisan nakhoda pertama [Gambar]. *Historia*. *id*. <https://historia.id/sains/articles/warisan-nakhoda-pertama-PyaVP/page/1>.
- Murray Li, T. (2020). Epilogue: Customary land rights and politics, 25 Years on. *The Asia Pacific Journal of Anthropology (TAPJA)*, 21(1), 77–84.

- Mus, G. (2020, 25 Maret). Tuhan mengajarkan melalui corona. <https://www.industry.co.id/read/63083/tuhan-mengajarkan-melalui-corona>.
- Nasution, A.B. (1995). *The aspiration for constitutional government in Indonesia: A socio-legal study of the Indonesian konstituante 1956-1959*. Pustaka Utama Grafiti.
- National Museum of Ethnology. (2017, 22–24 Mei). *Adat law 100 years on: Towards a new interpretation?* [Konferensi]. Leiden.
- Nitisarso, W. (1961). *Migration, population, growth and economic development in Indonesia: A study of the economic consequences of alternative patterns of inter-island migration* [Disertasi]. University of California.
- Novaria, A. (2020, 23 April). Arief Budiman, kakak Soe Hok Gie tutup usia [Gambar]. *Media Indonesia*. <https://mediaindonesia.com/humaniora/306884/arief-budiman-kakak-soe-hok-gie-tutup-usia>.
- Oey-Gardiner, M. (2001). *Mendobrak langit-langit kaca: Lambat memang namun tak terelakkan*. UI-Press.
- Oey-Gardiner, M. (2011). *Study of the role of the Indonesian Institute of Sciences (LIPI) in bridging between research and development policy*. Final report submitted to Insan Hitawasana Sejahtera, Jakarta. <https://dfat.gov.au/aboutus/publications/Documents/indo-ks5-lipi.pdf>.
- Pengendum Tampung [@PTampung]. (2014). Header profile [Gambar]. Twitter. <https://twitter.com/ptampung>.
- Pemerintah Jawa Barat. (2014, 1 Oktober). Indonesia butuh 569 epidemiolog [Gambar]. *Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat*. https://jabarprov.go.id/index.php/news/9818/Indonesia_Butuh_569_Epidemiolog.
- Penny, D.H., & Singarimbun, M. (1973). *Population and poverty in rural Java: Some economic arithmetic from Sriharjo* (No. 41). Department of Agricultural Economics, New York State College of Agriculture and Life Sciences, Cornell University.
- Perhimpunan Pendidikan Demokrasi. (2006, 31 Mei). *Restorasi Pancasila: Mendamaikan politik identitas dan modernitas* [Simposium]. FISIP UI.

- Portal Resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2017, 1 Januari). Dewi Sartika [Daring]. *Jakgo*. <http://jakgo-dev.smartcity.jakarta.go.id/artikel/konten/1022/dewi-sartika>.
- Pranoto, Y. (t.t.). Profil Asmara Nababan: Arsip foto dari berbagai media. *Asmara Nababan*. Diakses pada 18 Maret 2022 dari <https://asmaranababan.org/galeri/>.
- Prasetya, Renatha Agung Yoga. (2016, 20 Juni). Gus Dur dan prestasi demokrasi Indonesia dari Al Azhar [gambar]. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2016/06/20/gus-dur-dan-prestasi-demokrasi-indonesia-dari-al-azhar>.
- Prasetyo, W. A. (2018, 19 Oktober). Archeologist Edi Sedyawati: Jewelry craftsmen need certification [Gambar]. *Tempo English*. <https://en.tempo.co/read/490525/archeologist-edi-sedyawati-jewelry-craftsmen-need-certification>.
- Purdey, J. (2011). *From Vienna to Yogyakarta: The life of Herb Feith*. UNSW Press.
- Ra, D. (2019, 29 Oktober). Policy expert Takashi Shiraishi examines Japan's role in relationships with U.S. and China [Gambar]. *The Cornell Daily Sun*. <https://cornellsun.com/2019/10/29/policy-expert-takashi-shiraishi-examines-japans-role-in-relationships-with-u-s-and-china/>.
- Rakhmani, I., & Siregar, F. (2016, Februari). *Reforming Research in Indonesia: Policies and practice* (Global Development Network Working Paper no. 92). cipg.or.id/wp-content/uploads/2016/04/GDN-DR-Indonesia.pdf.
- Rendra, W. S. (1974). Aku mendengar suara. Dalam *Potret pembangunan dalam puisi*. Pustaka Jaya.
- Renganis, M. T. (2020, 2 Oktober). Peluncuran buku di makam [Gambar]. *Tempo*. <https://majalah.tempo.co/read/pokok-dan-tokoh/161542/sangkot-marzuki-meluncurkan-buku-achmad-mochtar-di-kuburan-belanda>.
- Retno, L. (2020, 15 Juni). Garin Nugroho: Pelopor generasi film pasca 1990 [Gambar]. *Kongres Kebudayaan Desa*. <https://kongreskebudayaandesa.id/garin-nugroho-pelopor-generasi-film-pasca-1990/.html>.

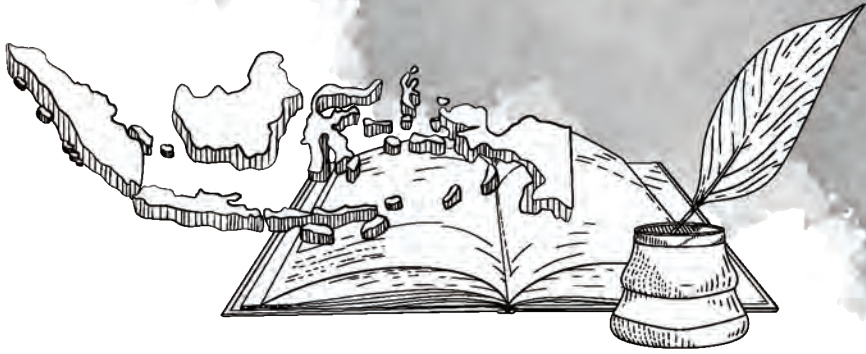
- Rizal, J. (1887). *Noli Me Tángere*. Penguin Classics.
- Robison, R. (1986). *Indonesia: The rise of capital*. Allen & Unwin.
- Robison, R. (2009). *Indonesia: The rise of capital*. Equinox Publishing.
- Salihara Arts Center [@salihara]. (2018, 6 Juni). Video Karlina Supelli dalam ceramah “20 Tahun Reformasi: Majukah Rasionalitas dan Budaya Ilmiah Kita?” [Gambar]. Twitter. <https://twitter.com/salihara/status/1004229779644563456>.
- Saluang, S. (2019). *GWR jali merah: Dari berbagai tuturan biografis Gunawan Wiradi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sampurno. (2020, 28 Maret). Korona dan industri farmasi. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/opini/2020/03/28/korona-dan-industri-farmasi>.
- Sastroamidjojo, S. (1997). *Obat asli Indonesia*. Dian Rakyat.
- Sastrowardoyo, S. (1970). *Daerah perbatasan: Dua kumpulan sadjak*. Budaja Djaja.
- Setiawan, B. (2016, 28 Mei). Kala Umbu Landu Paranggi bacakan puisi Emha Ainun Najib [Gambar]. *Tempo*. <https://seleb.tempo.co/read/774796/kala-umbu-landu-paranggi-bacakan-puisiemha-ainun-najib/full&view=ok>.
- Shiraishi, T. (1990a). *An age in motion: popular radical movements in Java 1912–1926*. Cornell University Press.
- Shiraishi, T. (1990b). Dangir’s testimony: Saminism reconsidered. *Indonesia*, 50, October, 95-120.
- Simanjuntak, M. (1992). *Democratization in the 90’s: Coming to terms with gradualism?*. Monash University.
- Simanjuntak, M. (1994). *Pandangan negara integralistik: Sumber, unsur, dan riwayatnya dalam persiapan UUD 1945*. Pustaka Utama Grafiti.
- Sitompul, M. (2018, 9 Oktober). Semsar Siahaan, seniman yang dianiaya orde baru [Gambar]. *Historia*. <https://historia.id/kultur/articles/semsar-siahaan-seniman-yang-dianiaya-Orde-Baru-DLNxQ/page/1>.
- Spinoza, B. (2009). *The Ethics* (R. H. M. Elwes, Penerj.). The Project Gutenberg EBook.

- Suaedy, A. (2018). *Gus Dur, Islam Nusantara, & kewarganegaraan bhineka: Penyelesaian konflik Aceh & Papua 1999-2001*. Gramedia.
- Subekti. (2018, 30 Maret). Syafii Maarif berharap kejadian di pilkada DKI tak menular [Gambar]. *Tempo*. [https://nasional.tempo.co/read/1074689/syafii-maarif-berharap-kejadian-di-pilkada dki-tak-menular](https://nasional.tempo.co/read/1074689/syafii-maarif-berharap-kejadian-di-pilkada-dki-tak-menular).
- Subekti. (2019, 24 Agustus). Aswi Warman Adam LIPI cerita sejarah ibu kota gagal pindah [Gambar]. *Tempo*. <https://bisnis.tempo.co/read/1239809/aswi-warman-adam-lipi-cerita-sejarah-ibu-kota-gagal-pindah>.
- Suhartono. (2009, 8 Januari). Soal Situs Trowulan, Jero Wacik “cooling down” dulu. *Kompas*. <https://nasional.kompas.com/read/2009/01/08/08265093/Soal.Situs.Trowulan.Jero.Wacik>.
- Suhendra, R.H. (2020, 17 Januari). Kisah Sumarsih diadang polisi saat 13 tahun aksi kamisan [Gambar]. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200117001114-20-466133/kisah-sumarsih-diadang-polisi-saat-13-tahun-aksi-kamisan>.
- Sukandar, A. (2021, 30 Oktober). Topeng lengger Dusun Kledung 3: Dibawa ke mata air Kali Siringin untuk dibasuh [Gambar]. *Harian Merapi*. <https://www.harianmerapi.com/kearifan/pr-401576993/topeng-lengger-dusun-kledung-3-dibawa-ke-mata-air-kali-siringin-untuk-dibasuh>.
- Sumartana, T. (1971). *Soal-soal teologis dalam pertemuan antar agama* [Skripsi]. Sekolah Tinggi Teologi.
- Sumartana, T. (1993). *Mission at the crossroad: Indigenous churches, european missionaries, Islamic associaton, and socio-religious change in Java 1812-1936*. BPK Gunung Mulia.
- Suriyanto. (2019, 16 Agustus). Pramoedya Ananta Toer menghantam penjajahan lewat sastra [Gambar]. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20190808111439-234-419463/pramoedya-ananta-toer-menghantam-penjajahan-lewat-sastra>.
- Surjomihardjo, A. (2008). *Kota Yogyakarta tempo doeloe: Sejarah sosial 1880-1930*. Penerbit Komunitas Bambu.

- Surjomiharjo, A. (2020, 6 Juli). Yang berakar di warung-warung [Gambar]. *Museum*. <https://museum.or.id/gerakan-ekonomi-sarekat-islam/>.
- Surjomohardjo, A. (1979). Alam gagasan Kartini: Dalam kenyataan sejarah, pemikiran termasa dan dunia lambang. Dalam Katoppo, A. (Ed.), *Satu abad Kartini*. Sinar Harapan.
- Suseno, F. M. (1984). *Etika Jawa: sebuah analisa falsafi tentang kebijaksanaan hidup Jawa*. Gramedia.
- Suseno, F. M. (2020, 10 Juli). Komunisme memang gagal. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/opini/2020/07/10/komunisme-memang-gagal>.
- Tedjabayu. (2020). *Mutiara di padang ilalang*. Komunitas Bambu.
- Tempodotco. (2019, 7 Februari). *Mengenang Rahman Tolleng* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=48sOzjNmot8>.
- Tirtosudarmo, R. (2019, 29 Desember). Remembering Suprpto Suryodarmo. *Kajanglako*. <http://kajanglako.com/id-9795-post-remembering-suprpto-suryodarmo.html>.
- Tirtosudarmo, R. (2021). *Mencari Indonesia 3: Esai-esai pandemi*. Vidya Mandiri.
- Toer, P. A. (1980). *Bumi manusia*. Hasna Mitra.
- Toer, P. A. (1988). *Rumah kaca*. Lentera Dipantara.
- Tripoli. (2013, 11 Oktober). *Edward Said interviewed by Salman Rusdhie* (Video). YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=vAmLNc_4VtE.
- Triraharjo, M. (2019, 27 Februari). Nurcholis Madjid [Gambar]. *Radar Jombang Jawa Pos*. <https://radarjombang.jawapos.com/tokoh/27/02/2019/nurcholis-madjid-pemikir-islam-moderat-penulis-dan-organisatoris>.
- Untung, M. A. (2017, 30 September). Toeti Heraty Noerhadi Roosseno [Gambar]. *Koran Jakarta*. <https://koran-jakarta.com/toeti-heraty-noerhadi-roosseno>.
- Utama, P. (2021, 15 Februari). Jalaluddin Rakhmat meninggal, politikus PDIP: Dia tokoh Islam yang inklusif [Gambar]. *Tempo*. <https://nasional.tempo.co/read/1433154/jalaluddin-rakhmat-meninggal-politikus-pdip-dia-tokoh-islam-yang-inklusif>.

- Utami, A. (1998). *Saman*. KPG.
- Utami, A. (2001). *Larung*. KPG.
- Utami, A. (2008). *Bilangan fu*. KPG.
- Utami, A. (2019). *Anatomi rasa*. KPG.
- Utomo, K. (1975). *Masyarakat transmigrasi spontan di daerah Way Sekampung, Lampung*. Gajah Mada University Press.
- Wahid, A. (1981, 19 Desember). Melawan melalui lelucon. *Tempo*. <https://majalah.tempo.co/read/kolom/50550/melawan-melalui-lelucon>.
- Wahid, A. (2011). Perubahan struktur tanpa Karl Marx. Tuhan Tidak Perlu Dibela. Yogyakarta: LKiS. <https://gusdur.net/perubahan-struktural-tanpa-karl-marx/>.
- Wahid, A. (1982). *Tuhan tidak perlu dibela*. Tempo.
- Wahid, A. (2000). *Melawan melalui lelucon: Kumpulan Kolom Abdurrahman Wahid di Tempo*. Tempo.
- Wibisono, J. (2019, Januari 10). Mengagumi kekaguman Benedict Anderson terhadap José Rizal. *Gatholotjo*. <https://gatholotjo.com/2019/01/10/mengagumi-kekaguman-benedict-anderson-terhadap-jose-rizal-oleh-joss-wibisono/>.
- Wibowo, K. S. (2020, 11 Juli). Oei Him Hwe, si penjaga karya Pramoedya. *Tempo*. <https://majalah.tempo.co/read/iqra/160888/oei-him-hwei-sosok-berjasa-di-balik-novel-bumi-manusia>.
- Widjojo, N., & Keyfts, N. (1954). *Penduduk dan pembangunan Indonesia*. Pembangunan.
- Wijaksana, M. B. (2016, 2 Maret). (Almh.) Marianne Katoppo: yang hampir terlupakan dari sastra indonesia [Gambar]. *Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan*. <https://www.jurnalperempuan.org/tokoh-feminis/almh-marianne-katoppo-yang-hampir-terlupakan-dari-sastra-indonesia>.
- Wijaya, I. (2020, 20 April). Investigasi Kementerian Pendidikan kuatkan dugaan plagiarismerektor. *Tempo*. <https://koran.tempo.co/read/nasional/464000/investigasi-kementerian-pendidikan-kuatkan-temuan-plagiarisme-rektor>.

- Wikimedia Commons (2021, 21 April). RA Kartini, putri Jawa pejuang emansipasi dan sejarah hari kartini [Gambar]. *Kompas*. <https://www.kompas.com/sains/read/2021/04/21/090200423/ra-kartini-putri-jawa-pejuang-emansipasi-dan-sejarah-hari-kartini>.
- Winarno, H. H. (2012, 9 Maret). Ekonom orba, Widjojo Nitisastro meninggal dunia [Gambar]. *Merdeka.com*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/ekonom-orba-widjojo-nitisastro-meninggal-dunia.html>.
- Winters, J. A. (1996). *Power in motion: Capital mobility and the Indonesian state*. Cornell University Press.
- Zoelverdi, E. (2016, 11 Desember). Kisah George Aditjondro ikut doktor di Cornell tanpa ijazah [Gambar]. *Tempo*. <https://nasional.tempo.co/read/827196/kisah-george-aditjondro-ikut-doktor-di-cornell-tanpa-ijazah>.
- Zulkarnain. (2015, 14 Agustus). Goenawan Mohamad to speak at discovery Indonesia in Glasgow [Gambar]. *Tempo English*. <https://en.tempo.co/read/691985/goenawan-mohamad-to-speak-at-discovery-indonesia-in-glasgow>.



Indeks

- 3 D's (*dirty, dangerous, difficult*) 33
- 1945 xxiv, 10, 11, 126, 129, 130,
181, 196, 305, 342, 376, 380
- 1965 xxi, xxii, xxiii, 3, 6, 16, 32,
53, 56, 62, 63, 64, 66, 76,
87, 100, 120, 124, 126, 131,
132, 133, 182, 190, 218,
220, 222, 234, 253, 255,
264, 269, 290, 292, 302,
303, 304, 305, 343, 344, 373
- (ANU) 186, 191, 194, 420
- ABBA 348
- Abdul Ghafar 336
- Abdul Hakim Garuda Nusantara
16, 17
- Abdurahman Wahid 149, 166
- Abdurrachman Surjomihardjo 156,
359
- Abdur Rauf 157
- Abendanon 158, 375
- A.B. Kusuma vii, 9, 11, 12, 13, 363
- A borderless world* 35
- Aceh xx, 3, 52, 58, 77, 111, 157,
167, 168, 175, 176, 336,
337, 380
- A common project* 76
- Act of Free Choice 23
- Adam Malik 124
- Adam Selligman 148, 150
- Adat *recht* 336
- Adatrecht politiek* 338
- Adipati Karna 163
- Adi Sasono 149
- Adnan Buyung Nasution vii, 15, 17,
219, 285, 363
- A doomsday scenario* 186
- Adrian Bernard Lapian 19
- A.E. Priyono 39
- Afrika 48, 152, 186, 292

- Agama xx, 10, 11, 52, 53, 57, 58,
 59, 67, 98, 99, 100, 105,
 148, 162, 166, 170, 171,
 172, 202, 209, 237, 247,
 296, 299, 309, 312, 318,
 320, 331, 351, 361, 381
- Agnes Louis Symmers 158
- Agus Purwadianto vii, 25, 26, 27,
 29, 358, 363
- Agus Widjojo 292
- Ahmad Suaedy 175
- Ahok 77
- A holistic wellness* 299
- Akademia 72, 327
- Akademi Ilmu Pengetahuan Indone-
 sia 194, 245
- Akademi Jakarta 91
- Aku dalam Budaya 323
- Al Azhar 100, 379
- Aleksandr Solzhenitsyn xxiii
- Alex Ulaen 24
- Alfian 2, 4, 38, 200, 231, 369
- Alfred Wallace 28
- Al-Hujwiri 100
- Ali Moertopo 2, 56, 76, 132, 180
- Ali Sadikin 16, 114, 218, 222, 264,
 275, 322, 323
- Ali Syariati 148
- Ali Wardhana 194, 343, 345
- Allende 42
- Almon 138
- Alpukat 138
- Amarzan Loebis 180
- A masterpiece* 94
- Amerika xxiv, 17, 42, 47, 86, 95,
 120, 124, 130, 144, 148,
 156, 158, 171, 186, 196,
 206, 211, 219, 247, 268,
 275, 299, 308, 312, 315,
 337, 338
- Amerika Latin 186
- Amerika Serikat 47, 95, 144, 171,
 211, 219, 247, 275, 299,
 308, 338
- Ami Prijono 322
- Amir Sjarifudin 254
- Amnesia Sejarah xxiii
- Amsterdam 26, 80, 159, 240, 318
- Amurang 24
- Anak Semua Bangsa 234
- Anatomi Rasa 68, 69
- Andrew Beatty xxiii
- Andrew Goss 28, 29
- Anggrek 138
- Anies Baswedan 275
- An internal army affairs* 131
- Anis Hidayah vii, 31, 33, 34, 35,
 358, 363
- Anthony Johns 190
- Anthony Reid 21
- Anton Wijana 137
- An unlikely nation* 96
- A political fault line* 255
- Apologia 132
- Arbi Sabit 37, 38
- Arianto Sangaji 111
- Arief Budiman vii, xiv, 15, 41, 42,
 43, 56, 100, 109, 113, 135,
 136, 137, 139, 181, 182,
 200, 201, 219, 220, 305,
 322, 364, 378
- Ariel Heryanto 43, 94
- Arifin C. Noer 322
- Aris Ananta vii, 45, 46, 47, 49, 358,
 364, 375
- Aristides Katoppo 136, 137, 139,
 302
- Arjijanto Jonosewojo 28
- Arjuna 164

- Arkeologi xx, 90, 205, 207, 208
Artful science 351
 Artidjo Alkotsar 39
A secular saint 130
 Asfinawati vii, 16, 51, 52, 53, 54,
 358, 359, 364, 370
 Asia 77, 186, 240, 303, 314, 315,
 373, 377, 420
 Asketisme 268
 Asmara Nababan vii, 42, 55, 56, 57,
 58, 317, 318, 320, 358, 364,
 379
 Asmat 265
 Asrama Daksinapati 3
 Astronomi 71, 72, 151
 Asvi Warman Adam vii, 61, 62, 358,
 360, 381
 Audrey Kahin 131, 166
Aufklarung 240
 August Parengkuan 136, 139
 Australia 21, 43, 111, 120, 130,
 132, 158, 187, 190, 191,
 196, 246, 247, 268, 315,
 419, 420
 Australian National University 130,
 148, 186, 191, 194, 419, 420
 Australian Volunteers International
 (AVI) 130
 Auw Jong Peng-Koen 326
A wonder boy 94
A working ideology 344, 345
 Ayatullah Khomeini 148
 Ayu Utami iv, vii, xvi, 65, 66, 67,
 68, 69, 350, 351, 352, 358,
 364, 369
- Babinsa 48, 49
 Bachrun Suwatdi 328
- Badan Koordinasi Kemahasiswaan 3
 Badan Permusyawaratan Kewar-
 ganegeraan Indonesia (Baper-
 ki) 234
 Badan Riset dan Inovasi Nasional
 (BRIN) iv, 248, 270
 Bagdad 100
 Baharuddin Lopa 58
 Balai Besar Penelitian dan Pengem-
 bangan Tanaman Obat dan
 Obat Tradisional (B2P-
 2TOOT) 28
 Balai Soedjatmoko 298
Balik buwono 243, 312
 Bambang Purwanto 328
 Bambang Widiyanto 2
 Bambang Widjojanto 16
 Bandung 71, 72, 80, 148, 180, 218,
 243, 252, 313, 375
 Banten 80, 206, 243, 252, 313,
 337, 375
 Banten Lama 206
 Bantuan hukum struktural 17, 99,
 371
 Banyumas 96
 Banyuwangi xxiii, 106
 Bappenas 48, 342
 Barisan Buruh Wanita (BBW) 253
 Baruch de Spinoza 356
 Batavia xxii, 28, 80, 248, 341, 374
 Beerling 258, 323
 Beijing 293
 Bejo Untung 290
 Belanda xxii, 17, 20, 22, 23, 28, 62,
 72, 80, 81, 125, 126, 130,
 133, 149, 155, 156, 157,
 158, 170, 176, 201, 213,
 235, 240, 241, 242, 247,
 249, 252, 254, 255, 258,

- 268, 313, 315, 318, 319,
322, 323, 326, 336, 337,
338, 342, 420
- Belgia 240, 336
- Ben Anderson viii, 17, 75, 76, 131,
132, 156, 166, 181, 230,
302, 303, 304, 364, 375
- Benny Mamoto 136
- Benny Moerdani 132
- Ben White 126
- Berlin 47, 77, 182, 240
- Bernie Sanders 338
- B.F. Matthews 157
- Bias gender 359
- Biennale Senirupa 274
- Bilangan Fu 67, 68
- Bima 5
- Bimas/Inmas 48
- Bintang Jasa Utama 314
- Bintang Kejora 167, 175
- Biro Perancang Negara 342
- B.J. Habibie iv, 175, 182, 202, 246,
249
- Blitar 253
- Bloom 298, 372
- Blora 235
- BMI 33, 34, 35
- BNP2TKI 34
- Bogor 28, 110, 138, 206, 274
- Bondan Gunawan 166, 182, 183
- Borobudur 206, 283, 284, 285,
286, 287, 299
- Boscha 72
- Boston University 148
- Boundaries* 269
- Boven Digoel 313, 314
- BPK Gunung Mulia 319, 381
- BPUPKI 11, 196
- Brainstorming* 143
- Brazil 186
- Brexit 171, 195
- Budapest 240
- Buddha 202, 299
- Budi Hernawan 176
- Budi Munawar Rahman 223
- Budi Oetomo 251
- Bugis 157
- Bulu 252
- Bumi Manusia 26, 192, 234, 235,
236
- Bung Karno 6, 100, 120, 131, 136,
180, 196, 197, 252, 303,
304, 305, 321, 322, 332
- Buruh 33, 253, 254
- Buruh Migran 33
- Butet Manurung 226
- Buya Hamka 323
- Cahyo Pamungkas 144
- California Berkeley 200
- Canberra 4, 186, 190, 191, 419,
420
- Candi Mendut 286
- Candi Tetek 76
- Cannes 94
- Carl Sagan 153
- C.A. van der Leeden 20
- CEDAR 150, 331
- Ceko 96
- Cekoslovakia 166, 167, 182
- Cendekiawan xvi, xviii, xix, xx, 42,
114, 157, 265
- Center for Southeast Asian Studies
(CSEAS) 314
- Chairil Anwar 42, 153
- Charles Darwin 28
- Che Guevara 285

- Chiyoda 314
 Christiaan Eijkman 248
 Christiaan Snouck Hurgronje 336
 CIA 42, 343
 Cicalengka 80
 Cilegon 80
 Cili 42
 Cina 26, 27, 47, 186
 Ciputat 38, 222
Class politics 338
 Clifford Geertz 42
Climate change 120, 196
 Coenrad 195
 Communities Engaging with Difference and Religion 150
Conservative turn 96, 149
Conviction 58, 182
Coolie 304
 Cornelis Van Vollenhoven 373
 Cornell Paper 131, 132, 230
 Cornell University xxii, 200, 302, 373, 375, 377, 378, 380, 384
 Cosmas Batubara 302
Courage 53, 58
 Covid-19 xvi, 25, 26, 97, 139, 142, 248, 331
Craftmanship 350
Critical thinking 29
 CSIS 5, 76, 132
 Curug Nangka 138
Custodes xxv

 Dangir 313, 380
 Daniel Bell 146, 372
 Daniel Dennet 153
 Daniel Dhakidae 181
 Daniel Lev 17, 166, 337
 Daoed Joesoef 3, 259

 Darsono 304
 Datu Tanette 157
 Daud Aris Tanurejo 208
 David Borrie 186, 187
 David Penny 187
 Dayak 265
 D. Djajakusuma 322
 Dedi Adhuri 24
 De Haan xxii
 Dekrit Presiden 129, 130
 Deliar Noer 38
 Demagogi 152
Democratic socialism 338
 Demografi xix, 45, 46, 47, 48, 49, 187, 194, 342, 348, 349, 419
 Demografi politik 349
Demographic vital 47
 Demokrasi 13, 16, 38, 57, 58, 130, 131, 132, 170, 181, 182, 293, 379
 Demokrasi konstitusional 131
Demos 46, 48, 49, 317, 320
 Denmark 163
 Denys Lombard 62
 Departemen Keuangan 48
 Derek Freeman 186
 Desa Leteh 104
 Desantara 142
 Desa Sriharjo 187
 Detroit 213
 Dewan Adat Papua 175
 Dewan Mahasiswa UI 2, 180, 219
 Dewan Revolusi 63
 Dewan Riset Nasional (DRN) xxi, 89, 90
 Dewi Sartika viii, 79, 80, 81, 82, 335, 361, 364, 378
 Diaspora 33, 35
 Diaspora Indonesia 33, 35

- Di Bawah Lentera Merah 304
 Dili 182
 Dino Pati Jalal 33
 Direktur Jenderal Kebudayaan xx
 Djuanda 342
 DKJ 323
 Dodi A. Tisna Amidjaya 4
 Doenia Bergerak 314
 Dolorosa Sinaga viii, 85, 86, 87,
 358, 364
 DOM 111
 Domini Hera 304
 Don Flasy 175
 Don Hasman 137
 Dorodjatun Kuncorojakti 2
 DPR-GR 218, 253, 302
 Drama 114, 284
 Driyarkara xvii, 162, 258, 323, 358,
 361
 Duke University 46
Dynamic paralysis 66
- Edi Masinambow 4, 20, 201
 Edinburgh 240
 Edi Sedyawati viii, xx, 89, 90, 364,
 379
 Eduard Douwes Decker 80
 Edward Said 332, 336, 382
 Egaliter 213, 308
 EHESS 62
 Eijkman 28, 245, 246, 248, 249
 Eka Kurniawan 77
 Ekonom-demograf 45, 46, 47
 Ekonomi liberal 304
 Ekonomi pasar 90, 342
 Ekonom-teknokrat 46, 48, 344
 Ekskavasi 207
 Ekspres 326
- Elcid Li 331
 Emansipasi 82, 157, 384
 Embodied Lives 297, 298
 Emil Salim 110, 124, 194, 343, 344
 Endo Suanda 265
Engagement 196
 Enigma 159, 231, 235
 Epistemologi 297
 Eropa xxii, 28, 33, 100, 120, 133,
 166, 171, 195, 240, 241,
 242, 243
 Esai xv, xvi, 114, 144, 217, 219,
 350, 353, 356, 382
 Esais 114
Ethnic entrepreneur 196, 277
 Etika Jawa 162, 237, 382
 Etnografis 144, 235
Expatriate 33
- Fadjar Thufail 24
 Fahmi Idris 302
 Fasisme xxiv, 132
 Fathur Rokhman xxv
 Fauzi Abdullah 17
 Fazlur Rahman 223
 Feodalisme 88, 240, 241, 242
 Festival Air 330, 331
 Festival Lima Gunung 286, 296
 Festival Way Humba 330, 331
 FEUI 46, 47, 110, 193, 194, 342,
 343
 Filipina 77, 156, 213, 240
 Filsafat 26, 27, 28, 41, 68, 151,
 152, 162, 240, 258, 323
 Filsafat manusia 28, 258
 FKUI 26, 258, 322
 Floracrat 29
 Fordem 99, 166, 170, 182

- Ford Foundation 342
 Forum Demokrasi (Fordem) 99, 170, 182
 Francine 213
 Franky Sahilatua 96
 Frederick Bunnell 131
 Frederick Hopkins 248
 Fredy Lasut 136, 137
 Fuad Hassan 10, 41, 258
 F.X. Harsono 87
- G30S xxiii, 62
 G30S/PKI 62
 Gadis Arivia 152
 Galanter 298, 372
 Gambir 137
 Garin Nugroho viii, 93, 94, 95, 96, 364, 379
 Gayo Aceh 3
 Gedung Trisula 2
 Generasi milenial 314
 Geopolitik 312
 George Aditjondro 43, 384
 George Hicks 5
 George Junus Aditjondro (GJA) 109, 360
 George Kahin 130, 181
 Gerakan Kiri 255
 Gerakan Seni Rupa Baru 87
 Gerakan wanita Indonesia (Gerwani) 253
 Gerakan Wanita Sedar (Gerwis) 253
Gestalt 86
 Gestapu 62
 Gestok 62
 GJA 109, 110, 111, 360
Global warming 120, 196
 Goa Gajah 299
- Goenawan Mohamad viii, xiv, 10, 15, 41, 42, 91, 100, 109, 113, 114, 115, 135, 180, 221, 319, 322, 358, 365, 384
 Golden Globe 94
 Golkar 101, 180, 183, 253
 Golput 42, 56, 163
 Gontor 222
 Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) 314
Grass root politics 313
 Greg Barton 100
Grey areas 255
 Gunarti viii, 117, 118, 119, 120, 121, 358, 360, 365, 371
 Gunawan Wiradi viii, xxiv, 110, 120, 123, 125, 126, 127, 268, 269, 358, 360, 365, 374, 380
 Gunretno 118, 119
 Gunung Padang 208
 Gunung Penanggungan 76
 Gus Dur viii, 5, 97, 98, 99, 100, 101, 166, 167, 170, 174, 175, 176, 182, 183, 202, 226, 227, 236, 280, 360, 364, 379, 380
 Gus Mus viii, 100, 103, 104, 105, 106, 107, 360, 365, 377
 Guy Pauker 343
- Haji mabrur 105
 Haji Misbach 252, 314
 Halimun 138
 HAM 58, 290, 292, 293
 Hamka 223, 323
 Hamzah Fansuri 157
 Handoko 43

- Harian Kami 218
 Hariman Siregar 2, 180, 219
 Harold Crouch 148, 181
 Harry Benda 130
 Harry Poeze 231, 255
 Harry T. Oshima 201
 Harvard 4, 42, 159, 194, 200, 219
 Haryati Subadio 156
 Hasan Tiro 176
 H.B. Jassin 42, 323, 332
Heaven 296
 Hegel 181
 Heinz Arndt 191
 Helsinki 175, 176
 Helsinki Agreement 176
 Herbert Feith 358, 365, 371
 Herdin Halidin 175
 Herman Awom 175
 Herman Hidayat 314
 Herman Lantang viii, 135, 136,
 137, 138, 139, 302, 365, 374
 Hermawan Soelistyo 166
 Hersri (Setiawan) xxiii
 Hikmat Budiman viii, 141, 142,
 143, 144, 145, 146, 365, 375
 Himpunan Kerukunan Tani Indone-
 sia (HKTI) 180
 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
 222
 Hindia Belanda 62, 240, 242, 248,
 313, 336, 337, 338
 Hipokrisi 153, 275
 Hiroshima 312
 Hongaria 182
 Hongkong 5, 293
 Horizon 42
 Houston Texas 138
 Hukum adat 336, 337, 338, 360,
 373
 Human Resource Center for ASEAN
 58
 ICMI 99, 182
Identity politics from above 338
 Idhan Lubis 137
 Ignas Kleden 56, 57
 Ikatan Cendekiawan Muslim Indo-
 nesia (ICMI) 99
 IKJ 86, 91, 95, 323
 Iksana Banu 242, 313
 Iles-iles 138
 Ilmu-Ilmu Sosial Transformatif 166
 Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kema-
 nusiaan (IPSK) 4, 20
 Imam Waluyo 42
 Impase 338
 Imperialisme 124, 241
 Indah Yuning Prapti 28
 India 26, 27, 47, 186
 Indian 85, 86, 88
 Indische Partij 252
 Indonesia iv, xiii, xv, xvi, xvii, xviii,
 xix, xx, xxi, xxiii, xxiv, xxv,
 xxvi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12,
 16, 17, 20, 21, 22, 23, 26,
 27, 28, 32, 33, 35, 43, 45,
 47, 48, 56, 57, 62, 63, 66,
 68, 73, 75, 76, 77, 85, 91,
 94, 95, 96, 99, 101, 110,
 111, 113, 120, 121, 124,
 125, 126, 130, 131, 132,
 133, 136, 137, 138, 142,
 143, 144, 145, 147, 148,
 149, 157, 158, 159, 162,
 163, 164, 166, 167, 168,
 171, 175, 177, 179, 180,
 181, 182, 183, 186, 187,

- 188, 189, 190, 191, 192,
193, 194, 195, 196, 200,
201, 208, 213, 217, 218,
219, 220, 221, 222, 223,
227, 228, 229, 230, 231,
234, 237, 240, 241, 246,
247, 252, 253, 254, 255,
258, 268, 270, 274, 276,
277, 280, 281, 286, 290,
291, 292, 293, 298, 302,
303, 304, 305, 309, 312,
313, 314, 315, 318, 322,
323, 332, 336, 337, 338,
342, 343, 344, 348, 350,
351, 352, 355, 358, 360,
361, 365, 369, 370, 371,
372, 373, 374, 375, 376,
377, 378, 379, 380, 381,
382, 383, 384, 419, 420
- Indonesia Incorporated 220
- Indonesianis 5, 17, 75, 132, 144,
148, 189, 190, 191, 311, 361
- Indonesia Study Group 191
- Indonesia Update 191
- Indro Tjahjono 166, 276
- Inggris 46, 86, 90, 148, 156, 158,
171, 172, 195, 201, 247,
290, 297, 336, 337, 356, 420
- Inklusif 308, 310, 339, 382
- Institute of Developing Economies
(IDE) 314
- Institute of Social Studies Den Haag
xxii
- Institute of Southeast Asian Studies
(ISEAS) 46
- Institute van Vollenhoven 335
- Institut Kesenian Jakarta 86, 91
- Intelektual xiv, xx, xxii, xxiii, 2, 4,
11, 16, 39, 47, 49, 55, 56,
57, 72, 77, 91, 100, 109,
110, 111, 113, 114, 115,
142, 145, 146, 148, 149,
156, 166, 170, 171, 172,
180, 181, 182, 188, 191,
194, 196, 218, 219, 220,
221, 263, 264, 269, 274,
280, 286, 287, 308, 309,
313, 317, 318, 319, 320,
323, 326, 332, 344, 350,
355, 356
- Intelektualisme 234
- Intelektual muslim 148, 149
- Intelektual publik 16, 47, 49, 72,
77, 91, 109, 110, 111, 115,
148, 149, 166, 172, 181,
188, 194, 196, 269, 309,
319, 320, 323, 326, 332,
355, 356
- Interfaith dialogue* 150
- Interfidei 320
- Inter-Governmental Group on Indo-
nesia (IGGI) 125
- Internasionalisme 196, 197
- Intoleransi 309, 320
- Intuisi politik 344
- Intuitive knowledge* 357
- Investment climate* 124, 127
- Iowa University 148
- IPB xxiv, 125, 269
- Iran 148, 149
- IRGSC 331
- Irian Barat 20, 22, 23
- Irian Jaya 167
- Irina Vogeslang 242
- Irrelevant* 131
- Irwan Abdullah 187
- ISI 94
- Islam 38, 52, 80, 96, 99, 105, 130,

- 148, 149, 162, 166, 175,
200, 202, 213, 221, 222,
223, 252, 279, 280, 304,
308, 309, 314, 319, 336,
337, 338, 339, 360, 374,
380, 382
- Islam Nusantara 175, 380
Islam Yes, Politik No 223
Istana Bogor 28
Istana Merdeka 96, 289
Italia 240
ITB 4, 71, 72, 73, 151, 257, 275,
276, 321
Ithaca xxii
IUSSP 45, 375
Ivan Illich 171
- Jack Caldwell 186, 187, 194
Jack Lesmana 322
Jacob Vredembregt 20
Jacques Pangemanann 313
Jakarta Design Center 143
Jakob Oetama 10
Jalaludin Rakhmat viii, 147, 148,
365
Jalan Sutra (Silk Road) 23
Jali Merah 125, 127
Jambi xiii, 209, 226, 227
Jambu merah 138
Jami Baiturrahman 157
Jamie Davidson 290
Jamie Mackie 130, 191
Jan Breman 126
Jan Michiel Otto 336, 337
Japan Foundation 142
Jawa xvii, xx, xxiii, 2, 5, 21, 25, 28,
32, 34, 46, 68, 72, 76, 77,
80, 81, 91, 92, 94, 105, 110,
114, 118, 136, 138, 146,
156, 158, 162, 163, 164,
200, 206, 212, 214, 215,
235, 237, 241, 242, 251,
264, 265, 268, 284, 291,
295, 296, 297, 298, 301,
313, 318, 319, 326, 332,
337, 341, 344, 359, 360,
370, 373, 376, 378, 382,
384, 419
Jawa Barat 25, 34, 378
Jawa Tengah 21, 146, 264, 360, 419
Jawa Timur 32, 34, 76, 301, 341
Jeans 228
Jeffrey Winters 123, 124, 344
Jejak Langkah 234
Jemma Purdey 132
Jenewa 124
Jenifer Lindsey 94, 265
Jepang 26, 95, 120, 130, 158, 180,
211, 213, 247, 253, 311,
312, 314, 315, 420
Jerman 132, 158, 162, 240, 242,
247, 292, 336
Jero Wacik 207, 208, 381
Jesuit 162
Jhon Mambor 175
J.J. Rizal 21
Joged Amerta 296, 297, 298, 299
John Ingelson 253
John Legge 130
Joko Pinurbo 94, 95
Jokowi 28, 38, 48, 49, 77, 106, 119,
121, 174, 192, 228, 247,
248, 260, 270, 271, 276,
287, 290, 291, 292, 293,
313, 338
Jopie 21, 136
Jopie Wangania 21

- Jose Rizal 240
 Joss Wibisono 155, 156, 158
 Junghun 28
 Junus Melalatoa 3
 Juwono Sudarsono 2, 219
- Kairo 100
 Kajanglako xiii, xiv, xvi, xviii, 363,
 364, 365, 366, 367, 368, 382
 Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 (KLHS) 104
 Kakuei Tanaka 180
Kalarat wai 331
 Kaleidoskop 219
 Kalimantan 23, 120, 138, 265, 269
 Kalimantan Timur 23
 Kalyanamitra 32
 Kamala Chandrakirana 196
 Kamboja 213
 Kamisan 289, 290, 291, 370
 Kampto Utomo 268
 Kanada 120, 158, 226, 247, 274,
 339, 342
 Kananggar 330
 Kang Jalal 148, 149
 Kang Sobary 103, 104, 106
 KAPAL Perempuan 32
 Kapitalis 124, 125, 344
 Kapitalisme xxiv, 124, 220, 269,
 302, 303, 305
 Karisma 264, 344
 Karlina Supelli viii, 151, 152, 153,
 323, 361, 365, 380
 Karl Marx 98, 239, 240, 243, 383
 Karl May 153
 Kartini viii, 79, 81, 82, 155, 156,
 157, 158, 159, 241, 319,
 335, 361, 365, 371, 375,
 382, 384
- Kaisiepo 166, 167
 Katolik 65, 67, 161, 162, 202
 Kaukus Indonesia untuk Kebebasan
 Akademik (KIKA) xix
 Kayu besi 138
 Keadilan sosial 125, 346
 Kebebasan akademik xix, xx, 29,
 269, 271
 Kebudayaan xx, xxv, 3, 4, 42, 91,
 100, 145, 156, 170, 200,
 231, 247, 248, 293, 313,
 379, 419
 Kebun Raya 28
 Kelahiran 15, 47, 48, 57, 91, 152,
 166, 187, 196, 206, 212,
 252, 280, 303, 308, 330, 348
 Kematian 47, 121, 142, 180, 187,
 296, 299, 305
 Kemerdekaan berpikir 153, 166
 Kendeng 104, 118, 119, 120, 121,
 360, 371
 Kenormalan 153
 Keprihatinan sosial 156
 Keris 72, 241
 Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia
 (KAMI) 343
 Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia
 (KASI) 16, 343
 Kesenian 86, 87, 91, 170, 219, 265
 Kewarganegaraan Bineka 175
 Kiai Mojo xxii
 Ki Hadjar Dewantoro 6
 Kitab Kuning 281
 KITLV 255, 372, 420
Knowledge 252, 311, 357, 358, 376,
 377
 Kobe 213
 Koentjaraningrat 195, 227
 Koji Tsuda 200, 202

- Kolam Segaran 208
 Kolonialisme 81, 88, 124, 125, 133,
 240, 241, 242, 315, 318, 336
 Komaruddin Hidayat 223
 Komite Anti Korupsi 56
 Komnas HAM 58
 Komnas Perempuan 33, 196
 Kompas xvii, xxiii, 22, 26, 72, 73,
 164, 194, 207, 237, 264,
 268, 289, 290, 309, 326,
 355, 380, 381, 382, 384
 Komprador 302
 Komunisme 66, 162, 234, 237, 382
 Komunitas adat 53, 276, 338
 Komunitas Bambu 21, 174, 376,
 381, 382
Konco wingking 82
 Konflik horizontal 63
 Konghucu 200, 202
 Kongres Pemuda 252
 Konservatisme 83, 149, 281
 Konstituante 17, 129
 Kopenhagen 163
 Korea Selatan 93, 94, 95
 Kosmopolitan 52, 72, 86, 172, 201,
 213, 286
 Kosmos 152, 153
 Kostrad 63
 Koteka 227
 KPG 242, 373, 382, 383
 Kreatif 94, 95, 114, 115, 242, 246,
 268, 286, 349
 Kriminologi 26, 27
 Krisis linguistik 146
 Kristen 42, 57, 146, 169, 170, 202
 Kritik 2, 6, 38, 46, 73, 82, 110,
 153, 193, 220, 253, 260,
 271, 309
 KSBH 285
 Kucumbu Tubuh Indahku 94, 95
 Kudeta merangkak xxiii, 63
 Kudus 118
 Kuntowijoyo 149
 Kupang 34, 35, 331
 Kurawa 162, 163
 Kurnia Effendi 242, 313
 Kyai Nogo Siluman 241
 Kyoto University 314
 La Barka 213
 La Galigo 157
 Laku-topo 291
 Lampung 268, 269, 383
Land reform 125
 Larung 67
 Lasem 200
 LBH 16, 32, 52, 53, 264, 371
 LBH-APIK 32
 Lebak 80, 81
 Lech Walensa 182
 Lee Kuan Yew 293
 Legacy 194, 345
 Leiden 175, 177, 255, 314, 323,
 335, 336, 337, 339, 378
 Leiden University 175
 Leknas xix, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 20, 200,
 223, 230, 231, 343, 419
 Leknas LIPI 419
 Leluhur bangsa xx
 Lemah-Putih 296
 Lembaga Demografi UI 46, 49
 Lembaga Ekonomi dan Kema-
 syarakatan Nasional 194,
 200, 419
 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indone-
 sia xiii, xix, 419
 Lembaga Ketahanan Nasional 292

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) 342
 Lembaga Riset Kebudayaan Nasional (LRKN) 3, 200
 lembaga swadaya masyarakat xx, 142
 Lembah Baliem 138, 174
 Lemhanas 292
 Lenger 96
 Leonard Blusse 177
 Leon Maria Guererro 156
 Letters of Javanese Princes 158
Libretto 114
 Liek Wilarjo 43
 Liem Bian Khoen (Sofyan Wanandi) 302
 Lie Tek Tjeng 3, 200
 Liga Pemulihan Demokrasi 182
 Ligitan 23
 LIPI iv
 LIPI Press 369, 420
 Lisbon 240
 Lise Lavelle 298
Live music 94
 Loekman Soetrisno xxi, xxii, 90
 Lokon 24
 Lombok Barat 21
 London 151, 240
Love affair 77
 LP3ES 76, 264
 LSM 32, 34, 35, 57, 111, 142, 149, 226, 264, 276, 280, 285
 ludruk 98
 Luhulima 3
 lurah 46, 344

 MacArthur 312
 Madrid 240
 Mahabarata 162
 Mahameru 137
 Mahasiswa Indonesia 218, 343
 Majalah sastra Horizon 42
 Majalah Tempo 98, 110, 180, 260, 264, 280
 Majalah Zaman 280
 Majapahit 206, 207, 208, 209
 Majelis Rakyat 322
 Majelis Rakyat (MARA) 322
 Makassar 111
 Makekal Hulu 226, 227
 Makkah 106, 107
 Malang xx, 76, 91, 167, 234, 302, 333, 341
 Malari 2, 3, 6, 55, 110, 180, 219, 220, 259, 315
 Malaria 174
 Malaysia 23, 32, 34, 138
 Maluku 20, 176, 230, 372
 Mangestuti 28
 Manifes Kebudayaan 42
 Manikebu 42
 Manila 213
 Manokwari 314
 Manubilis 277
 Manuel ix, 165, 166, 167, 168, 365
 Manuel Kaisiepo ix, 165, 166, 167, 168, 365
 Mapala UI 136, 207
 Marapu 331
 Marco Polo 23
 Maria Hartiningsih xvii, 355
 Maria Katarina Sumarsih 290
 Marianne Katoppo ix, 169, 170, 358, 366
 Maria Ulfah Santoso 254
 Mari'e Muhamad 302
 Markisa 138
 Martin Luther King 348

Buku ini tidak diperjualbelikan.

- Martin Van Bruinnissen 96, 149
 Marxisme 98, 99, 149, 162, 163,
 237, 252, 304
 Marzuki Darusman 58
 Mas Marco 213, 252, 314
 Max Havelaar 81
 Max Lane ix, 189, 190, 191, 192,
 236, 309, 366, 371
 Mayling Oey ix, 193, 194, 195,
 196, 358, 366
 Mayoritas 99, 120, 148, 150, 170,
 186, 220, 309, 360
 M. Dawam Rahardjo 10
 Medan 246, 326
 Medan Priyayi 326
 Medayu Agung 235, 236
 Media Aesculapius 26
 Meksiko 186
 Melawan Melalui Lelucon 98
 Melayu 157, 314, 326
 Melayu Pasar 326
 Melbourne 43, 181, 246
 Melly G. Tan ix, 2, 199, 200, 201,
 202, 366
 Mencari Indonesia iv, xv, xvi, xxiii,
 xxiv, 348, 350, 382, 420
 Mendut Magelang 146
 Mesir 138, 208
 Migrant Care 31, 34, 375
 Migrasi 33, 35, 46, 47, 144, 187,
 268, 269
 Mijak 226, 227, 228
 Mike Keraf 331
 Militer-teknokrat 86, 223
 Minahasa xxii, 20, 21, 22, 24, 136,
 170
 Minke 26, 192
 Minoritas 53, 148, 150, 162, 170,
 326
 Mochtar Buchori 4, 21, 22
 Mochtar Lubis 5, 16, 42, 91, 323,
 327
 Mochtar Pabottingi 7, 290
Modernization without development
 271
 Moertiningsih 23
 Moeslim Abdurachman 96
 Mohamad Hatta 126
 Mohamad Sadli 124, 194, 343, 345
 Mohamad Sobary xvii, 104, 347
 Mojosongo 296
 Moment of truth 163
 Monas 2, 275, 276
 Monash University 181, 353, 380
 Monique 213
Moral courage 53
 Muara Jambi 209
 Mugabe 152
 Muhadjir Darwin 187
 Muhamad Hisyam 141
 Muhamad Isnur 16
 Muhammadiyah 252, 308
 Multatuli 80, 88
 Multikulturalisme 143
 Multi National Corporation 124
 Mulyana W. Kusumah 17
 Munir 16, 53, 58, 290
 Munthahari 148
 Muridan Satrio Widjojo 173
 Museum Sejarah Jakarta xxii
 Musiana Adenan 230
 Musso 255
Myrmidon xxiii
 Nabel Award 62
 Nadiem Makarim xxiv, xxv
 Nagasaki 312

- Nashar 136, 322
 Nasionalisme 156, 158, 195, 196,
 241, 338, 359
 Nasionalisme Indonesia 76, 370
 Nasution vii, 15, 17, 219, 255, 285,
 363, 378
 Nathanael Iskandar 46
 Nathan Keyfits 342
 Natsir 223, 323
 Nazi Jerman 132
 Negara maritim 20, 21, 230
 Neo-kolonialisme 125
 New Zealand 120
 Nh. Dini ix, 211, 212, 213, 214,
 215, 366
 NIAS 28, 420
 Nico Kana 90
 Nigeria 186
 Ni Made Purnamasari 333
 Ninok Leksono 73
 Nirmala Bonat 34
 Nirwana 296
 Nobel 28, 234, 248
 Noli Me Tângere 156, 379
 Normalisasi Kebijakan Kampus 3
 Norman Edwin 207
 Novel 67, 68, 80, 88, 91, 114, 156,
 170, 212, 213, 214, 234,
 240, 242, 243, 254, 313,
 351, 352, 353, 383
 NTT 34, 35, 330, 331
 Nugroho Notosusanto 6
 Nurcholis Madjid 38, 222, 223,
 308, 366, 382
 Nurhayati Srihardini Siti Nukatin
 211
 Nursyahbani Katjasungkana 16
 Nuruddin ar-Raniry 157
 Nusakambangan 234
 Nusantara 16, 17, 21, 143, 146,
 148, 150, 175, 231, 239,
 241, 249, 309, 338, 369, 380
 Nusantara School of Difference
 (NSD) 148
 Nusa Tenggara Timur 330
 Oey Hiem Hwie 234
 Omah Tani 43
 Ong Hok Ham 304
 Orang Aceh 77, 336
 Orang Jawa 2, 91, 105, 206, 214,
 235, 241, 296, 298, 318, 359
 Orang Karo 185
 Orang Kubu 227
 Orang Osing 106, 107
 Orang Papua 77, 167, 168, 227,
 228
 Orang Rimba xiii, 226, 227, 228
 Orde Baru xxiv, 2, 6, 16, 43, 46, 47,
 48, 55, 56, 57, 58, 62, 63,
 86, 110, 114, 124, 125, 149,
 190, 191, 192, 218, 219,
 220, 223, 234, 237, 270,
 307, 308, 315, 326, 338,
 348, 349, 360
 Orientalis 336
 Ortodoksi 149, 281
 Osaka 23
 Oscar 93, 94, 95, 96
 Osman Effendi 136
 Otoritarianisme 302
 Otti 206, 207, 208, 209
Overly bureaucratic 20
 Oxford xvii, xxiii, xxvi, 106, 133,
 420
 Oxford University xvii, 133, 420

- Paberiwai 330
 Palu 111
Panacea 292
 Pancasila 10, 11, 12, 54, 196, 293,
 376, 378
 Pandawa 162
 Pandemi xvi, xxiii, 248, 292, 420
 Pangeran dari Timur 242, 243, 313,
 351, 371
 Pangeran Diponegoro xvii, xxii, 373
 Pangeran Nuku 176
Pangrawit 94
 Panjebar Semangat 72
 Panti Wredha 213, 215
 Pantura 200
 Panyebar Semangat 72
 Papua 20, 23, 58, 77, 111, 120,
 138, 144, 145, 167, 168,
 174, 175, 176, 177, 227,
 228, 265, 269, 276, 313,
 314, 372, 373, 374, 380
 Papua Road Map 176
 Paramita Abdurachman ix, 229,
 230, 231, 366
 Para priyayi 91, 251
 Parasite 93
 Paris 240
 Parsudi Suparlan xxi, 90
 Partai Amanat Nasional (PAN) 322
 Partai Nasional Indonesia (PNI) 342
 Partai Republik Indonesia Raya
 (PARINDRA) 342
 Partai Sosialis Indonesia (PSI) 179,
 218, 342
 Partindo 252
 Pasar Senen 2, 98, 180
 Pascakolonial 268, 315
 Pasundan 80, 337
 Pater Neles Tebay 176
 Pati 118
 Paus Sastra Indonesia 332
 Payakumbuh 313
 PDII 5
 PDII-LIPI 5
Peer review journal 195
 Penanaman Modal Asing (PMA)
 123
 Pencerahan 29, 53, 57, 298
 Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera)
 23
 Pengawal revolusi 99
 Pengendum Tampung ix, 225, 226,
 227, 228, 358, 366, 378
 Pengetahuan diri 357, 358
 Pengetahuan intuitif 356, 357
 Penggalan Kembali 274
 Pengobatan Tradisional Indonesia 28
 Penyair xiv, 107, 114, 153, 166,
 274, 332, 333
 Perang dingin 63, 162
 Perang Jawa xvii, 241
 Perang Pasifik 312
 Perencanaan sosial 269
 Peristiwa Madiun 255
 Peristiwa Malari 1974 2, 6, 110,
 220, 259, 315
 Permesta 62, 136
 Persekusi 53, 57, 62, 64, 150, 167,
 190
 Persia 157
 Pertumbuhan ekonomi 48, 291,
 344, 345, 346
 Perubahan Struktural tanpa Karl
 Marx 98
 Pesantren 98, 104, 106, 222, 279,
 281
 Petani 48, 53, 66, 80, 104, 118,
 119, 125, 126, 265, 270,
 304, 337, 342, 375

- Peter Carey xvii, xix, xxvi, 133
 Peter Drooglover 23
 Peter Gardiner 194, 196
 Petrus 76
 Pipit 77
 PKI 62, 63, 131, 243, 252, 253,
 255, 303, 304, 313, 343
 P.K. Oyong 326
 Plagiarisme 260, 383
 Planet 73, 120, 152, 153, 186
 Plato xxv
 Pluralisme 170
 P.M. Laksono 187
 Pnom Penh 213
 PNS 142, 223
 Polandia 162, 182
 Polemik 145
 Politik xx, xxiv, xxv, 2, 3, 10, 16, 17,
 22, 29, 33, 34, 38, 39, 42,
 46, 47, 53, 54, 56, 57, 58,
 62, 63, 64, 66, 67, 76, 80,
 86, 87, 90, 91, 98, 99, 100,
 101, 111, 114, 115, 124,
 125, 130, 131, 133, 136,
 145, 148, 149, 152, 153,
 156, 158, 162, 166, 167,
 170, 171, 172, 180, 182,
 183, 190, 191, 192, 196,
 200, 202, 208, 218, 219,
 222, 223, 231, 235, 237,
 243, 247, 248, 249, 252,
 253, 254, 255, 259, 264,
 268, 269, 271, 275, 276,
 277, 292, 304, 305, 307,
 309, 312, 313, 315, 319,
 326, 327, 336, 337, 338,
 339, 343, 344, 345, 348,
 349, 351, 361, 371, 376, 378
 Politik identitas 10, 38, 153, 167,
 172, 196, 275, 277, 338,
 339, 361, 376, 378
 Politik kelas 338
 Politik Tai Kucing 136
Polling 144
 Pondok pesantren 222
 Ponorogo 222
 Populi Center 142, 144, 145
 Portugis 22, 23, 132, 230, 231, 336,
 369
 PPKI 11, 255
 Pragmatis 191, 270, 291, 327
 Pragmatisme 39, 344, 345
 Praha 240
 Prancis 144, 145, 240, 247, 336
 Preanger Bode 243
 Preman-preman berjubah 309
 Presiden Jokowi 28, 38, 49, 106,
 119, 121, 174, 228, 247,
 260, 271, 291
 Princen 182
 Priyayi 5, 81, 91, 251, 375
 Progresif revolusioner 351
 PRT 32
 Puan Amal Hayati 280, 281
Public virtue 149
 Puisi v, 94, 95, 114, 153, 379, 380
 Pujo Semedi 187
 Pulau Buru xxi, 62, 171, 190, 234,
 235, 236, 260, 303
 Pusat Data dan Analisa Tempo 98
 Pusat Studi Heritage Nusantara 146

Quasi anthropology 187

 Rahman Tolleng 10, 100, 218

- Raden Ajeng Kartini 156
Raden Saleh iv, ix, xvi, 239, 240,
241, 242, 243, 313, 350,
352, 367, 376
Radikalisme 309, 320
Radio Belanda 155
Raffles 28
Rahayu Supanggah 94
Rakhmani xxiv, 379
Rakyat xix, xxv, 13, 23, 42, 49, 56,
80, 81, 82, 106, 133, 177,
270, 274, 276, 277, 286,
287, 291, 292, 314, 315,
337, 339
Ramon Magsaysay 171
Rand Corporation 343
Ranupani 137
R.A. Rajapermas 80
Rasa xiii, xv, xviii, xxi, 81, 87, 118,
120, 125, 132, 137, 139,
153, 162, 207, 212, 230,
236, 241, 275, 291, 303,
333, 344, 348, 351, 356,
358, 383
Rasjidi 223
Ratna Juwita 243
Ratu Adil 80
Raudlatut Maarut Thalibin 104
Raumanen 169, 375
Rawamangun xvii, 3, 138, 236, 347,
349
Rawasari 162
Real politics 269
Redundancy 332
R.E. Elson 96
Reeve 298, 372
Referendum 133, 175
Referendum 1999 133
Reforma agraria 125, 126, 374
Regina Joice Moningka 138
Rekayasa sosial 47, 343
Rekognisi 167, 338
Religion 106, 150
Rembang 104, 106, 200, 228, 319,
376
Renaissance 322
Rengas Dengklok 255
Represi 3, 46, 53, 62, 64, 67, 80,
101, 132, 150, 167, 172,
188, 190, 264
Repressive developmentalist regime
149, 191, 194
Research culture 246, 247, 248, 249
Research grant 142
Revolusi 63, 192, 240, 271, 327
Revolusi Iran 148
Rice bowl 75
Richard Dawkins 153
Richard Robison 76, 124
Riset sosial 142, 269
Robertus Robet 10
Romo Drijarkara 41
Romo Mangunwijaya 42, 182
Romo Pastur 352
R. Rangga Somanegara 80
Ruang publik 12, 33, 39, 87, 114,
136, 162, 166, 170, 171,
222, 223, 269, 280, 332
Rudy Badil 137
Rumah Kaca 234, 313
Rumphius 28
Ruptures 16
Rusdi Muchtar 3
Rusia xxiii
Russel Delman 299
Ruth Indiah Rahayu xvii, 355, 361
Ruth McVey 17, 66, 229, 230
Ruwat Rawat Borobudur 287

- Saiful Mahdi xx
 Saleh Iskandar Poeradisastra 260
 Salemba 2, 72
 Salman Rusdhie 332, 382
 Saman 65, 66, 67, 68, 382
 Sangita Pancasona 264
 Sam Harris 153
 Samin 235, 313
 Saminisme 313
 Samin Surosentiko 235, 313
 Sampurno 26, 380
 Sam Ratulangi xxv, 22
 Samsiah Ahmad 196
 Samuel Huntington 293
 Sang Demonstran 303
 Sang Imam Mahdi 80
Sangkan paraning dumadi 296
 Sangkot Marzuki ix, 245, 246, 247, 249, 367
 Sang Pemula 235, 326
 Santa Cruz 182
 Saparinah Sadli 196, 202, 323
 Sardono W. Kusumo 264, 274, 322, 367
 Sarekat Dagang Islamiyah 252
 Sarekat Islam 213, 304, 314, 374
 Sartono Kartodirjo 80
 Sastra-politik 349
 Satu Abad Kartini 156
 Saudi Arabia 32
 Sawahlunto 235
 Sayogyo Institute 120
 Sayuti Melik 253, 254, 255
 SBY 10, 11, 290
Science 245, 248, 351, 370, 374
Science, technology, and society (STS) 245
Scientist 209
Scientist par excellence 209
 Sediono Tjondronegoro 268, 269
 Sedulur Sikep 235, 313
 Sekolah Keutamaan Istri 81
 Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) 343
 Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara xvii, 162, 358, 361
 Sekretariat Kerjasama Perlindungan Hutan Indonesia (SKEPHI) 276
 Selo Sumardjan 123, 124
 Semanggi 58, 290
 Semaoen 304
 Semarang xxv, 119, 211, 212, 213, 215, 241, 252, 304, 374
 Semen 104
 Semeru 42, 77, 136, 137, 218, 301
 Semsar Siahaan x, 87, 273, 274, 276, 277, 367, 380
 Seno Gumira Ajidarma 323
 Seno Sastroamidjojo 26
 Seoul 94
 Sepak bola 98
 Setan Jawa 94
 Shinto 312
Short social commentary 98
 Sibolga 86
 Silungkang 243, 313
 Simon and Garfunkel 146
 Simone de Beauvoir 82
 Singapura 46, 158, 247, 293, 369
Sinic culture 293
 Sinta Nuriyah Wahid x, 279, 280, 281, 358, 367
 Sipadan 23
 Siregar xxiv, 2, 180, 219, 379
 Sisyphus 292
 Siti Aisyah We Tenriolle 157
 Sitras Anjilin 296

- Sjahrir 2, 136, 218, 219, 255
 Skandinavia 120
 S.K. Trimurti ix, 251, 252, 253,
 254, 255, 367
 Slamet Sukirnantio 302
 Sleman 213
Smart phone 153
Social engagement 196
Social engineering 47, 343
Social planning 269
 Soebadio Sastrosatomo 179, 218,
 371
 Soedjatmoko 2, 218, 219, 298, 323
 Soegeng Sarjadi 302
 Soeharto xxiii, xxiv, 2, 3, 6, 32, 42,
 43, 47, 48, 56, 63, 66, 76,
 101, 110, 124, 131, 133,
 152, 167, 175, 180, 182,
 188, 190, 192, 194, 200,
 202, 218, 220, 222, 223,
 230, 235, 236, 253, 275,
 284, 290, 307, 308, 322,
 343, 348, 420
 Soehartono 23
 Soe Hok Gie 3, 42, 77, 100, 135,
 136, 137, 138, 218, 302,
 303, 304, 305, 367, 370,
 371, 378
 Soekarno 42, 76, 87, 110, 114, 124,
 125, 133, 218, 235, 255,
 268, 275, 303, 305, 344
 Soemitro 56, 218, 342, 343
 Soemitro Djojohadikusumo 218,
 342, 343
 Sofian Effendi 22
 Sokola 226, 228
 Sokola Rimba 228
 Solidaritas Perempuan 32
 Solo 94, 206, 252, 264, 265, 296,
 297, 298, 314
 Sosialisme 42, 268
 Spanyol 156, 157, 230, 336
Sparing partner 145
Speak truth to power 302
 Srihadi Soedarsono 322
 Sri Mulyani 48, 49
 Sriwijaya 208, 209
 S. Sudjojono xxi
 STA 68
Stadtbuis (Balai Kota) xxii
 Stanley 43
 Stephen Hawking 72, 153
 STFD xvii
 STOVIA 26, 28
 St. Petersburg 240
 Studio Mendut 286, 296
Studium generale 259
 Suara Ibu Peduli (SIP) 152
 Subroto 194, 202, 343
 Suciwati 290
 Sudarno Ong 297
 Sudomo 32
 Sugeng Sarjadi 218
 Suharso 230
 Sukamdi 187
 Sukardi Rinakit 96
 Sukarno 234
 Suku Anak Dalam (SAD) 227
 Suku Dani 138
 Sularto 22
 Sulastin Sutrisno 156, 158
 Sulawesi xxii, 20, 22, 52, 111, 143,
 157, 170, 339, 376
 Sulawesi Selatan 157
 Sulawesi Utara xxii, 20, 22, 170
 Sultanah Safiatuddin 157
 Sultan Hamengkubuwono X 6
 Sultan Iskandar Muda 157
 Sultan Yogyakarta 96

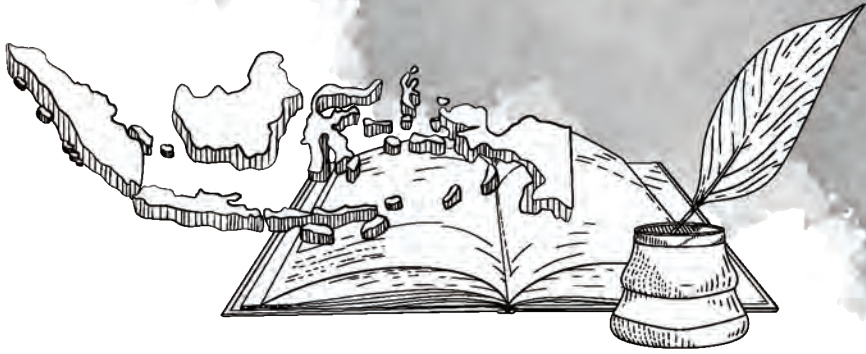
- Suluh Indonesia Muda 252
 Sumantri Brojonegoro 259
 Sumarah 297
 Sumatra 61, 62, 68, 86, 120, 143,
 235, 252, 308, 313
 Sumatra Barat 61, 62, 235, 252,
 308, 313
 Sumatra Utara 86
 Sumba Barat 331
 Sumba Tengah 330, 331
 Sumba Timur 330, 331
Summer school 148
 Sumpah Pemuda 252, 341
 Sumur 69, 208
 Sumur Jalatunda 76
 Sunda 80, 246
 Sunni 148
 Supomo 12, 181, 337
 Suprpto Suryodarmo x, 295, 296,
 297, 298, 299, 367, 369,
 372, 382
 Surabaya 77, 107, 167, 174, 235,
 236, 342
 Surat Keprihatinan 1, 2
 Survei Agro Ekonomi (SAE) 269
Surveillance 313
 Surya Saluang 125
 Susan Blackburn 253
 Sutanto 146, 265, 286
 Sutanto Mendut 265
 Sutomo 252
Suwargo 296
 Suwarsono 314
 Suwanto 343
 Swantoro 268
 Syafei 243, 313
 Syafii Maarif x, 223, 307, 308, 309,
 310, 368, 381
 Syarif Thajeb 259
 Syiah 148, 149
 Syubah Asa 98
 Syumanjaya 322
 Tabu 13, 29, 53, 63, 95
 Tajuddin Noer Effendy 187
 Takashi Shiraishi x, 311, 312, 313,
 314, 315, 358, 368, 379
Talk show 9, 13, 149
 Taman Ismail Marzuki 91, 115,
 219, 222, 264, 273
 Taman Mini Indonesia Indah 56
 Taman Nasional Bukit Dua Belas
 226
 Taman Sastra 349
 Taman Siswa 6, 7, 342
 tanam paksa 80, 81, 240, 241, 304
 Tanette 157
 Tania Li 339
 Tanjung Priok 58
Tan keno kinoyo ngopo 235
 Tan Malaka 231, 255, 369
 Tanto Mendut 146, 274, 286
 TAP MPRS Nomor XXV/1966 237
 Tapol xxi, 260
 Tatik Krisnawaty 32
 Taufik Abdullah 2, 4, 6
 Taufik Ismail 332
 Tawangmangu 28
 Tedjabayu Sudjojono xxi
 Tegal 4, 5, 21, 24, 419
 Teguh Karya 322
 Teknokrasi 47, 48, 49, 222
 Tembok Berlin 47, 182
 Tempo 42, 76, 98, 110, 135, 180,
 181, 188, 234, 260, 264,
 274, 280, 325, 326, 327,
 328, 359, 370, 371, 373,

- 374, 375, 377, 379, 380,
381, 382, 383, 384
- Teng Hsiao Ping 345
- Tentara 48, 342
- Tentara Republik Indonesia Pelajar
(TRIP) 342
- Teori Big Bang 72
- Teroris 58
- Teten Masduki 16
- Thadeus van Geelman 243
- Thaha Muhammad Alhamid 175
- The culture of mediocrity* 195
- The Economist 180
- Thee Kian Wie 2, 4, 5, 201, 345
- The Imagined Communities 77
- The new normal* 101
- The New York Times 96
- The people* 277
- The Population Council 186
- The Red Java* 77
- The Second Sex 82
- The Sound of Silence 146
- Theys Hiyo Eluay* 167, 175
- Think tank* 76, 132, 133
- Think the unthinkable* 100
- Th. Sumartana x, 56, 57, 317, 318,
319, 320, 368
- Thung Ju Lan 143, 230
- Tidore 176
- Timor Leste 58, 175, 182, 192
- Timor Portugis 132
- Timor Timur 22, 23, 58, 111, 132,
133, 175
- Timur Tengah 138, 195
- Tionghoa 195, 200, 201, 202, 326
- Tip of the iceberg* 142
- Tirakat 291
- Tirani mayoritas 170
- Tirto Adhi Soerjo 235
- Tjut Nya Dien 156
- TMII 56
- Todung Mulya Lubis 10, 16, 17,
166
- Toeti Herati Noerhadi x, 91, 321,
358, 368
- Toeti Soewarti Kakiailatu 326, 368
- Tokoh publik xiv, xv, 43, 355, 356,
358, 359, 360, 361
- Tolak Pabrik Semen 119
- Tom Friedman 96
- Tomohon 24
- To the point* 201
- Tracee Baru 16, 343
- Tragedi 1965 132
- Tragedi Semanggi 290
- Transformasi 98, 99, 124, 303
- Transgender 96
- Transparency* 246
- Trauma xxiii, xxiv, 264
- Trinity College xxvi
- Trisakti 290
- Trisno Sumardjo 136
- Trompet Masyarakat 234
- Trowulan 206, 207, 208, 381
- Trust* 246
- Tuhan 99, 100, 106, 107, 115, 233,
234, 235, 357, 377, 383
- Tuhan Tidak Perlu Dibela 99
- Ubud 299
- UGM xxi, xxii, 22, 90, 144, 187,
188, 208, 264, 277, 328,
375, 420
- UKSW 42, 43, 110, 146, 200
- Ulil Abshar Abdalla 5
- Umar Kayam 91, 92, 323
- Umberto Eco 68

- Umbu Landu Paranggi x, 329, 330, 331, 332, 368, 380
 Umbu Wulang Tanaamahu 330, 331
 Umi Sardjono 253
 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 126
Underdevelopment 271
Undiscribable 235
 UNESCO 23, 285
 UNFPA 186
 Uni-Soviet 63, 166, 167, 182
 Universitas Airlangga 28
 Universitas Amsterdam 26, 80, 159
 Universitas Berkeley 46, 342
 Universitas Chicago 223, 308
 Universitas Indonesia xxvi, 16, 91, 193, 217, 258, 281, 323, 370, 374, 419
 Universitas Kristen Satya Wacana 42
 Universitas Kumamoto 314
 Universitas Michigan 28
 Universitas Padjadjaran 148
 Universitas Princeton 42
 Universitas Syah Kuala Banda Aceh xx
 Universitas Utrecht Belanda 17
 University College London 151
 Urdu 157
 USA 419
 Utan Kayu 236
 UU Cipta Lapangan Kerja 254
 UU PMA 124, 344
- Vaclav Havel 96, 166, 167, 182
 Van Peurson 323
 Vedi Hadiz 76, 277, 375
 Venesia 23
 Vidya Mandiri 382
- Vienna 132, 240, 379
 Vietnam 62
 VOC 241
Vocabulary 297
- Wahidin Sudirohusodo 251
 Wahyu Susilo 33, 34, 35
 Waikabubak 331
 Waingapu 331, 332
 Wali xxv
 Warganegara 46
 Wargono 118
 WARSII 226
 Wartawan xvii, 5, 22, 42, 66, 73, 114, 155, 207, 208, 234, 243, 252, 254, 314, 325, 326, 328, 344, 355
 Werner Krauss 242
 Widjojo Nitisastro x, 16, 46, 48, 100, 110, 188, 194, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 368, 384
 Wikipedia 213, 290, 370
 Wiladi Budiharga 166
 Wilopo 342
 Wim Wertheim 268
Windfall benefit 48
 World Heritage 285
 Woworuntu 22, 24
 W.S. Rendra 1, 101, 264, 274
 WTC New York 58
- Yahudi 130, 132, 148
 Yahudi Abangan 130
 Yale University 130
 Yamin 12
 Yasmin Sungkar 230

Yasukuni 312, 314, 315
 Yayasan Donders 331
 Yayasan Interseksi 143
 Yayasan Lembaga Bantuan Hukum
 Indonesia 16, 370
 Yayasan Paramadina 223
 Yayasan SPES 76
 Yayasan Tanah Merdeka 111
 YLBHI 16, 53, 370
 Yogyakarta xxi, xxii, 6, 21, 96, 132,
 185, 192, 202, 206, 213,
 215, 219, 252, 254, 308,
 332, 359, 379, 381
 Yopi Lasut 42
 Yos Suprpto 233, 237
 Yudi Latief 11
 Yunani 206, 292
 Yuval Noah Harari 153
 Yves Coffin 213
 Zaini 136
 Zaman bergerak 243
 Zen Budhism 299
Zero sum game 145
 Zoelverdi 109, 384
 Zoetmulder 162
 Zulkarnain 113, 384

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Biodata Penulis



Riwanto Tirtosudarmo memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Jakarta, pada tahun 1979, dan gelar doktor dalam bidang demografi-sosial dari *Research School of Social Sciences*, Australian National University, Canberra, Australia, pada tahun 1990. Dilahirkan di Tegal, Jawa Tengah, pada tahun 1952, dan mulai bekerja di Lembaga Ilmu Pengeta-

huan Indonesia (LIPI) sejak tahun 1980. Tahun 1980–1986 sebagai peneliti di Pusat Penelitian Penduduk, Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional (Leknas LIPI); tahun 1986–1998 di Pusat Penelitian Kependudukan dan Ketenagakerjaan (PPT LIPI), tahun 1998 hingga pensiun tahun 2017 di Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB LIPI). Semenjak pensiun mendedikasikan diri sebagai peneliti sosial independen.

Sepanjang kariernya sebagai peneliti LIPI pernah menjadi *Senior Visiting Researcher Fulbright* di Brown University, USA (1996–1997), *Fellow-in-Residence* Netherlands Institute for Advanced Studies (NIAS),

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Belanda (2000–2001); *Visiting Professor* Institute for Language and Culture of Asia and Africa (ILCAA), Tokyo University for Foreign Studies (TUFS), Jepang (2003–2004); *Visiting Fellow* Refugee Studies Center (RSC), Oxford University, Inggris, 2005; *Visiting Fellow* Indonesia Project Australian National University (ANU), Canberra, Australia, 2006; *Visiting Fellow*, KITLV, Belanda, 2007; *Senior Visiting Researcher* Asia Research Institute (ARI), National University of Singapore (NUS), 2008. Pada tahun 2012–2013 menjadi dosen tamu untuk mata kuliah Etnisitas, Migrasi dan Politik di Program Pascasarjana Antropologi, FIB, UGM.

Beberapa di antara buku yang ditulisnya: *Dari Riau sampai Timor-Timur: Demografi-Politik Pembangunan di Indonesia* (Sinar Harapan: 1996), *Mencari Indonesia 1: Demografi-Politik Pasca-Soeharto* (LIPI Press; Penerbit BRIN, 2021), *Mencari Indonesia 2: Batas-Batas Rekayasa Sosial* (LIPI Press; Penerbit BRIN, 2021), *From Colonization to Nation-State: The Political Demography of Indonesia* (LIPI Press, 2013), *On the politics of migration: Indonesia and Beyond* (LIPI Press, 2015), *The Politics of Migration: Indonesia and Beyond* (Springer, 2018), *From Colonization to Nation-State: The Political Demography of Indonesia* (Revised edition, Springer, 2022), *Mencari Indonesia 3: Esai-Esai Masa Pandemi* (Vidya Mandiri & Kampung Limasan Tonjong; Penerbit BRIN, 2022).

Buku ini merupakan seri keempat dari Mencari Indonesia yang merupakan kumpulan tulisan tentang berbagai isu demografi politik di Indonesia. Sedikit berbeda dari buku-buku sebelumnya, *Mencari Indonesia 4* merupakan kumpulan sketsa-sketsa biografis dari sosok-sosok intelektual, akademisi, tokoh sejarah dan para penggerak perubahan sosial dan politik di Indonesia sejak zaman kolonial hingga sekarang.

Seri keempat ini menyoroti secara singkat profil para tokoh intelektual tersebut dan peran mereka dalam dinamika sosial politik di Indonesia. Pemilihan sosok-sosok dalam buku ini didasarkan terutama oleh pentingnya sosok-sosok tersebut dalam bidangnya yang menjadi tempat mereka berkiprah dalam masyarakat. Buku ini berusaha mendudukan sosok laki-laki dan perempuan secara setara dan menempatkan mereka sebagai bagian penting dalam berbagai konteks kesejarahan semasa mereka hidup.

Buku ini diharapkan dapat menjadi bacaan populer bagi pembaca yang berasal dari berbagai kalangan, baik kalangan yang bersifat akademis maupun non-akademis.

MENCARI INDONESIA 4

Dari Raden Saleh Sampai Ayu Utami



Diterbitkan oleh:
Penerbit BRIN
Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah
Gedung B. J. Habibie, Jln. M. H. Thamrin No. 8,
Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340
Whatsapp: 0811-8612-369
E-mail: penerbit@brin.go.id
Website: penerbit.brin.go.id

DOI: 10.55981/brin.436



ISBN 978-623-7425-64-9



9 786237 425649

Buku ini tidak diperjualbelikan.